



“Obrolan Nusantara : Menyambut Indonesia Baru”

Sudarsono Soedomo

“Obrolan Nusantara: Menyambut Indonesia Baru”

Sudarsono Soedomo

**“OBROLAN
NUSANTARA :
MENYAMBUT
INDONESIA BARU”**

SUDARSONO SOEDOMO

“OBROLAN
NUSANTARA :
MENYAMBUT INDONESIA BARU”



PENERBIT FIRDAUS

Pemandu Ilmu dan Hikmah



Judul : Obrolan Nusantara : Menyambut Indonesia Baru
Penulis : Sudarsono Soedomo
Design Cover : Ari
Tata letak : SS
Cetak Pertama : November, 2012

Penerbit Firdaus, Jakarta
Jl. Kramat sentiong masjid No. E450, Jakarta Pusat
Tlp/fax : +6221-3144738
e-mail : penerbitfirdaus@gmail.com

Forci – Dev.
Gedung Dept. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB,
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680
Tlp : +6251-8421355
Email : info@forcidev.com
Web : www.Forcidev.org

ISBN : 978-602-9252-21-7

@ Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang

Prakata

Udara politik di Indonesia semakin pengab dari waktu ke waktu. Rakyat menjadi kehilangan harapan untuk dapat menggapai hidup yang lebih sejahtera. Hampir semua lembaga publik sudah tidak dapat dipercaya. Rakyat sebagai pemilik syah dari negara bebas bersuara tetapi tanpa daya. Wakil rakyat tak acuh terhadap rakyat yang memberinya mandat. Situasi ini secara ringkas dapat dikatakan sebagai jaman “kafilah menggonggong, anjing berlalu.”

Meskipun saya selalu dinasehati oleh kakak yang juga teman diskusi, Bondan Gunawan, bahwa seperti apapun keadaannya, rakyat tidak salah dan tidak boleh dipersalahkan, tetapi menurut saya andil rakyat terhadap terbentuknya kondisi saat ini juga besar. Lamanya situasi seperti ini berlangsung juga tidak terlepas dari sikap mental masyarakat. Selalu merasa diri tidak berdaya dan bersikap menunggu datangnya hari baik, pemimpin yang jujur, tegas, tetapi adil, jaman keemasan atau situasi menyenangkan lainnya. Selama perjalanan saya ke berbagai penjuru negeri ini, saya jelas mendengar jeritan rakyat yang tak pernah terdengar. Menjeritlah dengan daya sehingga ada yang mendengar!

Perubahan harus dimulai dari cara kita memandang persoalan dan lingkungan di sekitar kita. Hari baik tidak akan pernah datang bila kita sendiri tidak menjemputnya. Pemimpin yang jujur, tegas, tetapi adil itu tidak akan pernah datang kecuali kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu. Jangan berharap jaman keemasan akan datang jika kita hanya menunggu. Kitalah yang membuat semua itu mungkin terjadi. Berhentilah menunggu. Mulailah mengerjakan sesuatu yang diyakini dapat membantu mempercepat datangnya hari baru yang lebih bermutu. Jaman keemasan akan datang bila cara kita berpikir dan bertindak adalah berkualitas emas.

Kerisauan yang sama juga dirasakan oleh para mahasiswa. Mereka hendak berbicara, mungkin dengan sedikit teriak, tetapi tidak ada pihak yang mau mendengar, baik secara sukarela maupun terpaksa. Saya mencoba menyediakan diri untuk menjadi teman diskusi mereka dalam mem-

bicarakan banyak hal. Kadang serius, tetapi tidak jarang penuh canda. Dari merekalah saya tahu betapa mereka haus. Mereka menginginkan interaksi dengan para dosen secara lebih bermakna, bukan hanya terbatas dalam ruang kuliah. Mereka ingin memahami realita secara lebih utuh. Realita yang tidak dikungkung oleh bidang studi sedang mereka geluti. Mereka memiliki banyak energi yang belum tergali bagi kejayaan ibu pertiwi. Sudah banyak sejarah perubahan ditorehkan oleh mahasiswa, tetapi umumnya baru menurunkan presiden atau pemerintah. Sekarang saatnya mahasiswa Indonesia yang “melahirkan” presiden atau pemerintah. Peran mahasiswa seperti inilah yang sebenarnya sedang ditunggu oleh bangsa Indonesia sekarang ini.

Semakin bertambahnya hari, mengapa anak negeri ini semakin diliputi oleh rasa iri dengki? Mengapa semakin mudah melontarkan sumpah serapah? Apakah karena melihat sangat banyaknya penyelenggara negara yang serakah? Mengapa meningkatnya kehidupan religius diiringi dengan hadirnya lebih banyak tikus. Indonesia memang sedang dikuasai oleh banyak tikus yang sebutan kerennya adalah politikus.

Terhadap kondisi seperti itu ada rasa marah dalam diri ini dan kemarahan itu tidak jarang dialamatkan kepada Tuhan juga. Sekali waktu ada seseorang yang menyatakan begini “wahai Tuhan, memangnya apa sih yang Tuhan kerjakan? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan keadaan yang menyesakkan seperti sekarang ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang serba gelap ini dengan keadaan yang lebih memberi harapan? Kemudian terdengar dalam hati yang paling dalam jawaban sebagai berikut ... Aku telah melakukannya menciptakanmu!

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman dan para mahasiswa yang telah membantu terbitnya buku ini. Kritik dan saran dari anda semua sangat berguna dan membantu terutama ketika penulis telah terlanda oleh rasa kejenuhan. Bila masih juga ada kesalahan, maka tidak ada pihak lain yang pantas diminta pertanggung jawabannya kecuali penulis sendiri.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Perkenalan	2
1.2	Syarat Harus dan Syarat Cukup	8
1.3	Logika Konyol Sang Profesor 1	12
1.4	Logika Konyol Sang Profesor 2	15
1.5	Mengeluh Ketika Seharusnya Bersyukur	18
1.6	Latihan Berpikir	21
1.7	Kemacetan Jakarta	27
2	Tentang Berbagai Paham	35
2.1	Liberalisme	36
2.2	Individualisme	41
2.3	Kapitalisme	42
2.4	Pasar Bebas	47
2.5	Sosialisme	55
2.6	Neoliberalisme	58
2.7	Sosialisme Pasar	61
2.8	Negara Kesejahteraan	66
3	Landasan Politik Ekonomi	71
3.1	Ekonomi Konstitusi	72
3.2	Asas Kekeluargaan	76
3.2.1	Membangun <i>Trust</i>	78
3.2.2	Membangun Cinta	86
3.3	Penting Bagi Negara dan Mengusai Hajat Hidup Orang Banyak	88
3.4	Dikuasai Oleh Negara	90
3.4.1	Cabang Produksi	90
3.4.2	Kekayaan Alam	92
3.5	Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat	94

3.6	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	95
3.6.1	Pengertian BUMN	98
3.6.2	Peran BUMN	101
3.7	Privatisasi Merugikan Rakyat?	103
4	Koperasi	109
4.1	Umum	110
4.2	Retorika atau Realita	112
4.3	Organisasi, Firma, dan Koperasi	117
4.4	Koperasi: Gerakan Melawan Firma Kapitalis	124
4.4.1	Firma Kapitalis	125
4.4.2	Koperasi dan Residual Claimant	127
4.5	Model Ekonomi Perilaku Koperasi	129
4.5.1	Koperasi Kapitalis	132
4.5.2	Koperasi Sosialis	133
4.6	Koperasi Sosialis dan Teknologi Produksi	137
5	Kebijakan Publik	141
5.1	Subsidi Bahan Bakar Minyak	142
5.2	Subsidi di Sektor Pertanian	149
5.3	Penurunan Harga	153
5.4	Upah Minimum	157
5.5	Pembatasan Harga Maksimum	163
5.6	Pasar Modern vs Pasar Tradisionil	166
5.7	Perang Harga	167
5.8	Surat Utang	170
5.9	Perdagangan Rotan: Kebijakan Ayunan Anak Kecil	174
6	Sumberdaya Alam	177
6.1	Suksesi Bentang Alam	178
6.2	Tata Ruang	184
6.3	Kutukan Sumberdaya Alam	191
6.4	Hutan dan Lahan	202
6.5	Pertambangan	207
6.5.1	Model Dasar	216
6.5.2	Model Lanjutan	224
6.5.3	Penerimaan Negara	227

7 Menatap ke Depan	231
7.1 Jejak Kita	232
7.1.1 Penduduk	233
7.1.2 Ekonomi	238
7.2 Beberapa Isu Penting	240
7.2.1 Mewujudkan Negeri Maritim	240
7.2.2 Mengefisienkan Kebijakan Fiskal	243
7.2.3 Membangun Kekuatan Maritim	247
7.2.4 Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	250
7.2.5 Mengamankan Lahan Pangan Kita	252
7.2.6 Memanfaatkan Kekayaan Budaya	255
8 Spiritual	261
9 Penutup	279

Daftar Gambar

1.1	Informasi Terakhir Tidak Kompatibel dengan Pola yang Sudah Terbentuk (de Bono, 2009)	23
1.2	Hasil Penyusunan Ulang Informasi yang Ada untuk Memperoleh Pola Baru (de Bono, 2009)	23
1.3	Perubahan Landuse di Sekitar Jalan Tol Cipularang	33
2.1	Ekonomi Swasembada versus Ekonomi dengan Perdagangan	50
2.2	Persentase Luas Kebun Milik Rakyat	54
2.3	Perbandingan Sosialisme dan Kapitalisme dalam Memberikan Kesejahteraan Sosial	64
3.1	Produksi oleh BUMN vs BUMS Industri Monopoli	106
3.2	Produksi oleh BUMN vs BUMS Industri Kompetitif	108
4.1	Penentuan Keanggotaan Optimal	134
5.1	Efek Fluktuasi Harga pada Surplus Konsumen	148
5.2	Pasar Pupuk	151
5.3	Pasar Gabah	152
5.4	Efek Regulasi Harga Melalui Kekuasaan Politik	156
5.5	Efek Regulasi Upah Minimum	159
6.1	Perkembangan Keanekaragaman Jenis dan Umur Bentang Alam	183
6.2	Perluasan Perhitungan Ekonomi Keluar Batas Siklus Ekonomi Konvensional (Cato (2009) yang mengutip dari F. Hutchinson, M. Mellor dan W. Olsen)	195
6.3	Teori Rente Ricardo	197
6.4	Ekstraksi Sumberdaya Alam takterbarukan dengan <i>Teknologi Constant Return to Scale</i>	210

6.5 Ekstraksi Sumberdaya Alam takterbarukan dengan Teknologi <i>Decreasing Return to Scale</i>	211
6.6 Perkembangan Rent Menurut Waktu	220
6.7 Perkembangan Output Menurut Waktu	221
6.8 Perkembangan Rent yang Menyimpang dari Kaidah Hotelling	224
6.9 Perkembangan Output Menurut Waktu	225
7.1 Perkembangan Populasi Wilayah Cina, India, dan Gabungan Beberapa Wilayah ($\times 100.000.000$)	234
7.2 Perkembangan Populasi Wilayah Papan Tengah ($\times 10.000.000$)	235
7.3 Perkembangan Populasi Wilayah Papan Bawah ($\times 10.000.000$)	236
7.4 Perkembangan Populasi Wilayah Setelah Standardisasi	237
7.5 Perbandingan Produktivitas antar Wilayah per Dollar per Kapita	240
7.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia	251

Daftar Tabel

2.1 Perbandingan Liberalisme Klasik dan Liberalisme Modern (Clark, 1998)	40
2.2 Bentuk Kelembagaan Kapitalisme (Screpanti, 1999)	45
4.1 Ringkasan dari Sejarah Teori Organisasi	121
6.1 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan Lapangan	188
6.2 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah Menurut Kepekaannya terhadap Erosi	189
6.3 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian Rata-Rata	189
6.4 Kekayaan Per Kapita Beberapa Negara Tahun 2005	208
6.5 Rencana Optimal Ekstraksi Sumberdaya Tambang Pada Tingkat Diskon 5%	225
6.6 Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty untuk Usaha Tambang	228
6.7 Landrent: (1) Kuasa Pertambangan (Usaha A) dan (2) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Usaha B)	229
7.1 Konsumsi Ikan+Seafood Tahun 2009 dan Protein Tahun 2005-2007	242
7.2 Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto Beberapa Negara Tahun 2009	244
7.3 Perkembangan Subsidi Bahan Bakar Minyak	245
7.4 Perbandingan Harga Minyak Diesel di Beberapa Negara	246
7.5 Penetapan LPPB, CLPPB, dan KPPB	254

"I'd rather be a failure at something I enjoy than a success at something I hate"

George Burns

"God often visits us, but most of the time we are not at home"

Joseph Roux

"Do not take life too seriously, you will never get out of it alive"

Elbert Hubbard

1

Pendahuluan

Banyak hal produktif yang dapat dilakukan selama musim liburan sekolah atau cuti kerja. Ngobrol dengan santai dapat sangat produktif bila materi yang dibicarakan cukup bermutu. Tulisan ini menyajikan obrolan santai, tetapi sesekali sangat serius, antara seorang ponakan, **Tanya** (baca "Tania") yang sedang berlibur di rumah seorang pak De-nya, **Answer**.

Bab Pendahuluan ini merupakan bab yang berisi bagaimana proses berpikir dan berargumen yang mengikuti kaidah secara benar sehingga kesimpulannya adalah valid. Sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia sering disuguhi pertunjukkan cara berpikir dan berargumen yang sangat menggelikan oleh orang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat atau pemimpin. Selain karena kekurangpahaman, sebab lain adalah ketidakjujuran. Akibatnya, masalah sepele menjadi perdebatan yang sangat panjang, sangat tidak produktif, dan sering salah fokus. Lebih parah lagi, hal yang seharusnya disukuri malah disesali.

Menata negara harus dimulai dengan menata pikiran. Keruwetan yang terjadi di dunia nyata sebenarnya merupakan refleksi dari keruwetan pikiran yang ada di kepala. Banyak orang tidak menyadari bahwa berpikir membutuhkan latihan. Demikian pula, belum banyak disadari cara berpikir seperti apa yang dibutuhkan dalam situasi tertentu; kapan cara berpikir

vertikal diperlukan dan kapan cara berpikir lateral lebih menjanjikan. Cara berpikir yang umum dan diajarkan di sekolah sejak usia dini adalah cara berpikir vertikal. Untuk mencari solusi dan terobosan, cara berpikir lateral lebih efektif ketimbang cara berpikir vertikal.

1.1 Perkenalan

1. **Tanya:** Pak De, mumpung ada libur panjang dan pak De kelihatannya juga sedang tidak banyak kegiatan di luar rumah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan pak De. Saya berharap pak De tidak keberatan.

Answer: Oh keponakanku Tanya, kalau pak De tahu dan sedang tidak sibuk tentu saja tidak keberatan. Sangat senang bahkan, kok di jaman seperti ini masih ada orang muda seperti kamu yang masih mau buang waktu untuk berdiskusi dengan orang seperti pak De-mu ini.

2. **Tanya:** Pak De, ngomong-ngomong kakek nenek membayangkan apa ketika memberi nama pak De? Apa kakek dan nenek juga mampu berbahasa Inggris?

Answer: He he he sebenarnya tidak sejauh itu. Kakek dan nenekmu waktu itu sedang bingung menentukan antara Anas atau Werkudoro. Anas itu bahasa Arab yang artinya manusia. Lha Werkudoro itu nama tokoh ksatria dalam pewayangan yang telah menemukan jati dirinya sebagai manusia. Tetapi kakek nenekmu itu rupanya cukup visioner; masak anak yang mengalami hidup di abad 21 bernama Werkudoro? Apa tidak malah membuat si anak menjadi minder karena diolok-olok oleh teman-temannya?

3. **Tanya:** Lho memang apa yang salah dengan nama Werkudoro pak De?

Answer: Ya tidak ada yang salah. Di abad 21 ini kan orang merasa lebih modern kalau namanya berbau barat atau merasa lebih religius kalau namanya berbau padang pasir yang gersang itu. Lha Werkudoro itu bahasa apa? Apalagi nama Werkudoro itu menggambarkan sosok tokoh yang berbadan besar nan gagah, ngomongnya tegas tidak mencla mencle, jujur, sederhana, dan tekun. Mungkin, ini mungkin ya, kakek nenekmu itu juga khawatir kalau nama yang diberikan kepada anaknya terlalu tinggi. Misalnya badannya memang tinggi besar, tetapi tidak punya nyali dalam mengambil keputusan dan ngomongnya

mencla mencle. Lha gimana kalau rakyat sampai *kepentut* sama orang yang seperti ini dan menjadikannya presiden tetapi ternyata selalu ragu dalam menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan cepat? Setiap ada masalah bukan mengambil tindakan, tetapi malah **melenguh**.

4. **Tanya:** Maksud pak De mengeluh? Melenguh itu kan hanya untuk kerbau pak De?

Answer: Mengeluh itu untuk manusia biasa yang tidak punya daya. Tetapi untuk manusia yang mempunyai kekuasaan luar biasa tetapi ngedumel melulu ketika harus mengambil keputusan segera maka tidak cocok kata mengeluh itu. Kata yang lebih cocok ya melenguh itu. Hanya mampu berkeluh kesah dan mengadu kanan kiri, serta meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Pak De teruskan dahulu cerita tentang nama tadi. Begitu pak De-mu ini sudah mbrojol maka dalam waktu "sepasar" nama yang pasti harus ditentukan. Tetapi karena kakek dan nenekmu masih tetap bimbang nama mana yang sebaiknya dipilih maka mereka bersepakat untuk menggabungkan keduanya menjadi Answer seperti sekarang ini, dengan harapan menjadi manusia yang berkarakter seperti Werkudoro tadi.

5. **Tanya:** Tetapi ada benarnya penggabungan tersebut, karena kalau diberi nama Anas saja jangan-jangan pak De malah terlibat korupsi uang negara dan tidak berani ngomong jujur seperti Werkudoro.

Answer: Hush, tidak usah dibawa kemana-mana. Nama pak De sekarang ini ya Answer itu tadi. Pak De bangga dengan nama itu. Sekarang kamu mau ngajak diskusi tentang isu apa?

6. **Tanya:** Begini pak De, karena saya punya beberapa hari dan beberapa malam disini, maka beberapa hari dan beberapa malam itu sebaiknya diisi dengan topik yang berbeda. Misalnya malam ini tentang ekonomi, besok malam tentang politik, dan besok malamnya lagi dengan topik yang lain lagi dan seterusnya sampai masa liburan saya habis. Dengan cara seperti ini, saya berharap diskusi kita akan menjadi lebih terarah dan tidak lari kemana-mana.

Answer: Ya bagus bagus saja idemu itu. Asal kamu ingat dan sadari saja bahwa satu topik dapat memakan waktu sangat panjang, bahkan tahunan. Maksud pak De, apa yang dapat diperoleh dalam waktu

semalam tidaklah terlalu mendalam. Tetapi paling tidak kamu sudah tahu kemana kamu harus melanjutkan perjalanan.

7. **Tanya:** Ya pak De, saya sangat menyadari hal itu. Sebutlah liburan di tempat pak De kali ini merupakan liburan pembuka jalan. Selebihnya ya memang tergantung kepada saya sendiri. Bahkan, jujur saja pak De, saya ingin melebihi pak De!

Answer: He he he pak De mendukung penuh gegayuhanmu itu. Generasi muda harus berani begitu; mengekspresikan ide dan keinginannya secara terbuka, bebas, dan merdeka. Benar juga itikadmu untuk melebihi pak De, karena pandangan pak De ini juga belum tentu benar. Kamu perlu mencari sumber yang lain dan membandingkannya. Pada akhirnya kamulah yang menentukan pandangan mana yang paling cocok dengan pandanganmu sendiri. Ayo, malam ini kita akan memulai dengan topik apa?

8. **Tanya:** Jika pandangan saya sama dengan pandangan pak De, maka hal demikian bukan berarti saya mengikuti pak De lho tetapi karena kita memang menemukan hal yang sama. Mohon maaf pak De saya menyatakan hal ini.

Answer: Ah ya tidak perlu mohon maaf, wong memang seharusnya manusia itu mempunyai pendapat sendiri. Tidak manut grubuyuk seperti banyak terjadi sekarang ini. Jadilah dirimu sendiri karena kamu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas apa yang kamu yakini dan lakoni.

9. **Tanya:** Bagaimana pak De kalau malam ini kita memulai diskusi kita dengan topik yang agak lebar dan menyangkut rakyat banyak sebagai langkah eksplorasi. Nah topik yang sering menjadi perhatian rakyat banyak itu adalah ekonomi dan politik. Urusan perut dan kekuasaanlah pak De. Tetapi bila pak De punya gagasan yang berbeda, maka Tanya tidak keberatan untuk mengikutinya. Atau kita sebaiknya tidak membatasi topik apa yang hendak didiskusikan?

Answer: Aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Lha kalau pak De tidak tahu tinggal ngomong wah pak De tidak tahu atau tidak punya ide. Lagi pula, topik yang pak De anggap penting boleh jadi tidak ingin kamu ketahui karena kamu menganggapnya tidak penting. Lha kamu kan pasti ngantuk.

10. **Tanya:** Baiklah pak De, saya akan mengambil alat perekam dan buku catatan dahulu. Dengan alat perekam maka pak De tidak dapat mengelak dengan mengatakan bahwa saya telah salah kutip bila suatu saat ucapan pak De terbukti ada yang kurang tepat. Jaman sekarang ini harus ada bukti otentik, karena sumpah dibawah tujuh rupa kitab suci ternyata belum memadai juga untuk memaksa orang berkata jujur. Apalagi bila pengadaan kitab sucinya saja sudah dikorupsi, maka semakin sulit mengharapkan orang untuk menghargai kitab suci seperti itu. Apa pak De percaya sama sumpah pocong?

Answer: He he he ... bukan soal percaya atau tidak percaya. Mestinya, orang yang diminta secara paksa untuk melaksanakan sumpah pocong itu mengajukan tawaran bahwa kalau ternyata tuduhan itu tidak benar maka petaka yang disumpahakan akan jatuh kepada orang yang memintanya untuk melakukan sumpah pocong. Nuduh orang harus ada biaya dan resikonya, sehingga orang akan mikir dua tiga kali sebelum memaksa orang lain melakukan sumpah pocong.

11. **Tanya:** Wah lama-lama sumpah pocong bisa hilang dong pak De? Sanya pak De, itu kan salah satu unsur budaya kita? Bagaimana kalau sumpah pocong itu diaku oleh negara tetangga kita sebagai budayanya?

Answer: Bisa jadi sumpah pocong itu akan hilang, sehingga orang yang biasa mendapat order untuk memimpin sumpah pocong jadi kesepian. Tanya, agar kita tidak terjebak dalam pikiran sumpek sumpah pocong ini maka pak De usul agar sama-sama menggunakan kaidah logika yang benar.

12. **Tanya:** Pak De, boleh sedikit menyimpang? Apa pendapat pak De tentang isu rebutan budaya ... negara tetangga kita mengklaim beberapa unsur budaya kita sebagai budaya mereka?

Answer: Lha apa ruginya bagi kita? Kalau mereka mengadopsi seluruh unsur budaya kita, maka mereka menjadi kita. Siapa yang diuntungkan kalau begitu? Memang kita ini bangsa yang aneh. Ketika ada bangsa lain mengklaim dan mengkapitalisasi budaya kita sebagai budaya mereka, maka kita mengatakan bahwa budaya kita dicuri. Sebaliknya, ketika banyak dari kita mengadopsi budaya asing kita mengatakan budaya asing telah merasuki dan mempengaruhi kita.

Pernah ada orang yang protes keras tentang penggunaan bahasa asing untuk menamai tempat umum, seperti minimarket, supermarket, dan

lain sebagainya. Menurutnya, hal seperti itu akan menggerus kecintaan kita kepada bahasa kita sendiri. Tetapi ketika pak De mengajaknya untuk berusaha bersama mengubah nama masjid terdekat dari nama Arab ke nama Indonesia, dia tidak menjawab but showing his or her pale face. Pak De mencium bau ketidakjujuran dalam protes orang tersebut.

13. **Tanya:** Maaf pak De, apakah kaidah logika yang benar itu merupakan syarat untuk diskusi yang produktif? Lagi pula, apa susahnyah sih pak De untuk menggunakan logika dengan mengikuti kaidah secara benar? Apakah ini bukan semacam pelestarian tradisi orang-orang tua yang penuh dengan syarat sebelum melakukan sesuatu, seperti harus membakar kemenyan dan menyediakan kembang setaman?

Answer: He he he untuk sementara kamu boleh beranggapan seperti itu, tetapi pak De yakin bahwa anggapanmu itu akan luntur sedikit demi sedikit dengan semakin jauhnya kita berdiskusi. Ketahuilah Tanya bahwa sekarang ini banyak orang yang tidak mampu menggunakan logika dengan benar padahal posisi yang dipegangnya sangat menentukan nasib dan emosi orang banyak. Kesalahan yang banyak disebabkan oleh cara kita menggunakan bahasa. Caramu menggunakan bahasa dapat menjerumuskanmu sendiri.

14. **Tanya:** Baiklah bila demikian halnya pak De, Tanya menurut saja apa saran pak De. Bagaimana memulainya pak De?

Answer: Wah pak De sendiri juga tidak tahu persis pendekatan mana yang paling efektif Tanya. Tetapi kita tukar pikiran dengan santai saja; tidak perlu terlalu terikat pada mazhab tertentu yang mungkin malah mengikat kita. Bila perlu berbagai mazhab yang dogmatis kita jungkir balikkan manakala kita mampu melakukannya dan hal tersebut memang perlu dilakukan. Pembatas diskusi kita ini ya kemampuan akal kita sendiri. Kita harus mampu menemukan pencerahan kita sendiri, seperti halnya dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad pertengahan.

Pendekatan *induktif-deduktif* tidak perlu kita pertentangkan, melainkan kita gunakan secara bersama atau bergiliran. Sekali-sekali kita gunakan istilah yang agak mentereng biar diskusi kita ini mirip dengan diskusinya orang pintar atau orang yang sok pintar he he he he Jangan lupa menyiapkan papan tulis dan *markernya*, karena untuk hal-hal tertentu pak De perlu menggambar grafik atau menulis

formulasi matematika. Sebaiknya kita mulai dengan logika dan kemudian beberapa contoh tentang berlogika secara konyol.

Demikian pula dengan cara berpikir, kita akan menggunakan cara berpikir vertikal dan cara berpikir lateral secara komplementer. Berpikir vertikal sudah kita kenal sejak kita masuk bangku sekolah dan ketika itu tidak diberi nama sebagai cara berpikir vertikal sampai ditemukan cara berpikir lain yang disebut cara berpikir lateral (de Bono, 2009). Berpikir vertikal mengacu kepada pemecahan suatu masalah melalui analisis dengan memfokuskan diri pada metoda yang sudah diketahui benar adanya. Sementara itu, solusi yang lebih baik dan proses yang kreatif dapat ditemukan hanya ketika kita berani menjebol zona nyaman pengetahuan. Berpikir lateral membongkar pengertian tradisional yang mengembangkan berpikir vertikal.

15. **Tanya:** Biar ingatan segar kembali, apa sih pendekatan deduktif dan induktif itu pak De?

Answer: Argumen deduktif merupakan argumen dengan struktur bahwa premis memberikan jaminan kebenaran dari kesimpulan. Argumen deduktif bekerja dari umum ke khusus atau disebut juga dengan pendekatan *top down*. Misalnya, semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Kambing adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, semua kambing pasti akan mati. Selama premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar.

Argumen induktif merupakan argumen dengan struktur bahwa premis memberikan alasan yang mendukung kebenaran kesimpulan dengan peluang yang tinggi. Dalam argumen deduktif, hubungan antara premis dan kesimpulan sudah pasti. Dalam argumen induktif, hubungan tersebut melibatkan peluang. Argumen induktif bekerja dari pengamatan yang lebih spesifik kepada generalisasi atau teori yang lebih umum. Kita mulai dengan pengamatan dan pengukuran yang spesifik, lalu mengenali pola dan keteraturan, memformulasikan hipotesis tentatif yang dapat dieksplor lebih lanjut, dan akhirnya membangun kesimpulan atau teori umum. Contohnya, setiap pagi kita melihat matahari terbit, maka besok pagi matahari akan terbit.

Nah, agar kamu dapat melakukan uji kebenaran dari suatu argumen maka kamu harus mengerti bahasa yang digunakan. Salah satu kunci untuk mengerti bahasa adalah memahami arti dari kata yang digunakan. Untuk itu definisi suatu kata sangat penting. Ini juga pesan bagi

kamu untuk selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, agar argumen kamu dapat diuji dengan mudah.

1.2 Syarat Harus dan Syarat Cukup

1. **Tanya:** Baik pak De. Mungkin kita mulai dengan contoh nyata yang banyak terjadi di masyarakat pak De. Misalnya fenomena seperti ini pak De. Apa dijamin? Pertanyaan seperti ini sangat umum terjadi dalam perdebatan antara dua pihak yang berbeda ide. Berikut ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan nyata:
 - (a) Misalnya program “busway” di Jakarta untuk mengatasi masalah lalu lintas yang semakin semrawut. Pihak yang tidak setuju dengan program ini lalu mengajukan pertanyaan apakah dengan program busway lalu lintas di Jakarta dijamin menjadi lebih teratur?
 - (b) Seorang dokter memberi saran kepada pasiennya yang menderita sakit sangat parah agar dirawat inap di rumah sakit. Pasien mengajukan pertanyaan apakah rawat inap menjamin kesembuhan dirinya?
 - (c) Apakah tingkat pendidikan yang tinggi merupakan jaminan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak? Fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang juga sulit mencari pekerjaan.

Itulah beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lha kalau sesuatu itu tidak menjamin terjadinya sesuatu yang lain yang diinginkan, maka apakah sesuatu yang pertama tidak perlu ada? Bagaimana pak De menjelaskannya?

Answer: Jika adanya suatu peristiwa tidak menjamin terjadinya peristiwa lain yang diharapkan apakah peristiwa pertama sebaiknya tidak diadakan saja? Ini sekedar pertanyaan balik untuk mengejutkan otak penanya agar bangun. Hingga hari ini kehadiran DPR hasil pemilu demokratis (peristiwa pertama) belum dirasakan manfaatnya dalam memperbaiki kehidupan rakyat banyak (peristiwa yang diharapkan). Apakah fenomena ini berimplikasi bahwa pemilu demokratis atau bahkan DPR itu sendiri seharusnya tidak ada? Apakah kita harus membubarkan lembaga peradilan karena hingga hari ini kita belum me-

rasakan adanya keadilan di negara kita? Apakah lembaga kepolisian perlu dibubarkan karena kita belum merasa terayomi? Itulah model debat kusir tanpa struktur dan logika yang benar. Disinilah kamu dapat membedakan antara pertanyaan yang benar dari pertanyaan yang asal bunyi.

Mari kita memasuki substansi yang lebih serius. Dalam berargumen, kita harus memperhatikan dua syarat, yakni syarat keharusan (*necessary condition*) dan syarat kecukupan (*sufficient condition*). Syarat keharusan adalah suatu kondisi yang dibutuhkan agar kondisi lain dapat terjadi. Misalnya, lulusan fakultas hukum merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima menjadi jaksa. Namun, lulus fakultas hukum saja belum menjamin seseorang dapat diterima menjadi jaksa, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi. Tetapi bila kita menjumpai seorang jaksa, pastilah dia lulusan fakultas hukum.

Syarat kecukupan adalah suatu kondisi yang “menjamin” terjadinya kondisi lainnya. Kembali ke contoh jaksa di atas. Jika lulus fakultas hukum merupakan syarat keharusan seseorang dapat diterima menjadi jaksa, maka jaksa manapun yang kita jumpai pasti dia lulusan fakultas hukum. Jadi, jaksa merupakan kondisi cukup untuk memastikan bahwa orang tersebut lulusan fakultas hukum. Bila kita menjumpai seseorang yang bukan jaksa, tidak lalu dapat disimpulkan bahwa orang tersebut bukan lulusan fakultas hukum. Tetapi bukan lulusan fakultas hukum merupakan syarat kecukupan bagi seseorang untuk tidak dapat menjadi seorang jaksa. Oleh karena itu, setiap anda menjumpai seseorang yang tidak lulus dari fakultas hukum, maka dia pasti bukan seorang jaksa.

Urian singkat di atas sudah cukup memadai untuk menganalisis apakah pertanyaan yang meminta jaminan adalah tepat atau tidak. Pembangunan busway jelas bukan kondisi kecukupan bagi tertibnya lalu lintas di Jakarta. Demikian juga rawat inap adalah bukan kondisi kecukupan bagi sembuhnya seorang pasien. Umumnya, syarat kecukupan sulit ditemukan. Syarat keharusan lebih mudah dirumuskan. Kumpulan syarat keharusan mungkin saja menjadi syarat kecukupan; artinya, suatu kondisi secara individual merupakan syarat keharusan tetapi secara bersama dapat saja membentuk syarat kecukupan.

Dengan memahami kaidah berargumen yang baik, debat kusir yang tidak berujung pangkal dapat dihindari. Satu hal yang perlu dicamkan

adalah bahwa kaidah berargumen yang benar hanya memberikan kesimpulan yang "valid," bukan kesimpulan yang pasti benar. Validitas dan kebenaran merupakan dua hal yang berbeda. Kesimpulan yang tidak valid dapat saja benar. Tetapi kebenaran seperti ini hanya bersifat kebetulan yang tidak dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Para pembela fanatik sistem kapitalisme seringkali menggunakan kehancuran sistem sosialisme sebagai argumen untuk membenarkan sistem kapitalisme. Sistem sosialis-komunis yang telah membawa kehancuran sosial di beberapa negara tidak lantas membuktikan atau bahkan menjamin bahwa sistem kapitalis pasar bebas yang menjadi lawannya akan memberikan kejayaan bagi masyarakat yang memraktekannya (Friedman, 2003). Kita belum tahu apakah sistem kapitalisme dapat bertahan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Mungkin saja ada sistem lain yang berbeda sama sekali dari keduanya yang dapat menyejahterakan manusia secara adil dan berkelanjutan. Sistem yang berlandaskan pada paham Pancasila boleh dicoba. Sistem sosial berlandaskan pada paham agama telah pernah dicoba dan jaya di beberapa tempat. Hari ini, kita tidak menjumpai sistem teokratis semacam itu. Artinya, sistem teokrasi tersebut telah ditinggalkan orang juga.

Ketika masih disebut-sebut sebagai salah satu dari beberapa orang yang menerima aliran dana BI, Paskah Suzzeta membantahnya dengan argumen yang lucu dan sekaligus bodoh. Sangat manusiawi bila yang bersangkutan membantahnya untuk menyelamatkan diri. Salah satu argumen yang digunakan adalah bahwa dia berposisi sebagai kepala BAPPENAS. Suatu badan yang bertanggung jawab membuat "rencana pembangunan nasional." Rencana pembangunan nasional tersebut harus atau bahkan pasti dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, maka rusaklah negara ini. Oleh karena itu, sebagai ketua badan yang membuat rencana pembangunan nasional pastilah orang yang dapat dipercaya. Jadi, bila Paskah mengatakan bahwa dirinya tidak ikut menerima uang, maka Paskah benar-benar tidak menerima uang. Orang Jawa bilang, bahwa argumen seperti ini adalah argumen yang *ngoyo woro* - melantur. Menggelikan tentu saja. Kita tidak perlu repot melawan argumen semacam ini. Jaksa, hakim, dan polisi yang semestinya merupakan lembaga yang sangat dapat dipercaya oleh pu-

blik dan menjadi sapu yang sangat bersih ternyata banyak tersandung masalah, sehingga kita terpaksa membentuk KPK.

Kalimat yang kita buat, sering menipu kita sendiri. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini:

- (a) Seorang kepala sekolah mengumumkan bahwa semua murid kelas enam di sekolahnya berhak mendapatkan 10 unit buku tulis secara gratis sebagai hadiah. Apakah hal ini berarti murid yang masih kelas tiga di sekolah yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan hadiah yang sama? Kita tidak memiliki cukup informasi untuk menarik kesimpulan seperti ini. Mungkin saja di hadapan murid kelas tiga kepala sekolah tersebut juga menyatakan bahwa semua murid kelas tiga berhak mendapatkan 10 unit buku tulis secara gratis.
 - (b) Seorang bendahara suatu organisasi menyatakan bahwa setiap usulan kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih dari 100 juta rupiah akan ditolak. Seorang pengusul marah karena usulan kegiatannya yang membutuhkan anggaran 75 juta rupiah ternyata juga ditolak. Tidak konsistenhkah bendahara tersebut? Apa yang dinyatakan oleh bendahara tersebut adalah suatu kepastian bagi usulan kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih dari 100 juta rupiah, yakni pasti ditolak. Tetapi dia tidak menyatakan apapun juga untuk usulan kegiatan yang membutuhkan anggaran kurang dari 100 juta rupiah. Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa bendahara tersebut tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri.
2. **Tanya:** Dalam debat politik di ruang publik kerancuan berpikir itu sering terjadi pak De. Lha kalau kerancuan tersebut terjadi dalam debat hukum di ruang pengadilan, ada potensi orang yang tidak bersalah dapat terhukum.

Answer: Keprihatinanmu sangat benar dan sangat beralasan Tanya. Tetapi coba kamu perhatikan beberapa undang-undang, kamu akan mendapati bagaimana amburadulnya Bahasa Indonesia yang digunakan. Hal itu menunjukkan betapa amburadulnya logika di baliknya. Contoh yang paling hangat adalah perdebatan tentang penyerahan atau penghentian penyidikan kasus Simulator SIM (salabim) POLRI; harus mengikuti KUHAP atau UU KPK. Kalau saja orang memahami

bahwa apa yang dinyatakan dalam KUHAP dalam penghentian penyidikan oleh POLRI sebagai “syarat kecukupan” dan bukan “syarat keharusan” maka perdebatan tidak bermutu yang berlangsung begitu panjang tidak perlu terjadi. Bila unsur yang disebutkan dalam KUHAP terpenuhi maka cukuplah bagi POLRI untuk menghentikan penyidikan tanpa melanggar hukum. Tetapi penghentian penyidikan oleh pihak POLRI dapat saja terjadi meskipun tidak harus memenuhi unsur yang disebutkan dalam KUHAP karena unsur tersebut bukan “syarat keharusan.”

3. **Tanya:** Tetapi apakah pak De menyangkal bahwa perdebatan yang tidak produktif tersebut terjadi karena sebenarnya ada kepentingan dibaliknya? Pak De, Tanya punya pikiran bahwa mestinya pihak yang dahulu menangani Novel Baswedan dalam kasus penembakan pencuri sarang burung walet harus ditindak juga. Sampai Novel lolos mulus seperti sekarang menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab menangani kasusnya dahulu tidak bertindak profesional.

Answer: Kemungkinan adanya kepentingan di baliknya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dari argumen yang dibangun, memang sulit sekali untuk menghilangkan kesan adanya sesuatu yang hendak ditutupi. Ini pelajaran yang entah sudah ke berapa kalinya, bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan muncul. Oleh karena itu, jangan sekalipun kamu pernah bersepakat dalam kebohongan atau kejahatan, karena cepat atau lambat pasti terbuka juga. Ingat, kamu itu bukan perkecualian sama sekali.

4. **Tanya:** Maksudnya bukan perkecualian pak De?

Answer: Banyak orang mengira bahwa dirinya itu merupakan perkecualian - kalau orang lain mungkin saja ketangkap atau ketahuan tetapi tidak dengan dirinya. Jangan pernah tergoda untuk mencobanya. Percayalah, tidak ada perkecualian seperti itu! Masih banyak jalan yang menyenangkan tanpa harus ditebus dengan biaya menjaga kerahasiaan terus menerus.

1.3 Logika Konyol Sang Profesor 1

1. **Tanya:** Menarik juga ya pak De, bahwa bahasa dan logika kita dapat menipu diri kita sendiri.

Answer: Benar Tanya. Contoh berikutnya merupakan kesalahan dalam mencari syarat cukup. Contoh ini dapat kamu temukan dalam arsip media masa, baik cetak maupun elektronik.

Sesaat bom Bali pertama meledak, banyak pihak terperangah dan sulit percaya bahwa bom bunuh diri sudah merambah negara kita. Bom dahsyat itu menyebabkan ratusan jiwa melayang dan meninggalkan bekas berbentuk kubangan yang berukuran besar dan dalam. Bermunculanlah berbagai macam analisis dan berbagai tipe analisis mulai dari kelas profesional hingga kelas sangat amatiran. Tidak ketinggalan, tuduhan keterlibatan pihak asing harus diangkat ke permukaan.

Melalui kerja yang sangat teliti dan sistematis yang dimulai dari TPK, bila dipanjangkan menjadi Tempat Kejadian Perkara mungkin banyak orang malah tidak paham, akhirnya polisi menemukan dan menangkap para tersangka pelakunya. Tertangkapnya para tersangka pelaku ini tidak dengan serta merta menghentikan teka-teki siapa pelakunya, sebaliknya justru menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa. Pelaku yang ditangkap dianggap terlalu sederhana untuk mampu melakukan pengeboman dengan dampak yang begitu besarnya.

Seorang analis amatiran berjabatan profesor yang tidak percaya atas hasil kerja polisi mengusulkan agar tersangka pelaku diminta untuk menunjukkan kemampuannya merakit bom. Bila para tersangka pelaku tersebut tidak mampu menunjukkan kemampuannya merakit bom, maka berarti polisi telah salah tangkap. Konsekuensi logisnya para tersangka pelaku harus segera dibebaskan. Jika saja sayembara ala profesor tersebut dilaksanakan, maka apa yang akan dilakukan oleh para tersangka?

Coba bayangkan bila kamu yang berada pada posisi para tersangka - posisi disini tidak harus sebagai teroris yang tidak berhati nurani. Apakah kamu ingin bebas dari sangkaan atau kamu ingin lebih memperkuat sangkaan? Manusia dengan IQ mendekati satu digit sekalipun yang masih berakal sehat akan memilih membebaskan diri dari segala sangkaan yang berkonsekuensi hukuman sangat berat bila terbukti bersalah. Normalnya, orang menggunakan segala kemampuannya jika ada insentif yang menguntungkan dirinya bilamana kemampuannya tersebut dapat dibuktikannya. Apa untungnya menunjukkan kemampuan bila akan menghasilkan hukuman yang sangat berat padahal berpura-pura tidak mampu jauh lebih mudah dan murah dan terbebas dari hukuman? Orang pintar dapat dengan lebih mudah berlagak

sebagai orang bodoh, tetapi tidak dapat sebaliknya yaitu orang bodoh berlagak sebagai orang pintar.

Teori permainan (*Game Theory*) mengajarkan adanya perilaku strategis (*strategic behavior*) yang dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dalam suatu konteks tertentu. Langkah yang diambil adalah langkah yang paling menguntungkan dirinya setelah memperhatikan langkah yang diambil oleh pihak lawannya. Bila berpura-pura bodoh - lebih mudah dilakukan ketimbang pura-pura pintar - lebih menguntungkan ketimbang menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, maka orang akan memilih pura-pura bodoh. Asumsinya adalah bahwa orang tersebut rasional.

Untungnya, polisi kita masih lebih cerdas dari profesor kita itu. Penyelidikan setahap demi setahap dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Semua bukti dikumpulkan satu demi satu sehingga para tersangka tidak mungkin lagi mengelak dari tuduhan melakukan tindakan teror. Pengadilanpun akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada para tersangka yang tidak bersedia menyesali perbuatannya.

Pelajaran penting dari peristiwa bom Bali adalah bahwa ketika manusia sudah tertutup akal budinya, maka dia tidak lebih dari sebuah monster yang menjijikkan. Kita juga dapat belajar bahwa berjabatan profesor sangat efektif untuk menyebarkan kepintaran dan juga kebodohan.¹ Oleh karena itu, jangan mudah terpesona oleh predikat apapun di dunia ini. Apalagi belakangan ini, banyak orang menggunakan berbagai atribut untuk menarik bahkan menipu orang lain. Modus penipuan yang masih sangat efektif hingga saat ini adalah penipuan dengan menggunakan kedok agama. Pelaku bom bunuh diri itupun sebenarnya juga korban penipuan yang berkedok agama.

2. **Tanya:** Bagaimana logikanya pak De?

Answer: Pelaku bom bunuh diri yang berlatar belakang agama pasti ada urusannya dengan insentif masuk sorga. Ada orang yang melakukan cuci otak sehingga para korban ini percaya betul bahwa dirinya akan masuk sorga setelah selesai menjalankan tugas meledakkan bom

¹Rasa buah asam direplikasi dan disebarkan melalui *gene*. Ide ternyata juga mengalami replikasi dan penyebaran melalui replikator yang disebut *meme*. Untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang *meme*, buku berjudul "Richard Dawkins: How A Scientist Changed the Way We Think" yang diedit bersama oleh Alan Grafen dan Mark Ridley, diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2006 sangat baik sebagai acuan.

yang juga membunuh dirinya sendiri. Orang yang tercuci otaknya lebih percaya ketimbang orang yang melakukan pencucian otak. Oleh karena itu, si pencuci otak ini tidak pernah melakukan sendiri bom bunuh diri. Dia sendiri tidak ingin buru-buru masuk sorga, sebagian besar dari mereka tertembak mati oleh peluru aparat dengan cara yang sangat hina.

3. **Tanya:** Beberapa waktu yang lalu ada yang mengusulkan agar pengajaran tentang Pancasila digalakkan lagi untuk meredam radikalisme dan tindakan radikal. Tetapi kelihatannya hanya tinggal wacana. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Kalau benar hanya sampai wacana, maka pak De sangat bersyukur. Menurut pak De, menggalakkan pengajaran Pancasila seperti yang pernah dilakukan di periode pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen versi orde baru dahulu malah akan memicu radikalisme lebih hebat. Itu artinya salah mengidentifikasi permasalahan.

Timbulnya radikalisme itu kemungkinan besar tidak dipicu oleh suatu sebab tunggal, melainkan ada beberapa penyebab. Tetapi menurut pak De ketidakadilan sosial merupakan penyebab tunggal yang berperan paling besar dibandingkan peran penyebab tunggal lainnya. Nah, pengajaran Pancasila dalam situasi yang penuh ketidakadilan tersebut akan semakin mempertegas kemunafikan atau, meminjam istilah Buya Syaifi Ma'arif, antara kata dan perbuatan pecah kongsi. Jadi, yang diperlukan bukan pengajaran atau penataran Pancasila, tetapi pengamalannya. Pak De yakin sekali bahwa pengamalan Pancasila yang tetap mampu mempertahankan kongsi kata dan perbuatan akan menekan dan akhirnya menghilangkan radikalisme.

1.4 Logika Konyol Sang Profesor 2

1. **Tanya:** Gawat juga ya pak De, kalau orang yang semestinya menjadi panutan masyarakat dalam olah pikir ternyata malah membuat kesalahan yang sangat fatal.

Answer: Ya begitulah Tanya. Masih ada contoh lain. Ini fenomena yang diangkat dari perdebatan yang ditayangkan oleh Stasiun Metro TV yang membicarakan isu sekitar pengelolaan sumberdaya alam dan privatisasi. Empat orang panelis terdiri dari Marwan Batubara, Rizal

Malarangeng, Amin Rais, dan Sofyan Jalil. Amin dengan sinis mempertanyakan mengapa Blok Cepu “dihadiahkan” kepada Exxon padahal Pertamina - sebagai BUMN milik bangsa Indonesia - juga mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Untuk menunjukkan kehebatan Pertamina, disebutkan bahwa Pertamina memenangkan tender di Libia. Tidak dijelaskan tender apa yang dimenangkan oleh Pertamina tersebut. Kurang lengkap bila tidak diimbui dengan kesimpulan spekulatif bahwa pemerintah Indonesia tunduk pada tekanan politik dari pemerintahnya Exxon.

Mari secara perlahan kita urai kekacauan pikiran seorang profesor politik yang menjadi politisi. Tidak perlu mencari argumen yang rumit untuk melihat kekacauan tersebut. Nuansa standard ganda sangat kental dalam argumen kacau tersebut. Ketika Pertamina memenangkan tender, maka kesimpulannya adalah bahwa Pertamina merupakan perusahaan hebat karena mampu mengalahkan pesaingnya di negeri orang. Sementara itu, ketika Exxon yang menang di negeri kita, kesimpulan “spekulatif” menjadi pemerintah Indonesia tunduk pada tekanan pemerintahnya Exxon. Apakah sebenarnya yang bersangkutan ingin mengatakan bahwa pemerintah Libia telah tunduk pada tekanan pemerintah Indonesia sehingga Pertamina dapat menang tender di Libia, padahal di negeri sendiri kalah?

Biar debat kusir dengan pikiran kacau tambah seru, kita dapat mempertanyakan mengapa Exxon kalah oleh British Petroleum (BP) di Alaska? Hal seperti ini terjadi karena Exxon kalah profesional dari BP atau lebih disebabkan oleh tunduknya pemerintahnya Exxon terhadap pemerintahnya BP? Andapun dapat membuat analisis yang seru untuk memojokkan pihak lain dengan menggunakan standard ganda. Ketika seseorang mempunyai ambisi politik untuk kepentingan pribadinya sendiri, gelar atau jabatan akademis setinggi apapun tidak akan banyak berguna bagi bangsanya, bahkan cenderung digunakan untuk *minteri* - bahasa jawa untuk mengakali - bangsanya sendiri.

Selain menggunakan standard ganda, pikiran yang digunakan juga bersifat linear. Karena Pertamina mampu memenangkan tender di negeri orang, maka Pertamina tentu mempunyai peluang lebih tinggi untuk memenangkan tender di negeri sendiri. Jika demikian, orang Libiapun dapat mengajukan pertanyaan yang sama “mengapa bukan perusahaan Libia sendiri yang memenangkan tender di bumi Libia?” Pasti ada yang tidak beres dengan tender tersebut. Pikiran seperti ini

sangat mengabaikan faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tender di kedua negara tersebut boleh jadi sangat berbeda jauh.

2. **Tanya:** Kalau sekedar salah pikir tanpa sengaja masih dapat diterima. Bagaimana kalau salah pikir itu memang dilandasi niat culas untuk menjerumuskan orang lain?

Answer: Hal seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Guru besar yang suka culas itu ya Pandito Durno. Orang seperti ini harus diwaspadai dan jangan pernah dibiarkan menyebarkan omongannya yang menyesatkan orang banyak. Orang seperti ini biasanya sangat ahli dalam mengutip ayat-ayat dari kitab suci.

3. **Tanya:** Pak De ini bagaimana sih, Pandito Durno itu kan adanya hanya di dunia pewayangan kalau Tanya tidak salah ingat. Di dunia nyata, bagaimana kita dapat mengenalinya? Banyak kemunafikan, banyak kamufase pak De.

Answer: Kamu benar Tanya. Tokoh Pandito Durno itu memang hanya simbol. Siapa yang menciptakan simbol itu? Konon Sunan Kalijogo, salah seorang wali yang menyebarkan ajarannya melalui budaya lokal, adalah orang yang memiliki peran dalam merancang tokoh tersebut. Tetapi hal ini tidak perlu terlalu kamu hiraukan. Bukan siapa penciptanya yang penting tetapi apa yang hendak disimbolkan oleh Pandito Durno itu yang lebih penting. Orangnya tinggi. Hidungnya mancung. Selalu mengenakan peci yang mirip dengan peci haji. Di tangannya selalu menggantung benda yang mirip tasbih. Pak De tidak tahu dengan pasti apa maksud dari penggambaran tokoh Pandito Durno yang seperti itu, tetapi dugaan pak De adalah semacam sindiran bagi kita. Jangan mudah kagum pada penampakan fisik. Pak De kutipkan kata bijak oleh Henry David Thoreau “ It’s not what you look at that matters, it’s what you see.”

4. **Tanya:** *So, we do need to be very very careful.* Bagi orang yang sudah memiliki pengalaman banyak tipuan itu mudah terdeteksi, tetapi bagaimana dengan orang muda yang masih kurang pengalaman? Bukankah sasaran mereka itu umumnya kaum muda? Bagaimana kita melindungi kaum muda dari pandangan yang menyesatkan? Atau mungkin lebih tepatnya bagaimana membangun generasi muda yang memiliki daya tangkal terhadap paham yang dapat menjerumuskan mereka sendiri.

Answer: Memang benar harus hati-hati. Salah satu caranya adalah tetap bersikap terbuka terhadap berbagai pendapat. Jika kamu mendengar satu pendapat, maka berusaha untuk mendapatkan pendapat yang berlawanan. Perhatikan dan cernalah argumennya. Jangan lupa untuk terus menggunakan akal sehat. Sesuatu yang terlalu spektakuler harus selalu dicurigai. Usahakan untuk tidak terperangkap oleh simbol, tetapi dapatkan esensinya. Kamu boleh mengganti pepatah “air beriak tanda tak dalam” dengan “simbol besar tanda tak dalam.” Setiap paham yang mengurangi kebebasanmu maka segera tinggalkan. Kebebasan disini maksudnya adalah kebebasan diri yang juga menghormati kebebasan orang lain, bukan kebebasan yang diperoleh dan digunakan dengan mengurangi kebebasan orang lain.

1.5 Mengeluh Ketika Seharusnya Bersyukur

1. **Tanya:** Indonesia memiliki hutan tropis alam terluas ketiga di dunia. Sebagaimana hutan alam dimanapun, hutan tropis alam milik Indonesia mengalami kerusakan yang sangat mencemaskan. Pembalakan liar dipercaya sebagai penyebab kerusakan hutan yang paling penting. Semakin tinggi permintaan kayu, semakin tinggi harga kayu dan pada gilirannya semakin tinggi insentif untuk melakukan penebangan hutan. Kapasitas terpasang industri pengolahan kayu jauh melampaui kemampuan hutan menyediakan bahan baku yang lestari. Banyak industri yang terpaksa harus tutup karena tidak memperoleh bahan baku yang cukup untuk memproduksi secara tidak merugi. Untuk memenuhi kebutuhan baku tersebut, penebangan hutan dilakukan dengan melebihi kapasitas lestari hutan tersebut. Ringkasnya, permintaan kayu yang tinggi merupakan penyebab kerusakan hutan.

Pandangan bahwa permintaan kayu yang tinggi merupakan penyebab kerusakan hutan dianut oleh banyak kalangan, termasuk dari pemerintah. Dengan pandangan seperti itu, kebijakan yang diusulkan biasanya mencakup penutupan beberapa industri yang tidak mempunyai dukungan bahan baku dari hutan. Dengan berkurangnya permintaan kayu, maka penebangan hutan akan berkurang sehingga kerusakan hutanpun dapat dihindarkan.

Answer: Apa makna dari permintaan atau demand? Arti demand adalah harga tertinggi dimana konsumen bersedia membayarnya (wi-

lingness to pay). Demand yang tinggi artinya ketersediaan konsumen membayar per unit yang dibelinya itu tinggi. Demand yang naik bermakna ketersediaan konsumen membayar per unit barang yang dibelinya meningkat. Ringkasnya, demand dapat dipandang sebagai penghargaan dari konsumen terhadap barang yang hendak dibelinya. Oleh karena itu, demand yang tinggi merupakan harapan dari setiap produsen. Tidak ada bisnis yang bangkrut ketika permintaan produksinya tinggi. Kejadian yang paling lazim adalah bisnis mati bila demand produksinya sangat rendah.

Penutupan bisnis kehutanan pasti juga bukan karena permintaan produk kehutanan yang tinggi. Bahwa kedua peristiwa tersebut - permintaan produk kehutanan yang tinggi dan penutupan banyak bisnis kehutanan - terjadi pada saat yang bersamaan tidak lantas dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang satu merupakan penyebab peristiwa yang lain. Problem kehutanan terletak pada sisi pengaturan penawarannya, bukan pada sisi permintaannya. Bila sisi penawaran dapat dibenahi, permintaan yang tinggi akan menjelma menjadi harga yang tinggi, bukan menjelma menjadi meningkatnya penebangan hutan. Demikian juga, peningkatan permintaan kayu akan menjelma menjadi peningkatan harga kayu.

Kapan permintaan produk hutan rendah? Jika manfaat produk hutan dirasakan rendah oleh konsumen, maka ketersediaan konsumen untuk menghargai hutan juga rendah. Bila hutan sudah dianggap kurang bermanfaat oleh manusia, maka ketersediaan manusia untuk mempertahankan hutan juga rendah. Jadi, usaha menurunkan permintaan atas produk dari hutan sama artinya dengan usaha untuk mendorong agar manusia kurang menghargai hutan. Sungguh sulit diterima akal sehat ketika upaya menurunkan permintaan produk hutan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlihat peduli pada kelestarian hutan. Kepedulian yang otentik dan kepedulian yang pura-pura semakin sulit dibedakan. Kita harus lebih berhati-hati sebelum menerima kata-kata seseorang yang sepintas tampak indah, tetapi sebenarnya sangat menjerumuskan.

Menurunkan permintaan memang mungkin dapat menurunkan kayu yang diperdagangkan, tetapi belum tentu menurunkan jumlah penebangan. Untuk mencapai tingkat kuantitas yang diperdagangkan sama dengan tingkat produksi yang dianggap lestari dapat dicapai dengan menurunkan permintaan. Tetapi harga yang tercipta juga ren-

dah, karena penurunan permintaan pada hakekatnya adalah menurunnya ketersediaan membayar dari konsumen. Sementara itu, jumlah kayu yang ditebang sangat mungkin melebihi dari yang diperdagangkan. Ketika masyarakat melihat bahwa penghargaan terhadap hasil hutan rendah, maka sangat mungkin masyarakat akan menebangi hutan untuk diganti dengan penggunaan lain yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, keinginan untuk mempertahankan hutan dengan cara mengurangi permintaan produk hutan merupakan kesesatan pikir yang tiada taranya. Mengurangi permintaan hasil hutan tidak identik dengan mengurangi tekanan pada hutan. Bila harga hasil hutan rendah, maka tekanan pada hutan akan berbentuk dorongan untuk mengonversi hutan menjadi penggunaan lain. Inilah tekanan yang sesungguhnya, sementara permintaan hasil hutan yang tinggi justru bukan tekanan pada hutan bila kelembagaannya tepat.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa dampak dari permintaan hasil hutan pada hutannya. Sebagai pemilik hutan yang berlimpah, permintaan hasil hutan yang sangat tinggi sudah pasti merupakan sesuatu yang harus disukuri. Persoalannya adalah dalam kondisi seperti apa sehingga permintaan tersebut dapat menjadi bencana dan dalam kondisi seperti apa sehingga permintaan tersebut menjadi rahmat. Dengan mengetahui kondisi-kondisi tersebut, pekerjaan selanjutnya adalah menghindari terjadinya kondisi yang menimbulkan bencana dan pada saat yang bersamaan menciptakan kondisi yang dibutuhkan agar permintaan hasil hutan menjadi rahmat bagi hutannya. Ringkasnya, faktor institusi akan menentukan dampak seperti apa yang akan terjadi (Ferreira, 2004; Copeland & Taylor, 2009). Bukan hanya malu bertanya sesat di jalan yang perlu selalu diingat, tetapi juga salah bertanya karena sesat di pikiran, seperti menghubungkan kebijakan perdagangan dengan kelestarian hutan tanpa melihat institusi yang melatarinya (Shimamoto, 2008).

Contoh paling nyata yang dapat dilihat saat ini adalah semakin luasnya hutan milik di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling dipadati oleh penduduk di Indonesia. Permintaan kayu di Pulau Jawa juga paling tinggi di Indonesia. Mengapa hutan di Pulau Jawa malah bertambah luas? Penguasaan tanah di Pulau Jawa relatif sudah mantap, dalam arti pengakuan terhadap kepemilikan tanah sudah kuat. Ketika kebutuhan kayu meningkat, harga kayu menjadi meningkat juga. Hal ini memberi insentif kepada pemilik ta-

nah untuk menanam hutan. Disini tingginya permintaan kayu menjadi rahmat bagi pemilik tanah untuk menanam hutan. Jadi, kepastian hak itu sangat penting bagi kerusakan atau pembangunan hutan.

1.6 Latihan Berpikir

1. **Tanya:** Kita memang harus selalu waspada ya pak De, bahkan terhadap pikiran kita sendiri. Selain dapat menjebak diri kita sendiri, pikiran kita juga dapat menggiring kita pada sikap yang fanatik.

Answer: Memang, pikiran itu merupakan sistem yang menciptakan pola (pattern-making system). Sistem informasi dari pikiran bertindak menciptakan pola dan mengenalinya (de Bono, 2009). Namun demikian, pikiran tidak secara aktif menyortir informasi. Informasi menyortir dan menyusun dirinya sendiri menjadi pola. Pikiran sendiri pasif dan hanya memberi kesempatan kepada informasi untuk bertindak seperti itu. Lingkungan khusus ini merupakan permukaan memori dengan ciri khusus.

Pola susunan informasi yang sudah terbentuk akan menentukan bagaimana informasi yang datang berikutnya ditempatkan. Disinilah titik kritis itu terjadi, yakni ketika informasi yang datang paling akhir tersebut tidak kompatibel dengan pola yang sudah ada yang terbentuk dari informasi sebelumnya. Ada orang yang memilih untuk mengabaikan atau bahkan membuang informasi terakhir tersebut dan mempertahankan pola yang sudah ada dalam pikirannya. Inilah yang kamu sebut dengan sikap fanatik tadi. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk menyusun ulang semua informasi yang ada untuk membentuk pola baru. Inilah orang kreatif.

2. **Tanya:** Jadi fanatik dan kreatif itu masalah kebersediaan untuk melakukan bongkar pasang informasi saja pak De?

Answer: Bukan hanya kebersediaan bongkar pasang susunan informasi, tetapi juga keberanian untuk melakukannya. Penyusunan ulang atas informasi yang ada dapat menghasilkan pola baru yang menggugat pola lama yang merupakan fondasi keyakinan yang diimaninya selama ini. Kamu dapat dikucilkan atau dianggap aneh oleh masyarakat, bahkan kalau sangat apes dapat dihukum mati. Penemuan besar umumnya dihasilkan dari cara penyusunan informasi yang berbeda.

Dilihat dengan kaca mata ini, maka masalah dapat dibagi menjadi tiga tipe (de Bono, 2009), yaitu:

- (a) Masalah yang untuk memecahkannya membutuhkan informasi lebih banyak atau teknik yang lebih baik untuk menangani informasi;
- (b) Masalah yang untuk memecahkannya tidak membutuhkan informasi baru tetapi pengaturan informasi yang telah tersedia;
- (c) Masalah yang sebenarnya bukan masalah.

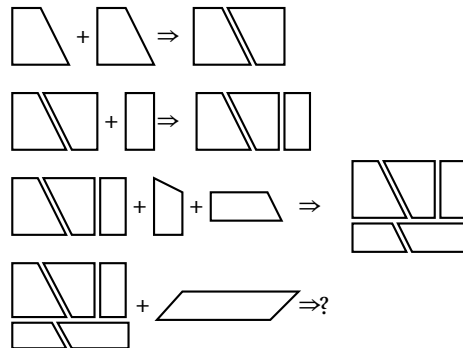
Masalah tipe pertama dapat diselesaikan dengan cara berpikir konvensional (*vertikal thinking*), tetapi masalah tipe dua dan tiga membutuhkan pendekatan yang berbeda (*lateral thinking*). Dengan mengubah sudut pandang kita akan menemukan solusinya, yang tidak jarang sangat sederhana.

Gambar 1.1 memperlihatkan terbentuknya suatu pola dengan datangnya informasi. Tetapi informasi keenam tidak dapat dipasangkan dengan pola yang telah terbentuk sebelumnya untuk mendapatkan pola yang mudah dimengerti. Disini kita mempunyai pilihan apakah menyusun ulang informasi yang telah membentuk pola sehingga informasi terbaru dapat terangkai menjadi pola yang mempunyai makna atau tetap mempertahankan pola yang telah ada dan membuang atau mengabaikan informasi baru.

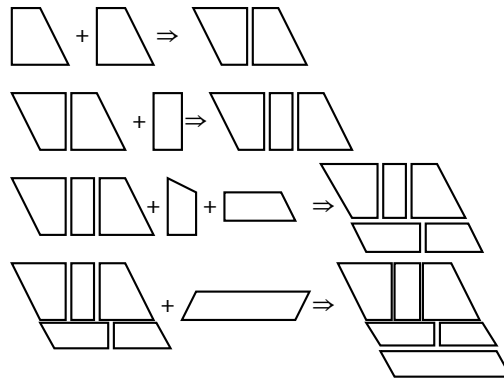
Cara penyusunan yang berbeda dapat menghasilkan pola yang mantap secara psikologi pada setiap tahanan hingga informasi terakhir (Gambar 1.2). Hanya saja, cara penyusunan kedua ini (bentuk jajaran genjang) mempunyai peluang dipilih lebih kecil dibandingkan cara penyusunan pertama (bentuk kotak). Secara sederhananya, berbagai jenis bumbu masak yang sama dapat menghasilkan jenis masakan yang berbeda dan jenis masakan tertentu lebih mungkin dihasilkan ketimbang jenis masakan yang lain. Ringkasnya, kreativitas adalah masalah penyusunan informasi.

3. **Tanya:** Menarik juga ya pak De, hanya dengan menyusun ulang informasi kita dapat membangkitkan ide baru. Agar lebih mantap pemahaman Tanya, beberapa contoh mungkin dapat membantu. Saya harap pak De tidak keberatan.

Answer: Benar Tanya, contoh merupakan alat belajar yang paling efektif, bukan hanya dalam memberi pemahaman tetapi juga dalam



Gambar 1.1: Informasi Terakhir Tidak Kompatibel dengan Pola yang Sudah Terbentuk (de Bono, 2009)



Gambar 1.2: Hasil Penyusunan Ulang Informasi yang Ada untuk Memperoleh Pola Baru (de Bono, 2009)

membangun keyakinan diri bahwa pemahaman yang diperolehnya adalah benar adanya. Tentu saja pak De tidak keberatan memberikan beberapa contoh, karena pak De yakin tangan di bawah lebih baik dari tangan di atas.

4. **Tanya:** Apa tidak terbalik pak De ... ucapan yang selalu Tanya dengar adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ucapan seperti ini bahkan pernah disampaikan oleh seorang nabi, atau mungkin nabi itu sendiri sebagai sumber dari ucapan tersebut.

Answer: Ini sudah merupakan contoh tersendiri. Kamu hanya menghafal ucapan itu tanpa melihat konteksnya. Sudah ada pola dalam pikiranmu yang akhirnya menjebakmu. Konteks ucapan pak De adalah dalam mendorong naiknya seseorang ke jenjang yang lebih tinggi demi kebaikan bersama.

5. **Tanya:** Oh kalau begitu kata-kata orang terkenal dapat memintarkan kita tetapi juga potensial untuk menjebak kita dong pak De?

Answer: He he he ... mulai pintar kamu. Ya sebaiknya kamu sendiri saja yang berani menjadi diri sendiri dan berani melakukan percobaan akal sehingga tidak perlu harus menyalahkan orang lain. Orang sering meminjam otoritas orang hebat untuk mendukung posisinya.

6. **Tanya:** Baik pak De. Berikan contoh yang lain lagi pak De.

Answer: Contoh ini pak De ambil dari internet. Seorang bapak dan anaknya terlibat dalam kecelakaan mobil. Bapak tersebut meninggal di tempat, sedangkan anaknya dilarikan ke rumah sakit dan harus segera menjalani operasi. Ketika operasi siap dilaksanakan, ahli bedahnya mendadak bilang bahwa dirinya tidak dapat melakukan operasi tersebut karena anak yang akan dioperasi tersebut adalah anaknya. Bagaimana mungkin?

7. **Tanya:** Sepertinya ada yang kurang beres sehingga menimbulkan keraguan. Jadi siapa sebenarnya ayah dari anak yang hendak dioperasi ini, ahli bedah atau pria dewasa yang meninggal dalam kecelakaan?

Answer: Problem keraguan tersebut timbul akibat dari persepsi dadakan yang terjadi karena pola yang sudah ada bahwa dokter ahli bedah itu umumnya pria. Bagaimana jika dokter ahli bedah tersebut ternyata perempuan? Dialah ibu dari anak yang hendak dioperasi tersebut.

8. **Tanya:** Terus pak De, contoh yang lain lagi.

Answer: Seseorang yang baru taraf belajar mengemudi bergerak di jalan satu arah dengan cara melawan arus tanpa melanggar hukum. Bagaimana mungkin terjadi?

9. **Tanya:** Sebentar pak De, disini kan ada tiga informasi, yaitu baru taraf belajar mengemudi, jalan satu arah, dan bergerak melawan arus. Informasi pertama hanya menerangkan identitas dari seseorang yang bergerak melawan arus di jalan yang arusnya satu arah. Aturan satu arah di jalan raya hanya berlaku untuk kendaraan bermotor. Tetapi bagaimana dia bergerak kan tidak harus dengan mengemudi mobil, mungkin saja dia jalan kaki. Jadi, mungkin saja hal itu terjadi bila orang yang dimaksud berjalan kaki. So, nothing wrong with the story.

Answer: Yes, you are very right.

10. **Tanya:** Tampaknya kita harus dapat membebaskan diri dari jebakan yang tidak perlu dan fokus pada masalahnya. Informasi yang tidak perlu dapat mengacaukan pikiran kita untuk dapat segera fokus pada masalah. Pak De, mohon diberikan contoh satu lagi.

Answer: Sebuah mobil box terhalang oleh portal yang dibuat permanen sehingga tidak dapat dilakukan buka tutup. Ada kelebihan tinggi satu sentimeter agar mobil box dapat lewat. Jalan alternatif lebih panjang puluhan kilometer. Saran apa yang dapat kamu berikan?

11. **Tanya:** Untuk dapat melewati portal maka tinggi maksimum box harus di bawah portal. Ini persoalan menurunkan tinggi box. Caranya yang dapat ditempuh ada dua pak De. Pertama, kalau masih ada ruang tersisa yang cukup dalam box maka masukkan saja batu untuk menambah beban sehingga box akan menurun. Cara kedua adalah mengurangi tekanan ban sehingga box menjadi lebih rendah. Masih ada cara lain lagi pak De, yaitu saya minta beberapa tukang ojek yang mangkal di sekitar jembatan itu untuk naik ke mobil, baik di box maupun di kabin. Jika masih juga kurang rendah, maka beberapa orang lagi diminta naik. Bila perlu mereka juga membawa batu.

Answer: Cool. Pak De senang kamu sudah mulai berani menggunakan pikiran kreatifmu untuk menjawab suatu masalah. Bangkitkan semua alternatif penyelesaian yang mungkin dan jangan takut untuk disebut bodoh, lucu, atau semacamnya. Meskipun kamu sudah menemukan solusinya, sebaiknya kamu tetap membuka diri dan pikiran untuk menerima kemungkinan solusi lain yang berbeda. Jangan pernah menutup diri, karena banyak yang tidak kita ketahui.

12. **Tanya:** Kelihatannya pak De berpandangan bahwa ketrampilan berpikir dapat ditingkatkan melalui latihan. Apa benar demikian pak De?

Answer: Ya benar, seperti kamu melatih jari-jarimu dalam bermain *guitar* atau melatih kakimu mengolah bola. Semakin banyak berlatih maka kamu akan semakin trampil menggunakan jari-jari dalam bermain *guitar* atau kakimu dalam mengolah bola. Demikian juga dengan otakmu.

13. **Tanya:** Pak De, bukankah kecemerlangan berpikir seseorang itu sangat ditentukan oleh inteligensia orang yang bersangkutan? Apa pak De tidak sedang memberi harapan yang terlalu besar kepada orang yang mempunyai inteligensia kurang cemerlang?

Answer: Oh tidak Tanya. Pak De sangat serius. Tetapi kalau apa yang pak De sampaikan dapat menghibur orang yang merasa inteligensianya kurang cemerlang tidak ada buruknya juga kan? Apa benar untuk dapat terhibur saja orang harus cerdas? Tetapi benar bahwa orang cerdas membutuhkan hiburan yang cerdas juga.

Begini Tanya, inteligensia itu merupakan kemampuan untuk melihat hubungan atau mengenali pola dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Kreativitas di pihak lain merupakan kemampuan untuk keluar dengan sederet solusi orisinal baru yang mungkin bagi masalah tertentu. Kamu sudah melihat beberapa contoh sebelumnya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa melihat inteligensia dari satu sudut pandang itu sangat tidak memadai. Kemampuan dan ketrampilan manusia itu ternyata sangat beragam. Orang yang encer dalam matematika tidak harus berarti secara keseluruhan memiliki inteligensia lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang gagap matematika. Sangat mungkin kegagapan itu hilang bila cara menyampaikannya diubah.

Hal yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya ketika menghadapi masalah adalah strategi yang digunakan untuk menemukan solusinya. Ada yang menggunakan inteligensia dan berpikir kreatif secara bersama, ada yang lebih mengandalkan inteligensianya, dan ada yang lebih mengandalkan berpikir kreatif. Para jenius menggunakan kedua strategi ini dengan sangat baik. Tetapi dalam hal berpikir kreatif maka antara kamu dan para genius tidak ada bedanya.

14. **Tanya:** Yang benar saja pak De. Pak De makin sulit dikenali apakah sedang serius atau sedang bercanda atau sedang memberi hati.

Answer: Lho pak De ini sangat serius. Cara para jenius mengendarai sepeda adalah sama dengan cara kamu mengendarai sepeda. Coba kamu perhatikan montir yang sudah berpengalaman. Mereka ahli sekali dalam menyiasati masalah mesin. Cara yang mereka tempuh untuk mengatasi masalah sering menyimpang dari buku panduan. Bahkan dengan menabrak teori yang ada kamu berpotensi menemukan hal baru. Hal seperti ini pernah terjadi dan temuannya masih kita gunakan hingga sekarang.

15. **Tanya:** Beberapa penemuan sebenarnya hanya meniru apa yang terjadi di alam. Alam memberikan model atau prinsip yang dapat digunakan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Benar. Itu yang disebut dengan berpikir dengan analogi atau menganalogikan. Ambil prinsipnya dan sesuaikan dengan keadaan. Bagaimana cangkang kerang membuka menginspirasi rancangan pintu pesawat kargo. Soal hirarki dalam organisasi kita dapat melihat masyarakat baboon, pembagian kerja sudah dicontohkan oleh rayap dan tawon, soal jaringan dicontohkan oleh laba-laba, dan masih banyak contoh yang lain. Bahkan ada jenis laba-laba tertentu yang dapat digunakan untuk meramalkan apakah hari itu akan hujan atau tidak. Ini hanya berdasarkan pengalaman dari para petani yang harus kamu kritisi. Pak De tidak terlalu ingat jenis laba-labanya, tetapi agak berbulu. Nah, bila dia menghadap ke atas maka hari itu tidak akan hujan dan sebaliknya bila dia menghadap ke bawah maka hari itu akan hujan. Sekali lagi, hal ini jangan kamu percaya dahulu. Ingat bahwa pendekatan induktif itu melibatkan peluang, sehingga belum tentu benar.

1.7 Kemacetan Jakarta

1. **Tanya:** Pak De, menyimpang sedikit nih, apa pandangan pak De terhadap kemacetan di Jakarta? Apa komentar pak De terhadap berbagai ide dan usulan solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Siapa tahu pak De, Tanya terpilih menjadi calon wakil gubernur dari jalur independen.

Answer: Tanya, kamu ini dibekali untuk level presiden kok malah menysar hanya level wagub. Nista benar kamu ini.

2. **Tanya:** Wah pak De, tadinya Tanya hendak memulai karier politik dari tingkat desa, and then move up to the top one.

Answer: Wow wow wow ... Coba dielaborasi lebih lanjut tentang idemu itu ... “from the very bottom up to the top one.” Kok pak De jadi penasaran.

3. **Tanya:** Wah bisa juga pak De penasaran. Begini pak De idenya. Se-seorang selesai pendidikan di perguruan tinggi (PT) kira-kira umur 23-25 tahun. Ambil gampangnya 25 tahun. Selesai pendidikan di PT dia kembali ke desa dan magang di desa untuk lima tahun, sehingga umurnya menjadi 30 tahun ketika periode magang selesai. Magang tadi dapat diganti dengan kegiatan lain yang intinya untuk mengenali desa dan masyarakatnya. Selesai periode itu, dia mencalonkan diri menjadi kepala desa. Katakanlah dia terpilih dan menjadi kepala desa untuk periode lima tahun, sehingga di akhir masa jabatan kepala desa umumnya menjadi 35 tahun. Nah, para kepala desa sarjana tersebut siap untuk berkompetisi bagi posisi bupati. Dua periode dalam posisi bupati menghantarkannya pada usia 45 tahun. Silahkan para mantan bupati tersebut berkompetisi menjadi gubernur dan siapa yang terbaik mudah-mudahan terpilih menjadi gubernur. Dua periode jabatan, kalau tidak keburu ditangkap KPK, usianya 55 tahun. Nah, siaplah dia menjadi kandidat presiden yang benar-benar memulai karier politiknya dari tingkat desa.

Answer: Hemmm ... idemu lumayan cemerlang Tanya. Memang pemimpin itu seharusnya mempunyai akar rasa hingga ke tingkat desa.

4. **Tanya:** Bahkan bila kita mau, kita dapat mengembangkan model demokrasi tanpa partai politik seekorpun.

Answer: Hus, omonganmu ini semakin bikin penasaran saja. Dan, itu lho partai politik kok satuannya ekor?

5. **Tanya:** Lha kalau perilaku semua partai politik seperti binatang, apa salahnya bila satuan partai politik adalah ekor.

Answer: Lho yang berperilaku seperti binatang itu kan orangnya, atau lebih tepat oknum di dalam partai.

6. **Tanya:** Benar pak De, yang berperilaku seperti binatang itu memang orangnya atau oknum menurut pak De, tetapi jumlahnya sangat banyak dan menurut Tanya masih lebih tepat menyebutnya dengan “semuanya” ketimbang menyebutnya dengan “sedikit oknum.” Akibatnya,

partai itu sendiri seperti monster, binatang yang sangat mengerikan. Nilanya bukan lagi setitik, tetapi seluruh belanga itu telah dipenuhi nila. Saat ini adalah jamannya “kafilah menggonggong anjing berlalu.”

Answer: Ha ha ha ... kamu semangat sekali Tanya. Baiklah teruskan idemu tentang demokrasi tanpa seekorpun partai politik tadi.

7. **Tanya:** Begini pak De, demokrasi itu kan mungkin saja dibuat dalam bentuk perwakilan. Bupati, misalnya, kan dapat saja dipilih diantara para kepala desa oleh para kepala desa tersebut? Forum kepala desa itu dapat bertindak sebagai lembaga legislatifnya. Demikian juga gubernur dapat dipilih oleh para bupati dan forum bupati menjadi lembaga legislatif tingkat propinsi. Nah presiden dipilih dari gubernur yang paling hebat oleh forum gubernur dan forum bupati. Jadi omong kosong bahwa demokrasi tidak mungkin tanpa partai politik. Partai politik itu pada dasarnya suatu bentuk sistem perwakilan juga. Jadi, yang benar itu apapun model demokrasinya maka perwakilan tidak dapat dinegasikan.

Answer: Bagus. Pak De dapat melihat benang merahnya. Terlepas dari kelemahan yang menyertainya, teorimu tentang demokrasi tanpa seekorpun partai politik dapat diterima akal sehat. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan awal dari diskusi ini, yakni tentang kemacetan Kota Jakarta?

8. **Tanya:** Maaf pak De, Tanya jadi keasyikan dengan nila sebelanga - partai politik belanganya, sedangkan anggotanya itu nilanya. Kita kembali ke soal kemacetan Kota Jakarta. Bagaimana pandangan pak De? Apa solusinya?

Answer: Menurut pak De, kemacetan di Jakarta itu hanya sebuah gejala saja. Gejala dari apa? Gejala dari kegagalan pembangunan wilayah. Dengan kemacetan yang parah, polusi udara yang sangat berat, dan tingkat kriminalitas yang tinggi, toh orang masih lebih suka mendatangi Kota Jakarta ketimbang mendatangi kota lainnya di Indonesia. Ini artinya, seburuk-buruknya kondisi Kota Jakarta ternyata masih lebih menarik dibandingkan kota yang lain. Busway, monorail, lingkaran luar, lingkaran dalam, dan sebagainya hanya merupakan obat sementara dan akan semakin memperparah keadaan. Peristiwa Mbah Tanjung Priok sebenarnya menunjukkan adanya “kelebihan muatan” yang dialami oleh Kota Jakarta.

9. **Tanya:** Jika memang demikian pak De, maka seharusnya pengembangan wilayah lain harus dilaksanakan lebih gencar. Tetapi hal demikian tentu sudah diketahui dan disadari oleh pemerintah. Apakah iya pemerintah begitu naifnya sehingga tidak mampu melihat persoalan yang sebenarnya.

Answer: Pemerintah naif itu bukan hal yang aneh. Sangat sering bahkan. Kalaupun pemerintah tahu dan menyadari, belum tentu pemerintah dapat segera merealisasikannya. Kita semua tahu dan sangat sadar bahwa korupsi itu buruk bagi bangsa, tetapi toh korupsi berjalan terus, bahkan seringkali dilakukan secara berjamaah.² Kita semua tahu bahwa membakar tempat ibadah itu tidak baik, tetapi sudah berapa puluh atau bahkan ratus rumah ibadah dirusak dan dibakar tanpa ada penyelesaian hukumnya?

10. **Tanya:** Persoalan pengembangan wilayah diluar Kota Jakarta itu kan hanya masalah realokasi anggaran saja pak De? Apa sulitnya bagi para ahli yang bekerja di lembaga pemerintah?

Answer: Tidak sesederhana itu Tanya. Apa yang tampak ini sebenarnya hanyalah refleksi dari sesuatu yang tidak tampak atau tidak disadari adanya karena terlalu biasa. Menurut pak De, kesemrawutan Kota Jakarta adalah refleksi dari budaya feodal - semua predikat ingin disandanginya sendiri. Sebagai kota, dia ingin menjadi kota pemerintahan, kota pendidikan, kota kebudayaan, kota perdagangan, kota industri, dan masih sederet predikat lainnya. Karena terlalu banyak beban maka menjadi sulit bergerak. Penjelmaan budaya feodal yang lain adalah menumpuknya peran atau jabatan yang digenggam oleh seseorang. Dia ketua RT, ketua dewan pembina partai, ketua dewan kehormatan partai, dan berbagai macam jabatan kedua. Hasilnya apa? Ya kemacetan juga seperti halnya yang terjadi di Kota Jakarta, hanya saja wujudnya menjadi seperti sangat lambat dan ragu-ragu dalam membuat keputusan.

Jadi, kalau pembangunan wilayah di Indonesia ingin merata, dengan implikasi kemacetan di Kota Jakarta akan ditekan atau dikurangi, maka budaya dan sikap mental feodal itu harus di bongkar dahulu. Sekali lagi, pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Te-

²Ada politisi tak bermutu yang sok religius mencoba melarang orang lain menggunakan kata berjamaah yang dikaitkan dengan korupsi karena kata berjamaah itu hanya untuk urusan ibadah. Dia tidak sadar bahwa jaman sekarang ini korupsi sudah dianggap suatu ibadah atau minimal ibadah sambil korupsilah.

tapi ingat, bukan sembarang pendidikan, melainkan pendidikan yang mampu menggetarkan jiwa untuk melawan dan membongkar kemapanan.

11. **Tanya:** Pak De, anggaran pendidikan kita kan sudah mencapai 20% dari total APBN? Berarti pendidikan kita sudah pada jalur yang benar pak De.

Answer: Apa urusannya jumlah anggaran pendidikan yang dikurangkan dan benar tidaknya jalur yang ditempuh? Tidak ada. Anggaran yang tersedia memang penting, tetapi tidak cukup bahkan dapat saja kontra produktif. Pendidikan yang pak De maksud adalah proses penanaman nilai-nilai, pembentukan karakter bangsa, serta peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis. Pendidikan yang diselenggarakan sekarang ini hanya menghasilkan orang yang berijazah dengan menampung ilmu pengetahuan tanpa memahami untuk apa ilmu pengetahuan yang dimilikinya kecuali hanya sekedar untuk mencari sandang pangan bagi diri sendiri dan keluarganya saja. Mereka telah menjadi robot yang digerakkan dengan tenaga nasi. Mereka tidak peduli ketika peningkatan kemakmuran dirinya itu menyebabkan miskinnya orang lain atau bahkan bangkrutnya negaranya sendiri. Ujian nasional disekapi dengan doa bersama, mendatangi ulama untuk mohon doa, bahkan dengan meminta ulama untuk membuatkan rajah di pinsil yang akan digunakan dalam ujian nasional. Ujian nasional merupakan pameran dan pemekaran kebodohan nasional yang diikuti oleh banyak pihak. Penguasaan ilmunya sendiri tidak terlalu penting, tetapi diluluskan dan memperoleh ijazah yang lebih dikejar.

12. **Tanya:** Anggaran besar yang dikorupsi besar juga pak De, bahkan konon ketika anggaran itu masih dalam tahap pembahasan di DPR sudah ada rancangan korupsi, apalagi dengan banyaknya jumlah partai politik. Apa tidak mungkin pak De jumlah partai politik itu disederhanakan menjadi tiga atau empat ekor saja?

Answer: Bagaimana caranya? Disinilah banyak orang keliru melihat masalah. Jumlah partai politik yang puluhan ekor di Indonesia itu sebenarnya mencerminkan apa? Waktu jaman orde baru dulu, pak Harto menyederhanakan jumlah partai menjadi hanya tiga ekor. Tetapi, karena daya kohesi masyarakat kita itu masih rendah, maka penyederhanaan tersebut dilakukan secara paksa. Nah, ketika kekuasaan

sebagai alat paksa masih cukup besar, maka pemaksaan tersebut dapat berjalan. Apa yang kemudian terjadi setelah pak Harto kehilangan kekuasaan? Jumlah partai politik ya kembali kepada jumlah alaminya yang sesuai dengan karakter bangsa kita, puluhan ekor.

13. **Tanya:** Terus jalan keluarnya bagaimana dong pak De?

Answer: He he he ... untuk membangun negeri ini secara hakiki maka tidak ada cara *instant* atau dadakan yang dapat digunakan. Membangun negeri itu ibarat lari maraton Tanya, bukan lari *sprint*. Suka atau tidak suka, pendidikan karakter, budi pekerti, dan kebudayaan harus dijalankan dengan lebih sistematis dan serius. Salah satu ciri Indonesia yang sebenarnya sudah terwujud adalah hilangnya istilah putra daerah dari kamus pergaulan sosial politik masyarakat kita.

14. **Tanya:** Wah ya lama dong pak De?

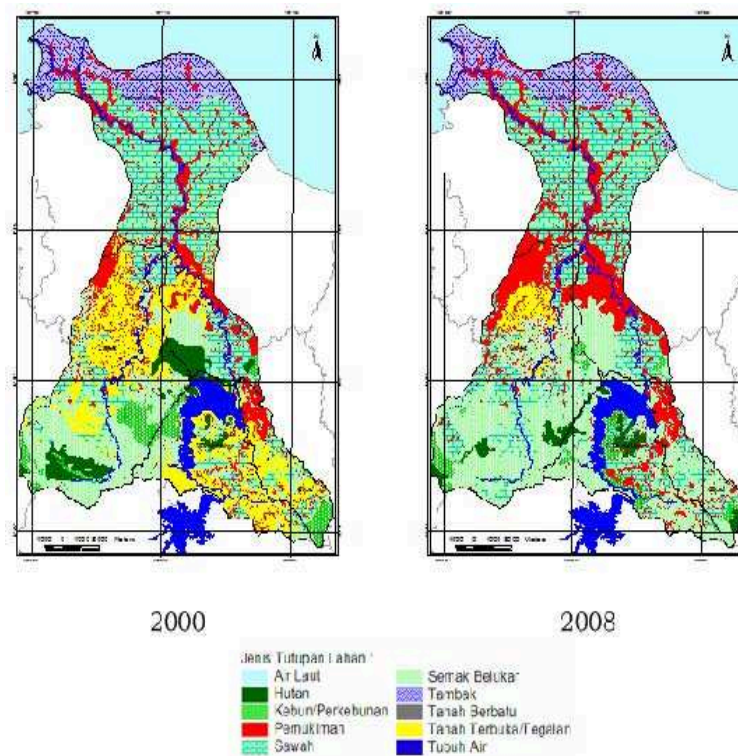
Answer: Lama itu kalau kamu tidak sabar, tetapi menjadi tidak lama atau bahkan terlalu cepat kalau kamu sabar.

15. **Tanya:** Lho kan memang membutuhkan waktu puluhan tahun pak De?

Answer: Iya, tetapi kita menginginkan Indonesia tegak sepanjang masa kan? Karena butuh waktu panjang, maka marilah segera kita mulai agar datangnya kejayaan itu tidak semakin tertunda. Orang yang sabar tidak mempertanyakan kapan datangnya hari baik itu, tetapi berbuat sesuatu yang berguna dengan upaya terbaik yang dapat dilakukannya sekarang juga. Ketika kamu membayangkan hidup enak di masa lalu atau masa yang akan datang, maka kurang enaklah hidupmu hari ini. Tanya, sebenarnya segala sesuatu termasuk hidup itu terjadinya hanya sekarang. Nah, orang sabar itu adalah orang yang hidupnya sekarang. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan “sekarang” mungkin buku yang ditulis Tolle (2009) dapat membantu.

16. **Tanya:** Pak De, ketika masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta dapat diatasi, itupun kalau benar dapat diatasi, menurut Tanya akan ada faktor pembatas lain yang muncul. Faktor pembatas baru ini tidak kalah merepotkannya. Perkiraan Tanya, air bersih akan menjadi persoalan besar di Jakarta. Air yang masuk ke Jakarta akan semakin sedikit dan semakin kotor. Air untuk kebutuhan rumah tangga

akan bersaing ketat dengan air untuk menunjang industri yang tumbuh pesat di sepanjang jalan Tol Jakarta-Cikampek-Padalarang dan air untuk menunjang pertanian sawah di sekitar Kerawang. Intinya, air dari Sungai Citarum akan menjadi rebutan banyak pihak. Kalau kita perhatikan *landuse* di sekitar Jalan Tol Cipularang berubah sangat cepat selama periode 2000 hingga 2008, khususnya wilayah pemukiman (Gambar 1.3). Padahal, wilayah ini juga merupakan lumbung padi nasional. Jadi, masalah Kota Jakarta dapat merembet menjadi masalah nasional.



Gambar 1.3: Perubahan Landuse di Sekitar Jalan Tol Cipularang

Answer: Bukan mustahil perkiraanmu itu akan terjadi. Melawan ke-

terlanjuran memang sangat berat karena dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk berkorban. Ibarat Indonesia ini sebuah kapal, cara kita meletakkan beban sangat tidak merata sehingga posisi kapal menjadi miring. Akibatnya, muatan yang dapat ditampung oleh kapal untuk dapat berlayar secara aman jauh lebih rendah dari kapasitas kapal yang sebenarnya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan karena akan membahayakan keamanan dan keselamatan kapal.

"Perfection is our goal, excellence will be tolerated"

J. Yahl

*"I am careful not to confuse excellence with perfection.
Excellence, I can reach for; perfection is God's business"*

Michael J. Fox

*"Socialism is government of the duds by the duds and for
the duds."*

Sir Winston Churchill

2

Tentang Berbagai Paham

Memahami berbagai paham yang membentuk masyarakat dunia ini penting mengingat pendirian orang terhadap suatu isu biasanya berhubungan dengan paham yang dianutnya tersebut (Sanders, 1986). Di Amerika Serikat, orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai liberal akan lebih merasa nyaman berada dalam Partai Demokrat, sedangkan mereka yang mengidentifikasi dirinya konservatif merasa lebih nyaman berada di Partai Republik (Linn, 1949). Bangsa Indonesia memang telah memiliki paham sendiri, yakni Pancasila. Meski demikian, beberapa partai politik yang ada sampai batas tertentu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan tentang posisi mereka dalam suatu isu. Berbagai paham dunia tersebut tampaknya juga ikut mewarnai pemikiran orang-orang yang terlibat dalam merumuskan Pancasila.

Dalam bab ini dibahas secara ringkas berbagai paham utama yang dikembangkan manusia dan paling banyak mempengaruhi pemikiran kita. Berbagai paham tersebut meliputi liberalisme, individualisme, kapitalisme, pasar bebas, sosialisme, neoliberalisme, sosialisme pasar, dan negara kesejahteraan. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar dalam berwacana kita tahu benar posisi kita dan posisi orang lain. Banyak orang menunjukkan kebenciannya kepada suatu paham, tetapi bila dirunut dengan teliti

maka sebenarnya yang bersangkutan secara tidak sadar merupakan peng-anut paham yang dibencinya tersebut. Ada lagi orang yang menunjukkan kebencian pada suatu paham hanya untuk memperoleh simpati dan dukungan publik bagi kepentingan dirinya sendiri. Model cerita hantu yang berkembang dari katanya dan katanya harus diakhiri. Langkah tukang tipu dan orang-orang yang tidak jujur harus segera kita hentikan semampu kita. Untuk itu, kita harus memiliki bekal pemahaman yang cukup atas berbagai paham yang berkembang di dunia ini.

Satu hal yang patut disadari adalah bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Paham apapun dia pasti mengandung kelemahan. Oleh karena itu, kita tidak perlu fanatik buta dalam menganut suatu paham. Sebaliknya, kita juga tidak harus anti secara total terhadap suatu paham. Karena, bila diperhatikan lebih dalam, semua paham tersebut dikembangkan sesungguhnya untuk kesejahteraan umat manusia. Niat baik tidak selamanya berakhir dengan kebaikan sebagaimana diharapkan.

2.1 Liberalisme

1. **Tanya:** Liberalisme itu apa sih pak De? Juga neoliberalisme dan istilah-istilah sejenis yang seolah-olah haram bagi bangsa kita untuk mencicipinya. Malam ini mohon pak De berkenan membahas berbagai istilah seram itu dengan segamblang-gamblangnya.

Answer: Agar lebih mempunyai makna, kita perlu melihat keadaan ketika berbagai paham itu muncul. Di abad 16an saat bangsa Eropa masih dalam kegelapan, praktek paham feodalisme sangat umum terjadi. Kaum aristokrat dan agamawan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada penyelenggaraan pemerintahan yang sangat membatasi gerak masyarakat. Tahayul sangat berkembang biak. Ide yang berkaitan dengan pencerahan secara tradisional disebut dengan “liberal.” Liberalisme bermakna kebebasan dan hak individual melawan penggunaan kekuasaan yang seenaknya dari kaum aristokrat dan agamawan dalam suatu masyarakat yang berjenjang.

Apa yang terjadi ada jaman pertengahan tersebut pada dasarnya adalah gelombang transformasi sosial yang luar biasa dengan dampak tergerusnya ekonomi feodal. Dalam ekonomi terjadi perubahan dalam produksi dan perdagangan. Semakin terbukanya pasar membuka kesempatan bagi tumbuhnya aspirasi individual dan perilaku wirausa-

ha yang tadinya ditekan oleh kaum agamawan, kaum aristokrat, dan komunitas. Orang liberal adalah orang yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari penindasan oleh kaum aristokrat dan agamawan yang menguasai pemerintahan.

Dalam dunia pemikiran muncul ide baru tentang pencarian ilmiah. Jaman Renaissance (abad 15 hingga 16) memberikan jalan bagi berkembangnya pencarian ilmiah. Ditambah reformasi gereja yang diawali oleh Martin Luther di Jerman semakin menambah kuatnya gerakan untuk membebaskan diri dari kungkungan pemerintah feodal penuh tahayul yang dikendalikan oleh kaum aristokrat dan kaum agamawan. Ingat bagaimana Copernicus dihukum mati hanya karena mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat kaum agamawan saat itu tentang tatasurya?

2. **Tanya:** Maaf pak De, mengapa pak De menyebutnya dengan kaum agamawan, bukan langsung menunjuk pihak gereja karena faktanya memang begitu?

Answer: Benar Tanya, pak De memang sengaja menggunakan sebutan kaum agamawan karena semua agama berpotensi untuk disalahgunakan seperti itu. Berapa orang yang menderita akibat tafsir agama di Afganistan, Pakistan, India, bahkan di Indonesia sendiri? Di abad 21 ini, masih ada komunitas manusia yang hidup didalam jaman kegelapan. Hanya dengan dalih menjalankan perang suci dan iming-iming kenikmatan surga, seseorang rela meledakkan dirinya sendiri di tengah kerumunan orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau memang benar keyakinan seperti itu dijalankan dengan teguh, maka mestinya tidak ada pemimpin “perang suci” yang bersembunyi menghindari kematian oleh musuh, karena hal itu hanya akan menunda untuk mendapat jatah kenikmatan di surga. Faktanya masih banyak orang bodoh yang mau tunduk pada omongan para pemimpin “perang suci.”

Ringkasnya, liberalisme atau paham liberal itu adalah suatu pandangan yang meyakini bahwa warga negara memiliki hak dan kebebasan asasi yang memiliki signifikansi politik mendasar. Hak dan kebebasan ini merupakan landasan dalam pengertian sebagai prakondisi untuk menggapai nilai-nilai sosial lainnya, seperti efisiensi ekonomi, kesejahteraan umum, dan mengurangi tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak ada dari hak dan kebebasan tersebut yang mutlak, tetapi alasan untuk membatasinya

adalah untuk melindungi hak dan kebebasan lain serta mempertahankan landasan yang diperlukan bagi penggunaan yang efektif. Sebuah fitur integral dari konstitusi liberal adalah perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan kebebasan sipil dan status yang sama bagi semua warga negara. Sebagai generalisasi kasar, liberal berkepentingan untuk melindungi kebebasan individu terhadap kekuasaan negara dan kekuatan orang lain atau lembaga (Simon, 2002).

Pada awalnya, komitmen yang sangat kuat dari penganut liberalisme terhadap kebebasan dan otonomi individual membuat kaum liberal tersebut egaliter dalam mendukung persamaan hak bagi semua warga negara. Ingat, yang dihadapi saat itu adalah masyarakat feodal yang sangat berjenjang. Ketika kaum liberal melawan tatanan masyarakat feodal yang berjenjang tersebut dan mendorong terbentuknya masyarakat yang egaliter, maka muncul istilah sayap kiri untuk kaum yang memperjuangkan masyarakat egaliter dan sayap kanan untuk kaum yang menghendaki terpeliharanya masyarakat yang berjenjang.

Pendukung sayap kanan mengklaim bahwa hubungan sosial yang berjenjang adalah esensial bagi masyarakat yang baik. Para individu membutuhkan perbedaan status untuk membedakan diri mereka dari yang lain. Masyarakat yang kurang berjenjang akan gagal untuk memberikan insentif bagi warganya untuk menggapai prestasi yang tinggi, yang menghasilkan kelemahan yang mencekik dan menarik seluruh masyarakat dalam kemandegan ekonomi, kebodohan, dan kemalasan. Pendukung sayap kanan juga membela hirarki sebagai esensial untuk mengorganisasi proses sosial yang kompleks yang diperlukan untuk mempertahankan kemakmuran dan keteraturan.

Pendukung sayap kiri mengklaim bahwa perkembangan manusia berjalan pesat bila orang terlibat dalam hubungan kooperatif yang saling menghormati yang dapat bersemi hanya bila perbedaan yang berlebihan dalam status, kekuasaan, dan kekayaan dihilangkan. Pendukung sayap kiri berpendapat bahwa suatu masyarakat tanpa persamaan yang mendasar akan mendistorsi perkembangan dari orang yang kurang beruntung dan juga kelompok yang privileginya melemahkan motivasi dan rasa tanggung jawab sosialnya. Penghambatan perkembangan manusia ini, bersama dengan kebencian dan konflik yang diciptakan oleh perbedaan kelas yang tajam, pada akhirnya akan mengurangi efisiensi ekonomi.

Dikotomi kanan kiri sering dipandang sebagai sinonim bagi dikotomi konservatif liberal. Disamping pertentangan atas hirarki dan persamaan, masing-masing pendukung sayap kanan dan sayap kiri mengalami pemisahan atas pertanyaan: haruskah kepentingan pribadi didahulukan dibandingkan kepentingan masyarakat? Penganut paham individualisme membela prioritas kepentingan perseorangan, sementara penganut komunitarian lebih mendahulukan kepentingan masyarakat.

Penganut paham individualisme mengklaim bahwa suatu komunitas tidak mempunyai kepentingan lain daripada agregasi kepentingan individual di dalamnya. Selanjutnya, pengertian kepentingan umum atau kebaikan bersama adalah sebuah mitos; komunitas yang baik adalah komunitas yang mengizinkan individual untuk menggapai kepentingan pribadi secara bebas. Penganut individualisme tidak secara langsung peduli dengan kemakmuran dari komunitas karena mereka tetap percaya bahwa setiap komunitas yang mengamankan kebebasan individual akan menjadi makmur oleh energi dan bakat dari warganya. Bagi penganut individualisme, kebebasan bermakna hak untuk menggapai kepentingan pribadi dengan sedikit kendala dari masyarakat.

Sebaliknya, penganut komunitarian memandang perkembangan manusia merupakan fungsi dari kualitas lingkungan sosial dan selanjutnya mengharapkan komunitas untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mengasuh. Bila dibiarkan, individual akan kurang berdaya dalam menghadapi tekanan sosial yang di luar kendalinya, tetapi komunitas secara keseluruhan dapat secara sadar terlibat dalam tindakan untuk memfasilitasi perkembangan kependingan individu dan membentuk karakter individu.

Debat antara penganut individualisme dan komunitarianisme berlangsung pada kedua sayap, kanan dan kiri, spektrum politik, yang menghasilkan empat perspektif dalam ekonomi politik, yakni Liberal Klasik (hirarki - individual), Liberal Modern (persamaan - individual), Konservatif (hirarki - komunitas), dan Radikal (persamaan - komunitas) (Clark, 1998). Tabel 2.1 memperlihatkan berbanding beberapa ciri antara Liberal Klasik dan Liberal Modern.

3. **Tanya:** Lha apa yang salah dengan paham liberal pak De kalau maknanya seperti itu?

Answer: Yang salah ya sikapmu yang tercermin dari pertanyaanmu

Tabel 2.1: Perbandingan Liberalisme Klasik dan Liberalisme Modern (Clark, 1998)

Penciri	Liberalisme Klasik	Liberalisme Modern
Sifat manusia	Manusia memiliki kepentingan pribadi dan mampu bertindak secara otonom dengan menggunakan kemampuannya untuk beralasan untuk menemukan cara yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.	Manusia mampu membuat pilihan rasional, tetapi lingkungan sosial mereka secara nyata membentuk tujuan mereka.
Masyarakat	Agregasi individu dan tidak memiliki tujuannya sendiri.	Agregasi individual dengan kepentingan pribadi dan kolektif.
Pemerintah	Para individu menciptakan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak para individu tersebut.	Melindungi hak tanpa berpihak dan bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif yang tidak mungkin dicapai secara individu.
Moralitas	Tidak mungkin membandingkan nilai secara obyektif.	Nilai adalah subyektif dan oleh karenanya relatif.
Kebebasan	Tiada paksaan dari pemerintah atau orang lain.	Dalam arti negatif, kebebasan adalah tiadanya paksaan atau kendala yang diterapkan oleh pihak lain atau pemerintah. Dalam arti positif, kebebasan adalah kemampuan untuk memperjuangkan tujuan.
Otoritas	Otoritas yang legitimate lahir hanya melalui persetujuan individu.	Otoritas yang legitimate ada bila kekuasaan digunakan demi kepentingan publik.
Persamaan	Kesamaan bermakna bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan hak sipil yang sama sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.	Persamaan dalam kesempatan dan persamaan di muka hukum merupakan dua komponen persamaan sosial.
Keadilan	Keadilan membutuhkan perlindungan terhadap hak milik dan hak sipil sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi dan hukuman bagi mereka yang melanggar hak orang lain.	Keadilan tercapai bila hak asasi manusia dan hak milik terjaga.
Efisiensi	Efisiensi merupakan suatu situasi dimana tidak seorangpun dapat diuntungkan tanpa membuat orang lain dirugikan.	Efisiensi bermakna memaksimalkan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi.

itu Tanya. Kamu ini terlalu mudah dan terlalu cepat melihat segala sesuatu dari kacamata salah benar. Liberalisme itu tidak beda dengan rawon pedas. Apa yang salah dengan rawon pedas? Ya tidak ada yang salah, bahkan ketika rawon pedas itu kamu gunakan untuk cuci muka sehingga mukamu seperti terbakar sekalipun. Bukan rawonnya yang salah, tetapi cara kamu memperlakukan rawon itu yang kurang pada tempatnya. Jangan terlalu mudah kagum atau sikap sebaliknya terhadap apa saja.

4. **Tanya:** Maaf pak De, Tanya jadi agak impulsif karena sering melihat orang demo anti ini dan anti itu tetapi sepertinya mereka belum paham apa yang diantainya itu. Sebaliknya juga banyak yang demo dukung ini dan dukung itu tetapi juga tidak paham apa yang sedang didukungnya. Sudah demonya bikin macet jalanan, tetapi mereka sendiri tidak paham tentang apa yang ditentang atau dibelanya. Sudah begitu sering menyalahkan atau bahkan memberi stigma bahwa pihak lain salah atau sesat. Ini kan menjengkelkan pak De?

Answer: Lha kalau mereka mampu berpikir seperti kamu ya tidak jadi demo dong Tanya. Gunakan akal budimu untuk mampu menggapai setiap poros pergolakan, maka niscaya kamu tidak ikut terbawa oleh pusaran itu.

5. **Tanya:** Pak De, bukankah sebenarnya gerakan liberalisasi itu juga terjadi di tempat lain dan waktu yang berbeda? Bukankah kontrol oleh kaum aristokrat dan agamawan itu mirip dengan kontrol kaum Quraisy kaya atas kaum papa pada jaman jahiliyah?

Answer: Pak De senang sekali dengan pertanyaanmu ini. Pada hakikatnya ya seperti itu dan setiap nabi pada dasarnya adalah bapak pembaharuan atau bapak pembebasan dari aturan lama yang sudah usang dan dianggap menyimpang karena menindas kaum lemah yang seharusnya dilindungi. Hanya saja, orang Eropa itu memang mempunyai budaya tulis yang luar biasa. Semua peristiwa ditulis dan orang yang berjasa diberi kredit. Terkadang kreditnya agak berlebihan, misalnya Benua Australia diklaim ditemukan oleh Kapten James Cook padahal jelas disana sudah ada penduduknya yang memulai peradaban di Benua Australia mungkin ribuan tahun sebelum kedatangan James Cook tadi. Apa ada catatan siapa orang Aborigin pertama yang menemukan orang kulit putih yang nyasar di Benua Australia? Pak De sangat yakin bahwa sebelum James Cook sampai di Benua Australia, orang Nusa Tenggara Timur sudah ada yang berenang pulang pergi dari Kupang ke Darwain sana, tetapi masalahnya tidak dicatat dan diberi kredit.

2.2 Individualisme

1. **Tanya:** Ya pak De, mohon pak De berkenan menjelaskan individualisme dan apa ada hubungannya dengan liberalisme.

Answer: Liberalisme sebagai filosofi politik dan moral berpusat pada dua prinsip - yakni individualisme dan kebebasan. Liberalisme menempatkan individual di pusat dari masyarakat dan berpandangan bahwa tatanan sosial bernilai paling tinggi adalah tatanan yang dibangun seputar individual. Tujuan dari masyarakat adalah memberi kesempatan kepada individual untuk mencapai potensi penuhnya jika mereka mau, dan jalan terbaik untuk melakukan ini adalah memberi kebebasan sebesar mungkin kepada individual. Dua prinsip kunci ini merupakan landasan dari berbagai unsur liberalisme mekar.

Individualisme menghargai individualitas dan karena itu individualisme mencakup sejumlah keyakinan. Satu keyakinan disampaikan oleh John Locke adalah bahwa individual mempunyai beberapa hak hanya karena mereka manusia dan bahwa hak-hak tersebut berada di atas diskresi negara dan ada mendahului politik. Liberal klasik memandang hak-hak tersebut secara formal atau legal. Yakni, hak-hak harus negatif dalam pengertian bahwa negara tidak seharusnya mencampuri hak-hak tersebut, dan tidak positif dalam arti bahwa pemerintah harus menyediakan sesuatu (kesejahteraan misalnya). Tetapi, hak-hak ini tunduk pada prinsip menyakiti yang menyatakan bahwa individual harus dibiarkan untuk melakukan apapun yang dimau sepanjang mereka tidak menyakiti orang lain.

Pengertian menyakiti adalah kontroversial, tetapi sebagai prinsip teori hal ini berimplikasi ada peran legitimate bagi negara untuk melindungi individu dari sesamanya. Kepercayaan yang lain adalah bahwa individual adalah mempunyai kepentingan pribadi dan merupakan pihak yang paling tahu apa kepentingan mereka. Hal ini berakibat bahwa individual harus dibiarkan tidak terganggu dalam membuat keputusan untuk memaksimalkan utilitas dan bahwa setiap keputusan yang dipaksakan oleh pemerintah hanya akan membuat individu tersebut lebih buruk.

2.3 Kapitalisme

1. **Tanya:** Kapitalisme pak De? Kesannya itu kapitalisme itu jahat, gangrang, dan sangat eksploitatif, baik terhadap kaum buruh maupun terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Sangat menyeramkanlah pak De. Apa benar seperti itu? Atau kesan tersebut timbul karena

propaganda dari pihak yang anti kapitalisme apapun alasannya? Bagaimana penjelasan yang lebih obyektifnya pak De?

Answer: Wah pak De tidak menjamin apakah penjelasan pak De ini cukup obyektif seperti yang kamu harapkan atau malah sangat bias. Bagaimanapun juga pak De ini adalah subyek yang memiliki preferensi dan latar belakang sejarah. Bukan hal mudah mendefinisikan pengertian kapitalisme karena meliputi beberapa dimensi. Preferensi politik biasanya juga mempengaruhi rumusan definisi kapitalisme. Pak De tidak ingin terlibat dalam perdebatan definisi ini. Apapun definisinya, beberapa aspek harus tercakup di dalam definisi tersebut yaitu: (1) suatu ideologi ekonomi dengan preferensi normatif terhadap kepemilikan pribadi dan delegasi keputusan produksi kepada individual, (2) kelembagaan pola hubungan pertukaran tertentu yang berbasis pasar, (3) struktur legal yang menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi. Secara garis besar kapitalisme dapat dirumuskan sebagai suatu sistem sosial ekonomi dimana keputusan produksi, konsumsi, dan pertukaran sukarela (apa, berapa, dan bagaimana) diserahkan kepada individu yang memperjuangkan kepentingan pribadinya dengan menggunakan sumberdaya miliknya dalam perlindungan negara.

Bagaimana mempelajari perilaku pelaku ekonomi dalam sistem seperti itu? Siapapun boleh mengembangkan teori apapun karena pada akhirnya kesesuaian teori tersebut akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menjelaskan fenomena dan membuat prediksi apa yang akan terjadi. Teori ekonomi yang dianggap prokapitalisme adalah pemikiran ekonomi Austria dan pemikiran ekonomi klasik yang setelah ditambah dengan ajaran utilitas marginal dan keseimbangan umum berkembang menjadi neoklasik (Reisman, 1998). Ajaran utilitas marginal merupakan inti teori nilai yang selanjutnya menggusur teori nilai dari buruh yang banyak dianut oleh pendukung teori klasik. Karena teori ekonomi neoklasik ini menjadi arus utama pengajaran ekonomi di negara-negara kapitalis besar, tidak mengherankan bila masyarakat umum mengasosiasikan kapitalisme dengan teori ekonomi neoklasik (Putterman, 1982). Sebenarnya, kurang tepat untuk menganggap bahwa ekonomi neoklasik merepresentasikan sepenuhnya sembarang tipe ekonomi kapitalis atau pasar (Hodgson, 1996). Menurutny, kapitalisme Anglo-American berbeda dengan kapitalisme Jepang misalnya.

Screpanti (1999) menggunakan konsep Property Rights Regime (PRR),

yang terdiri dari milik pribadi yang terkonsentrasi (*concentrated private property*), milik pribadi yang tersebar (*diffused private property*), milik negara (*state property*), dan Accumulation Governance Structure (AGS), yang terdiri dari jaringan dan hirarki, dalam mengklasifikasikan beberapa kasus kapitalisme nyata dan beberapa bentuk idealnya (cetak tebal pada Tabel 2.2). Adapun deskripsi dari PRR adalah sebagai berikut:

- (a) Milik pribadi yang terkonsentrasi. Dalam regim ini, kekayaan terkonsentrasi di tangan individu dari kelas tertentu (borjuis), sementara individu dari kelas pekerja tidak memiliki kekayaan. Distribusi kekayaan menciptakan kondisi bagi eksploitasi kaum proletar sebagai pekerja upahan yang tunduk pada perintah pemilik alat produksi.
- (b) Milik pribadi yang tersebar. Regim ini berlangsung dalam kapitalisme kontemporer, khususnya di negara maju. Meskipun kapital masih sangat terkonsentrasi, massa orang dalam jumlah besar yang terus berkembang mendapatkan akses kepada kekayaan baik secara langsung, sebagai penabung yang memiliki andil dalam perusahaan saham gabungan, dan secara tidak langsung, sebagai investor atau penerima manfaat dari berbagai jenis lembaga keuangan, dana investasi, dana pensiun, rencana pemilikan saham pekerja, dan sebagainya.
- (c) Milik negara. Regim ini menarik difusi pemilikan hingga ekstrim, karena kekayaan yang dimiliki secara publik merupakan, secara legal, milik dari seluruh warga negara. Secara legal semua warga negara merupakan pemegang saham yang sama pentingnya, karena dalam sistem ini prinsip 'satu kepala satu suara' menggantikan aturan 'satu rupiah satu suara.' Regim seperti ini tidak harus sosialis. Selama kendali tidak di tangan pekerja dan keputusan diambil dengan tujuan mengakumulasi kapital maka regim seperti itu berkepentingan dengan sistem kapitalisme.

Sedangkan deskripsi dari AGS adalah sebagai berikut:

- (a) Jaringan ekonomi merupakan sistem kelembagaan yang mengatur pasar. Semua aktor sosial merupakan subyek bebas yang dibekali dengan kebebasan kontraktual, dan berinteraksi satu dengan yang lain melalui hubungan pertukaran. Mekanisme disiplin, selektif dan keuangan bekerja melalui persaingan pasar.

Tabel 2.2: Bentuk Kelembagaan Kapitalisme (Screpanti, 1999)

		Property Rights Regime		
		Terkonsentrasi	Tersebar	Negara
Accumulation Governance Structure	Pasar Barang	Revolusi Industri, Kapitalism klasik		Yugoslavia
	Pasar Perusahaan		UK & USA, Kapital- isme korporasi berorientasi pasar	
	Hirarki Eksternal		Jerman & Jepang Kapitalisme korporasi berorientasi bank	Mantan Uni Soviet
	Hirarki Internal	Semua yang di atas	Semua yang di atas	Semua yang di atas

- (b) Hirarki ekonomi merupakan sistem kelembagaan yang mengatur organisasi ekonomi. Mekanisme disiplin, selektif dan keuangan bekerja melalui persaingan organisasi. Aktor sosial terhubung satu dengan yang lain oleh ikatan formal subordinasi dan berinteraksi melalui hubungan komando. Suatu ikatan formal subordinasi merupakan suatu hubungan yang diatur oleh suatu lembaga (hukum, regulasi, kontrak) dimana aktor terdominasi mempunyai kewajiban untuk mengeksekusi keputusan yang diambil oleh aktor lain yang mendominasi.

Di pihak lain, ada hirarki internal - struktur hubungan yang mengikat anggota organisasi - dan hirarki eksternal - struktur relasi kekuasaan dan subordinasi antara organisasi. Suatu hirarki internal merupakan syarat keharusan bagi ekstraksi nilai surplus dalam proses produksi dari segala bentuk kapitalisme. Ini merupakan struktur dasar dari kapitalisme. Mekanisme disiplin berdasarkan pada kompetisi organisasi bekerja lebih baik bila per-

usaha merupakan bagian dari hirarki eksternal badan usaha. Model seperti ini yang berkembang di Jepang dan Jerman dalam sistem kontrol bank. Perusahaan milik kelompok korporasi diorganisasi dalam struktur hirarki dimana kepemilikan saham minoritas, belenggu hutang, ketergantungan teknologi, aturan hukum dan kebiasaan, dan berbagai jenis lain susunan kelembagaan dipakai untuk memungkinkan korporasi besar mengawasi, memantau, dan mendisiplinkan perusahaan kecil. Kelompok perusahaan ini biasanya dipimpin oleh sebuah 'bank utama', yang memiliki dan menguasai, secara langsung atau tidak langsung, saham minoritas yang kecil tetapi efektif di semua perusahaan lainnya.

2. **Tanya:** Pak De, katanya Uni Soviet dahulu menganut paham sosialisme, mengapa masuk sebagai salah satu bentuk kapitalisme juga?

Answer: Lha membahas kapitalisme pasti fokusnya pada kapital sebagai alat produksi yang membangkitkan kapital baru. Fokus si pembahas kapitalisme itu pada kapital dan dia mengikuti kemana kapital itu mengalir dan siapa yang menguasai. Pihak yang dapat menguasai kapital itu ya swasta atau pemerintah sebagai wakil negara. Ketika yang menguasai kapital tersebut adalah pemerintah, maka disebutlah sebagai *state capitalisme*. Dahulu ketika instrumen investasi belum berkembang seperti sekarang, penguasaan kapital oleh swasta itu umumnya mengumpul pada sangat sedikit orang, misalnya para tuan tanah. Ketika itu, anggota masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pemilik modal dan pemilik tenaga buruh saja. Kaum pemilik modal mengeksploitasi kaum pekerja, terlebih lagi setelah revolusi industri. Distribusi kekayaan menjadi sangat timpang yang akhirnya menimbulkan kemarahan sosial. Sekarang, ketika instrumen investasi sudah sangat berkembang, kaum buruh yang memiliki kelebihan nilai dapat menginvestasikan kelebihan nilainya tersebut dalam berbagai jenis instrumen investasi yang tersedia. Artinya, kaum pekerja tersebut disamping menguasai memiliki tenaga buruhnya juga memiliki kapital. Jadi, pendapatan kaum pekerja berasal dari tenaga buruhnya dan hasil dari kapital yang diinvestasikannya.

3. **Tanya:** Kok jadinya seperti dagelan juga ya pak De? Mengapa state capitalism yang berusaha untuk mengoreksi bentuk kapitalisme sebelumnya justru rontok lebih dahulu?

Answer: Hidup di dunia ini kalau tidak sambil dagelan bisa stress

berat kamu nanti. Yang namanya manusia itu makhluk yang sangat kompleks Tanya. Ketika kapital itu dikuasai oleh negara, maka siapa sesungguhnya yang menguasainya. Secara teoritis memang benar bahwa kapital tersebut milik seluruh warga negara. Di antara sesama warga negara ternyata ada yang lebih berkuasa. Peringatan keras bagi kita bahwa yang namanya kuasa atau milik itu “nggendhong lali” - makna sederhananya adalah bahwa kekuasaan atau keinginan itu selalu diiringi rasa lupa. Ketika belum berkuasa janjinya selangit, tetapi semua menguap ketika kekuasaan telah digenggamnya. Dari sisi rakyat biasa, ternyata kemerdekaan jiwa itu lebih berharga ketimbang soal materi yang berkaitan dengan kapital tadi. Apalagi kemakmuran materi yang dijanjikan tidak kunjung tiba sementara keterkekangan jiwa sudah tidak tertanggungkan. Itulah yang terjadi di beberapa negara yang menganut *state capitalism*.

2.4 Pasar Bebas

1. **Tanya:** Lha kalau pasar bebas itu maksudnya apa pak De? Pasar bebas dianggap sebagai penimbul bencana oleh banyak pihak, khususnya para elit politik yang peduli atau pura-pura peduli terhadap nasib rakyat yang dianggap akan kalah bersaing. Ketakutan terhadap pasar dan perdagangan bebas ini melanda setiap negara, baik negara maju maupun negara terbelakang. Pekerja di negara maju ketakutan karena upah buruh di negara terbelakang jauh lebih murah sehingga produknya akan menjadi lebih kompetitif. Sebaliknya, masyarakat di negara terbelakang ketakutan karena menganggap produksi di negara maju yang didukung oleh teknologi canggih dan modal kuat akan lebih efisien sehingga produknya akan lebih kompetitif. Oleh karena itu, dalam setiap sidang WTO dan pertemuan puncak yang membicarakan perdagangan besar selalu disemarakkan oleh demo yang pesertanya datang dari negara maju maupun negara terbelakang.

Menurut Tanya nih pak De, kebingungan semakin menjadi-jadi ketika para politisi ikut nimbrung menentang pasar dan perdagangan bebas untuk mendapat simpati rakyat. Argumen para politisi tersebut ada yang agak masuk akal, tetapi umumnya sangat ngawur. Bahkan politisi yang berlatar belakang pendidikan ekonomipun tidak segan-segan untuk menyebarkan kengawuran sekedar untuk mendapatkan simpa-

ti rakyat dan dapat terpilih menjadi pejabat.

Answer: Tidak setuju dengan pasar bebas dan perdagangan bebas merupakan hak dari masing-masing orang. Sebelum kita setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, sebaiknya kita perlu mengetahui dengan benar apa sesungguhnya sesuatu yang akan kita setujui atau tidak kita setujui tersebut. Mengapa perdagangan penting bagi kehidupan manusia? Apa sebenarnya manfaat dari perdagangan? Marilah kita urai isu penting ini secara perlahan.

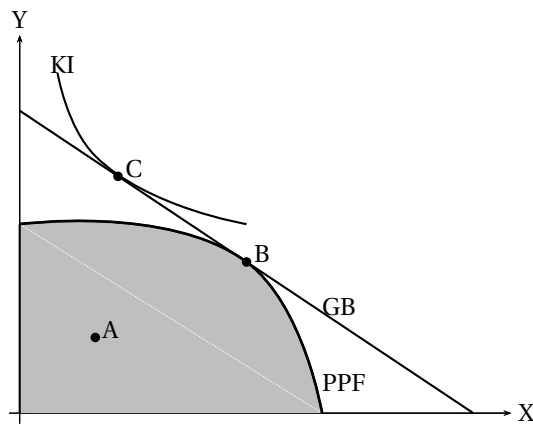
Mari kita bayangkan dunia tanpa perdagangan sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka setiap orang harus memproduksi semua kebutuhannya tersebut secara swasembada. Karena makan beras maka dia harus menanam padi sendiri. Karena butuh garam maka dia harus membuat garam sendiri. Bila ingin bepergian ke pulau lain maka dia harus membuat perahu atau kapal sendiri. Jika ada seseorang yang mampu melakukan swasembada penuh maka kemampuan orang tersebut melebihi kemampuan konglomerat yang dibenci oleh para penentang pasar dan perdagangan bebas. Kondisi yang lebih mungkin adalah semua orang akan mengalami keterbatasan yang luar biasa. Tidak ada orang yang akan menekuni ilmu pengobatan karena waktunya habis untuk kegiatan lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat yang paling primitifpun perdagangan telah terjadi, meskipun transaksi dilakukan dalam bentuk barter. Jadi, dunia tanpa perdagangan atau pertukaran barang dan jasa sama sekali merupakan dunia yang tidak mungkin.

Karena dunia tanpa perdagangan sama sekali adalah dunia yang tidak mungkin, maka pilihannya tinggal satu yakni dunia dengan perdagangan. Dengan adanya perdagangan maka orang yang tidak pandai membuat cangkul tetapi membutuhkan cangkul tidak perlu harus membuat cangkul sendiri. Dia cukup menggunakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk memproduksi barang atau jasa yang paling sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Barang atau jasa ini kemudian ditukarkan dengan cangkul yang dibuat oleh orang yang memang ahli membuat cangkul. Adanya perdagangan, setiap orang mempunyai kesempatan untuk memilih profesi yang paling sesuai dengan dirinya. Inilah spesialisasi. Dengan spesialisasi tersebut maka setiap barang dan jasa akan diproduksi dengan cara yang paling efisien. Dengan kata lain, setiap barang dan jasa diproduksi dengan cara yang paling murah.

Dari sisi produsennya, karena dia bekerja pada bidang yang paling efisien maka nilai yang dihasilkan oleh sumberdaya yang dimilikinya tentu saja lebih tinggi dibanding ketika dia terpaksa harus melakukan hal lain yang kurang sesuai dengan keahliannya. Karena nilai produksinya dengan spesialisasi lebih tinggi dibanding nilai produksi tanpa spesialisasi, maka setiap orang dapat mengkonsumsi lebih banyak daripada apa yang dapat dikonsumsi bila perdagangan tidak ada. Dengan kata lain, perdagangan memungkinkan seseorang untuk mengkonsumsi lebih daripada apa yang dapat dikonsumsi bila dia melakukan segalanya secara swasembada. Karena dapat mengkonsumsi lebih banyak, maka secara teoritis dia menjadi lebih sejahtera. Tambahan kesejahteraan yang timbul dari perdagangan ini disebut dengan *gain from trade*.

Secara grafis dengan bantuan Gambar 2.1, uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut (Dunn, Jr & Mutti, 2003). Kita anggap setiap orang hanya mengkonsumsi dua jenis barang, yakni X dan Y. Kita ambil satu orang sebagai model. Dalam keadaan swasembada tanpa perdagangan, satu orang model ini akan memproduksi sendiri barang X dan Y. Hubungan antara jumlah X dan jumlah Y maksimum yang diproduksi dengan seluruh sumberdaya yang dimilikinya dapat digambarkan dalam bentuk kurva PPF, sebagai kependekatan dari *Production Possibilities Frontier*. Bila dia hanya memproduksi pada titik A, maka ada sumberdaya yang tidak digunakan. Bila hal seperti ini terjadi, maka kondisi tersebut dikatakan tidak efisien karena ada sumberdaya yang dibiarkan mubazir. Jumlah X dan Y maksimum yang dapat diproduksi - tidak ada lagi sumberdaya yang mubazir - dan oleh karena dapat dikonsumsi harus berada pada kurva PPF. Misalnya titik B.

Tanpa perdagangan, seseorang dalam model tersebut dapat mengonsumsi sebatas daerah yang dibatasi oleh kurva PPF. Dengan kata lain, konsumsi pada titik C yang memberikan kesejahteraan lebih tinggi tidak mungkin dapat dijangkaunya karena sudah berada di luar daerah yang dibatasi oleh kurva PPF. Namun, perdagangan memungkinkan orang model tersebut mengkonsumsi pada titik C meskipun dia memproduksi pada titik B. Katakanlah harga X dan Y sedemikian rupa sehingga titik B dilalui oleh kurva yang disebut dengan kurva budget (GB). Semua kombinasi X dan Y yang berada pada dan di sebelah kiri (atau bawah) kurva budget dapat dijangkau oleh orang model tersebut.



Gambar 2.1: Ekonomi Swasembada versus Ekonomi dengan Perdagangan

Perhatikan, ada daerah yang berada di sebelah kiri kurva budget tetapi tidak termasuk dalam wilayah yang dibatasi oleh kurva PPF.

Titik C yang berada di luar kurva PPF - artinya tidak dapat dijangkau dalam kondisi swasembada - menjadi terjangkau dengan adanya perdagangan karena masih berada tepat pada kurva budget. Dengan memproduksi pada titik B, orang model dapat menjangkau titik C dengan cara menjual kelebihan produksi X-nya untuk membeli kekurangan barang Y yang diproduksi oleh orang lain.

Model perdagangan di atas dapat diperluas. Bila orang dalam model diganti dengan kecamatan, maka akan terjadi perdagangan antar kecamatan. Bila orang diganti dengan pulau, maka akan terjadi perdagangan antar pulau. Bila orang model diganti dengan negara, maka akan terjadi perdagangan antar negara atau lebih kerennya perdagangan internasional atau lazim dikenal dengan impor-ekspor. Anda dapat mulai membayangkan apa yang akan terjadi bila perdagangan antar pulau di negara kita dilarang atau dikendalikan dengan ketat sebagai wujud untuk mencegah terjadinya perdagangan bebas?

Tentu saja politisi sontoloyo yang kurang bekal pengetahuan tidak kurang akal untuk mencari dukungan dari orang lain yang sama tidak mengertinya tentang perdagangan. Disebutkanlah bahwa banyak ne-

gara maju juga memberi subsidi kepada produsen dalam negerinya dan memberlakukan tarif impor yang tinggi bagi produk asing. Praktek seperti itu menunjukkan bahwa perdagangan bebas hanyalah sebuah konsep yang menyesatkan dan oleh karena itu kita punya alasan yang legitimate untuk menghambat terjadinya perdagangan bebas.

Sudah disinggung sebelumnya bahwa perdagangan bebas itu juga banyak mendapat tantangan di negara maju sendiri. Believe it or not, banyak politisi negara maju yang juga berpikiran sontoloyo nan tak paham dengan perdagangan bebas. Sialnya, politisi seperti itu yang sering dijadikan rujukan politisi kita ketika berbicara tentang hal yang tidak dipahaminya.

Lalu apa itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan istilah ringkas bagi suatu susunan pertukaran yang berlangsung di masyarakat. Setiap pertukaran dilaksanakan sebagai kesepakatan sukarela antara dua individu atau antara dua kelompok individu yang diwakili oleh agen-agen. Kata kunci disini adalah "sukarela." Kedua individu tersebut mempertukarkan dua barang ekonomi, baik barang yang dapat dengan mudah dilihat atau jasa yang tidak tampak wujud fisiknya.

Alasan kedua pihak melakukan pertukaran atau perdagangan adalah karena masing-masing pihak mengharapkan mendapatkan manfaat dari pertukaran tersebut. Pertukaran tersebut akan diulangi lagi bila kedua belah pihak merasakan manfaatnya dari pengalaman pertukaran yang pernah terjadi. Bila salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan maka pertukaran antara kedua individu tersebut tidak akan pernah diulang. Dalam bahasa keseharian kita mengenal kata langganan. Untuk suatu jenis barang, kita lebih sering melakukan pertukaran dengan langganan kita ketimbang dengan orang lain yang bukan langganan kita. Apakah kamu menginginkan agar mempunyai langganan itu dilarang? Jika kamu tidak menginginkan ada larangan, maka sesungguhnya kamu adalah penganut pasar bebas.

Prinsip yang sederhana di atas sering ditangkap salah atau dengan sengaja diplintir oleh banyak pihak yang mengatas namakan rakyat bahwa perdagangan bebas merugikan pihak yang lemah. Para "pembela" kaum lemah tersebut menggunakan kacamata merkantilis dalam melihat perdagangan bebas. Pandangan kaum merkantilis yang populer di abad 16 mempercayai bahwa dalam setiap pertukaran, satu pihak memperoleh keuntungan atas kerugian yang ditanggung oleh pihak lain. Mereka percaya bahwa dalam setiap transaksi pasti ada

yang mengeksploitasi dan ada yang dieksploitasi. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ketika membeli rujak di warung langganan kamu, kamu atau pemilik warung merasa dieksploitasi? Apakah kamu menginginkan perlunya surat ijin dari kecamatan sebelum membeli rujak agar kedua belah pihak terlindungi? Jika kamu tidak setuju perlunya surat ijin, maka kamu adalah penganut pasar bebas.

Faktor krusial dari pasar adalah pertukaran hak kepemilikan. Ketika seseorang membeli jeruk satu kilogram seharga 10 ribu rupiah, maka apa yang sesungguhnya dia lakukan adalah bahwa dia memberikan kepemilikan 10 ribu rupiah kepada penjual jeruk dan sebagai imbalannya penjual jeruk memberikan kepemilikan satu kilogram jeruk kepada pembeli tersebut. Kedua belah pihak bertukar hak kepemilikan.

Mengingat pertukaran yang terjadi sebenarnya adalah pertukaran hak kepemilikan, maka kehadiran dan perkembangan pasar bebas akan terjadi dalam masyarakat yang mengenal hak kepemilikan kekayaan pribadi dan hak tersebut dihormati, dipertahankan, dan diamankan. Tanpa hak kepemilikan kekayaan pribadi, maka tidak mungkin ada pertukaran. Barang yang tidak mungkin dibebani dengan hak kepemilikan tidak mungkin dapat dipertukarkan dan oleh karena itu tidak ada pasarnya - bahkan di negara yang menganut sistem pasar bebas dengan sangat fanatik. Tidak ada pemerintah yang mampu memberikan hak kepemilikan sinar matahari kepada seseorang sampai kapanpun. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi bahwa tidak mungkin akan pernah ada pertukaran sinar matahari dengan jenis barang lain.

Kamu mungkin ingat dengan pengalaman petani cengkeh dan jeruk. Dengan berbagai alasan yang "indah" yang dibuat oleh pemerintah, petani cengkeh diwajibkan menjual cengkeh hasil panennya kepada suatu badan tunggal - BPPC namanya. Dalam hal jeruk, petani jeruk di Kalimantan Barat diwajibkan menjual jeruk hasil panennya kepada badan tunggal TATA NIAGA JERUK. Hasilnya kita semua telah mengetahui, yakni kehancuran tanaman dan sekaligus petani cengkeh dan jeruk di Kalimantan Barat. Bukan hanya produsen yang dirugikan, konsumenpun menderita kerugian. Kita perlu waspada untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Pikiran dan syahwat mengatur masih tertanam di banyak orang yang seolah-olah membela kepentingan publik. Ketika seseorang berbicara serba indah dan menyenangkan, maka waspadalah karena hampir pasti dia seorang penipu.

Meskipun hak kepemilikan kekayaan diakui dan dihormati dalam sis-

tem pasar bebas, pemilikan pribadi secara penuh tanpa memberi ruang kepada pemilikan kolektif akan mengurangi atau bahkan menghilangkan manfaat kepemilikan pribadi. Pemilikan kolektif tetap diperlukan bahkan terhadap barang yang mempunyai ciri *private goods* sekalipun.¹ Sama seperti pemilikan kolektif murni yang tidak menghasilkan kinerja ekonomi yang baik, pemilikan *private* murni akan menghasilkan kemacetan. Berikut adalah argumen saya.

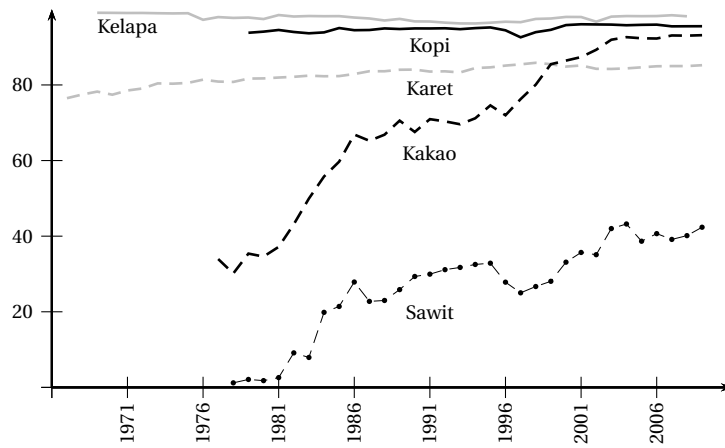
Mari kita bayangkan tentang tanah yang mempunyai ciri *private goods*. Orang dapat dieksklusi dari suatu petak tanah kita. Artinya, hanya orang tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dapat menggunakan tanah tersebut - ciri *excludability*. Ketika tanah tersebut digunakan, misalnya untuk rumah, maka orang lain tidak dapat menggunakan tanah tersebut - ciri *rivalry*. Apa yang terjadi bila tanah seluruh Pulau Jawa terbagi habis atas kepemilikan pribadi? Jalan dan prasarana angkutan lainnya tidak mungkin dapat dibangun dengan leluasa. Akibatnya, ekonomi akan mengalami kemacetan. Memang, mungkin saja jalan dibangun di atas tanah hak milik dan pengguna jalan harus membayar kepada pemilik tanah yang dilewati jalan tersebut. Tetapi menghadapi banyak pemilik tanah jelas bukan suatu proses yang mudah. Kita merasakan betapa sulitnya membebaskan tanah untuk membangun jalan tol di Pulau Jawa. Sebelum terlanjur rumit seperti di Pulau Jawa, daerah lainnya yang masih belum padat penduduk sebaiknya segera mengalokasikan tanah untuk kepentingan pembuatan jalan. Tentu saja, rencana pengembangan wilayah harus disusun terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju.

2. **Tanya:** Pak De, maafkan Tanya sebelumnya. Bagaimana jika pemain didalam pasar bebas tersebut tidak sama atau setara. Bukankah pihak yang kuat akan mengeksploitasi pihak yang lemah? Disinilah perlunya perlindungan dari pemerintah, karena konon pasar itu tidak mampu mengoreksi kelemahannya sendiri. Mungkin yang perlu dirumuskan itu seberapa jauh pemerintah dapat mengintervensi pasar.

Answer: Waduh, betapa bangganya pak De mempunyai keponakan seperti kamu Tanya. Kepedulianmu itu benar adanya. Pasar bebas yang kompetitif itu pada dasarnya hanya ada dalam model mental saja. Ke-

¹Berdasarkan ciri *excludability* dan *rivalry*, barang dapat dikelompokkan kedalam 4 golongan, yaitu *private goods*, *club goods*, *common pool resources*, dan *public goods*.

tidakseimbangan informasi juga terjadi. Pertukaran sukarela itu banyak diantaranya sebenarnya merupakan pertukaran yang terpaksa. Tetapi, langsung berpaling begitu saja kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah juga belum tentu merupakan pilihan yang bijaksana. Coba kamu perhatikan Gambar 2.2, sebagian besar perkebunan di Indonesia berskala kecil yang disebut dengan kebun rakyat, sementara itu hutan tanaman hampir 100% dikuasai perusahaan besar. Padahal, perkembangan perkebunan lebih banyak mengikuti mekanisme pasar, sedangkan perkembangan hutan tanaman sangat dikendalikan oleh pemerintah.



Gambar 2.2: Persentase Luas Kebun Milik Rakyat

3. **Tanya:** Wah, kalau keterlibatan pemerintah malah membuat ketimpangan seperti itu, lalu bagaimana mengatasinya? Ini kan jalan buntu pak De?

Answer: Lha kok kamu gampang menyerah begitu. Orang Eropa abad pertengahan juga menghadapi hal yang sama dan mereka melakukan transformasi sosial dengan paham liberalisme. Kalau kamu dan teman-temanmu tidak suka dengan liberalisme, maka kamu harus menemukan jalan yang lain. Tidak cukup hanya dengan mengeluh apalagi mengeluh seperti kerbau. Satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah memperkuat masyarakat madani, karena dengan begitu

masyarakat tidak mudah dipermainkan oleh pemerintah. Masyarakat harus diajak untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan. Kamu akan menghadapi kelompok yang menggunakan simbol-simbol primordial yang unggul selama masyarakat masih dilanda kegelapan.

4. **Tanya:** Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai terjadi perubahan pak De? Tanya membayangkan dua tiga generasi belum tentu selesai.

Answer: Ini perlombaan maraton Tanya. Kalau kamu ingin cepat-cepat menikmati hasilnya dalam kehidupanmu yang sekarang ini maka kemungkinan besar kamu akan kecewa. Godaan kenikmatan dunia itu luar biasa Tanya. Perjuangan ini membutuhkan keyakinan yang tuntas bahwa menanam kebaikan sekarang akan menghasilkan kebaikan di suatu saat nanti. Bagi yang tidak sabar dan mengang-gap berbuat kebaikan itu tidak ada gunanya, karena hasilnya tidak tampak dalam jangka pendek, maka ikut hanyutlah dia oleh godaan kenikmatan dunia ini.

2.5 Sosialisme

1. **Tanya:** Nah sebagai tandingannya pak De ... sosialisme. Ini kelihatannya merupakan suatu konsep yang penuh welas asih terhadap wong cilik dan kaum yang lemah. Tetapi terus terang pak De, ketika melihat nasib rakyat di negara yang mengaku dirinya sosialis ternyata juga tidak lebih baik dari nasib rakyat yang mengaku dirinya kapitalis. Bagaimana jelasnya pak De?

Answer: Dalam upaya mendefinisikan pengertian sosialisme, Martin (1911) berkonsultasi kepada beberapa profesor. Berikut ringkasannya. Mayoritas yang ditanya sepakat bahwa definisi sosialisme harus mencakup butir-butir berikut: 1) Pemilikan hampir semua alat-alat produksi oleh publik, 2) Operasi dari alat-alat tersebut dilakukan oleh pegawai pemerintah, 3) Distribusi income sesuai dengan aturan yang ditetapkan komunitas, 4) Pemilikan private dari income yang didistribusikan.

Sosialisme itu tandingannya kapitalisme atau individualisme? Memang benar, antara kapitalisme dan individualisme itu gampang sekali berteman, atau bahkan bersaudara. Sementara itu, sosialisme

kelihatannya selalu hadir dimanapun kapitalisme hadir, bukan untuk bekerjasama saling melengkapi tetapi lebih untuk saling mengusir satu terhadap yang lain. Disinilah barangkali salah satu kekeliruan manusia; pihak yang meyakini sosialisme cenderung anti kapitalisme dan sebaliknya.

Sosialisme merupakan teori dan praktek yang diarahkan kepada kepemilikan bersama dan penguasaan kekayaan barang dan jasa sosial secara kolektif. Dengan kata lain, kepemilikan pribadi tidak ada. Sosialis sejati memperjuangkan masyarakat yang benar-benar tanpa kelas, dimana pemerintah mengendalikan semua alat produksi dan distribusi barang. Penganut sosialis percaya bahwa kontrol pemerintah tersebut merupakan keharusan untuk menghilangkan kompetisi diantara warga negara dan menempatkan setiap orang pada tempat yang setara. Kompetisi yang didorong oleh “keserakahan” akan menghasilkan perbedaan, bahkan dapat menjurus kepada ketimpangan sosial dalam penguasaan kekayaan. Si kaya kemudian menindas si miskin.

Tujuan utama sosialisme adalah untuk menghapuskan perbedaan kelas dengan mengembalikan kendala industri kepada negara. Dengan cara ini diharapkan tercipta masyarakat tanpa kelas yang hidup harmonis, bebas dari penindasan, serta bebas dari instabilitas keuangan.

2. **Tanya:** Idenya kan sangat bagus pak De, tetapi mengapa kurang berhasil dan berkembang? Kan tidak mungkin rakyat kecil tidak menyukai sosialisme? Bagaimana penjelasannya pak De?

Answer: Sebab utama kegagalan sosialisme adalah inkonsistensi yang dikandungnya. Watak serakah yang ada dalam diri manusia itu sesuatu yang nyata. Watak ini tetap menempel ketika yang bersangkutan bertindak sebagai pengendali yang bertanggung jawab menghilangkan perbedaan kelas didalam masyarakat yang dikendalikannya. Apa yang terjadi kemudian adalah ada kelas masyarakat umum dan ada kelas penguasa yang tetap mempunyai watak serakah dan mempunyai kesempatan lebih luas untuk mengekspresikan keserakahannya. Dengan mudah kita dapat mengamati betapa mewah kehidupan penguasa di negara yang menganut paham sosialis, sementara rakyat umum hidup sangat kekurangan.

3. **Tanya:** Terus hubungan antara sosialisme dan Marxisme itu bagaimana?

Answer: Sosialisme sering dikaitkan secara menyesatkan dengan Marxisme karena sosialisme 50 tahun lebih dahulu dari Marxisme. Kata sosialisme mulai digunakan tahun 1820. Penggunaan dalam bahasa Inggris pertama kali terjadi di Inggris dalam kaitannya dengan lahirnya gerakan koperasi. Demikian pula, sosialisme juga lebih besar dan lebih beragam daripada Marxisme, karena penggunaannya mengacu kepada kisaran tempat yang lebih lebar daripada Eropa Barat, dimana Marxisme klasik berkembang dari Jerman. Bahkan kontradiksi dan konflik internal juga tidak jarang terjadi. Di awal penggunaannya, istilah sosialisme bersifat reaktif, tetapi sedikit menentang ide kapitalisme ketimbang ide individualisme. Ketika itu, sosialisme kurang dimengerti sebagai sistem sosial alternatif terhadap kapitalisme dan lebih sebagai perlawanan terhadap dampak merusak dari *laissez-faire* dan individualismenya.

Semua marxist pasti sosialis, tetapi tidak semua sosialis adalah marxist. Marxisme merupakan satu dari beberapa teori sosialisme yang revolusioner dan otoritarian. Ada juga sosialisme yang tidak revolusioner, seperti Fabianisme, dan ada pula sosialisme yang tidak otoritarian, seperti demokrasi sosial. Marxisme bersifat lebih teoritikal sementara sosialisme bersifat lebih praktikal. Perbedaan lainnya antara marxisme dan sosialisme adalah bahwa marxisme bersifat politis dalam konsep, sedangkan sosialisme lebih bersifat ekonomi dalam ideologi.

Menurut marxisme, siapapun yang mengendalikan alat produksi maka dia akan mengendalikan masyarakat dan menjadi kelas penguasa. Dalam masyarakat kapitalis kelas penguasa disebut borjuis, sementara kelas bukan penguasa disebut proletariat. Borjuis memiliki alat produksi (pabrik, bank, transportasi, komunikasi, dan sebagainya), sementara proletariat tidak memiliki alat produksi dan dipaksa menjual tenaganya kepada kaum borjuis untuk mempertahankan hidupnya. Untuk membalik keadaan, Marx mengambil posisi agar kaum proletar menggulingkan penguasa borjuis dan mendudukkan dirinya sebagai kelas penguasa. Marx juga percaya bahwa negara tidak lebih dari alat bagi dan dari kelas penguasa. Dari situlah muncul istilah kediktatoran. Bila kelas proletar mampu menjungkalkan penguasaan borjuis maka akan terbentuk negara yang diperintah oleh kaum mayoritas, yakni kelas proletar. Secara perlahan kelas borjuis akan hilang dan bila gerakan ini berkembang terus dari negara ke negara maka batas nega-

ra juga akan lebur, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat egaliter, tidak berklas, dan tanpa negara. Inilah komunisme.

2.6 Neoliberalisme

1. **Tanya:** Dalam media masa - cetak, televisi, radio - sering para pakar menghubungkan kondisi atau keputusan ekonomi yang tidak disukai dengan paham neoliberalisme. Inti dari argumen para pakar tersebut adalah bahwa pasar tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Atau sebaliknya, peran pemerintah tidak boleh diperkecil untuk kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Swastanisasi BUMN itu dianggap sebagai hasil dari paham neoliberal. Pengurangan subsidi BBM itu rekomendasi dari paham neoliberal. Tidak ketinggalan, para pakar biasanya menyebut nama tersohor Stiglitz untuk "memperkuat argumennya" - sebenarnya mungkin saja sekedar numpang populer atau memang benar-benar mengerti dan sepaham dengan pikiran Stiglitz.²

Belum lengkap bila serangan terhadap neoliberalisme tidak disertai dengan serangan langsung terhadap World Bank dan saudara kandungnya IMF sebagai dua lembaga yang dianggap sarangnya kaum neoliberal.³ Gara-gara mengikuti saran World Bank dan IMF maka krisis ekonomi Indonesia menjadi berkepanjangan. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang dengan tegas menolak petuah dari kedua lembaga tersebut sehingga krisis yang terjadi dapat lebih cepat dilalui. Kemenangan calon sayap kiri dalam pemilihan presiden di Venezuale dan Bolivia menambah amunisi untuk menggempur paham neoliberalisme sebagai biang keladi kesengsaraan suatu bangsa.

Answer: Dalam debat publik, globalisasi banyak dikaitkan dengan liberalisasi pasar, privatisasi aset, kekuasaan korporasi multinasional yang semakin besar, intensifikasi persaingan, diringkas dengan label

²Joseph Stiglitz adalah salah satu pemenang nobel dalam bidang ekonomi. Dia banyak menyoroti masalah informasi yang tidak seimbang (asymmetric information) yang banyak terjadi dalam pasar sehingga transaksi yang efisien dan fair sulit terwujud. Pihak yang kurang informasi biasanya dirugikan oleh pihak yang lebih menguasai informasi.

³World Bank dikecam habis dalam banyak hal, tetapi data kemiskinan World Bank yang berbeda dengan data kemiskinan BPS digunakan tanpa rasa malu sekedar untuk menjatuhkan lawan politiknya dan menarik simpati rakyat bagi dirinya. Politisi yang sedang mabuk nasi aking seperti itu sepantasnya dibuang, seperti juga nasi aking yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia.

umum “neoliberalisme.” Bagi kelompok pendukung yang lebih fokus pada manfaat, neoliberalisme menawarkan kebebasan dan pilihan individu yang lebih banyak. Bagi kelompok penentang yang berfokus pada biaya, neoliberalisme menyebabkan peningkatan kemiskinan, degradasi lingkungan, dan kehancuran budaya lokal. Sebelum kita memutuskan untuk membenci atau menyenangi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa gerangan neoliberalisme itu.

Neoliberalisme jelas berkaitan sangat kuat dengan liberalisme. Liberalisme merupakan sebutan bagi berbagai pandangan mengenai pemerintah dan masyarakat yang lahir di abad 19 di Eropa setelah reformasi protestan. Paham ini menjunjung tinggi kebebasan (freedom) atau kemerdekaan (liberty) individu. Ada penghormatan terhadap pandangan tentang cara dan tujuan hidup, ide pemerintah yang terbatas dan negara hukum, dan lembaga pemilikan pribadi. Liberalisme digunakan oleh banyak pihak yang berbeda kepentingan politik sekedar untuk membangun citra publik dan untuk memojokkan lawan politiknya, bukan dalam konteks memperbaiki kehidupan rakyat banyak.

Dengan waktu liberalisme berkembang menjadi berbagai tradisi yang kadang saling bersaing. Di berbagai negara penganut liberalisme kita mengenal kelompok konservatif (kanan) dan kelompok liberal (kiri). Di Australia, Inggris, dan Kanada, kelompok konservatif membentuk partai konservatif, sedangkan kelompok liberal membentuk partai buruh. Di Amerika Serikat, kelompok konservatif diwakili oleh partai republik sedangkan kelompok liberal diwakili oleh partai demokrat. Konservatif disini bermakna sebagai sikap untuk mempertahankan liberalisme secara ketat, terutama dalam isu peran pemerintah. Sebaliknya, kaum liberal sedikit lebih longgar dalam memaknai liberalisme dengan memberi ruang peran pemerintah yang lebih besar. Jadi, kaum konservatif dan liberal keduanya menganut liberalisme.

Dewasa ini di Eropa kata liberalisme digunakan oleh golongan kiri untuk mencemooh golongan kanan atas keyakinan buta terhadap nilai ekonomi pasar yang tidak terkendali dan kurangnya perhatian pada pentingnya tindakan negara dalam merealisasikan nilai persamaan dan keadilan sosial. Sementara itu, di Amerika Serikat, kata liberalisme digunakan oleh golongan kanan untuk mencemooh golongan kiri atas kekekatannya yang tidak realistis kepada nilai persamaan sosial dan ekonomi serta mudahnya menggunakan kekuasaan pemerintah untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut dengan mengorban-

kan kebebasan dan inisiatif individual (Barnett, 2005).

Kita lanjutkan dengan dua istilah yang sangat mirip dan bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin menjadi identik, yakni Liberalisme Baru (New Liberalism) dan Neoliberalisme. Liberalisme Baru berkembang dari tradisi liberal sosial yang lebih berkonsentrasi pada kebebasan individual untuk mencapai pemenuhan melalui intervensi negara (misalnya hak atas pendidikan dan perawatan kesehatan gratis). Sebaliknya, neoliberalisme berkaitan erat dengan liberalisme ekonomi, yang menekankan kebebasan individual dari intervensi negara (misalnya, persyaratan hak memiliki kekayaan pribadi dan hak membuat kontrak). Varian liberalisme ini sering diasosiasikan dengan Adam Smith (Bevir, 2007).

Sampai disini tampak bahwa Liberalisme Baru lebih dekat dengan ide kaum liberal, sedangkan Neoliberalisme lebih mendekati ide kaum konservatif. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila istilah "Reaganism-Thatcherism"⁴ dan "Washington Consensus"⁵ acapkali juga digunakan untuk menyebut neoliberalism. Neoliberalisme dimulai ketika Presiden Reagan di Amerika Serikat dan Perdana Menteri Thatcher di Inggris menyerang ide negara kesejahteraan (welfare state) dan serikat pekerja (labor unions). Ini kemudian berkembang menjadi kebijakan penyesuaian struktural dari IMF dan kemenangan ideologi globalisasi korporasi setelah tumbanganya Uni Soviet. Namun, neoliberalism tidaklah sama dengan globalisasi meskipun diantara keduanya terdapat tumpang tindih (Arestis & Sawyer, 2004).

Neoliberalisme bukan semata-mata suatu struktur ekonomi. Ini juga merupakan suatu filosofi dengan sikap yang sangat jelas terhadap masyarakat, individu, dan lapangan kerja. Neoliberalisme adalah suatu paradigma kebijakan yang menekankan perlunya persaingan pasar bebas. Ini merupakan ideologi (seperangkat ide-ide) dan juga sebuah praktek (seperangkat resep kebijakan) (Bevir, 2007). Penganut neoliberal cenderung melihat dunia dengan kaca mata metafor pasar. Ciri umum neoliberalism adalah kehendak untuk mengintensifkan dan

⁴Reagan dan Thatcher dikenal sebagai tokoh yang konservatif. Reagan dari Partai Republik di Amerika Serikat dan sedangkan Thatcher dari Partai Konservatif di Inggris. Konservatisme sendiri mempunyai arti yang semakin tidak jelas dan seringkali menyesatkan. Namun, penggunaan populer hari ini adalah untuk menunjukkan 'pro-kapitalisme.'

⁵Seperangkat resep kebijakan yang berorientasi pasar yang disusun oleh ekonom neoliberal untuk membangun negara-negara agar mencapai pertumbuhan ekonomi.

memperluas pengaruh nilai pasar.

Meskipun wujud pasti pikiran dan praktek neoliberal masih menjadi perdebatan, neoliberal umumnya diasosiasikan dengan ekonomi *laissez-faire*. Beberapa ciri umum neoliberal adalah keyakinannya pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai cara untuk mencapai kemajuan manusia, kepercayaan pada pasar bebas sebagai cara alokasi sumberdaya yang paling efisien, penekanannya pada campur tangan negara yang minimum dalam ekonomi dan pergaulan sosial, dan komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan kapital.

Bagi yang ingin mempertebal kecurigaan dan kebencian terhadap neoliberalism dapat membaca tulisan Brohman (1995) dan Rosenzvaig & Munck (1997). Bagi pak De, neoliberalisme adalah hantu di siang bolong yang sedang minum es cendol di sebuah pasar yang bebas dari preman, baik legal maupun illegal, khususnya para preman dari partai politik. Barangnya seperti apa masih belum terdefinisi dengan jelas tetapi keributannya sudah kemana-mana.⁶ Persis seperti cerita tentang hantu.

2.7 Sosialisme Pasar

1. **Tanya:** Lha kalau sosialisme pasar jadi apa pak De?

Answer: Sosialisme pasar adalah suatu ekonomi dimana perusahaan dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah tetapi kemudian menjual produknya ke konsumen dalam pasar yang kompetitif (Shleifer & Vishny, 1994). Dari namanya, sosialisme pasar merupakan sistem campuran antara sistem pasar bebas dan sistem sosialis. Dengan sangat sinis, Reisman menjuluki sosialisme pasar sebagai suatu konstruksi sistem ekonomi yang bersifat mitos yang analog dengan mitologi Yunani, binatang buas yang setengah manusia dan setengah kuda (Reisman, 1998). Sistem ini pernah dipraktekkan di beberapa negara, seperti Yugoslavia di tahun 1960an dan di Hungaria di akhir 1960an hingga awal 1970an. Sosialisme di kedua negara tersebut berbeda dengan sosialisme yang dipraktekkan di bekas Uni Soviet yang menganut sosialisme perencanaan terpusat. Pengenalan pasar dalam sistem sosialisme juga dimaksudkan untuk membuat sistem sosialisme menjadi lebih ma-

⁶Tulisan lepas D. E. Thorsen dan A. Lie dari Department of Political Science, University of Oslo yang berjudul "What is Neoliberalism?" mungkin dapat mengendorokan syaraf kita.

nusiawi (Temkin, 1996). Bukankah sistem sosialisme itu diciptakan sebagai tandingan bagi sistem kapitalisme yang dianggap sangat tidak manusiawi?

Sejarah munculnya sosialisme pasar tidak dapat dilepaskan dari nama Lange (Lange, 1936, 1937). Menurut Lange, ada beberapa alasan bahwa sosialisme lebih superior. **Pertama**, negara dapat mendistribusikan pendapatan dengan lebih merata. **Kedua**, karena negara mengontrol semua perusahaan, negara dapat mengatasi masalah eksternalitas. **Ketiga**, karena negara menetapkan harga dan menentukan entry, negara dapat menghindari monopoli. Menurut Lange, harga dapat naik turun seperti dalam pasar bebas melalui “trial and error” yang dilakukan oleh pemerintah. Jika terjadi kekurangan, maka harga dinaikkan dan bila terjadi kelebihan maka harga diturunkan sehingga apa yang diproduksi sama dengan apa yang dikonsumsi. Apakah kita percaya bahwa pemerintah mempunyai informasi yang cukup untuk melakukan tugas tersebut?

Isu yang sering terlewatkan dalam debat pasar sosialisme adalah pertukaran hak milik. Beberapa kritik terhadap pasar bebas menyatakan bahwa hak milik adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagaimana dengan hak seseorang terhadap dirinya sendiri dan tenaga kerjanya sehingga dia dapat mengikat kontrak dengan siapapun yang dianggapnya menguntungkan? Apakah kamu menginginkan agar pemerintah membuat peraturan yang mencabut hak kamu atas tenaga kerja kamu sendiri? Mencabut hak seseorang atas tenaga kerjanya sendiri sebagai aset produksi jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Bukti empiris menunjukkan bahwa semua negara yang menerapkan sistem sosialisme gagal mencapai kemakmuran ekonomi bahkan akhirnya mengalami kemunduran setelah sempat mengalami perekonomian yang berpendapatan menengah. Semua negara Eropa Timur sekarang mengadopsi sistem ekonomi pasar.⁷ Beberapa negara bahkan belum pernah lepas dari kemelaratan hingga hari ini.

Hasil dari penerapan sistem sosialisme ternyata tidak seindah konsepnya. Penyakit utamanya adalah korupsi yang dilakukan oleh birokrat

⁷Ekonom Eropa Timur menyatakan “kita lelah dengan berbagai percobaan, mari tidak perlu membuang waktu lagi, tetapi melanjutkan bekerja dengan satu-satunya sistem yang telah teruji dapat berjalan, meski tidak sempurna yakni kapitalisme.”

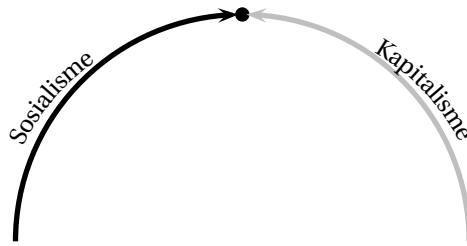
pemerintah yang mempunyai kekuasaan mengontrol semua aset ekonomi. Kita dapat saja berargumen bahwa kehancuran ekonomi beberapa negara tersebut bukan karena penerapan yang sebenarnya dari sosialisme, melainkan praktek korupsi yang dibungkus dengan label sosialisme. Jika itu persoalannya, maka Indonesia bukan perkecualian dari praktek seperti itu. Kita semua dapat melihat dan bahkan merasakan hasil kerja hampir semua BUMN yang kita miliki.

Jika ada orang menyampaikan keindahan sosialisme pasar, maka kamu cukup mendengarkannya dan membandingkan dengan pengalaman yang pernah kamu rasakan. Jangan salah, kamu tidak perlu pergi jauh menanyakan kepada rakyat bekas Yugoslavia atau Hungaria. Di sini, di negara kita sendiri sosialisme pasar itu sedang berjalan.

Kamu pernah kerepotan atau dibuat jengkel oleh minyak tanah, elpiji, bensin, solar, atau listrik? Pengaturan berbagai barang tersebut memenuhi semua ciri sosialisme pasar. Jasa telekomunikasi dahulu juga disediakan melalui sosialisme pasar sebelum akhirnya diubah menjadi pasar bebas dengan banyak penyedia jasa. Apa yang kamu rasakan? Televisi dahulu juga menganut sosialisme pasar dengan TVRI sebagai penyedia informasi tunggal, sekarang banyak stasiun yang menyediakan beragam informasi dan hiburan. Apakah kamu ingin kembali ke jaman stasiun TV tunggal seperti dulu?

Sesungguhnya, jika semua asumsi dan persyaratan yang diperlukan oleh sistem sosialisme dan sistem kapitalisme dapat terpenuhi dengan sempurna, maka baik kapitalisme maupun sosialisme akan memberikan hasil yang identik. Dalam Gambar 2.3, hasil identik tersebut ditunjukkan oleh titik hitam di puncak lingkaran. Namun, ketika ada asumsi yang tidak terpenuhi, hasil yang dicapai akan sangat jauh berbeda.

Untuk memproduksi apa dan berapa, perencanaan ekonomi nasional harus mengetahui dengan tepat preferensi atau keinginan dari masyarakat. Ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Kamu masih percaya anggota DPR dan pejabat pemerintah benar-benar memikirkan nasib rakyat? Sebaliknya, persaingan sempurna sebagai salah satu syarat agar pasar dapat bekerja dengan efisien. Syarat ini praktis tidak dapat dipenuhi. Namun, kerugian yang kita alami akibat pasar yang bersaingnya kurang sempurna masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerugian yang harus kita tanggung ketika pemerintah



Gambar 2.3: Perbandingan Sosialisme dan Kapitalisme dalam Memberikan Kesejahteraan Sosial

tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh rakyat.

Ada tiga alasan mengapa sosialisme pasar tidak dapat dilaksanakan (Shleifer & Vishny, 1994):

- (a) Di bawah sosialisme pasar, negara akhirnya mengontrol perusahaan dan oleh karena itu tujuan negara harus menentukan alokasi sumberdaya;
- (b) Dengan tujuan seperti pada butir pertama, kepentingan pemerintah dalam efisiensi ekonomi pada dasarnya sangat sulit terjadi;
- (c) Di bawah sosialisme pemerintah yang memperjuangkan tujuan yang melekat dalam proses demokratis kemungkinan menimbulkan kerusakan terhadap ekonomi lebih parah ketimbang bila pemerintah yang sama bekerja di bawah kapitalisme.

Disamping itu, efisiensi alokasi anggaran negara juga menjadi perhatian. Porsi ekonomi nasional yang dikuasai pemerintah sosialis lebih besar dari porsi ekonomi nasional yang dikuasai oleh pemerintah kapitalis. Akibatnya, peluang untuk membelanjakan keuangan negara pada proyek yang tidak efisien atau proyek mercusuar lebih besar di negara sosialis ketimbang di negara kapitalis.

Pandangan Shleifer dan Vishny di atas berlawanan dengan pandangan Bardhan & Roemer (1992). Menurut Bardhan dan Roemer, kompetisi, pasar, dan demokrasi ekonomi adalah menentukan program reformasi, bukan privatisasi berskala besar. Pasar kompetitif merupakan

keharusan untuk mencapai ekonomi yang efisien dan sehat, tetapi kepemilikan pribadi secara penuh bukan keharusan bagi berjalannya kompetisi dan pasar yang berhasil. Pengalaman buruk inefisiensi perusahaan yang dimiliki oleh negara di berbagai negara berkembang dan mantan negara sosialis bukan disebabkan oleh kepemilikan melainkan disebabkan oleh monopoli. Melalui restrukturisasi kelembagaan yang tepat, isu insentif dan efisiensi dapat diatasi tanpa privatisasi. Meskipun Bardhan dan Roemer menghindari privatisasi, mereka juga menolak nasionalisasi dan berusaha mencegah intervensi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan.⁸ Mereka lebih memilih kepemilikan oleh banyak pihak, baik oleh perusahaan kecil maupun perorangan terutama karyawan.

Saya tidak tahu, apakah para pembela sosialisme pasar benar-benar memahami makna sosialisme pasar dan implikasinya bila diterapkan atau sekedar kebencian terhadap dan selanjutnya ingin menundukkan dan mengatur kelompok kaya yang bermodal kuat tanpa peduli akibatnya bagi ekonomi negara secara keseluruhan. Keadilan bagi seluruh rakyat sangat baik dan harus terus diupayakan untuk terwujud. Tetapi orang yang berbeda mengartikan keadilan secara berbeda juga. Tidak ada sistem yang sempurna. Kita harus terus bekerja memperbaiki kehidupan seluruh rakyat dengan cara yang realistis. Tidak ada cara yang ajaib. Cara yang menjanjikan hasil terlalu indah kemungkinan besar hanya utopia yang didendangkan orang mabuk nasi aking.

2. **Tanya:** Pak De, mengapa justru dalam sosialisme sering terjadi kelangkaan barang kebutuhan masyarakat?

Answer: Dalam sosialisme, birokrat diasumsikan baik hati dan mengetahui dengan tepat preferensi masyarakat. Padahal, kenyataannya birokrat juga memiliki kepentingan pribadi, yang tidak jarang berlawanan dengan kepentingan publik. Ketika birokrat memiliki kepentingan pribadi, adalah kepentingan mereka untuk membuat kelangkaan agar mereka memperoleh uang suap dari masyarakat yang membutuhkan barang yang bersangkutan (Shleifer & Vishny, 1992). Penjelasan ini tidak beda dengan jawaban petugas penjual tiket kereta api

⁸Jika kepemilikan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah ditiadakan, maka sebenarnya Bardhan dan Roemer sudah tidak lagi membicarakan sosialisme pasar. Nampaknya, privatisasi dalam kaca mata Bardhan dan Roemer lebih dimaknai sebagai kepemilikan perusahaan oleh satu atau sangat sedikit orang pemegang saham yang selanjutnya akan menikmati surplus yang diperoleh perusahaan tersebut.

“maaf tiket sudah habis” tetapi di pihak lain ada yang menawarkan tiket untuk tempat tujuan, jenis kereta, dan klas yang sama.

2.8 Negara Kesejahteraan

1. **Tanya:** Kondisi negara yang tidak kunjung membaik - benarkah demikian? - semenjak krisis 1997/1998 dan cara mengatasi krisis yang dianggap tidak tepat telah mengundang berbagai kalangan untuk menoleh kembali kepada model *welfare state* atau negara kesejahteraan. Cara yang tidak tepat tersebut dianggap terlalu didikte oleh kepentingan kaum *neoliberal*. Kondisi tidak kunjung membaik, bahkan sebaliknya ada yang beranggapan tambah memburuk khususnya bagi kelompok berpendapatan paling rendah. Kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, dianggap terlalu liberal yang hanya menguntungkan para kapitalis.

Berbagai kalangan yang “prihatin” dengan nasib kaum papa menawarkan solusi untuk mewujudkan *welfare state*. Konstitusi kita yang sangat fleksibel itu memang memungkinkan untuk ditafsirkan ke arah pembentukan *welfare state*. Dalam wadah *welfare state*, tunjangan sosial diperbesar agar rakyat hidup lebih sejahtera secara lebih merata. Sekolah dan rumah sakit yang gratis atau setidaknya murah sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat. Penyediaan tempat tinggal dan makanan bagi orang yang tidak mampu. Masih banyak detail yang lain, tetapi semuanya dapat diringkas menjadi “seperti negara-negara Skandinavia.”⁹ Atau bahkan seperti di sorga.¹⁰ Begitulah jualan para politisi yang sedang bernafsu menjadi calon presiden.

Answer: Semua orang tentu saja ingin hidup sejahtera, tentram, aman, dan damai. *Toto tentrem kerto raharjo* kata Orang Jawa. Bagaimana mencapai kondisi tersebut? Apakah *welfare state* dapat menghantar-kan kita kepada kondisi seperti itu? Apa yang dimaksud *welfare state*? Bagaimana mewujudkannya?

⁹Negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara mencakup Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Sebenarnya keempat negara tersebut mempunyai perbedaan yang besar dalam kebijakan sosialnya.

¹⁰Saya ingatkan lagi bahwa ketika seseorang menawarkan sesuatu yang terlalu indah maka anda harus sangat waspada. Besar kemungkinan orang tersebut sedang memasang perangkap bagi anda. Ingat cerita Nabi Adam? Dimana dia tertipu sehingga makan buah terlarang? Dalam sorga. Jadi, di sorgapun ada penipu. Apalagi di Senayan!

Konstitusi kita memang sangat memungkinkan dibangunnya sebuah negara yang memenuhi definisi *welfare state*. Unsur-unsur *welfare state* dapat dijumpai pada beberapa pasal dalam konstitusi kita, diantaranya pasal 27, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Atau, sesungguhnya negara kita ini memang dirancang sebagai *welfare state*. Mengapa masih ada orang yang ingin membentuk *welfare state*? Apakah kita masih kurang atau belum sejahtera? Mengapa? Apakah karena pemerintah belum melaksanakan pasal-pasal *welfare state* tersebut? Satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah ongkos yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan negara kesejahteraan tersebut.

Inti dari *welfare state* adalah kemampuan negara mengisolasi elemen-elemen kunci dari kehidupan ekonomi dari kekuatan pasar dunia (Bevir, 2007) - bukan melulu melindungi kelompok miskin dan lemah dari kemiskinan dan memperjuangkan sasaran kesejahteraan seperti *full employment* atau kesehatan masyarakat,¹¹ tetapi juga berbagai langkah berikut ini:

- (a) Meregulasi bisnis bagi kepentingan publik;
- (b) Melakukan *fine tuning* (penyesuaian) siklus bisnis;
- (c) Membina industri strategis;
- (d) Mengintegrasikan gerakan buruh kedalam neokorporatis dan proses *collective bargaining*;
- (e) Mengelola perdagangan internasional dan gerakan kapital.

Sesungguhnya, pemegang kekuasaan pemerintahan dimanapun sangat senang memberikan tunjangan sosial bagi warga negaranya, bila tersedia sumberdaya yang memadai. Mengapa? Secara politis pemegang kekuasaan tersebut pasti mendapat nama dan dukungan dari "rakyat" yang hidup saat itu, sedangkan uang yang dibelanjakan bukan milik pribadinya. Pihak yang mendapat nama dan menanggung beban berbeda. Pertanyaannya adalah dari mana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program sosial tersebut?

¹¹Banyak orang memahami *welfare state* sebagai negara yang gemar memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya agar seluruh rakyat dapat hidup layak. Aspek pemerataan kesejahteraan memperoleh perhatian yang sangat besar. Pendidikan, kesehatan, santunan kepada penyandang cacat, jaminan hari tua, dan tunjangan terhadap warga negara yang tidak mampu (BLT) merupakan contoh program sosial yang umum dilakukan oleh *welfare state*.

Idealnya, sumber pembiayaan program sosial tersebut adalah dari pajak. Karena belanja sosial di negara penganut *welfare state* umumnya sangat tinggi, maka tarif pajak di negara yang bersangkutan biasanya juga lebih tinggi dibandingkan di negara yang tidak menganut *welfare state*. Pajak kepada orang kaya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak pada orang miskin sehingga mengurangi perbedaan pendapatan riil. Penerimaan negara yang lain adalah penerimaan bukan pajak, termasuk dari keuntungan perusahaan yang dimiliki oleh negara. Tetapi, belanja program sosial juga dapat dibiayai dari hutang yang pengembaliannya biasanya dibebankan kepada generasi berikutnya. Dari sisi ini, peningkatan belanja pemerintah bukannya menimbulkan efek ganda melainkan *crowding out* - rebutan dengan investor swasta (Mankiw, 2006).

Agar pendapatan yang diperoleh negara memadai, maka ada yang berpikir untuk melakukan *nasionalisasi* terhadap berbagai perusahaan swasta besar. Seperti biasa terjadi, ide heroik semacam ini tidak didasarkan pada pemikiran yang dalam dan matang. Hanya sisi keuntungan yang dilihat, sementara itu sisi biaya termasuk resiko dan konsekuensi dari *nasionalisasi* tidak dipertimbangkan. Inefisiensi yang ditimbulkan oleh *nasionalisasi* dilupakan. Argumen yang selalu digunakan adalah bahwa di negara lain perusahaan milik negara juga dapat berjalan efisien seperti perusahaan swasta. Jika seperti itu argumennya, maka kita cukup mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara lain tetapi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah negara kita. Faktanya, perusahaan milik negara di Indonesia umumnya tidak efisien meskipun mungkin saja mereka masih memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut jauh kurang dari yang semestinya dapat dilakukan oleh perusahaan yang efisien.

Kekhawatiran utama terhadap bentuk *welfare state* adalah bahwa pajak yang tinggi dan program jaminan sosial yang luas mempunyai pengaruh buruk pada kinerja ekonomi agregat. Pemerataan ekonomi yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berujung pada kelumpuhan. Inilah yang kemudian dikenal dengan *sclerosis diagnosis* (Sinn, 1995). Selama periode 1970-1990, pertumbuhan ekonomi Swedia lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) (Agell, 1996).

Menarik mengkaji sikap masyarakat negara Skandinavia terhadap *wel-*

fare state dan dinamika kebijakan yang berlangsung dalam negara yang menganut *welfare state* (Kautto et al., 1999). Analisis sosiologis mengklaim bahwa dukungan bagi *welfare state* menurun dalam jangka panjang. Ada kesenjangan yang semakin melebar antara posisi relatif dari golongan muda dewasa yang makin melemah terhadap posisi yang mantap atau lebih baik dari golongan tua dalam hal resiko eksklusi sosial dan pendapatan setelah pajak (*disposable income*). Meskipun hal ini dapat ditafsirkan sebagian sebagai fakta bahwa golongan muda mempunyai posisi yang lebih lemah dalam pasar tenaga kerja dan lebih terpengaruh oleh pengangguran, hal ini dapat juga dilihat sebagai tanda dari ketidak-mampuan dari *welfare state* untuk menjamin kondisi kehidupan dari generasi muda. Jadi, ini dapat ditafsirkan sebagai kekurangan reorientasi atau penyesuaian dari *welfare state*.

Dalam pandangan ahli teori pilihan publik (*public choice theorist*), arsitek *welfare state* berasumsi bahwa pegawai pemerintah termotivasi dengan etika pelayanan. Menurut ahli teori pilihan publik, ketimbang bersifat “ksatria,” pegawai pemerintah pada kenyataannya lebih menunjukkan sifat “bangsat” (*knave*) yang termotivasi oleh kepentingan pribadi (Bevir, 2007). Artinya, untuk dapat menyelenggarakan *welfare state* yang mampu menyejahterakan rakyat diperlukan dukungan birokrasi yang bersih dan efisien. Negara kesejahteraan menjunjung tinggi trust yang tinggi pada integritas para profesional (Casson & Godley, 2000). Apakah mungkin birokrasi di Indonesia dapat menjadi bersih dan efisien dalam jangka waktu 2 hingga 12 tahun ke depan untuk mendukung program *welfare state*?

Anehnya, mengapa program BLT pemerintah yang juga merupakan unsur *welfare state* dikecam habis oleh banyak pihak termasuk oleh pihak yang memimpikan *welfare state*? Baru satu unsur dari *welfare state* sudah sangat kerepotan, bagaimana hendak menyelenggarakan 10 atau lebih unsur *welfare state* dalam waktu pendek? Padahal, aparat yang sama yang akan digunakan untuk menyelenggarakan *welfare state* bila pihak pengkritik tersebut berada dalam kekuasaan. Sesungguhnya mereka tidak sedang memikirkan nasib rakyat, melainkan hanya mengejar kekuasaan untuk dirinya sendiri. Perhatikan perjalanan beberapa “tokoh” yang awalnya jadi tukang kritik pemerintah lalu terpilih menjadi penguasa. Apakah mereka melaksanakan apa yang pernah diucapkannya saat masih menjadi tukang kritik. Tidak ada satupun!

Jangan lagi mencari-cari orang yang dapat dipercaya, bentuklah diri kamu sendiri menjadi orang yang dapat dipercaya dan terus melanjutkan hidup kamu. Nasib kamu berada di tangan kamu sendiri, oleh karena itu jangan pernah menyerahkannya kepada pihak lain, apalagi kepada politisi. Sadarkah kamu, bahwa tanpa kita semua, politisi itu tidak ada artinya. Sebaliknya, tanpa politisi, hidup kita tetap berjalan normal dan mungkin lebih menyenangkan.

2. **Tanya:** Tadi pak menyebut biaya dari membangun dan menjalankan negara kesejahteraan. Biayanya apa pak De?

Answer: Inti dari negara kesejahteraan itu adalah keterlibatan pemerintah secara langsung dalam urusan kesejahteraan rakyat dan dalam mengelola barang serta jasa yang menentukan kesejahteraan rakyat. Artinya, secara umum peran pemerintah dalam kehidupan dan pengambilan keputusan privat adalah lebih besar. Belanja di sektor publik juga menjadi lebih tinggi. Nah, untuk melakukan semua itu maka pemerintah negara kesejahteraan membutuhkan anggaran lebih banyak dibandingkan pemerintah negara penganut ekonomi pasar biasa. Akibatnya, tingkat pajak di negara kesejahteraan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara penganut ekonomi pasar biasa.

3. **Tanya:** Ah tidak ada masalah kalau begitu, karena toh yang membayar pajak adalah orang kaya. Orang miskin kan tinggal menikmati.

Answer: Lha itu ongkos negara kesejahteraan yang lain lagi yang jarang disadari oleh orang.

4. **Tanya:** Maksudnya pak De?

Answer: Kalau mau membentuk negara kesejahteraan ya mikirnya haruslah kesejahteraan bagi semuanya. Lha nadamu seperti hendak menghukum orang kaya dengan menarik pajak tinggi dari mereka untuk memanjakan orang miskin. Orang kaya pindah tempat untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi itu sudah banyak terjadi. Artinya tingkat pajak berpengaruh pada basis pajaknya (*tax base*). Pindahnya bisnis dan orang kaya akan mengurangi basis pajak dan akhirnya jumlah pajak yang dapat dipungut. Mimpi mendapat revenue tinggi dari pajak boleh jadi hanya ilusi.

“When you’re going through hell, keep going”

Albert Einstein

“There is always a well-known solution to every human problem – neat, plausible and wrong.”

H. L. Mencken

“To open a shop is easy, the difficult thing is keeping it open”

Chinese Proverb

3

Landasan Politik Ekonomi

Landasan politik ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh kebijakan ekonomi harus mengacu kepada konstitusi ini. Pasal 33 dari konstitusi ini paling sering dijadikan bahan perdebatan dan alat untuk memojokkan pihak lain sambil berharap mendapat simpati publik dan akhirnya terpilih menjadi pejabat publik. Beberapa pihak secara norak mencoba memasarkan pepesan ekonomi konstitusi yang tampaknya tidak banyak yang mau membelinya. Syukurlah, rakyat Indonesia sudah cukup cerdas menghindari jebakan pepesan kosong. Bab ini dimaksudkan untuk memperkuat kecerdasan rakyat Indonesia tersebut.

Kita perlu menafsirkan dengan baik amanat yang terkandung dalam konstitusi kita. Apa yang dimaksud dengan azas kekeluargaan? Apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara? Lalu apa pula yang dimaksud dengan kemakmuran? Bagaimana mengukurnya? Sementara berbagai pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara tuntas dan disepakati bersama, beberapa isu penting yang sering ditabrakkan pada atau dipertentangkan dengan amanat Pasal 33 dari konstitusi. Dalam bab ini akan dibahas dua isu yang sering muncul, yakni peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan privatisasi yang sering dituduh sebagai bagian dari liberalisasi ekonomi yang disokong dan sangat disukai oleh penganut paham neoliberal.

3.1 Ekonomi Konstitusi

1. **Tanya:** Pak De tolong dijelaskan tentang maksud dari istilah “ekonomi konstitusi” yang sering disebut oleh beberapa kalangan. Konon ekonomi kita ini berjalan diluar konstitusi. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Aku tidak mau terlibat dalam debat kusir yang hanya cari popularitas dengan membodohi rakyat. Pak De tegaskan bahwa tidak ada itu ekonomi konstitusi. Sebelumnya ada yang disebut dengan Ekonomi Pancasila. Lha ada yang tanya, Ekonomi Pancasila itu seperti apa? Dari jawaban dan keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki gagasan Ekonomi Pancasila itu maka orang akhirnya berkesimpulan bahwa Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang serba bukan. Bukan sosialis, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan liberal, bukan neoliberal, atau ringkasnya ekonomi bukan-bukan, bahkan mungkin bukan ekonomi sama sekali. Demikian juga dengan ekonomi konstitusi yang kamu tanyakan tadi.

2. **Tanya:** Lha terus apa gunanya kita memiliki konstitusi pak De jika konstitusi tersebut pada akhirnya diabaikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional kita? Bukankah hal seperti itu merupakan penghianatan terhadap komitmen bernegara kita?

Answer: Wah wah kita baru selesai makan malam kok sudah terlibat dalam diskusi yang berat begini? Tetapi pak De sangat senang mendapat pertanyaan seperti ini, apalagi dari orang muda yang baru lulus dari perguruan tinggi. Memang kita punya konstitusi dan konstitusi tersebut juga memuat panduan garis besar tentang ekonomi.

Kita mulai dengan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Selanjutnya, dalam penjelasan (UUD 45 sebelum diamandemen) dinyatakan “ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Paling tidak ada tiga kata penting yang patut diperhatikan pada ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, yakni asas kekeluargaan (sebagai landasan), kemakmuran masyarakat (sebagai tujuan), dan koperasi

(sebagai instrumen). Hendaknya, ekonomi kita dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan. Lha apa saja nilai-nilai kekeluargaan itu dan bagaimana nilai-nilai tersebut telah menjadi pedoman bertindak dari masyarakat kita? Kalau belum mewujudkan menjadi laku sehari-hari terus apa yang harus dilakukan?

3. **Tanya:** Sebelum dilanjutkan pak De, apa ada latar belakang sejarahnya sehingga rumusan ekonomi yang hendak dibangun di negeri ini kok begitu banyak pertimbangan? Ada dong pak De latar belakangnya?

Answer: Benar kamu Tanya. Teks seperti itu pasti ada konteksnya. Memang sangat baik bila kita mengetahui sejarah dari sesuatu yang sedang kita pelajari. Pendekatanmu sangat cerdas Tanya.

4. **Tanya:** Dari sejak bayi Tanya memang sudah cerdas pak De hi hi hi ... Memang apa hebatnya sih pak De dengan pertanyaan latar belakang sejarah?

Answer: Begini Tanya, meski pak De ini juga cerdas sejak bayi tetapi pak De pernah membenci pelajaran sejarah. Gara-garanya sepele, yaitu dalam ujian ada pertanyaan kapan Napoleon Bonaparte wafat. Lha kapan wafatnya mbah buyut pak De sendiri pak De tidak hafal, kok malah ditanya wafatnya Napoleon. Sebagai orang yang cerdas sejak bayi, pak De agak kurang suka dengan pertanyaan seperti itu.

5. **Tanya:** Wah pak De ini bisa narsis juga yah? Terus kapan mulai cerita sejarahnya pak De?

Answer: Apa sulitnya “merasa bisa.” Yang jauh lebih sulit itu “bisa merasa” Tanya. Baiklah Tanya, kita lihat latar belakang sejarah rumusan ekonomi yang penuh dengan ide besar itu. Rumusan pasal 33 UUD 1945 tentu tidak terlepas dari sumbangan pemikiran Bung Hatta yang berlatar belakang pendidikan ekonomi Belanda. Hal ini sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta dikungkung dan dibatasi oleh paham ekonomi Belanda. Apalagi kita tahu bahwa ekonomi Belanda pada masa disusunnya UUD 1945 sangat bersifat eksploitatif, sementara itu Bung Hatta memasukkan unsur kekeluargaan yang bernuansa kebalikan secara diametral terhadap sifat eksploitatif.

Pada masa penyusunan UUD 1945 dunia terpolarisasi dalam dua kubu, yakni kubu Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kubu

Timur yang dimotori oleh Uni Soviet sebelum akhirnya pecah menjadi beberapa negara. Ekonomi kubu Barat dibangun atas dasar keyakinan pada mekanisme pasar. Keputusan diambil oleh masing-masing pelaku secara bebas. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini dikenal juga sebagai sistem ekonomi terdesentralisasi. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem kapitalis. Ada juga yang lebih menyukai sebutan *free enterprise system* (Arnold, 1994). Dalam sistem kapitalis, hak milik diakui dan persaingan merupakan cara untuk mencapai efisiensi yang akan memberi kemakmuran tertinggi. Persaingan sempurna merupakan salah satu syarat bekerjanya sistem pasar dengan efisien.¹ Menarik mengikuti perdebatan tentang kapitalism antara Profesor Glenn E. Hoover dengan Oppenheimer (Oppenheimer, 1942). Deskripsi yang sangat lengkap tentang kapitalism dapat diperoleh dari buku yang ditulis oleh Reisman (1998).²

Namun, ternyata kemiskinan, terutama di kalangan kaum buruh, banyak terjadi. Sebaliknya, kekayaan dikuasai oleh sedikit pemilik modal. Keadaan ini melahirkan pemikiran tentang sosialisme. Salah satu penganut fanatik dan tersohor dari paham sosialisme adalah Karl Marx. Paham sosialisme percaya bahwa faktor pemilikan modal atau aset ekonomi produktif oleh individu merupakan sebab utama timbulnya kemiskinan, khususnya di kalangan kaum buruh yang umum disebut sebagai kaum proletar.³ Dengan kata lain, kaum proletar merupakan produk logis dari ekonomi pasar bersaing bebas. Hingga hari ini, pasar bersaing bebas ini masih terus dituduh sebagai penyebab ketimpangan sosial oleh berbagai pihak, terutama untuk memperoleh popularitas politik. Demi popularitas politik, orang melupakan keru-

¹Persaingan sempurna sering dijadikan model ideal mekanisme pasar yang tentu saja sangat sulit atau bahkan tidak pernah ada dalam dunia nyata.

²Reisman, sejauh yang pak De dapat tangkap, tidak membedakan istilah bersaing bebas (*free competition*), bersaing murni (*pure competition*), serta bersaing murni dan sempurna (*pure and perfect competition*). Menurutnya, belum pernah ada yang mendefinisikan "bersaing murni dan sempurna" - yang pernah dilakukan adalah menyajikan daftar syarat yang harus dipenuhi. Secara ringkas, syarat yang harus dipenuhi agar persaingan murni dan sempurna terjadi adalah produk yang seragam oleh semua penjual dalam industri yang sama, pengetahuan yang sempurna, ukuran masing-masing penjual yang sangat kecil, tidak ada ketakutan akan pembalasan oleh pesaing sebagai respon terhadap tindakan seseorang, perubahan harga yang konstan, dan keluar masuk industri dapat dilakukan dengan sangat mudah. Syarat yang kurang lebih serupa dijumpai dalam Wilkinson (2005) tetapi dengan tambahan tidak ada biaya transportasi.

³Karl Marx percaya bahwa kapitalisme secara inheren tidak adil, sebagian karena kapitalisme mengharuskan pekerjaannya menjual tenaganya pada harga yang kurang dari nilai pasar, sedangkan perbedaannya menjadi keuntungan bagi juragan Adam & Dyson (2003).

gian masyarakat akibat terlalu sering terpaksa antri bahan bakar dan mengalami pemadaman listrik mendadak yang produksinya diatur negara. Tentu saja kita tidak perlu mendewakan ekonomi pasar bersaing bebas, karena dalam kondisi tertentu pasar dapat saja gagal mengalokasikan sumberdaya secara efisien. Kewajiban pemerintah adalah mengatasi kegagalan tersebut dengan kebijakan yang tepat, bukan dengan menghilangkan persaingannya sendiri yang malah memperkuat kegagalan pasar itu sendiri.

Sebagai response terhadap ekonomi pasar bersaing bebas tersebut, penganut paham sosialisme mengembangkan konsep ekonomi tandingan yang menghilangkan faktor kepemilikan atas aset ekonomi produktif. Keputusan ekonomi diambil secara kolektif dan dilaksanakan secara kolektif pula. Mengingat sebagian besar pelaku ekonomi terdiri dari kaum proletar, maka kaum proletarlah yang harus menentukan keputusan-keputusan ekonomi yang harus diikuti oleh semua pelaku. Dikenallah diktator proletariat. Dengan kata lain, pemerintah proletariatlah yang mengendalikan ekonomi negara dengan tujuan untuk memakmurkan kaum proletar secara berkeadilan. Sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai ekonomi perencanaan terpusat oleh pemerintah proletariat atau sistem ekonomi sosialis. Ditinjau dari proses terjadinya, sistem ekonomi perencanaan terpusat dibangun bukan atas dasar kepercayaan kepada peran pemerintah, melainkan atas ketidakpercayaan kepada sistem ekonomi bersaing bebas.

Secara umum, ekonomi suatu negara terletak pada dua ekstrim tersebut. Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menganut ekonomi pasar murni tanpa campur tangan pemerintah atau ekonomi yang dikendalikan secara penuh oleh pemerintah tanpa unsur pasar sama sekali. Ekonomi Amerika Serikat berada di dekat ekstrim pasar murni dengan sedikit campur tangan pemerintah. Sementara itu, ekonomi Korea Utara berada di dekat ekstrim perencanaan terpusat murni dengan sedikit mekanisme pasar. Sama-sama condong ke arah ekonomi pasar, campur tangan pemerintah dalam ekonomi Kanada lebih besar dibandingkan campur tangan pemerintah dalam ekonomi Amerika Serikat. Dibandingkan Kanada, kadar campur tangan pemerintah dalam ekonomi negara-negara Skandinavia lebih besar. Demikian seterusnya, ekonomi suatu negara dapat diletakkan diantara dua titik ekstrim tersebut.

Pemikiran ekonomi Bung Hatta tidak lepas dari pengaruh kedua eks-

trim tersebut. Faktor lain yang juga pasti mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta adalah kondisi ekonomi rakyat pada waktu itu. Sementara itu, dalam dunia nyata contoh ekonomi yang dijadikan model adalah ekonomi negara-negara Skandinavia. Dengan berbagai unsur dominan yang mempengaruhinya, terlahirlah rumusan ekonomi Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Namun setelah 60 tahun sejak kita menerima rumusan tersebut, penafsiran atas rumusan tersebut secara jelas untuk dapat dijadikan pedoman dalam membangun ekonomi negara belum juga terwujud. Dalam perdebatan publik masih banyak yang menafsirkan dikuasai oleh negara sebagai diproduksi oleh negara. Tanpa mengurangi penghargaan kepada jasa-jasanya, adalah merupakan hipotesis yang valid juga bahwa Bung Hatta sendiripun semasa hidupnya barangkali tidak mempunyai penafsiran yang jelas dan tuntas atas ide-idenya sendiri. Di pundak generasi berikutnya adalah tugas penafsiran itu berada. Kita mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan bangun ekonomi nasional yang ideal tetapi realistis, bukan yang utopis.

3.2 Asas Kekeluargaan

1. **Tanya:** Pak De, bukankah masyarakat kita itu sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan, seperti semboyan gotong royong itu? Sebelum lupa, saya usul agar koperasi dibahas lebih detail yang bila perlu dijadikan topik bahasan tersendiri.

Answer: Kalau nilai kekeluargaan sudah tertanam kuat, pak De rasa tidak ada cerita negara ini dijajah oleh bangsa dari negara kecil di Eropa sana sampai ratusan tahun. Kalau gotong royong sudah menjadi praktek hidup dalam masyarakat, mengapa koperasi yang sehat sulit sekali tumbuh di Indonesia? Bukankah esensi dari koperasi itu kerjasama atau gotong royong tadi. Kita perlu jelas benar mana yang baru menjadi angan-angan dan mana yang memang sudah menjadi kenyataan. Kamu pasti akan mengeluarkan jurus *divide et impera* yang dimainkan oleh penjajah kan?

2. **Tanya:** Karena sudah tertebak, ya silahkan pak De teruskan ceritanya.

Answer: Kamu lihat di jalanan kita orang berebut cepat tanpa memedulikan kenyamanan bahkan keselamatan orang lain. Setiap tahun ada saja orang mati terinjak-injak ketika berebut pembagian za-

kat atau yang lainnya. Tawuran antar kampung terjadi dimana-mana, bahkan disertai dengan pembakaran rumah ibadah. Bagaimana partai politik pecah karena beberapa orang tidak terpilih sebagai pengurus. Bahkan PSSI (kamu mestinya lebih tahu apa kepanjangannya) yang nota bene organisasi keolahragaan yang mestinya menjunjung tinggi sportifitas ternyata sangat sulit untuk akur. Jadi, tanpa politik *divide et empera* bangsa kita memang gampang sekali tidak akur. Keadaan seperti ini tidak perlu ditutupi, tetapi sebaliknya dibuka saja lalu dicarikan obatnya agar tidak mudah diprovokasi.

3. **Tanya:** Jadi nilai kekeluargaan itu apa pak De?

Answer: Jawaban secara umum dapat kamu cari dari kualitas keluarga ideal yang kamu bayangkan dan hal-hal apa yang harus ada agar kondisi ideal tadi dapat terwujud. Kita ambil unsur yang paling dasar dan bersifat universal dalam pengertian spatial dan temporal, artinya dimana saja berlaku dan tidak lekang dimakan jaman. Apakah keluarga yang harmonis itu baik menurutmu?

4. **Tanya:** Ya tentu saja baik pak De. Sayapun bercita-cita untuk memiliki keluarga yang harmonis.

Answer: Kamu menggunakan kata “memiliki” itu maksudnya apa? Apakah seperti kamu menemukan anak kucing di jalan lalu kamu miliki dan kamu rawat begitu?

5. **Tanya:** Ya bukan begitu pak De. Maksud saya, pertama ketemu calon pasangan yang saya anggap paling cocok, lalu kawin, dan seterusnya membangun bahtera rumah tangga itu bersama hingga mencapai tingkat harmoni yang saya inginkan. Apakah maksud pak De bahwa keluarga yang harmonis itu harus dibangun dari titik awal tertentu yang harus ada?

Answer: Persis. Lha apa yang harus ada pada calon pasangan yang kamu anggap paling cocok tadi?

6. **Tanya:** Suatu kualitas yang dapat menimbulkan *trust* di hati saya pak De. Maaf pak De, saya menggunakan kata *trust* karena kekurangtahuan saya akan kosa kata bahasa kita sendiri yang dapat menggantikan kata *trust* tersebut. Saya harus melihat tanda-tanda yang dapat membangun rasa percaya saya kepadanya. Disamping itu ya harus ada rasa “grent” dihati - maksud Tanya bibit cinta.

Answer: Artinya, modal awal dalam bentuk *trust* dasar harus ada dan *trust* dasar ini dapat tumbuh penuh atau sebaliknya malah mati dengan berjalannya waktu, tergantung bagaimana kamu dan pasanganmu merawatnya. Tetapi kamu harus ingat bahwa tumbuhnya *trust* di hati kamu itu bukan semata-mata karena kualitas orang lain yang sedang kamu hadapi tetapi juga oleh kualitas dirimu sendiri.

7. **Tanya:** Lebih jelasnya seperti apa pak De?

Answer: Apa kamu tidak pernah dengar bahwa ada kelompok masyarakat yang mudah curiga kepada orang yang belum dikenalnya dan ada juga kelompok masyarakat yang mudah menerima orang asing?

8. **Tanya:** Ya pernah pak De dan sepertinya hal yang demikian itu ada. Tetapi yang saya rasakan adalah, ini jujur saja pak De, ada kecenderungan untuk lebih mempercayai satu kelompok tertentu dan lebih sulit mempercayai kelompok lainnya.

Answer: Oleh karena itu, besar kecilnya *trust* yang tumbuh di hati kamu tadi tergantung kepada kualitas orang yang sedang kamu hadapi dan kualitasmu sendiri yang dipengaruhi oleh kualitas kelompok darimana kamu berasal. Terhadap hal kedua yang baru saja kamu sampaikan, pak De tidak menyalahkan tetapi sekedar mengingatkan bahwa sikapmu lebih mudah mempercayai kelompok yang satu ketimbang kelompok yang lain itu dapat saja berangkat dari angan-anganmu sendiri tentang kedua kelompok tersebut. Kamu membuat keputusan berdasarkan penilaian subyektifmu terhadap suatu obyek, bukan kenyataan tentang obyek itu sendiri.

3.2.1 Membangun *Trust*

1. **Tanya:** Kata-kata pak De kok makin *mbulet*. Membahas ekonomi kok sampai *trust* segala sih pak De. Ekonomi itu kan cukup permintaan dan penawaran atau agak lebih menterengnya *demand* dan *supply* saja to pak De? Atau produksi dan konsumsi.

Answer: Lha disini orang sering mereduksi ekonomi menjadi hanya sekedar produksi dan konsumsi barang dan jasa. Lebih celaka lagi, membahas ekonomi hanya dari aspek teknikal saja - alokasi sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ini masalah optimisasi alokasi, dengan atau tanpa kendala,

yang sangat teknis. Nanti kita juga sampai pada permintaan dan penawaran. Ini soal teknis belaka. Inti dari ekonomi adalah soal manusia, bukan sekedar soal barang dan jasa. Ekonomi melibatkan pelaku - konsumen, produsen, dan pihak lainnya termasuk pemerintah - dan aturan main yang melingkupi para pelaku dalam memilih. Aturan main yang dipilih itu biasanya juga dipengaruhi oleh asumsi yang diberlakukan terhadap pelaku ekonomi. Asumsi tentang pelaku tadi mempengaruhi ilmu yang dikembangkan tentang perilaku pelaku dan berdasarkan ilmu yang dikembangkan ini aturan main dibuat. Lha kalau antara asumsi dan realitas pelaku sangat jauh berbeda maka ilmu yang dikembangkan menjadi jauh dari realitas dunia yang dianalisisnya. Gampangnya begini, antara karakter pemain dan aturan mainnya harus kompatibel sehingga dapat dihasilkan permainan yang indah dan produktif. Jika para pemainnya berkarakter suka menendang, maka permainan yang cocok adalah sepak bola dan aturan mainnya adalah aturan main sepak bola. Kalau belum ada pemain yang memenuhi karakter yang dibutuhkan oleh suatu permainan dengan aturannya, maka tidak ada jalan lain kecuali mencetak pemain yang mempunyai karakter yang diinginkan.

2. **Tanya:** Oh jadi kita harus memiliki pemain ekonomi yang cocok dengan asas kekeluargaan pak De? Dalam satu keluarga itu kan biasanya saling peduli satu dengan lainnya pak De, padahal dalam praktek ekonomi yang saya lihat banyak pedagang yang tidak peduli dengan keselamatan pembelinya. Misalnya, makanan sudah basi, makanan yang diawetkan dengan formalin, atau makanan yang diberi pewarna tekstil.

Answer: Lha kamu mulai paham apa yang pak De maksud. Benar bahwa bila asas kekeluargaan itu dapat diwujudkan - yang artinya kualitas pemain yang dikehendaki dapat diwujudkan - maka ekonomi kita akan sangat menyejahterakan semuanya. Dan pasti sangat efisien. Kita tidak perlu repot mencari informasi - yang tentu membutuhkan biaya dan tenaga - penjual tahu mana yang dapat dipercaya bahwa tahu yang dijualnya memenuhi standard kesehatan yang ditentukan. Dalam sanubari pedagang tahu juga perlu tumbuh perasaan bahwa apa yang dilakukan bukan sekedar cari untung buat dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan kecerdasan konsumennya. Lha kan indah jadinya hidup ini.

3. **Tanya:** Wah kalau sampai masyarakat seperti itu dapat terwujud maka betapa ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan makanan yang banyak dijual di dekat sekolah tempat putra-putrinya belajar ya pak De? Para penjual itu memandang anak-anak sekolah yang menjadi pelanggan dagangannya seperti anak-anaknya sendiri sehingga perlu diberi makanan yang sehat. Begitu kan pak De? Tetapi yang terjadi kan jauh dari itu pak De, bahkan kebalikannya. Terus bagaimana mewujudkan ekonomi yang berasas kekeluargaan tadi?

Answer: Ekonomi dapat dipandang sebagai suatu permainan. Dimana ada pemain dengan karakter bawaannya, ada aturan mainnya, ada outcomenya, dan ada payoff yang diterima oleh masing-masing pemain. Bagaimana kita memandang atau mengasumsikan karakter dari para pemain akan menentukan aturan main yang cocok agar kinerja tertentu - gabungan dari outcome dan payoff - dapat tercapai. Kok kamu mengerenyitkan dahi apa mulai mumet dengan kata-kata pak De?

4. **Tanya:** Maaf pak De, mungkin contoh nyata akan lebih memudahkan saya untuk memahami pikiran yang pak De sampaikan tadi.

Answer: Di Amerika dan negara-negara yang menganut ekonomi pasar dengan kadar yang lebih kuat cenderung memandang para pemain ekonomi itu sebagai individu yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mereka tidak akan pernah berniat - ini baru berniat saja lho - memberikan subsidi bahan bakar minyak sambil pidato berbusa-busa bahwa subsidi tersebut ditujukan bagi golongan yang kurang mampu sehingga golongan mampu dihimbau tidak ikut membeli BBM yang bersubsidi. Sebagai konsekuensi logis dari asumsi mereka tentang karakter pemain ekonomi yang mementingkan diri sendiri, maka mereka yakin sekali bahwa himbauan semacam itu merupakan himbauan yang pasti sia-sia. Memberi subsidi sambil merengek mengeluarkan himbauan seperti itu hanya membuang-buang waktu dan juga hanya untuk memamerkan kebodohan saja. Disparitas harga yang sangat lebar pasti mengundang permainan. Satu kebodohan melahirkan kebodohan berikutnya, yakni distribusi BBM perlu diawasi. Apa si pengawas itu bukan pemain ekonomi juga? Lalu siapa yang mengawasi pengawas? Hurwicz (2008) mengutip kata-kata penulis dari Roma, Juvenal, yang berbunyi "that wives can not be trusted, and keeping them under guard is not a solution - because the guards cannot be trusted either."

5. **Tanya:** Maaf pak De, isu BBM ini kita simpan dahulu untuk kita bahas secara terpisah mengingat isu ini berulang kali muncul menjadi perdebatan publik seolah tidak ada solusinya.

Answer: Nah, disini ada yang sangat mengkhawatirkan pak De. Bukan soal usulmu untuk mendiskusikan BBM secara terpisah. Itu pak De setuju, tetapi ada tanda kuat bahwa bangsa kita ini hobi mengerjakan hal yang kurang perlu agar dianggap sudah bekerja.

6. **Tanya:** Maaf pak De, tampaknya pak De cenderung menggunakan pasar sebagai media untuk melakukan pertukaran. Harga pasarlah yang menggiring orang untuk mengonsumsi dan memproduksi barang dan jasa apa serta berapa. Ada yang bilang, sistem ekonomi pasar itu tidak cocok untuk bangsa kita. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Kalau misalnya pemerintah melarang perdagangan beras karena beras merupakan komoditi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka menurutmu apa yang akan terjadi? Akankah rakyat tunduk pada peraturan yang dibuat pemerintah tersebut?

7. **Tanya:** Terus kita dapat beras dari mana pak De?

Answer: Ya misalnya pemerintah yang menampung seluruh hasil produksi dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat dengan sistem catu. Kalau perlu semua komoditi diperlakukan semacam itu. Intinya tidak boleh ada perdagangan langsung antar anggota masyarakat. Semuanya harus melalui pemerintah. Apakah hidup menjadi lebih indah?

8. **Tanya:** Wah hidup jadi ribet amat pak De? Lalu diperlukan pemerintah segede apa pak De? Pasti terjadi inefisiensi yang luar biasa pak De.

Answer: Pak De suka dengan pertanyaanmu tentang ukuran pemerintah dan inefisiensi yang mungkin terjadi. Jika pemerintah tidak mungkin menghapuskan pasar, maka sebenarnya yang menciptakan pasar itu siapa? Bukankah hal ini berarti bahwa kelahiran pasar itu merupakan proses alami dari interaksi sosial? Pasar itu sendiri tampaknya sangat natural bagi semua masyarakat, tetapi belum tentu semua masyarakat dapat menerima sistem pasar; suatu sistem pasar ada hanya bila pasar berkembang dan berhubungan satu dengan yang lain dengan cara tertentu (Lindblom, 2001). Artinya, jika sistem pasar dilarang maka yang tersisa adalah pasar gelap. Memang benar

bahwa pasar, sebagaimana banyak institusi sosial lainnya, bukanlah institusi yang sempurna yang mampu menghadirkan semua harapan manusia. Yang disebut pasar bebas barangkali juga sekedar mitos dan tidak benar-benar bebas (Friedman, 2003).

Bagaimana Tanya, apa kamu punya pendapat lain atau sanggahan?

9. **Tanya:** Sementara ini Tanya belum punya sanggahan pak De. Tetapi saya menemukan beberapa orang yang dari omongannya sepertinya anti pasar. Banyak dari yang kurang menyukai pasar tersebut adalah orang-orang yang sangat terdidik. Sikap mereka yang tampak anti pasar kan pasti ada alasannya pak De?

Answer: Tentu mereka punya alasan. Menurut pak De, ya setelah mengamati siapa mereka, banyak diantaranya yang sekedar mencari popularitas dan sangat tidak jujur. Beberapa diantaranya memang tidak paham, atau lebih tepatnya tidak menyadari bahwa dia dapat hidup seperti sekarang ini ya karena ada pasar dan sistem pasar.

10. **Tanya:** Wong mencari popularitas saja kok harus dengan cara menipu rakyat yang kurang paham. Apa tidak ada cara yang lebih elegan?

Answer: Wah cara yang lebih elegan itu ya makan waktu jauh lebih panjang dan biasanya orang tidak sabar. Kan lebih cepat cari kain lalu diubel-ubelkan di kepala, lalu saat tiduran menggosok-gosok kening supaya tampak kehitaman dan tidak lupa menghafal beberapa ayat. Selebihnya, tinggal berlagak santun di depan umum dan siap dapat panggilan berjualan ayat.

Tetapi implikasi dari kamu menerima pasar, mungkin belum sampai sistem pasar, barangkali tidak kamu duga Tanya.

11. **Tanya:** Apa itu pak De?

Answer: Apakah kamu menerima bahwa kapitalisme itu sangat natural karena sesuai dengan naluri manusia? Pak De ingatkan lagi bahwa ide dasar kapitalisme itu adalah diakuinya kepemilikan pribadi dan dibolehkannya pertukaran sukarela. Jangan lupa bahwa yang dipertukarkan itu adalah hak, yakni hak yang melekat pada barang yang dipertukarkan.

12. **Tanya:** Tetapi manusia itu memiliki kecenderungan sosial juga lho pak De. Jadi tidak sepenuhnya kapitalis kan pak De?

Answer: Pak De suka dengan pandangan yang seperti ini. Benar demikian adanya Tanya. Tetapi pak De perlu pasti dahulu tentang apa yang kamu maksud dengan kecenderungan sosial tadi.

13. **Tanya:** Gampangnya begini lho pak De peduli dengan nasib orang terlantar yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan yang diambilkan dari gaji kita misalnya. Atau melakukan kerja bakti bersih desa misalnya.

Answer: Kamu perhatikan apa yang sedang terjadi sebelum kamu melakukan kerja sosial tadi. Gaji yang kamu terima itu jelas uangmu. Ada kepemilikan terhadap uang. Tenaga yang kamu sumbangkan untuk bersih desa itu juga tenagamu. Sekali lagi ada kepemilikan. Apa yang kamu miliki itulah yang kamu sumbangkan (pelepasan hak). Dilihat dengan cara seperti ini, maka apa yang kamu sebut sebagai kecenderungan sosial tadi sebenarnya merupakan bentuk kapitalisme juga. Mungkin saja seseorang itu bersedia melepaskan seluruh haknya demi kepentingan sosial, tetapi jelas ada perbedaan antara pelepasan hak secara sukarela dengan pelepasan hak dengan cara dipaksa. Intinya, setiap orang ingin mempunyai kebebasan dari tekanan atau paksaan siapapun (liberalisme) untuk dapat mengembangkan dirinya (individualisme).

14. **Tanya:** Secara akal, penjelasan pak De sangat mudah diterima, tetapi dalam perasaan kok masih ada yang menggajal. Apa mungkin hal seperti ini timbul karena persepsi sebelumnya bahwa kapitalisme itu tidak berperasaan dan sangat materialistis, sementara sosialisme terdengar lebih manusiawi dan penuh dengan solidaritas sosial? Semacam ada rasa malu kepada diri sendiri untuk mengakui bahwa dalam diri ini bersemi jiwa kapitalisme yang merupakan naluri dasar manusia.

Answer: Apapun alasannya, maka adalah baik bila kita bersedia mengakui dengan apa adanya tentang diri kita ini. Pak De sendiri juga sulit memahami bagaimana keinginan menghilangkan penindasan melalui penguasaan kekayaan dilakukan melalui perampasan hak melalui sistem kediktatoran. Menghapus penindasan dengan cara menindas itu apa mungkin? Faktanya, penindasan kekuasaan diktator ini jauh lebih berat dibandingkan penindasan kaum borjuis.

15. **Tanya:** Mungkin jalan tengahnya menjadi bagaimana memanusia-wikan kapitalisme ya pak De? Dunia ini tampaknya bukan tempatnya

first best solution pak De, karena *first best solution* kebanyakan hanya ada dalam konsep atau ide. Kapitalis ya kapitalis tetapi janganlah menindas dan mengeksploitasi orang lain yang kurang beruntung.

Answer: Menurut pak De, kapitalisme sejati justru anti penindasan. Dasar kapitalisme adalah liberalisme, yang didalamnya ada individualisme, dan pertukaran secara sukarela. Jika seseorang menjunjung tinggi kebebasan individu, maka orang tersebut juga harus menghormati kebebasan orang lain yang juga individu. Apa yang terjadi selama ini menurut pak De bukan kapitalisme juga, karena ada pelecehan terhadap kemerdekaan orang lain. Paham seperti itu ya kita sebut saja paham “*sak penak’e dhewe*.”

16. **Tanya:** Jadi menurut pak De sistem perbudakan itu bukan produk dari kapitalisme? Penjajahan suatu negara oleh negara lain itu bukan produk kapitalisme?

Answer: Bukan, itu produk paham “*sak penak’e dhewe*” tadi.

17. **Tanya:** Wah Tanya hampir lupa, “*sak penak’e dhewe*” bahasa apa sih pak De?

Answer: Ah itu kan mirip “*laizzes faire*.” Pertama kali pak De mendengar kata “*laizzes faire*” maka pak De juga bertanya ini bahasa apa sih? Tetapi setelah merenung sejenak kemudian muncul pertanyaan lain yang berbunyi untuk apa menanyakan bahasa apa toh persoalannya adalah bahwa kamu tidak mengerti arti dari kata-kata tersebut, sehingga bahasa apapun dia maka solusinya adalah mencari arti dari kata-kata tersebut.

18. **Tanya:** Jadi paham “*sak penak’e dhewe*” itu apa maksudnya pak De?

Answer: Ya gampangnya sebagai paham liberalisme gadungan; paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu sejauh itu dirinya sendiri. Pihak yang awalnya tertindas, setelah mampu membebaskan diri dari penindasan dengan berjalannya waktu dia berubah menjadi penindas.

19. **Tanya:** Jadi kebebasan orang lain tidak dihargai pak De? Liberalisme apa itu?

Answer: Ya liberalisme gadungan. Dari tadi kan pak De sudah bilang begitu. Tetapi yang perlu pak De tekankan adalah bahwa hal seperti itu, yakni inkonsistensi, juga dapat terjadi padamu dan pak De juga.

Jangan hanya melihat kesalahan yang dibuat orang lain, karena kita sendiripun dapat terjebak oleh hal yang sama tanpa kita sadari.

20. **Tanya:** Apa karena kemunafikannya itu maka kemudian muncul sosialisme sebagai tandingannya?

Answer: Lha itu salahnya sosialisme. Sosialisme bukan melawan kapitalisme, melainkan menyerang kemunafikannya kapitalisme dengan kemunafikan baru yang keterlaluan. Liberalisme yang murni seharusnya membebaskan setiap individu, bukan memperoleh kebebasan individu dengan cara mengorbankan kebebasan individu lainnya. Kebebasan individu, individu siapapun, harus menjadi keperdulian semua individu. Jadi, pembebasan individu dari tekanan dan eksploitasi harus dalam kerangka saling membebaskan. Individu yang sudah bebas menolong individu lain yang belum bebas. Liberalisme yang sejati adalah bebas dan membebaskan.

Sosialisme menyerang kemunafikan kapitalisme dan ingin membebaskan individu dari eksploitasi kaum kapitalis dengan cara merampas kebebasan individu untuk memilih. Bagaimana mungkin menghilangkan penindasan dengan cara paksa, yang sebenarnya merupakan bentuk penindasan juga. Bahkan lebih buruk lagi karena seseorang kemudian menjadi tidak mempunyai pilihan sama sekali dan harus tunduk kepada penguasa yang tidak dapat dihindari.

21. **Tanya:** Kalau liberalisme itu bermakna bebas dan membebaskan, maka bukankah itu sama dengan sosialisme?

Answer: Jawabannya pak De serahkan kepada Tanya saja.

22. **Tanya:** Jadi sebaiknya posisi kita dimana pak De?

Answer: Terserah kamu mau ambil posisi apa. Dalam hal berdagang atau berkegiatan ekonomi secara umum, ada kearifan Jawa sebagai berikut: “tuna satak bathi sanak.” Arti harfiah dari pepatah ini adalah rugi satu tak (satu ukuran uang) tetapi mendapat untung yang berwujud saudara dan persaudaraan. Inilah paham kekeluargaan dalam ekonomi. Persaudaraan diberi tempat yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang berupa materi (uang).

Kamu pasti paham banget bahwa dengan memperoleh keuntungan uang, seseorang dapat memupuk modal. Sebutlah *financial capital*. Tetapi kamu perlu sadar bahwa memperoleh keuntungan berupa persaudaraan itu juga cikal bakal terakumulasinya modal, yaitu modal

sosial (*social capital*). Bila persaudaraan itu dapat terbangun dan berkembang dengan baik maka akan terbentuk modal sosial yang sangat kuat. Hidup dalam masyarakat seperti ini akan terasa aman dan nyaman. Ingat Tanya, semua ini adalah mimpi yang memerlukan kerja sangat keras untuk mewujudkannya.

3.2.2 Membangun Cinta

1. **Tanya:** Bagaimana penjelasan unsur greng atau cinta tadi pak De?

Answer: Seperti halnya dengan *trust*, dalam diri setiap anggota keluarga perlu ditumbuhkan rasa mencintai anggota keluarga lainnya. Rasa cinta ini akan semakin tumbuh bila memperoleh balasan yang diharapkan. Sebaliknya, dia akan mati dan bahkan berbalik menjadi rasa benci bila respon yang diperoleh secara persisten berlawanan dengan respon yang diharapkan.

Dengan rasa cintanya, setiap anggota keluarga saling peduli atas kesejahteraan anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga dalam satu generasi maupun anggota keluarga beda generasi. Dalam ilmu ekonomi ciri ini disebut sebagai sifat altruistik. Fungsi kebahagiaan seorang anggota keluarga, yang dalam ilmu ekonomi disebut fungsi utilitas, merupakan dan mengandung unsur kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Seseorang yang mengejar kebahagiaan pribadinya tidak dapat mengabaikan kebahagiaan orang lain. Ada perasaan sungkan, malu, dan *teposeliro* (bahasa Jawa) yang tertanam kuat untuk senang sendiri tanpa memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Perilaku altruistik dapat mengurangi perbedaan diantara para aktor politik (Frohlich, 1974). Selanjutnya, Frohlich et al. (1984) menemukan bahwa altruism mempunyai peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan seseorang. Diri manusia tidak sepenuhnya diisi oleh self-interest. Masih ada ruang untuk memikirkan kepentingan orang lain.

Hal ini berimplikasi kepada bagaimana keluarga ini mendistribusikan kekayaan antar anggota dalam satu generasi maupun antar generasi. Dalam hal distribusi kekayaan antar anggota dalam satu generasi, pemerintah perlu mengembangkan program jaminan kesejahteraan sosial untuk menolong kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, peraturan perpajakan, khususnya pajak pendapatan, harus mencerminkan keperluan distribusi kekayaan antar anggota masyarakat. Sebenarnya, memasukkan kuantitas barang yang dikonsumsi oleh orang

lain sebagai argumen dalam fungsi utilitas seseorang sudah pernah disebutkan oleh Adam Smith (Fitzgerald, 1975). Sekarang, pemodelan dengan memasukkan utility orang lain dalam utility seseorang sering dijumpai (lihat Bernheim & Stark, 1988; Hultkrantz, 1992; Jouvet et al., 2000).

Menurut Reisman (1998), economics and capitalism are a comparable challenge to the morality of altruism. Sebagai pembela kapitalisme yang membabi buta biarlah Reisman mengatakan seperti itu. Adalah hak pak De untuk tidak sependapat dengan Reisman. Menurut pak De preference seseorang tanpa *altruism* tidak lebih benar dari preference orang lain yang dengan *altruism*. Tidak ada alasan moral untuk menyalahkan preference seseorang. *Altruism* dan *self-interest* tidak harus bertentangan. Sangat dimungkinkan bahwa *altruism* itu bagian dari *self-interest*. Jika membelanjakan uang untuk tiket menonton komedi ternyata dilakukan oleh banyak orang karena memang menimbulkan kepuasan, mengapa membelanjakan uang untuk menyenangkan orang lain (*altruistik*) tidak mungkin menimbulkan kepuasan pada diri pembelanja (*self-interest*)? Hal demikian sudah disampaikan oleh Adam Smith dalam karyanya "Theory of Moral Sentiment" yang sayangnya lebih jarang dilihat orang dibandingkan karya besar lainnya, yakni "The Wealth of Nation" (Gintis et al., 2005).

Implikasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyiapkan anggota keluarga yang mempunyai ciri altruistik. Sifat altruistik ini perlu ditanamkan sejak dini. Cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan nasional yang dibiayai dengan uang rakyat harus mampu menghasilkan manusia yang berkarakter altruistik. *Altruism* akan membangun norma sosial yang memudahkan terjadinya kegiatan kolektif atau gotong royong untuk kepentingan bersama (Ostrom, 2000).

Distribusi kekayaan antar generasi yang adil merupakan syarat harus bagi pembangunan yang berkelanjutan. Efisiensi penggunaan sumberdaya alam harus dilakukan dari waktu ke waktu. Kerusakan lingkungan merupakan tanda adanya inefisiensi penggunaan sumberdaya alam. Penggunaan sumberdaya alam oleh satu generasi tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi berikutnya, suatu generasi yang sering menjadi korban karena belum mempunyai suara. Generasi tanpa suara inilah yang sering dipaksa memberi subsidi kepada generasi sebelumnya yang umumnya disangka banyak orang sebagai subsidi

dari pemerintah. Pandangan yang salah namun tidak disadari ini sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperoleh dukungan rakyat yang hidup saat itu. Banyak kalangan yang benar-benar ingin menolong kelompok yang kurang beruntung secara tidak sadar sedang mengorbankan kelompok yang kurang beruntung lainnya karena belum mempunyai suara.

Dengan rasa cinta pula, setiap anggota keluarga menghormati keunikan anggota keluarga lainnya. Jadi, individualitas anggota keluarga diakui dan dihormati. Biarlah setiap anggota keluarga merasa bahagia atas siapa dirinya. Dengan keunikannya masing-masing, setiap anggota keluarga menyumbangkan karya terbaiknya bagi kebesaran dan kejayaan keluarganya. Kebhinekaan dihormati. Suatu sistem yang anggotanya sangat beragam secara umum lebih mantap dibanding sistem yang anggotanya seragam.

Tertanamnya saling percaya dan saling cinta diharapkan dapat menumbuhkan unsur-unsur sistem keluarga yang kuat, yakni kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi.⁴

Ringkasnya, *trust* berfungsi sebagai pelumas hubungan sosial. Jangan pernah menghancurkan *trust* orang kepada kita, karena sekali *trust* hancur maka sulit sekali untuk membangunnya kembali.

Sekarang sudah terlalu larut malam, menjelang subuh bahkan, soal koperasi kita bahas besok malam saja. Kita istirahat dahulu.

2. **Tanya:** Baik pak De, terima kasih.

Answer: Sama-sama. Silahkan istirahat.

3.3 Penting Bagi Negara dan Mengusai Hajat Hidup Orang Banyak

Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Apa pengertian cabang produksi? Bagaimana membedakan cabang produksi yang penting dari cabang produksi yang tidak penting? Apa pengertian dan kriteria menguasai hajat hidup orang banyak?

⁴http://www.essortment.com/wahtarefamily_ralm.htm

Dua ide besar dalam ayat 3 di atas dihubungkan dengan kata “dan” bukan dengan kata “atau.” Berdasarkan tingkat kepentingan bagi negara dan penguasaan hajat hidup orang banyak, kita dapat menyusun empat kombinasi besar, yaitu:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan susunan kalimat dalam ayat 3, cabang produksi yang termasuk kombinasi pertama harus dikuasai oleh negara. Jadi sifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan syarat cukup bagi negara untuk menguasainya. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa cabang produksi yang termasuk tiga kategori lainnya tidak dapat dikuasai oleh negara. Tafsir dikuasai oleh negara ini akan dibahas pada bagian tersendiri.

Bagaimana menilai penting tidaknya suatu cabang produksi? Apakah kriteria berikut dapat dipertimbangkan?

1. Memiliki sifat kerahasiaan yang vital bagi pertahanan dan keamanan negara.
2. Menghasilkan barang yang bernilai strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.
3. Menyerap banyak tenaga kerja.
4. Menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah tinggi.
5. Menyandarkan pada sumberdaya dalam negeri.
6. Melancarkan dan mempermudah transaksi.

Apakah cabang produksi pertanian, khususnya produksi pangan, penting bagi negara? Pangan, khususnya beras, tidak dapat disangkal menguasai hajat hidup orang banyak. Kecukupan pangan yang tersedia sepanjang

waktu di semua wilayah negara jelas sangat penting bagi ketahanan suatu negara. Apakah kemudian cabang produksi yang menghasilkan beras penting bagi negara? Saya yakin bahwa sebagian besar orang, khususnya aparat negara, akan memandang bahwa cabang produksi yang menghasilkan beras adalah penting bagi negara. Disamping produknya yang bersifat strategis bagi keamanan negara, pertanian penghasil pangan menyerap sangat banyak tenaga kerja. Unsur penting bagi negara dan unsur menguasai hajat hidup orang banyak telah terpenuhi dalam kasus beras. Jadi, cabang produksi beras harus dikuasai oleh negara!/? Bagaimana wujud penguasaan oleh negara itu?

3.4 Dikuasai Oleh Negara

Ungkapan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 diterapkan pada dua hal, yakni (1) pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan (2) pada bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penerapan pertama pada proses produksi, sedangkan penerapan kedua pada kekayaan alam yang keberadaannya tanpa campur tangan manusia.

3.4.1 Cabang Produksi

Meskipun telah dihilangkan melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, mencermati kembali penjelasan UUD 1945 yang asli sangat berguna untuk menduga ide awal yang terkandung dalam pikiran para penciptanya. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke

tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bentuk rumusan di atas mencerminkan paling tidak dua hal, yakni (1) model ekonomi negara-negara Skandinavia waktu itu dan (2) respon Karl Marx terhadap sistem kapitalisme primitif yang menghisap. Jaman terus berkembang, sistem sosialisme ortodoks runtuh, sementara sistem kapitalisme berkembang ke arah yang lebih manusiawi.⁵

Dengan bunyi penjelasan seperti di atas, kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan mudah mendapatkan legitimasi. Banyak kalangan masih sangat keberatan dengan hadirnya produsen minyak dan listrik swasta. Tetapi belum pernah ada orang yang meneriakkan agar beras, yang jelas lebih strategis dibanding minyak dan listrik⁶, diproduksi oleh perusahaan negara. Jelas terjadi inkonsistensi yang luar biasa namun menguntungkan disini. Di beberapa negara yang produksi pangannya dilakukan oleh negara sering terjadi antrian panjang sekedar untuk memperoleh sepotong roti berkualitas rendah. Sukurlah produksi pangan di Indonesia dilakukan oleh swasta dalam bentuk pribadi orang seorang yang berjumlah jutaan. Oleh karena itu, ketakutan seperti tersirat dalam penjelasan atas pasal 33 seperti dikutip di atas sebenarnya tidak cukup beralasan. Ingatkah kita pada saat telekomunikasi masih dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan negara? Kita selalu dihimbau dengan kata-kata bicaralah seperlunya. Kini, tatkala swasta telah ikut terlibat dalam industri ini, kita didorong untuk banyak berkomunikasi. Sekarang listrik masih dikuasai secara penuh oleh perusahaan milik negara dan kita selalu dihimbau untuk memakai listrik seperlunya. Himbuan ini mengirimkan pesan singkat dan padat kepada investor bahwa Indonesia kekurangan pasokan listrik sehingga kurang baik bagi investasi.⁷

Sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan yang bersifat tetap, sedangkan penguasaan oleh negara adalah instrumen yang dapat

⁵Arief, Sritua. 2002. Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat.

⁶Kakek dan nenek saya selama hidupnya, yang kurang lebih 90 tahun, tidak pernah menikmati listrik tetapi menikmati nasi.

⁷Ketika suatu produsen menghimbau pelanggannya untuk melakukan pengurangan konsumsi produk dari produsen tersebut, kita tahu bahwa ada yang salah dengan situasi yang sedang terjadi.

mengambil berbagai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Karena dikuasai oleh negara merupakan instrumen, negara tidak harus selalu menjadi pihak yang berkecimpung langsung dalam proses produksi. Dengan kata lain, bila diketahui ada pihak swasta yang mampu melakukan proses produksi dengan lebih efisien dibanding pemerintah maka proses produksi dapat diserahkan kepada pihak swasta.

Jadi pengertian dikuasai oleh negara sebaiknya ditafsirkan sebagai kewajiban negara untuk memberi perhatian khusus terhadap suatu proses produksi demi menjamin tercapainya kemakmuran yang maksimum. Dalam kasus proses produksi tersebut dilaksanakan oleh swasta, pemerintah berhak dan berkewajiban melakukan regulasi dengan tujuan mencapai kemakmuran tertinggi.⁸ Dalam hal tidak atau belum ada pihak swasta yang bersedia melakukan proses produksi barang atau jasa yang dimaksud, maka pemerintah yang wajib mengambil alih peran tersebut. Disini peran pemerintah sebagai pelopor di wilayah “frontier.” Manakala keterlibatan sektor swasta dalam industri yang dimaksud telah mencapai “critical mass”, maka peran pemerintah harus dikurangi dan memulai wilayah “frontier” lainnya. Demikian proses ini berlanjut hingga pada akhirnya peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa terbatas hanya pada barang dan jasa yang tidak pernah diproduksi oleh sektor swasta.

Tafsir di atas agaknya senada dengan pernyataan Bung Hatta bahwa

‘Dikuasai oleh negara’ dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. Lebih tepat kalau dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal (Atmadi, 2004).

3.4.2 Kekayaan Alam

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 1 angka 2 UU 5 tahun 1960 pada dasarnya mengamanatkan bahwa negara mempunyai *kekuasaan dasar* atas segala sesuatu yang terjadi secara alami yang berada di dalam wilayah atau ruang Republik Indonesia. *Kekuasaan dasar* ini bersifat tetap dan

⁸Termasuk dalam kekuasaan regulasi tersebut adalah kekuasaan untuk memaksa semua pihak yang terlibat dalam pasar untuk menyampaikan informasi yang benar dan selengkap mungkin kepada publik sebagai salah satu syarat terjadinya transaksi yang efisien.

tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun sejauh kekuasaan tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam *kekuasaan dasar* ini melekat semua *bentuk hak* yang mungkin. Ambillah contoh sebidang tanah. Pada awalnya, seluruh bidang tanah harus dikuasai oleh negara. Negara dapat melimpahkan kekuasaan ini kepada orang tanpa harus menghilangkan *kekuasaan dasar* negara atas tanah tersebut. Ketika negara membutuhkannya, maka negara dapat dicabut kembali kekuasaan yang telah dialihkan yang bila tidak dilakukan negara akan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Jadi, kekuasaan orang seorang atas sebidang tanah tersebut merupakan *kekuasaan turunan* yang diberikan oleh negara sebagai pemegang *kekuasaan dasar*. *Kekuasaan turunan* ini mengandung *bentuk hak* tertentu saja, bukan semua *bentuk hak* yang mungkin.

Kekuasaan orang seorang atas sebidang tanah tidak menjangkau kekuasaan atas kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam sebidang tanah tersebut. Seorang petani Amerika yang menemukan sumber minyak di dalam tanah yang dimilikinya otomatis menguasai sumber minyak tersebut. Hal demikian tidak dapat dilakukan oleh petani Indonesia, karena minyak di dalam tanah tersebut bukan hasil karya petani yang bersangkutan. Anugerah alam tersebut tetap milik seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi oleh kekuasaan negara atas kekayaan alam. Petani Indonesia hanya diijinkan untuk menguasai kekayaan yang timbul dari sebidang tanah yang dikuasainya tersebut sebagai hasil dari penerapan akal budi petani yang bersangkutan.

Satu hal yang tidak boleh dilanggar dalam pengalihan kekuasaan negara atas kekayaan alam kepada pribadi adalah bahwa negara tidak boleh dimiskinkan. Dengan kata lain, imbalan atas pengalihan kekuasaan tersebut haruslah sepadan. Karena kemampuannya yang masih terbatas, negara dapat saja mengalihkan kekuasaan mengeksploitasi minyak kepada badan swasta tetapi kekayaan bersih dari minyak tersebut harus tetap menjadi milik negara setelah memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi badan swasta yang bersangkutan. Implikasi dari kemampuan yang masih terbatas, keterlibatan negara - melalui badan pemerintah - secara langsung dapat menyebabkan biaya eksploitasi yang lebih tinggi sehingga kekayaan bersih yang diperoleh menjadi lebih kecil. Jika pengalihan eksploitasi kepada badan swasta tidak menghasilkan kekayaan bersih yang sama atau lebih besar dari kekayaan bersih yang diperoleh melalui keterlibatan pemerintah secara langsung, maka pengalihan tersebut sesungguhnya telah memiskinkan negara. Hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Kepentingan

pribadi dari orang yang menjalankan kekuasaan negara tersebut seringkali menghasilkan pengalihan kekuasaan yang memiskinkan negara. Inilah problem yang dihadapi oleh negara yang kaya sumberdaya alam, tetapi miskin sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial.⁹

3.5 Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Bagaimana mengukur kemakmuran? Dalam ilmu ekonomi, kemakmuran diukur dengan total surplus yang dinikmati produsen dan konsumen. Surplus produsen merupakan selisih antara harga yang diterima oleh produsen dengan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang yang dijualnya. Surplus konsumen adalah selisih antara tingkat kebersediaan membayar konsumen atas suatu barang atau jasa dengan harga yang benar-benar dibayarkan.

Tergantung kepada struktur pasar, adanya eksternalitas, informasi, dan biaya transaksi, nilai kesejahteraan dapat mencapai maksimum tetapi dapat juga kurang dari maksimum. Oleh karena itu, pernyataan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” mempunyai pengertian bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab mengelola ekonomi negara sehingga mencapai nilai maksimum. Dengan kata lain, “sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah konsisten dengan memaksimumkan efisiensi dan peran pemerintah adalah meniadakan inefisiensi yang ada.

Sebesar-besar kemakmuran rakyat ini harus menjadi patokan setiap kebijakan ekonomi. Artinya, setiap kebijakan ekonomi perlu diuji apakah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau tidak. Suatu kebijakan yang berdampak pada pengurangan kesejahteraan rakyat tidak boleh dilanjutkan. Namun, perlu disadari bahwa suatu kebijakan umumnya bersifat menguntungkan satu kelompok dan pada saat yang sama merugikan kelompok

⁹Sebagai contoh adalah pengalihan eksploitasi hutan alam. Angka-angka yang digunakan merupakan angka yang sangat kasar meskipun diupayakan mendekati realitas. Dianggap bahwa setiap hektar hutan alam menghasilkan 30 m³ dengan biaya produksi 500.000 rupiah dan harga jual 1.300.000 rupiah per m³. Selain biaya produksi, pemegang kuasa eksploitasi harus membayar dana reboisasi (DR) sebesar 14 dolar per m³ dan provisi sumberdaya hutan (PSDH) sebesar 10% dari nilai kayu dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah sebesar 600000 rupiah per m³. Dengan asumsi nilai tukar 10.000 rupiah per dolar, maka keuntungan yang diterima pemegang kuasa eksploitasi hutana alam adalah 18.000.000 rupiah per hektar, sedangkan negara menerima hasil bersih sebesar 1.800.000 rupiah yang berasal dari PSDH. Catatan: DR merupakan dana yang harus digunakan untuk melakukan pembinaan hutan. Memang benar bahwa pemegang kuasa eksploitasi masih harus membayar iuran ijin dan pajak bumi dan bangunan yang nilainya sangat kecil. Inilah salah satu contoh kecil pengalihan kekuasaan yang memiskinkan negara yang dimaksudkan.

lain. Oleh karena itu, kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan perlu dibarengi dengan kebijakan lain yang berfungsi meredistribusikan kenaikan kesejahteraan yang diperoleh.

Banyak perdebatan dilakukan antara pembela pertumbuhan ekonomi dan pembela pemerataan pendapatan. Perdebatan ini terjadi akibat dari anggapan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berbanding terbalik. Argumennya sangat simpel yang kurang lebih berlangsung sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang hanya mungkin dilakukan bila ada tabungan. Tingkat konsumsi (propensity to consume)¹⁰ kelompok berpendapatan lebih tinggi umumnya lebih kecil. Misalnya, sebagian besar pendapatan tukang becak akan habis untuk kebutuhan makan, tetapi bagi seorang konglomerat kebutuhan makan itu mungkin tidak sampai satu persen dari pendapatannya. Jadi, kalau pendapatan ekonomi dibagikan kepada kelompok berpendapatan rendah maka sebagian besar akan dikonsumsi. Akibatnya, tabungan dan investasi menjadi kurang yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan memang ada bukti empiriknya. Namun, kita perlu mempertanyakan apakah hubungan negatif tersebut berlaku untuk semua keadaan? Lagi pula, bukankah tujuan akhir ekonomi itu adalah sebesar-besar kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dan bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Kita tahu bahwa manfaat tambahan uang 1000 rupiah per hari bagi orang yang berpendapatan 10000 rupiah per hari jauh lebih besar dibandingkan manfaat 1000 rupiah per hari bagi orang yang berpendapatan satu juta rupiah per hari. Dengan kata lain, sebesar-besar kemakmuran rakyat itu juga ada kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka negara bertanggung jawab atas efisiensi proses produksi dan distribusi pendapatan.

3.6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. **Tanya:** Beberapa fenomena berikut ini sangat mengganggu pikiran
Tanya:

(a) Ketika rakyat memproduksi kopi, karet, kelapa sawit, coklat, tebu

¹⁰Propensity to consume+Propensity to save=100%.

dan sebagainya, perlukah pemerintah melalui BUMN juga memproduksi barang yang sama? Bukankah hal tersebut berpotensi menimbulkan persaingan produksi antara negara dan rakyatnya sendiri? Persaingan dalam memperoleh input produksi juga potensial terjadi.

- (b) Kasus rebutan lahan di Takalar - Sulawesi Selatan antara masyarakat dan PTPN XIV sungguh sangat memilukan. Sebuah BUMN berperang melawan rakyat yang seharusnya dimakmurkannya. Konflik serupa terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan masih banyak tempat lainnya. Pertanyaan pokoknya adalah apakah tujuan yang hendak dicapai oleh negara sebagai pemilik PTPN XIV berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat? Tidakkah ada keseiringan atau bahkan kesamaan tujuan di antara keduanya?
- (c) Ketika rakyat gagal memakmurkan dirinya sendiri karena berbagai keterbatasan, maka negara wajib turun tangan karena disitulah tujuan manusia membentuk negara. Sebaliknya, ketika rakyat dapat memakmurkan dirinya sendiri, maka negara seharusnya memfasilitasi dan tidak menghambatnya. Sungguh ironis, suatu BUMN yang semestinya menjadi kendaraan rakyat untuk menggapai kemakmuran malah menggilas rakyat yang seharusnya dimakmurkannya.

Peran BUMN menurut pak De salah kaprah. Kita perlu mengkaji ulang dan mendudukkan BUMN dalam perekonomian nasional agar menjadi alat yang lebih efektif dalam upaya mewujudkan “sebesar-besar kemakmuran rakyat.” BUMN yang kita butuhkan adalah BUMN yang mampu memberdayakan dan memakmurkan rakyat, bukan BUMN yang mengejar rente ekonomi dengan cara menggusur rakyat. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Membahas BUMN dengan nada gugatan cenderung menggelitik orang untuk membuat antisipasi bahwa diskusi mengalir ke arah privatisasi. Antisipasi ini sangat tepat, tetapi sebagian besar orang mempunyai pengertian yang kurang tepat tentang privatisasi. Pengertian yang kurang tepat itu pula yang dipercaya. Singkatnya, telah terjadi miskonsepsi dan mispersepsi. Satu hal yang harus disadari adalah bahwa ketika seseorang telah mempunyai persepsi tertentu di dalam benaknya, maka informasi baru apapun yang diterima cende-

rung disusun sedemikian rupa sehingga “membenarkan” persepsi yang telah ada betapapun jauhnya persepsi tersebut dengan realita yang dikandung dalam informasi yang baru diterimanya. Persepsi menentukan jalannya cerita, bukan cerita membentuk persepsi. Hal seperti ini umum terjadi pada sebagian besar orang. Marilah kita mencermati berbagai fakta

Padi merupakan produk yang paling strategis dan juga paling menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa yang memproduksi padi? Point terpenting disini adalah bahwa usaha swasta tidak harus berwujud usaha skala besar. Apakah listrik lebih penting dan lebih menguasai hajat hidup orang banyak dibandingkan padi? Kita semua tahu bahwa beras bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi juga merupakan komoditas politik. Dua pemerintahan yang sangat kuat di negara ini, Regim Soekarno dan Regim Suharto, tumbang ketika rakyat kesulitan membeli beras. Untungnya, beras diproduksi oleh swasta dalam wujud petani kecil. Dapat dibayangkan apa yang terjadi bila padi diproduksi oleh negara seperti negara memproduksi minyak dan listrik yang ketersediaannya sering mengecewakan.

Dalam hal kedaulatan, rakyat lebih berdaulat dalam hal pangan atau minyak dan listrik? Menurut pak De, kedaulatan rakyat dalam hal pangan jauh lebih kuat ketimbang kedaulatan rakyat dalam hal minyak dan listrik. Bahkan, dalam hal minyak dan listrik rakyat tidak memiliki kedaulatan sama sekali. Pak De sangat tidak mengerti bagaimana mungkin negara sebesar ini untuk urusan energi yang sangat strategis diserahkan kepada hanya satu pihak.

Mengapa banyak orang dihindangi rasa curiga yang berlebihan terhadap peran swasta. Di banyak negara, minyak dan listrik juga disediakan oleh usaha swasta dan mereka dapat hidup dengan nyaman. Beberapa pihak menggunakan pesan konstitusi untuk membela peran BUMN. Ayat 2 dan ayat 3 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa:

- Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- Ayat 3. Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci penting dalam Pasal 33 tersebut adalah “dikuasai oleh negara.” Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi sebagai berikut: Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Disini ada ungkapan “orang seorang yang berkuasa.” Produsen orang seorang yang berkuasa itu seperti apa? Dalam ilmu ekonomi, produsen seperti ini adalah produsen yang mampu mempengaruhi pasar. Bahasa menterengnya produsen yang memiliki *market power*. Gampangnya, produsen yang mampu mendikte harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jelas, sasaran tembak Pasal 33 UUD 1945 adalah monopolis, oligopolis, monopsonis, oligopsonis, bukan lembaga swasta yang kompetitif yang pasti tidak memiliki *market power*.

3.6.1 Pengertian BUMN

1. **Tanya:** Apa sebenarnya beda antara Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan BUMN? Bagaimana sampai timbul kesan bahwa BUMN itu tidak seefisien BUMS? Bila hal tersebut bukan sekedar kesan, adakah cara untuk menekan inefisiensi tersebut sehingga kinerja BUMN dan BUMS menjadi kurang lebih berimbang.

Answer: Apakah kita perlu memiliki BUMN? Jawaban terhadap pertanyaan ini secara garis besar terbelah menjadi dua, yakni perlu dan tidak perlu. Kelompok yang menjawab tidak perlu ada BUMN berdasarkan argumennya pada isu inefisiensi yang terlalu sering terjadi pada BUMN (Dewenter & Malatesta, 2001). Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa privatisasi merupakan keharusan (Boycko et al., 1996). Secara umum, kinerja BUMN di Indonesia kalah jauh dibanding kinerja BUMS. Bahkan sangat mudah menunjukkan BUMN yang berkinerja sangat buruk, bahkan merugi terus, meskipun BUMN tersebut beroperasi sebagai monopoli. Kelompok pendukung BUMN

mengangkat sukses banyak BUMN di dunia, khususnya BUMN di negara maju yang bermazhab pasar bebas yang sangat kuat. Singapore Airlines merupakan contoh favorit dari BUMN yang paling sukses. Memang benar, beberapa perusahaan kelas dunia dimiliki oleh negara. Perdebatan pada level ini sebenarnya bukanlah perdebatan yang bermakna, melainkan sekedar debat kusir di kepengapan jalanan yang semakin semrawut.

Debat kusir di atas terjadi karena BUMN dilihat hanya sebatas kepemilikannya saja, sedangkan masih ada isu lain yang melekat pada BUMN yang perlu dilihat lebih jauh sebelum menjatuhkan vonis perlu tidaknya memiliki BUMN. Satu isu yang sangat penting adalah siapa regim yang mengendalikan suatu BUMN. Berbagai isu lain sangat mungkin mempengaruhi kinerja BUMN, seperti misi yang diemban, nilai yang dianut, perlakuan yang diberikan pemerintah dan lain sebagainya. Dalam seksi ini, kita akan memfokuskan diri pada isu regim manajemen pengendali BUMN saja.

Laffont & Tirole (1991) mendefinisikan BUMN sebagai suatu badan usaha yang asetnya secara mayoritas dimiliki oleh pemerintah, yang selanjutnya melakukan kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal adalah kontrol input terhadap input badan usaha dan proses minimisasi biaya: pengaruh pada input managerial melalui skema insentif managerial, intervensi dalam pengambilan keputusan mengenai tenaga kerja, level, lokasi, dan tipe investasi, pinjaman, dan sebagainya. Kontrol eksternal merupakan kontrol semua variabel yang menghubungkan badan usaha dengan pihak luar: konsumen (regulasi harga, kualitas, seleksi produk, dll), pesaing (regulasi memasuki industri, harga akses), pembayar pajak (audit biaya).

Ketika pemerintah membentuk sebuah perseroan terbatas, maka pemerintah secara otomatis menjadi pemilik privat dari perusahaan tersebut, memegang saham di perusahaan yang bersangkutan, bertindak sebagai pemegang saham. Bila telah didirikan, BUMN menjadi perusahaan yang independen secara finansial, bertindak di bawah undang-undang perseroan terbatas (Lane, 2000). Ada dua tipe ideal regim pengendali BUMN, yakni regim tradisional dan regim neo-liberal (Lane, 2005). Regim tradisional memandang BUMN berada antara suatu biro dan suatu perusahaan - model trading department.¹¹ Regim neo-

¹¹Biro merupakan tempat para pegawai yang bekerja dengan berbagai aturan yang rigid dan rumit, dimana

liberal, atau disebut juga model sektor swasta perusahaan saham gabungan, beroperasi dalam suatu lingkungan yang tidak diregulasi dan peran pemerintah terbatas hanya sebagai pemilik saham. Dari segi efisiensi, regim neo-liberal ini mengungguli regim tradisional, tetapi masih ada masalah lain yang lazim disebut dengan masalah principal-agent (Ricketts, 2002). Masalah ini juga dihadapi oleh BUMS (Shleifer & Vishny, 1997).

Pemilik perusahaan adalah pihak yang memiliki andil dua hak formal: hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk memiliki sisa atau lebih dikenal dengan laba (Hansmann, 1988). Hak formal ini penting terutama dalam memilih manajemen puncak yang akan menjalankan perusahaan. Senada dengan pengertian tersebut Monks & Minow (2004) menyatakan bahwa kepemilikan dicirikan oleh hak menggunakan, hak penggunaan oleh orang lain, hak melakukan transfer, dan tanggung jawab bahwa pemakaiannya tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Ciri keempat dianggap terlalu lemah dan masih menjadi perdebatan. Tetapi jelas bahwa kepemilikan dicirikan oleh adanya beberapa hak yang dikuasai oleh pemilik.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membahas tata kelola suatu entitas bisnis, yakni hak mengendalikan, hak mengambil keputusan, dan hak sisa (Ricketts, 2002). Hak mengendalikan yang terpenting adalah berkaitan dengan pertanyaan siapa yang mempunyai hak untuk menunjuk manajemen puncak. Mengingat BUMN dimiliki oleh negara yang diwakili oleh pemerintah, penunjukkan manajemen puncak ini dapat diwarnai oleh berbagai kepentingan dan nilai. Disinilah yang akan banyak membedakan BUMN dari BUMS yang umumnya bekerja hanya dengan satu nilai, yakni mencari laba semaksimal mungkin. Dari sudut ini, kepemilikan menjadi mempunyai pengaruh pada kinerja organisasi bisnis (Frydman et al., 2000). Hak mengambil keputusan tersebar di seluruh level organisasi. Akhirnya, hak sisa dimiliki oleh pemegang saham, yang dalam kasus BUMN maka pemegang saham adalah pemerintah.

Jadi, kinerja sebuah BUMN pada dasarnya ditentukan oleh bagaimana penggunaan berbagai hak yang melekat itu, terutama hak untuk menentukan tipe regim pengendalian. Pada umumnya, BUMN di Indonesia memiliki tipe regim pengendalian tradisional. Sementara

aturan tersebut lebih dimaksudkan untuk mempertahankan dominasi dari pegawai ketimbang untuk meningkatkan pelayanan publik.

itu, BUMN di banyak negara maju telah bergeser ke arah regim pengendalian neo-liberal dimana manajemen diserahkan kepada manajer profesional yang direkrut semata berdasarkan pertimbangan profesi. Oleh karena itu, membandingkan BUMN Indonesia dengan BUMN yang sukses di negara maju sebenarnya membandingkan dua tipe regim pengendalian yang bertolak belakang. Hal ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMN sebenarnya selalu harus melalui privatisasi, melainkan dapat dengan cara korporatisasi (Aivaziana et al., 2005; Choudhury & Khanna, 2009).¹²

3.6.2 Peran BUMN

1. **Tanya:** Dari uraian diatas, menurut pak De peran BUMN yang lebih tepat itu seperti apa?

Answer: Dalam pandangan pak De, BUMN haruslah berfungsi sebagai alat negara untuk:

- (a) Memberdayakan rakyat dalam bidang ekonomi sehingga setiap warga negara Indonesia menjadi aset produktif bangsa sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan memberi sumbangan bagi bangsa dan negaranya. Pemilikan aset produktif dan kemampuan untuk mengakuisisinya bagi sebagian besar rakyat Indonesia masih sangat terbatas. BUMN perlu berperan membantu rakyat dalam mengakuisisi aset produktif tersebut. Dengan cara ini diharapkan pembagian aset produktif nasional menjadi lebih merata dengan implikasi pemerataan pendapatan dan kekayaan nasional yang lebih mendekati keadilan sosial yang kita cita-citakan.
- (b) Mendistribusikan secara adil nilai tambah yang diperoleh dari proses produksi. Sebagai contoh, pak De mengangkat sektor pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar diantaranya menjual hasil pertaniannya sebagai produk primer yang mempunyai nilai tambah sangat kecil. Nilai tambah yang besar umumnya diperoleh setelah ada proses pengolahan lebih lanjut. BUMN seharusnya berperan membuka kesempatan kepada petani untuk menikmati nilai tambah dari hasil proses pengolahan. Misalnya, agar lebih jelas,

¹²Salah satu bentuk korporatisasi adalah restrukturisasi sistem tata kelola internal sehingga tata kelola internal BUMN menyerupai tata kelola BUMS. Perbedaan keduanya hanyalah pemegang saham mayoritasnya.

BUMN seharusnya membantu petani tebu untuk memiliki pabrik gula sendiri. Setiap pekerja harus juga mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari nilai tambah tersebut. Artinya, disamping sebagai pekerja, seorang pekerja juga perlu memiliki saham di tempatnya bekerja.

- (c) Memelopori pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Keteringgalan suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan infrastrukturnya. Keterbatasan infrastruktur tersebut merupakan hambatan masuknya investasi dari sektor swasta. Tanpa harus terlalu mengorbankan prinsip perimbangan antara biaya dan manfaat dari suatu investasi, BUMN perlu lebih pro-aktif memelopori pembangunan wilayah miskin infrastruktur tersebut. Memang benar bahwa pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kewajiban negara. Tetapi, BUMN sebagai alat negara untuk pembangunan ekonomi sangat mungkin diberi tugas membangun infrastruktur. Bahkan pendanaan pembangunannya dapat lebih fleksibel karena tidak perlu terikat oleh kebijakan fiskal yang melibatkan proses politik yang rumit dan bertele-tele.

2. **Tanya:** Dengan demikian, melalui BUMN rakyat menjadi lebih cepat makmur, bukan terancam tergusur ya pak De?

Answer: Persis. Kalau negara ini tidak mampu memberikan lapangan kerja bagi warganya, maka janganlah negara malah membebani mereka dengan ancaman penggusuran. Tidak pantas dan bukan tujuan negara ini didirikan bila negara bersaing dengan rakyatnya sendiri. Fungsi BUMN haruslah memperkuat kedaulatan rakyat atas ekonomi, bukan malah menghilangkan kedaulatan rakyat.

3. **Tanya:** Pak De, ketika rakyat sangat tergantung pada suatu BUMN, sebutlah PLN untuk listrik dan Pertamina untuk bahan bakar minyak, sebenarnya dimana letak kedaulatan rakyatnya? Dihadapan PLN dan Pertamina, menurut penglihatan Tanya, rakyat sangat tidak berdaya. Bagaimana mungkin rakyat yang tidak berdaya kok dibilang berdaulat?

Answer: Pak De sependapat denganmu Tanya. Tampaknya kedaulatan itu juga hanya sekedar retorika untuk menghantam sistem pasar dengan peran swasta yang sangat kuat. Sekali lagi, ketika pak De menyebut swasta maka tidak perlu dengan serta merta diasosiasikan

dengan usaha skala besar. Kita juga tidak perlu alergi terhadap usaha skala besar bila hal tersebut menguntungkan rakyat banyak.

3.7 Privatisasi Merugikan Rakyat?

1. **Tanya:** Sekarang soal privatisasi pak De. Dengan alasan peningkatan inefisiensi, banyak pemerintah di dunia yang melakukan privatisasi badan usaha yang dikelola oleh pemerintah (BUMN). Privatisasi biasanya memperoleh dukungan oleh pihak yang mempunyai paham konservatisme atau kapitalisme dan sebaliknya tantangan biasanya datang dari pihak yang mempunyai kecenderungan sosialisme. Argumen penentang privatisasi biasanya mengalir sebagai berikut: Perusahaan privat berorientasi mencari keuntungan sehingga privatisasi akan merugikan kepentingan publik.

Lebih daripada itu, ayat 2 dan ayat 3 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa:

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci penting dalam Pasal 33 tersebut adalah “dikuasai oleh negara.” Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi sebagai berikut: Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Answer: Banyak orang yang berpendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945 ini sudah sangat gamblang. Arti “dikuasai oleh negara” adalah bahwa

proses produksi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak “dilakukan” langsung oleh negara, misalnya melalui BUMN. Contohnya adalah minyak yang dikuasai oleh Pertamina dan listrik yang dikuasai oleh PLN. Bagi penganut pandangan ini, minyak dan listrik tidak boleh diwastakan atau diprivatisasikan. Benarkah harus demikian? Sedikit renungkan Tanya apakah tidak terlalu beresiko memasrahkan hajat hidup orang banyak kepada satu perusahaan? Kapan saudara kita di pegunungan Papua sana mendapatkan pelayanan listrik PLN? Negara kita ini terlalu besar untuk dilayani oleh hanya satu perusahaan seperti itu, meskipun itu perusahaan milik negara sekalipun.

Mari kita mulai diskusi dengan pertanyaan ringan sebagai berikut: Menurut kamu Tanya, antara bensin dan beras (dibaca sebagai bahan makanan pokok) mana yang lebih menguasai hajat hidup orang banyak? Bahan pangan adalah kebutuhan pokok dan beras merupakan bahan pangan terpenting. Bahan makanan harus selalu ada setiap saat, agar dapat survive, sementara masih banyak rakyat yang selama hidupnya tidak pernah mengenal bensin. Dari fakta tersebut, seharusnya beras lebih menguasai hajat hidup orang banyak dan lebih penting bagi negara ketimbang bensin. Mengapa produksi beras tidak dilakukan oleh negara sementara bensin diproduksi oleh negara? Tahukah anda bahwa petani penghasil beras itu sesungguhnya adalah lembaga swasta? Kita pantas bersyukur bahwa produksi beras tidak dilakukan oleh BUMN, sehingga kita terbebas dari antri panjang karena kekurangan pasokan seperti sering terjadi pada bensin.

Mari kita perbandingkan kinerja beberapa industri yang pada awalnya sepenuhnya dikuasai oleh negara tetapi kemudian dibuka bagi partisipasi sektor privat. **Pertama**, industri penerbangan. Pada awalnya, hanya PT. Garuda dan PT. Merpati yang leluasa menggunakan pesawat bermesin jet, sementara perusahaan swasta sangat dibatasi dalam menggunakan pesawat bermesin jet. Sekarang, semua perusahaan penerbangan dengan leluasa mengoperasikan pesawat bermesin jet. Tanyakan kepada diri sendiri, kondisi manakah yang lebih baik bagi masyarakat di antara ada pembatasan atau tidak ada pembatasan bagi perusahaan swasta menggunakan pesawat bermesin jet?

Kedua, industri telekomunikasi. Ingatkah kamu ketika telekomunikasi masih sepenuhnya dikuasai oleh PT. Telkom? Iklan atau lebih tepat himbauan yang sering muncul adalah “bicaralah seperlunya” ketika lalu lintas menggunakan saluran sangat padat. Kini, setelah perusahaan

swasta juga ikut menyediakan jasa telekomunikasi, iklan yang muncul adalah “bicaralah semaumu sampai ndower.” Iklan yang sangat bertolak belakang. Sekali lagi tanyakan kepada diri sendiri, apakah pelayanan telekomunikasi dengan melibatkan sektor swasta sekarang ini lebih buruk atau lebih baik dibanding pelayanan telekomunikasi ketika masih sepenuhnya dikuasai PT. Telkom saja?

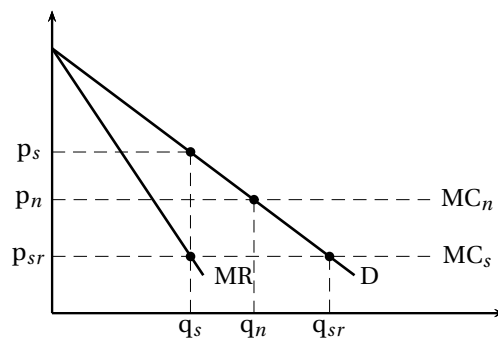
Setelah mempunyai gambaran bagaimana peran lembaga swasta dalam melayani masyarakat, mari kita melangkah kepada hal yang lebih substansial. Pak De kutipkan potongan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang asli sebagai berikut: “... Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.” Disini ada ungkapan “orang seorang yang berkuasa.” Produsen orang seorang yang berkuasa itu seperti apa? Dalam ilmu ekonomi, produsen seperti ini adalah produsen yang mampu mempengaruhi pasar. Bahasa menterengnya produsen yang memiliki *market power*. Gampangnya, produsen yang mampu mendikte harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jelas, sasaran tembak Pasal 33 UUD 1945 adalah monopolis, oligopolis, monopsonis, oligopsonis, bukan lembaga swasta yang kompetitif yang pasti tidak memiliki *market power*.

Pada titik ini, kamu harus menyiapkan diri untuk mengikuti diskusi selanjutnya yang lebih serius. Pak De akan tunjukkan bagaimana monopoli oleh swasta berpotensi merugikan masyarakat. Agar lebih seru, kita anggap bahwa efisiensi BUMN lebih rendah daripada perusahaan swasta. Perbedaan efisiensi tersebut dianggap dapat ditunjukkan oleh biaya marginalnya.¹³ Agar mudah diikuti, diasumsikan bahwa biaya marginal adalah konstan untuk semua tingkat produksi. Selanjutnya, mari kita catat biaya marginal BUMN dengan MC_n dan biaya marginal perusahaan swasta dengan MC_s . Karena BUMN kalah efisien maka $MC_n \geq MC_s$. Artinya, biaya marginal BUMN tidak lebih rendah dari biaya marginal perusahaan swasta.

Meskipun BUMN kalah efisien bila dibandingkan perusahaan swasta, privatisasi perusahaan yang monopolis tidak selalu menguntungkan masyarakat. Bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi? Be-

¹³Pengertian biaya marginal adalah besarnya kenaikan biaya bila produksi meningkat sebesar 1 unit. Misalnya, bila biaya produksi untuk 15 unit adalah 100 dan biaya produksi untuk 16 unit adalah 104, maka biaya marginal ketika memproduksi 16 unit adalah 4. Lazimnya, hal tersebut dicatat dengan $MC(16)=4$. Berapa $MC(17)$ bila biaya memproduksi 17 unit adalah 110? Biaya marginal ketika produksinya 17 adalah 6, yang diperoleh dari 110 dikurangi 104.

nar, hal tersebut sangat mungkin terjadi akibat dari perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan BUMN adalah mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, tujuan perusahaan swasta adalah mencapai keuntungan yang setinggi mungkin bagi perusahaan tersebut. Perbedaan tujuan tersebut berimplikasi pada perbedaan kaidah yang digunakan dalam pengambilan keputusan penentuan tingkat produksi yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan BUMN tercapai ketika MC_n sama dengan manfaat marginal yang ditunjukkan oleh kurva permintaan (D). Sementara itu, tujuan perusahaan swasta tercapai dicirikan oleh MC_s sama dengan penerimaan marginal (MR). Gambar 3.1 menunjukkan kedua kaidah yang dimaksud.



Gambar 3.1: Produksi oleh BUMN vs BUMS Industri Monopoli

Awalnya, barang diproduksi oleh BUMN. Karena kaidah yang digunakan adalah $MC_n=D$, maka produksi optimalnya adalah q_n . Harga yang diberlakukan adalah p_n . Walaupun, lembaga privat lebih efisien - seperti ditunjukkan oleh biaya marginal yang lebih rendah - tetapi karena kaidah yang digunakan adalah $MC_s=MR$ maka produksi yang optimal adalah q_s dan menjualnya pada harga p_s . Disini, privatisasi menghasilkan jumlah barang yang lebih sedikit dan harga yang lebih tinggi. Sudah barang tentu publik akan mempertanyakan privatisasi semacam ini, karena katanya swasta lebih efisien ternyata menghasilkan kondisi yang lebih buruk bagi masyarakat. Pertanyaan publik tersebut sangat valid. Kondisi seperti inilah yang dilarang oleh UUD 1945.

Agar kepentingan masyarakat terlindungi dari privatisasi dalam in-

dustri yang monopoli, maka negara melalui pemerintah harus menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana melakukannya? Pemerintah harus membuat kebijakan yang disebut dengan *marginal cost pricing*. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sama dengan biaya marginal dari perusahaan swasta yang memperoleh hak privatisasi. Menghadapi ketentuan seperti ini, pilihan optimal perusahaan swasta adalah menjual pada harga p_{sr} (harga swasta yang diatur) dan memproduksi sejumlah q_{sr} (kuantitas yang diatur). Kita melihat bahwa privatisasi industri monopoli yang diatur dengan kebijakan *marginal cost pricing* akan menghasilkan harga yang lebih rendah dan produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan kondisi ketika produksi masih dilakukan oleh BUMN. Jadi, privatisasi perusahaan monopoli sejauh kekuasaan negara digunakan secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

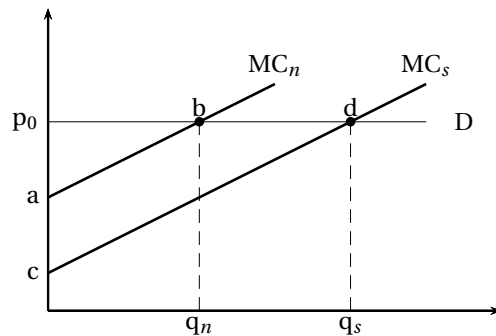
Sekarang bagaimana dengan privatisasi perusahaan BUMN yang beroperasi dalam pasar yang kompetitif, misalnya BUMN perkebunan kopi. Karena pasarnya kompetitif, maka perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Disini perusahaan tidak memiliki *market power*. Harga ditentukan oleh banyak penjual dan pembeli dalam pasar dan perusahaan menggunakan harga pasar tersebut untuk membuat keputusan produksi. Hal ini ditunjukkan oleh kurva permintaan yang horisontal.¹⁵ Sekarang kita asumsikan biaya marginalnya meningkat dengan meningkatnya tingkat produksi. Gambar 3.2 akan membantu mempermudah pengertian.

Ketika perusahaan masih di bawah BUMN, produksi yang optimal adalah q_n dengan keuntungan yang diperoleh sebesar area segi tiga p_0ab . Setelah privatisasi, maka produksi perusahaan tersebut akan meningkat menjadi q_s dan keuntungan juga akan meningkat menjadi area segi tiga p_0ab ditambah area $abdc$. Secara teoritis, pemerintah dapat menangkap kembali area segi tiga p_0ab atau bahkan lebih dari itu sejauh nilai kini dari aliran sisa keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta tidak lebih kecil dari harga beli perusahaan tersebut.

2. **Tanya:** Jika demikian, lalu mengapa privatisasi ditentang oleh begitu

¹⁴Perlu dicatat bahwa uraian di atas hanya berlaku untuk kasus monopoli buatan, tetapi tidak berlaku untuk kasus monopoli alami yang memerlukan kebijakan yang berbeda.

¹⁵Perhatikan bahwa kurva ini berbeda dengan kurva ketika perusahaan beroperasi dalam pasar monopoli yang dibahas sebelumnya. Kurva permintaan dalam pasar monopoli adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah.



Gambar 3.2: Produksi oleh BUMN vs BUMS Industri Kompetitif

banyak orang?

Answer: He he he, Tanya, orang yang menentang privatisasi itu tidak homogen. Lapisan yang paling kurang terdidik, gampangnya paling bodoh, adalah lapisan yang paling mudah diajak menentang privatisasi dengan menggunakan alasan idiologis. Lapisan ini paling sering dimanfaatkan oleh mereka yang diuntungkan oleh inefisiensi BUMN.

3. **Tanya:** Jadi, alasan idiologis itu hanya kedok saja pak De?

Answer: Belum tentu. Begini, sebagai patokan kasar atau rule of thumb, jika yang menentang itu sedang dalam posisi menguasai BUMN, misalnya partai penguasa, maka kemungkinan alasan idiologis itu hanya kedok. Alasan yang sebenarnya ya mencari uang untuk dirinya sendiri dan partainya. Sebaliknya, bila penentang tersebut berada diluar kekuasaan, maka alasan idiologis yang diusung bukan kedok melainkan kebodohan. Ya sesederhana itu, dia tidak paham.

“Guidelines for Bureaucrats: 1. When in charge, ponder. 2. When in trouble, delegate. 3. When in doubt, mumble.”

James H. Boren

“Bureaucracy defends the status quo long past the time when the quo has lost its status.”

Laurence J. Peter

“A person without a sense of humor is like a wagon without spring – jolted by every pebble in the road.”

Henry Ward Beecher

4

Koperasi

Córdova (1998) mengajukan pertanyaan yang sangat tajam - “mengapa ekonom keliru dalam melihat koperasi?” Argumen yang umum dikemukakan oleh ekonom adalah bahwa hanya ada sedikit perusahaan yang demokratis karena mereka kurang efisien daripada perusahaan konvensional, dan perusahaan yang efisien menyingkirkan perusahaan yang kurang efisien dari ekonomi yang kompetitif. Pengambilan keputusan demokratis yang melibatkan lebih banyak orang memang lebih sulit dibandingkan dengan pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan tunggal. Disamping itu, koperasi tidak akan mampu mempertahankan bentuk organisasi demokratis dan cenderung berubah menuju bentuk yang lebih berjenjang dan elitis (Sauser, Jr., 2009). Tetapi bagaimana dengan efek dari kepemilikan terhadap kinerja juga perlu diperhatikan (Pierce & Rodgers, 2004). Menurut Hashi (1998), pemilikan perusahaan oleh pekerja cenderung meningkatkan produktivitas dan upah, tetapi tidak mendorong peningkatan investasi.

Bab ini membedah koperasi konvensional atau koperasi sosialis, khususnya koperasi produksi, dengan menggunakan teori ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada prinsip koperasi yang berpotensi membunuh koperasi itu sendiri karena koperasi dapat terjebak pada inefisiensi akibat dari dilaksanakannya prinsip tersebut. Hal positif dari koperasi produksi harus

tetap dipertahankan, tetapi kita juga harus tetap realistis bahwa koperasi konvensional bukanlah organisasi tanpa cacat. Oleh karena itu, membicarakan koperasi harus dengan daya kritis dan meninggalkan bujukan retorika.

4.1 Umum

1. **Tanya:** Pak De, malam ini topik yang ingin Tanya tanyakan adalah koperasi. Katanya, koperasi ini merupakan sokoguru perekonomian kita. Kata koperasi disebutkan dalam penjelasan konstitusi kita sebelum diamandemen dahulu. Ringkasnya, koperasi itu mestinya sangat penting bagi kehidupan berbangsa kita. Bagaimana pendapat pak De?

Answer: Baiklah, pak De akan mulai dengan cerita pertemuan pak De dengan para peternak sapi perah di daerah pegunungan nan indah Pengalengan. Para peternak sapi perah umumnya tergabung sebagai anggota koperasi, yakni Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS). Koperasi ini merupakan satu-satunya koperasi yang mewadahi para peternak sapi perah di Pengalengan. Kantornya megah dan terletak di pusat keramaian kota. Konon asetnyapun sangat banyak dan sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Bila koperasinya hebat, tentu anggotanya akan ikut menikmati kehebatan koperasi tersebut. Amanat konstitusi telah terealisasi.

Namun, suara petani anggota koperasi dan mantan anggota koperasi memaksa pak De untuk menunda kesimpulan yang menggemberikan tersebut. Pak De tidak tahu sampai kapan penundaan tersebut harus pak De pertahankan. Pak De berharap tidak terlalu lama, tetapi pak De tidak yakin dengan hal ini. Kehidupan petani anggota koperasi ternyata secara umum tidak semegah kantor koperasinya. Dengan 2 ekor sapi, banyak petani yang menerima sisa usaha sangat minim dan beberapa menderita ketekoran. Semua input dan kebutuhan hidup petani anggota dipenuhi oleh koperasi dan harus dibayar oleh petani dari hasil susu. Harga input dan output ditentukan oleh koperasi. Secara teoritis hal ini berarti bahwa para anggota koperasi ikut menentukan harga input, tetapi dalam praktis ternyata jauh panggang dari api. Pemerah susu diperah koperasi! Tidak beda dengan kisah "hunter hunted" yang sering ditayangkan pada Discovery Channel. Benarlah kritik pedas Bung Hatta yang dikutip Mubyarto (2003) bahwa koperasi-koperasi Indonesia lebih berkembang ke arah "koperasi pe-

ngurus,” bukan koperasi anggota.

Sementara itu, entah karena memang telah memahami keunggulan koperasi dibandingkan entitas bisnis kapitalis atau sekedar meluapkan rasa benci pada kapitalisme atau sekedar untuk memperoleh simpati publik, banyak kalangan membela koperasi sebagai bangun perusahaan yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Fakta bahwa koperasi sulit berkembang di Indonesia perlu dicarikan kambing hitamnya. Pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada pengembangan koperasi paling sering ditunjuk sebagai biang keladinya, padahal sudah beberapa tahun departemen koperasi hadir di bumi Indonesia. Bahkan “antusiasme” pemerintah orde baru dalam membangun koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD), malah dianggap sebagai merusak citra koperasi itu sendiri (Nasution, 2008).

Semua realitas di atas telah memberi inspirasi dan dorongan kepada pak De untuk mengeksplorasi koperasi, implikasi, dan potensinya dalam memberdayakan perekonomian rakyat karena konstitusi Indonesia telah memberi tempat yang sangat terhormat kepada koperasi. Pertanyaan sederhana “apa yang terjadi bila pekerja menyewa kapital ketimbang pengusaha kapitalis menyewa buruh?” yang dibuat Meade (1972) cukup menggelitik pak De untuk lebih memahami koperasi. Sebagai orang yang dididik dalam dunia neoklasik dan tidak pernah memperoleh pelajaran tentang ilmu koperasi, sekuat apapun pak De menjaga diri untuk tetap obyektif tetapi kemungkinan untuk bias tetap saja terbuka lebar. Oleh karena itu, pak De mengajak para pemikir ekonomi, khususnya koperasi, untuk tetap bersedia membuka diri melakukan dialog ilmiah.

Pak De mulai mencari informasi tentang koperasi, khususnya mengenai landasan teorinya dan lebih khusus lagi tentang teori ekonominya. Beberapa tulisan pak De kumpulkan dan pelajari. Sebagian besar penulis Indonesia, atau mungkin malah semuanya, menyuguhkan keunggulan koperasi atas firma kapitalistik yang dipandang sebagai anak kandung kapitalisme yang harus dihadapi. Dalam pengembaraan tersebut, dalam diri pak De timbul perasaan kecut, sedih, tetapi sering juga timbul perasaan geli. Betapa tidak, sebagian besar tulisan orang Indonesia yang mengangkat keunggulan koperasi berangkat dan berakhir dengan analisis emosional ketimbang rasional (Widarmanto, 2008; Tambunan, 2008). Diantara berbagai publikasi tentang koperasi dari dalam negeri, kontribusi Krisnamurthi (2002) tentang bebera-

pa faktor fundamental bagi eksistensi dan peran koperasi merupakan kontribusi yang paling realistis.

Nah, kamu mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan buah pikiranmu dalam membangun ekonomi nasional melalui tulisan tentang koperasi yang rasional. Penulisan koperasi yang emosional tidak akan mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebaliknya justru membodohkan. Tuliskanlah pendapatmu dengan kejujuran.

4.2 Retorika atau Realita

1. **Tanya:** Sejarah atau asal muasal timbulnya koperasi itu bagaimana sih pak De?

Answer: Koperasi pertama kali lahir di Rochdale, sebuah kota di Inggris. Revolusi industri telah menghempaskan nasib kaum buruh. Para pemilik modal dapat menggunakan mesin sehingga produktivitas firma menjadi meningkat yang memberi keuntungan lebih banyak kepada pemilik modal. Sementara itu, para buruh sulit mengelak dari upah yang rendah. Kesulitan ekonomi yang luar biasa mendorong para buruh untuk mendirikan usaha sendiri secara bersama. Sejak membentuk usaha bersama tersebut kehidupan pekerja menjadi lebih baik, karena pekerja yang juga pemilik badan usaha memperoleh pembagian *SHU*. Usaha bersama tersebut selanjutnya disebut koperasi. Soesilo (2008) menyatakan karena berkoperasilah kehidupan para pekerja tersebut menjadi lebih baik. Tetapi fenomena tersebut juga dapat dilihat dengan cara pandang yang lain, yakni pekerja memperoleh *SHU* karena pekerja telah menjadi pemilik atau kapitalis badan usaha. Dengan kata lain, koperasi para pekerja di Rochdale tidak lebih dari firma kapitalis biasa yang sahamnya dimiliki oleh para pekerja dengan distribusi antar anggota yang kurang lebih merata. Cara mengakses surplus masih sama dengan tradisi firma kapitalis biasa, yakni dengan menjadi pemilik.

Kata dan gerakan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tokoh utamanya, yakni Bung Hatta. Berdasarkan tulisan Higgins (1958), Bung Hatta melihat koperasi sebagai tujuan dan kewajiban rakyat Indonesia untuk membangun masyarakat berkoperasi. Koperasi merupakan teknik pembangunan yang tepat. Lebih jauh Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi merupakan satu-satunya jalan un-

tuk menghapus “kompleks rendah diri” nasional. Pandangan Bung Hatta sangat jelas menunjukkan anti kapitalisme dengan pernyataannya bahwa dalam jangka panjang perusahaan swasta akan hilang dan digantikan oleh perusahaan koperasi dan BUMN. Menurut pak De, pandangan Bung Hatta sangat utopis karena banyak asumsi untuk terwujudnya koperasi yang sehat mustahil dapat dipenuhi, misalnya “kemurnian hati.” Ekonomi Denmark - negara yang dijadikan contoh oleh Bung Hatta - masih didominasi oleh perusahaan swasta.¹ Lebih dari itu, mempertentangkan koperasi dan perusahaan swasta yang dianggap kapitalistis sangat kurang tepat. Sangat mudah ditunjukkan bahwa perusahaan kapitalis yang dimiliki oleh anggota yang juga bertindak sebagai tenaga kerja dan mempunyai andil kapital yang sama akan berlaku seperti halnya koperasi.

Mimpi indah Bung Hatta nampaknya meneruskan mimpi indah Karl Marx yang telah menyengsarakan kaum buruh yang hendak dibelanya di dunia nyata. Bung Hatta mungkin sangat memahami ide dan konsep koperasi seperti dinyatakan oleh Nasution (2008), tetapi pak De meragukan apakah Bung Hatta juga memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. Ini tampak dari kritik pedas Bung Hatta yang dikutip Mubyarto (2003) bahwa koperasi-koperasi Indonesia lebih berkembang ke arah “koperasi pengurus,” bukan koperasi anggota. Kita harus tetap menghargai niat baiknya di dalam dunia idealnya untuk memakmurkan rakyat Indonesia, tetapi kita sendiri yang harus mencari jalan untuk mencapai apa yang diniatkan tersebut dalam dunia nyata yang kita jalani. Ilmu pengetahuan terus berkembang yang membuka lebih banyak kemungkinan. Kita pertahankan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, tetapi kita tidak harus terpaku pada satu jalan.

Tatkala badai ekonomi 1997 menerpa Indonesia, pada saat itulah tampil peran koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya (usaha mikro, kecil, dan menengah) (Soesilo, 2008). Pernyataan tersebut jelas sangat rancu karena mencampur-adukkan antara skala bisnis dan sifat organisasi. Apakah usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mungkin berbentuk firma kapitalis? Seolah badai ekonomi hanya melanda usaha besar dan atau kapitalis - yang karena ukurannya menjadi berita - sementara itu, usaha kecil yang bangkrut luput dari pemberitaan, perhatian, dan pendataan. Juga, samar-samar pernyataan tersebut

¹Ekonomi negara-negara Skandinavia sering dijadikan contoh model ekonomi yang lebih menyejahterakan pelakunya. Finlandia merupakan negara tempat tumbuh koperasi yang paling subur (Marshall, 1958).

berasumsi bahwa koperasi selalu berukuran kecil. Mungkin ini hasil dari harapan dan kebingungan.

Anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (*owner-user*), oleh karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota (Soesilo, 2008). Pernyataan tersebut sangat restriktif dan tidak masuk akal. Apa yang dimaksud dengan pelanggan? Apakah petani susu di Pengalengan merupakan pelanggan susu? Sebagian besar keluarga petani susu di Pengalengan ternyata bukan pelanggan susu karena sebagian besar hasil susunya dijual kepada pihak lain. Konsumsi keluarga petani akan garam yang dihasilkannya pastilah merupakan porsi yang terlalu kecil dari total produksi garam yang dihasilkannya sehingga tidak dapat disebut sebagai pelanggan. Apakah dengan demikian petani penghasil garam tidak dapat membentuk koperasi?

Mubyarto (2002) - pengusung ekonomi kerakyatan dan koperasi paling getol pada masanya - di satu sisi menyatakan bahwa tidak semua pertanian di Indonesia adalah bisnis sebagaimana dinyatakan oleh menteri pertanian waktu itu tetapi *way of life* - kegiatan yang tidak mengejar untung - di sisi lain menyatakan pertanian dan perkebunan rakyat dengan pemilikan lahan yang sempit, dengan teknologi sederhana dan modal seadanya, sulit berkembang karena merupakan usaha-usaha subsisten. Untuk apa mempersoalkan perkembangan petani subsisten tersebut karena mungkin saja mereka memilih itu sebagai *way of life*. Tidak perlu pula mengaitkan mereka dengan ekonomi pasar bebas karena ekonomi subsisten relatif bebas dari pasar (Means, 1957).

Mubyarto (2003) kesulitan menerima perubahan Pasal 33 UUD 1945 dengan dimasukkannya dua ayat tambahan dan dihapuskannya penjelasan. Menurutnya, asas *efisiensi berkeadilan* sulit dijelaskan maksud dan tujuannya karena menggabungkan **dua konsep yang jelas amat berbeda bahkan bertentangan**. Bukankah optimisasi dalam ekonomi banyak berkaitan dengan dua atau lebih hal yang saling bertentangan? Anehnya, dalam bagian penutup Mubyarto menyatakan "Ilmu ekonomi baru ini merupakan ilmu ekonomi tentang bagaimana bekerja sama (cooperation) agar masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih adil, **bukan sekedar** masyarakat yang lebih efisien (melalui persaingan/kompetisi) yang ekonominya tumbuh cepat." Rupanya, Mubyarto benar-benar dibuat bingung bahkan oleh idenya sendiri.

Kebingungan Mubyarto terutama terletak pada pencampuran antara kenyataan dan harapan. Berharap agar orang dalam masyarakat dapat bekerja sama, tetapi fakta memperlihatkan sifat bersaing yang lebih menonjol. Dalam diri manusia terdapat sifat kompetitif dan kooperatif sekaligus (May, 1937). Demikian juga dengan ciri individualis dan komunitas (Schoolman, 1987).² Ketika pembagian zakat memakan korban jiwa puluhan orang, sifat kompetitif atau kooperatifnya yang lebih menonjol? Ilmu ekonomi hanya memotret perilaku itu dan mencari alasan mengapa perilaku seperti itu muncul. Teori koperasi yang diterapkan kepada masyarakat semacam itu hanya menghasilkan penyesalan dengan mengatakan “seharusnya” mereka bekerjasama dengan membentuk antrian sehingga tidak terjadi korban dan pembagian zakat dapat dilakukan lebih cepat. Mengapa banyak penumpang kereta api ekonomi Bogor - Jakarta tidak membayar dan kereta semakin tidak layak?³ Ilmu ekonomi tidak mengajarkan agar orang menjadi serakah, tetapi mempelajari bagaimana orang serakah berperilaku. Jika benar jiwa orang Indonesia lebih diwarnai oleh sifat kooperatif ketimbang kompetitif, maka sudah banyak koperasi bermunculan. Terhadap kenyataan bahwa *koperasi pengurus* yang banyak muncul ketimbang *koperasi anggota*, respon yang muncul hanya koperasi “harus” mereformasi diri.

Tentu saja bukan tidak mungkin bahwa pada suatu masa koperasi dan ilmu ekonomi koperasi berkembang subur di Indonesia bila para pelakunya telah mempunyai ciri yang dipersyaratkan oleh koperasi. Dalam kondisi seperti itu, ilmu ekonomi neoklasik akan menjadi barang rongsokan yang tidak memberikan petunjuk apapun bagi penggunaannya atau hanya dapat berlaku pada kelompok yang sangat terbatas. Dengan kata lain, ilmu ekonomi yang bermanfaat adalah il-

²Penganut liberalisme yang menolak ide komunitas pada suatu tingkat ternyata memberikan dukungan pada tingkat yang lain, meskipun mereka memandang komunitas sebagai tidak lebih dari *kejahatan yang diperlakukan*. Bentuk negara kesejahteraan merupakan wujud ambivalensi dari kedua ciri tersebut. Hodgson (1995) dan Hodgson (1996) mengusulkan “prinsip ketidak-murnian” (*impurity principle*). Menurutnya, setiap sistem sosioekonomi harus menyandarkan pada paling sedikit satu subsistem yang tidak serupa agar dapat berfungsi. Bayangkan betapa sulitnya pergerakan orang dan barang bila semua lahan dari Jakarta ke Surabaya adalah milik pribadi (sistem) tanpa ditunjang oleh keberadaan lahan milik bersama (subsistem) yang digunakan untuk membangun jalan. Dawes & Thaler (1988) menggunakan istilah anomali untuk menunjukkan munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku arus utama, misalnya perilaku kooperatif dalam masyarakat yang kompetitif.

³Dugaan pak De, penjelasan ilmu koperasi Mubyarto mengapa mangkir membayar ongkos kereta dapat terjadi adalah karena mereka kurang mempunyai sifat kooperatif!

mu ekonomi yang dibangun sesuai dengan budaya masyarakat yang hendak dipelajarinya. Memaksakan suatu norma sosial tertentu yang berbeda jauh dengan karakteristik masyarakatnya hanya akan menghasilkan kegagalan. Eropa Timur dan Uni Soviet telah menunjukkan hal itu. Jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan yang konsisten dan terus menerus untuk menanamkan sifat kooperatif, altruistik timbal balik, kumunalitas, dan sejenisnya kepada rakyat Indonesia sejak dini. Tegasnya, jika ingin mengembangkan koperasi di Indonesia, maka rubahlah kultur bangsa ini. Ketika kulturnya cocok, koperasi tidak perlu dikembangkan karena dia akan berkembang dengan sendirinya (Putterman, 1982). Problemnnya adalah penduduk terus bertambah sementara sumberdaya alam semakin langka. Kondisi ini cenderung mendorong perilaku kompetitif ketimbang perilaku kooperatif (May, 1937).

Analisis komparatif antara organisasi kooperatif (firma koperasi atau secara singkat koperasi) dan organisasi kapitalistik (firma kapitalistik) sudah sejak lama dilakukan orang dengan tema sentral seperti: Tipe organisasi mana yang lebih hemat biaya (cost-effective)? Apa saja ciri keunggulan dan keterbatasannya? Apakah mungkin mengembangkan penjelasan ekonomi secara rasional bagi wajah koperasi yang berbeda, seperti sifat ganda (double nature),⁴ kontrol demokratis, pembatasan pada kompensasi bagi kapital yang disetor? (Valentinov, 2004).

Dalam mengorganisasi input menjadi output dalam proses produksi, apakah yang membedakan koperasi dari firma kapitalistik? UU 25 tahun 1992 tidak memberi indikasi yang jelas adanya perbedaan dalam hal proses produksi. Cara memasak soto oleh koperasi dan oleh firma kapitalistik adalah sama. Apakah susunan organisasi, cara pengambilan keputusan, hubungan antar individu dalam proses produksi, susunan imbalan, dan lingkungan kerja tidak mengubah parameter teknologi produksi yang digunakan? Kita sering mendengar bahwa dengan jumlah kapital dan buruh yang sama, perbedaan manajemen dapat menghasilkan produktivitas yang berbeda. Apakah ini artinya perubahan manajemen dapat mengubah parameter teknologi produksi yang digunakan? Jika dalam waktu singkat jumlah kapital dan labor yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda, maka perbedaan

⁴Koperasi merepresentasikan secara bersama (1) asosiasi orang-orang dalam arti sosiologi dan psikologi sosial, yakni kelompok sosial, dan (2) suatu usaha gabungan, dimiliki dan dioperasikan oleh anggota kelompok yang sama.

tersebut mungkin berasal dari perubahan parameter teknologi produksinya.

Untuk dapat menjawab atau menjelaskan fenomena yang mungkin berbeda antara organisasi produksi yang kooperatif dan organisasi produksi konvensional yang kapitalistik, maka ada baiknya kita menengok sejenak tentang teori organisasi secara umum. Setelah itu kita tinjau organisasi dalam bentuk firma dan koperasi. Intinya bagaimana memberi motivasi dan insentif kepada semua individu yang terlibat dalam organisasi sehingga semua individu secara umum lebih puas dan lebih produktif dan organisasinya sendiri semakin kuat.

4.3 Organisasi, Firma, dan Koperasi

1. **Tanya:** Maaf pak De, biar dapat mengikuti penjelasan pak De dengan runut, mohon dijelaskan apa yang pak De maksud dengan teknologi produksi.

Answer: Sederhananya, bagaimana satu atau lebih input ditransformasi menjadi satu atau lebih output. Katakanlah input kita catat dengan \mathbf{x} dan output dengan \mathbf{y} , maka teknologi produksi yang pak De maksud adalah $\mathbf{y} = f(\mathbf{x}; \alpha)$. Disini α adalah parameter. Nah, apakah α untuk koperasi berbeda dengan α untuk firma kapitalistik bila input yang digunakan dan output yang dihasilkan sama?

2. **Tanya:** Pak De, kita sedang membicarakan ilmu sosial, mengapa pak De menggunakan simbol matematik?

Answer: Teknologi produksi itu asal muasal dari kurva permintaan dan penawaran yang pernah kamu tanyakan dahulu (lihat Butir 1 Subseksi 3.2.1 Bab 3). Begini Tanya, ada berbagai cara untuk menyampaikan ide atau informasi. Misalnya kamu ingin menyampaikan bahwa ada mobil boks yang berisi 10 kg apel Malang, 5 kg apel Washington, 2000 US\$, 10 milyar rupiah, maka kamu dapat menggambar mobil boks yang didalam boks kamu gambar berbagai macam isi tadi. Ada orang lain yang lebih suka menggambarkan mobil boks dan isinya tadi dengan $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4) = (10 \ 5 \ 2 \ 10)$, dimana x_3 dalam ribuan US dolar sedangkan x_4 dalam milyar rupiah. Kurang indah memang, tetapi jauh lebih irit tempat.

Begitu Tanya, matematika itu bahasa, yang gunanya ya untuk berkomunikasi secara lebih singkat padat dan efisien. Apa diskusi tentang koperasi dapat kita lanjutkan Tanya?

3. **Tanya:** Oh iya pak De silahkan.

Answer: Berdasarkan prinsip koperasi yang tertuang dalam UU 25 tahun 1992, perbedaan utama antara koperasi dan firma kapitalistik terletak pada cara pengambilan keputusan yang menganut satu anggota satu suara dan distribusi hasil dari proses produksi yang disebut dengan *sisa hasil usaha (SHU)*. Pembagian *SHU* dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Hal ini sebenarnya masih senada dengan konsep *marginal revenue product* dalam teori ekonomi neoklasik.⁵ Namun ada prinsip lain yang membedakan koperasi dari firma kapitalistik, yakni pemberian balas jasa yang “terbatas” terhadap “modal.” Disini tampak bahwa koperasi lebih mengutamakan kerja manusia ketimbang kerja modal atau kapital (?).

Pembatasan balas jasa terhadap modal dapat menjadi disinsentif terhadap pemupukan modal oleh anggota. Mungkin saja hal ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh koperasi yang lebih mengedepankan pemerataan kesejahteraan antar anggota sesuai dengan besarnya jasa usaha anggota yang bersangkutan. Tanpa dukungan data sama sekali, pak De memperkirakan bahwa anggota yang memiliki kelebihan kekayaan akan lebih memilih menempatkan kelebihan kekayaannya tersebut pada entitas bisnis yang memberikan return lebih tinggi ketimbang pada koperasi tempatnya bekerja. Setelah melalui perjalanan yang panjang, sebagian besar kapital koperasi merupakan milik anggota secara kolektif. Kapital milik pribadi terbatas sebagai setoran wajib sebagai modal awal yang dalam jangka panjang porsinya akan semakin mengecil seiring dengan tumbuhnya koperasi yang bersangkutan.

Tidak puas dengan tulisan dari dalam negeri yang umumnya hanya bersifat retorika, pak De mulai menjelajahi literatur dari luar. Memperhatikan pernyataan Tambunan (2008) yang menyatakan bahwa koperasi kurang memperoleh pembahasan dalam buku teks ilmu ekonomi sejak perang dunia kedua serta hasil penelitian Hill (2000), pak De

⁵Marginal revenue product adalah tambahan revenue sebagai hasil dari penjualan peningkatan output yang tercipta dari penambahan satu unit input.

memfokuskan diri pada tulisan yang berbentuk artikel. Kajian koperasi dalam bentuk artikel ilmiah ternyata sangat berlimpah. Artinya, koperasi masih menjadi bahan kajian yang cukup menarik bagi banyak skolar.

4. **Tanya:** Wah Tanya tinggal menerima inti sarinya saja. Pak De, kalau ada teman Tanya yang memerlukan artikel tersebut, misalnya ketika hendak menulis tesis atau disertasi, apakah pak De tidak keberatan?

Answer: Oh tentu saja pak De tidak keberatan, bahkan malah sangat senang. Pengetahuan pak De toh tidak akan berkurang dengan memberikan artikel yang pak De miliki, sementara itu ada anak bangsa ini yang bertambah pintar.

Sekarang pak De mau melanjutkan diskusi tentang koperasi. Tetapi pak De akan membahas konsep penting yang berguna untuk memahami koperasi. Pertama, konsep tentang organisasi.

Mungkin kita dapat dengan mudah melihat adanya organisasi. Kerna saja kita pergi, kita menemukan organisasi. Ketika kita dilahirkan di rumah sakit, maka organisasi rumah sakit mengurus kita. Ketika seseorang meninggal, organisasi juga yang mengurusnya. Bahkan berita tentang meninggalnya orang tersebut dimuat dalam surat kabar yang dijalankan oleh organisasi. Tetapi mendefinisikan organisasi bukanlah hal yang mudah.

Organisasi formal, menurut Chester Barnard, adalah suatu sistem aktivitas dua atau lebih orang yang dikoordinasi secara sadar.⁶ Menggunakan tujuan sebagai salah satu penciri organisasi juga bukan tanpa masalah. Salah satu masalahnya adalah bahwa banyak organisasi yang anggota atau pekerjanya yang tidak mengetahui tujuan dari organisasinya atau, walaupun mereka tahu, tidak harus setuju dengan tujuan organisasi tempatnya berada. Sebagai contoh, perusahaan swasta yang umumnya mempunyai tujuan meningkatkan nilai sahamnya, karyawan perusahaan tersebut boleh jadi hanya peduli terhadap kepastian pekerjaannya. Masalah lain, ketika tujuan tercapai maka suatu organisasi dapat menciptakan tujuan yang lain. Meta tujuannya mungkin survival dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya, menurut Helmsberger & Hoos (1962), organisasi dapat tumbuh hanya bila (1)

⁶Definisi ini terlihat mudah dimengerti. Jika diartikan secara harafiah, maka seorang pemuda yang sedang mencium seorang pemudi merupakan contoh organisasi (Urwick, 1976). Tentu saja bukan seperti itu yang dimaksudkan.

orang-orang berkontribusi terhadap sistem, misalnya dengan menerima aturan main yang berlaku, (2) peserta andil dalam satu atau lebih tujuan bersama, dan (3) terjadi komunikasi diantara peserta.

Agar lebih sistematis, teori organisasi dibagi menjadi tiga aliran pemikiran, yakni (1) pemikiran klasik yang mencakup scientific management, pendekatan administratif, dan pendekatan birokratik (2) pemikiran neoklasik yang berisi kritik dan pengembangan dari pemikiran klasik serta teori human relation, dan (3) pemikiran modern.

Banyak penulis klasik peduli dengan perbaikan pengelolaan sebagai cara meningkatkan produktivitas. Penekanan diberikan pada masalah mendapatkan produktivitas yang meningkat dari karyawan melalui penyusunan teknis dari organisasi kerja dan pemberian insentif moneter sebagai pendorong bagi tingkat output yang lebih tinggi. Tokoh utama aliran ini adalah F. W. Taylor (1856–1917) yang berkeyakinan bahwa ada cara terbaik untuk mengerjakan setiap pekerjaan dan semua pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa pekerjaan terpisah.

Beberapa prinsip dari pemikiran klasik adalah

- (a) Pengembangan ilmu untuk setiap pekerjaan;
- (b) Seleksi ilmiah, pelatihan dan pembinaan karyawan;
- (c) Kerjasama dengan karyawan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai petunjuk;
- (d) Pembagian kerja dan tanggungjawab antara manajemen dan karyawan.

Kajian ekonomi tentang koperasi sering mengabaikan faktor pengelolaan organisasi dalam proses produksi. Nah ini merupakan wilayah riset yang sangat kaya topik dan sekaligus bermanfaat bagi pengembangan organisasi produksi yang lebih efisien dan adil. Tabel 4.1 menyajikan secara ringkas perkembangan teori organisasi dari waktu ke waktu.

5. **Tanya:** Dengan memahami teori organisasi ini, kita dapat memperbaiki lingkungan kerja kita sehingga menjadi lebih menyenangkan yang akhirnya berimbas kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Intinya, suasana di dalam organisasi menentukan sikap, perilaku, dan kepuasan seseorang. Begitu kan pak De? Kok yang sering terdengar adalah dieksploitasinya buruh oleh majikan di pabrik-pabrik. Bagaimana pak De?

Tabel 4.1: Ringkasan dari Sejarah Teori Organisasi

	Penulis	Fokus	Prinsip Utama
Classical & Scientific Management (1900 →)	Smith (1776), Marx (1867), Taylor (1911), Fayol (1919/1949), Weber (1924/1947)	Peran organisasi pada masyarakat, pengaruhnya pada kerja dan pekerja (sosiologis). Struktur paling efisien, cara mengorganisasi (orang dan kerja) dan cara mengelola, berdasarkan pada prinsip ilmiah.	Pembagian pekerja dan pekerjaan rutin secara jelas. Formalisasi. Hirarki dan otoritas manajerial. Standardisasi. Satu cara terbaik. Sistem
Systems & Contingency Theories (Modernism) (1950 →)	Parsons (1951) Gouldner (1954) Boulding (1956) March & Simon (1958) Woodward (1965) Trist and Bamforth (1951) Burns and Stalker (1966) Lawrence and Lorsch (1967)	Kebutuhan untuk mempelajari organisasi sebagai sistem yang kompleks dengan bagian yang saling terhubung. Menggunakan model input-output. Teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik dan menyarankan bahwa manajemen dan praktek organisasi akan tergantung pada karakteristik setiap situasi.	Semua bagian harus cocok untuk mengoptimalkan efisiensi. Menyeimbangkan input dan output. Sistem perlu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Lingkungan: stabil/tidak stabil. Struktur: Mekanistik/organik. Kultur: kontrol/komitmen. Teknologi: rutin/kompleks
Social Construction (1960s →)	Berger and Luckmann (1966) Goffman (1959) Boje (1991) Law (1994) Weick (1969/1979; 1995)	Realitas organisasi dibangun dalam interkasi sosial, melalui pengertian, artifak, simbol, dan cerita yang dianut bersama. Kita perlu mempelajari organisasi sebagai proses sosial, sejarah, dan bahasa.	Enactment, sensemaking. Organisasi sebagai komunitas. Teknologi sebagai konstruksi dan strukturasi sosial.
Postmodernism (1980 →)	Foucault (1973) Lyotard (1984) Harvey (1990) Cooper and Burrell (1988) Hassard and Parker (1993)	Mempertanyakan ide utama dari organisasi, tujuannya, bentuknya, bagaimana mereka beroperasi. Membongkar asumsi tentang apa yang benar dan dapat diterima, untuk mengekspos ketidakadilan dan penindasan.	Organisasi adalah sistem hubungan kekuasaan, dimana beberapa kelompok ditindas oleh yang lain. Organisasi merupakan arena dari disorder, konflik, dan kontradiksi.

Sumber: Cunliffe (2008)

Answer: Baiklah, kita bahas dua bentuk organisasi produksi, yaitu perusahaan biasa, yang selanjutnya pak De sebut secara pendek dengan firma, dan organisasi produksi yang berbentuk koperasi. Mari kita bahas satu per satu. **Firma** dapat didefinisikan sebagai sistem kerjasama yang terdiri dari organisasi, perseorangan yang menyumbangkan aktivitas kepada organisasi, dan pabrik yang secara fisik di-

miliki private dan di dalamnya terjadi mobilisasi sumberdaya ekonomi, produksi barang dan jasa untuk dijual, dan penyisihan hasil penjualan untuk menutupi biaya produksi.⁷ Kunci dari pengertian ini terletak pada konsep organisasi, terlepas dari siapa yang memiliki atau mengontrol organisasi tersebut (Helmberger & Hoos, 1962). Selanjutnya, untuk lebih mendalami berbagai ragam firma, termasuk berbagai ragam koperasi, karya Ricketts (2002) akan sangat membantu.

Dalam penjelasan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang masih asli disebutkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah **koperasi**. Meskipun telah dihapuskan dalam naskah UUD 1945 yang telah beberapa kali diamandemen, ide tentang koperasi tidak dapat dihapus begitu saja. Bukan hanya tidak dapat dihapus, bahkan koperasi dilindungi oleh sebuah undang-undang.

Menurut UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarakan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun prinsip koperasi disebutkan dalam pasal 5 sebagai berikut:

- (a) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - i. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - ii. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - iii. pembagian sisa hasil usaha (*SHU*) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - iv. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - v. kemandirian.
- (b) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - i. pendidikan perkoperasian;
 - ii. kerja sama antarkoperasi.

⁷Rutherford (2002) memberi pengertian firm sebagai (1)The basic unit for organizing production which performs the crucial role of linking product, factor and money markets, (2) An administrative organization utilizing a pool of resources. (3) A business organization under a single management with one or more ESTABLISHMENTS.

Menurut International Co-operative Alliance (ICA), suatu koperasi adalah asosiasi otonom dari orang-orang yang disatukan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama atas ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis.⁸ Selanjutnya, ICA menetapkan beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh lembaga untuk dapat disebut sebagai koperasi. Dijumpai banyak kemiripan antara prinsip-prinsip yang dianut dalam UU 25 tahun 1992 dan prinsip-prinsip yang dianut oleh ICA. Selanjutnya, ICA menetapkan nilai sosial sebagai landasannya yang meliputi: menolong diri sendiri - bertanggung jawab terhadap diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas (Skurnik, 2002). Selain koperasi versi Indonesia dan ICA, masih banyak koperasi versi lain - seperti Munkner, Rochdale, Raiffeisen, dan Herman Schulze - yang masing-masing memiliki beberapa prinsip.

Berdasarkan bunyi penjelasan UUD 1945 dan UU 25 tahun 1992, jelas bahwa antara firma dan koperasi dapat saling tumpang tindih. Pak De akhirnya berpandangan bahwa sebagai entitas bisnis koperasi merupakan tipe khusus dari firma.^{9,10} Dalam literatur, kata koperasi sering tidak digunakan secara langsung. Namun, berdasarkan prinsip yang terkandung dalam UU 25 tahun 1992, beberapa sebutan mempunyai implikasi yang sama dengan prinsip koperasi tersebut. Beberapa penulis menggunakan istilah *profit sharing* (Kruse, 1992), perusahaan yang dikelola pekerja (Steinherr, 1975; Miyazaki & Neary, 1983). Oleh karena itu, pak De dapat menerima pernyataan Bernardi (2007) bahwa pasarlah dan bukan legislasi yang menentukan batas-batas operasi koperasi dan manajemen koperasi harus mampu beroperasi dalam berbagai tipe firma tetapi harus juga dilengkapi dengan alat kewirausahaan yang digunakan oleh perusahaan nonkoperasi. Koperasi mungkin dikontrol oleh penjual terhadap koperasi (koperasi produsen), oleh para pembeli dari koperasi tersebut (koperasi konsumen), atau oleh orang yang bekerja disana (koperasi pekerja).

⁸Statement on the Co-operative Identity, ICA, Geneva, 2006, p.1-2.

⁹Koperasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang dualistik, yakni sebagai asosiasi individual dan sebagai suatu perusahaan (Szabó, 2006; Anonymous, 2007). Sebagai asosiasi individual, koperasi tidak melulu bermotif ekonomi. Karena ada unsur sosial dan ekonomi, koperasi sering disebut sebagai sebuah badan sosial ekonomi. Sebagai lembaga yang berciri berbeda dari ciri kapitalisme dan sosialisme, koperasi sering disebut sebagai jalan ketiga dalam ekonomi.

¹⁰Hansmann (1999) memandang korporasi bisnis konvensional yang dimiliki oleh investor tidak lebih dari tipe khusus koperasi produsen - yakni koperasi pemegang, atau koperasi kapital.

Pak De tidak ingin memperdebatkan definisi dan potret lengkap tentang koperasi. Bagi pak De yang lebih penting adalah apa yang menjadi tujuan koperasi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Dengan cara demikian kita dapat membuat prediksi-prediksi tentang perilaku, kinerja, dan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, *SHU* merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian *SHU* dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Hal ini sebenarnya masih senada dengan konsep *marginal revenue product* dalam teori ekonomi neoklasik.¹¹ Namun ada prinsip lain yang membedakan koperasi dari firma kapitalistik, yakni pemberian balas jasa yang “terbatas” terhadap “modal.” Disini tampak bahwa koperasi lebih mengutamakan kerja manusia ketimbang kerja modal atau kapital (?).

Pembagian *SHU* yang dilakukan secara adil “sebanding dengan besarnya jasa usaha” masing-masing anggota akan menghilangkan problem *free rider*. Pembagian *SHU* yang seragam kepada setiap anggota akan memperlemah hubungan antara upaya individu dan balas jasa yang diperolehnya. Firma yang dimiliki bersama oleh pekerja atau firma yang melakukan *profit sharing* – khususnya firma yang berukuran besar – atau koperasi berpotensi menghadapi problem ini.¹² Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa maksud baik saja tidak cukup tanpa disertai dengan tindakan yang masuk akal bagaimana mencapai maksud baik tersebut. Maksud baik yang tidak dapat diwujudkan atau didekati melalui tindakan nyata tidak lebih dari retorika yang tidak berguna.

4.4 Koperasi: Gerakan Melawan Firma Kapitalis

1. **Tanya:** Terlepas dari segala kelemahan yang menyertainya, menurut pak De bagaimana membuat koperasi yang kurang utopis tetapi lebih

¹¹Marginal revenue product adalah tambahan revenue sebagai hasil dari penjualan peningkatan output yang tercipta dari penambahan satu unit input.

¹²Jika balas jasa di bagian secara seragam kepada seluruh pekerja, maka setiap individu mempunyai insentif untuk malas bekerja karena setiap pekerja akan mendapatkan $\frac{1}{n}$ dari output, dimana n adalah jumlah pekerja. Ini dikenal dengan problem $\frac{1}{n}$ (Meade, 1972; Blasi et al., 1996).

rasional?

Answer: Agar mudah ditelusuri, sebelum menganalisis koperasi lebih jauh ada baiknya terlebih dahulu melihat kembali firma kapitalis yang dijadikan sasaran tembak koperasi. Kamu akan melihat bahwa koperasi merupakan modifikasi dari firma kapitalis, khususnya dalam hal input kewiraswastaan dan tujuan yang hendak dicapai. Pak De tidak tahu apakah hal seperti ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak analisis koperasi dilakukan oleh skolar yang berlatar belakang kapitalis.

4.4.1 Firma Kapitalis

1. **Tanya:** Kita mulai dengan teori firma kapitalis pak De. Dimana sebenarnya letak masalahnya dan ketidakadilan yang diciptakannya.

Answer: Suatu firma memproduksi output tunggal (y) dengan menggunakan n input, yakni x_1, \dots, x_n . Harga satuan input i adalah w_i . Fungsi produksi yang digunakan adalah $y(x_1, \dots, x_n)$. Tujuan utama firma kapitalis adalah memaksimalkan keuntungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\pi = \max_{\{x_i\}} p y(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad (4.1)$$

Problem menghasilkan factor demand $x_i(\mathbf{w}, p)$. Melalui substitusi dihasilkan $\pi(\mathbf{w}, p)$.

Pertanyaannya adalah ketika semua jasa input telah diberi kompensasi, termasuk jasa manajerial yang juga pemilik firma,¹³ dan masih terdapat keuntungan positif, milik siapa keuntungan tersebut? Secara umum jawabannya adalah bahwa keuntungan tersebut merupakan milik pemilik firma. Pandangan seperti ini sebenarnya tidak berdasar, karena pemilik firma telah menyisihkan revenue untuk mengkompensasi nilai oportunitas yang ditinggalkannya.

Teori neoklasik kapitalis mengajarkan bahwa dalam jangka panjang keuntungan firma tersebut akan bernilai nol.¹⁴ Hal tersebut terjadi

¹³Misalnya pemilik firma telah menyisihkan sebagian revenue sebagai kompensasi terhadap biaya oportunitas yang dikorbankannya karena mengelola firma.

¹⁴Jangka panjang merupakan konsep neoklasik yang disindir oleh John M. Keynes dengan ungkapan "dalam jangka panjang kita semua mati."

melalui kompetisi sempurna dimana setiap firma beroperasi menggunakan teknologi yang paling efisien pada biaya rata-rata minimum. Dengan demikian, pemilik firma hanya memperoleh kompensasi sebesar biaya oportunitas yang telah dikorbankannya. Fungsi biaya dapat diperoleh dari problem dual terhadap problem dalam Rumusan (4.1), yakni

$$c = \min_{\{x_i\}} \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \bar{y} = y(x_1, \dots, x_n) \quad (4.2)$$

Problem ini menghasilkan conditional factor demand $x_i(\mathbf{w}, y)$ yang melalui substitusi akan dihasilkan $c(\mathbf{w}, y)$. Dalam jangka panjang harga output akan sama dengan biaya rata-rata:

$$ac(\mathbf{w}, y) = \frac{c(\mathbf{w}, y)}{y} = p$$

2. **Tanya:** Realitas sehari-hari menunjukkan bahwa banyak firma yang menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut umumnya sepenuhnya dikuasai oleh pemilik firma. Sementara itu, para pekerja hanya memperoleh imbalan dari upah yang seringkali dianggap terlalu rendah. Akibatnya, timbullah ketegangan antara pemilik firma yang juga dianggap sebagai penguasa modal dan pekerja akibat dari ketimpangan pendapatan. Disinilah kemudian muncul tantangan terhadap model firma kapitalis dalam bentuk koperasi yang tema utamanya adalah bahwa pembagian *SHU* tidak didasarkan pada penguasaan kapital. Bukankah begitu pak De?

Answer: Firma kapitalis dalam dunia modern memisahkan pemilik firma dan pemilik kapital atau pemegang saham di satu pihak dengan pelaksana manajemen dan buruh di pihak lain. Pemilik firma umumnya adalah pemegang saham terbesar.¹⁵ Kekuatan suara dalam pengambilan keputusan didasarkan pada saham yang dikuasai. Suara sedikit orang yang menguasai saham besar akan lebih menentukan ketimbang suara banyak orang yang saham total berjumlah kecil. Pembagian dividen juga didasarkan pada saham yang dimiliki. Mengapa harus demikian, sementara jasa kapital telah diberi kompensasi?

¹⁵Pemilik firma adalah orang-orang yang andil dalam dua hak "formal": hak untuk mengontrol firma dan hak untuk memperoleh penghasilan residual (Hansmann, 1988). Namun, pemilik yang mempunyai hak formal mengontrol tidak selalu menggunakan haknya untuk mengontrol firma secara langsung. Kontrol digunakan dalam memilih dewan direktur yang diberi otoritas untuk mengendalikan firma. Disinilah ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.

Mengapa balas jasa terhadap modal dibedakan dengan balas jasa terhadap modal pinjaman?¹⁶ Disini ada isu tentang resiko yang perlu dipecahkan;¹⁷ apakah balas jasa yang terbatas terhadap modal - yang berlaku dalam koperasi - dimaksudkan sebagai pembayaran terhadap resiko tersebut?

Barangkali ada manfaatnya mendiskusikan lebih jauh tentang kompensasi terhadap modal dan pembagian dividen. Hal ini juga berguna untuk memberi klarifikasi terhadap prinsip “pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.” Kita amati kembali Persamaan (4.1); jika x_j^* adalah jumlah modal yang digunakan, maka kompensasi terhadap modal tersebut adalah $w_j x_j^*$ dimana w_j adalah kompensasi per satuan modal. Kompensasi ini diterima oleh pemilik modal. Menurut pak De, $w_j x_j^*$ memang harus dibayarkan kepada pemilik modal secara penuh sebagai salah satu komponen biaya produksi, sehingga maksud pemberian balas jasa yang “terbatas” terhadap modal bukan pembayaran yang kurang dari $w_j x_j^*$ melainkan pembatasan terhadap pembagian surplus. Dividen merupakan bagian dari π dalam Persamaan (4.1) yang dibagikan. Dividen yang diberikan kepada pemilik modal yang harus dibatasi, bukan kompensasi terhadap modal yang harus dibatasi sehingga kurang dari $w_j x_j^*$. Pembatasan seperti ini sangat sejalan dengan teori ekonomi neoklasik.

4.4.2 Koperasi dan Residual Claimant

1. **Tanya:** Jasa modal harus dibayar dan dividen adalah bukan pembayaran terhadap jasa modal. Lha jadi dividen itu sebenarnya untuk membayar apa ya pak De?

Answer: Pembagian dividen yang berdasarkan penguasaan modal dalam sistem firma kapitalis dipandang tidak adil.¹⁸ Secara etika, klaim

¹⁶Untuk melawan kendali perusahaan yang berada di tangan pemilik modal, koperasi menempatkan semua modal dalam kategori modal pinjaman (Nourse, 1922). Dengan demikian, apa yang diterima oleh pemilik modal adalah kompensasi terhadap modal yang dimilikinya yang kurang lebih sebesar tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Lihat juga Albrecht (1937).

¹⁷Upah dalam bentuk *profit sharing* menyebabkan para pekerja terbuka terhadap resiko. Disamping itu, dengan *profit sharing* menyebabkan pekerja yang ada berusaha untuk mencegah firma menerima pegawai baru yang dapat mengurangi pendapatannya. Hanya sedikit bukti empirik yang menunjukkan bahwa penerapan *profit sharing* dapat meningkatkan kinerja ekonomi di Inggris (Blanchflower & Oswald, 1987). Hasil yang kurang lebih sama disampaikan oleh Blasi et al. (1996) yang melakukan penelitian di Amerika Serikat.

¹⁸Di satu sisi dikatakan bahwa koperasi tidak mengejar keuntungan atau surplus, tetapi di sisi lain ingin ikut

pemilik kapital terhadap residual tidak dapat dibenarkan (DiQuattro, 1978).¹⁹ Landasan pembagian tersebut tidak lebih sah daripada landasan pembagian dividen kepada pekerja dan patron lainnya. Gerakan sosial ekonomi kelas pekerja melalui koperasi ditujukan untuk memasukkan pekerja sebagai *residual claimant* (Nourse, 1922). Dari sudut pandang koperasi, surplus terjadi karena pembayaran terhadap input yang terlalu rendah dan atau penetapan harga jual yang terlalu tinggi. Sebagai konsekuensinya, surplus tersebut harus dikembalikan lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan surplus tersebut, bukan hanya kepada yang menguasai kapital. Perhatian lebih diarahkan kepada bagaimana mengakses surplus, bukan bagaimana menciptakan surplus tersebut.

Pendistribusian surplus secara langsung yang dipilih masyarakat koperasi merupakan gerakan perlawanan terhadap cara tidak langsung - melalui kompetisi dalam pasar bersaing sempurna - yang ditempuh oleh masyarakat kapitalis. Secara teoritis, dividen terhadap modal oleh firma kapitalis yang beroperasi dalam pasar bersaing sempurna dalam jangka panjang akan sama dengan nol karena memang tidak ada surplus yang dapat dibagikan. Sebagaimana surplus, dalam jangka panjang firma juga tidak akan menanggung kerugian. Namun, kondisi ideal ini tidak pernah terjadi, sehingga surplus dan kerugian itu terjadi. Mengapa hanya pemilik kapital yang berhak memperoleh pembagian surplus ini? Inilah yang digugat oleh gerakan koperasi.

Perjuangan koperasi untuk mendapatkan surplus atau menjadi *residual claimant* ini juga terlihat dalam Nasution (2008). Ketika menghadapi monopolis, Nasution menganjurkan agar para pembeli berhimpun membentuk koperasi sehingga mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya ketika menghadapi pembeli yang monopsonis, produsen kecil dianjurkan untuk berhimpun membentuk koperasi sehingga mempunyai posisi tawar yang lebih baik. Dengan cara berhimpun tersebut akan terjadi *monopoli bilateral* sehingga surplus dapat terdistribusi lebih berimbang. Secara implisit hal ini sebenarnya terjadi proses maksimisasi *payoff* dalam suatu *game* yang biasa

menikmati surplus yang pembagiannya dianggap tidak adil. Ambivalensi yang sebenarnya tidak perlu ini sering merepotkan gerak langkah koperasi sendiri.

¹⁹Ajaran marginal menyatakan bahwa distribusi *income* dalam pasar kapitalis sebagai bentuk pertukaran disesuaikan dengan faktor produktif yang menyumbang pada produksi. Pernyataan ini sesungguhnya menyampaikan justifikasi etik.

dilakukan dalam ekonomi neoklasik. Memang tidak ada larangan jika koperasi ingin meminjam cara neoklasik.

Sampai disini mari kita lihat suatu kondisi hipotetik dan bagaimana ide koperasi diposisikan. Cerita dimulai dengan pasar komoditas pertanian tertentu yang diproduksi oleh banyak sekali produsen dan dikonsumsi oleh banyak sekali konsumen. Artinya, pasar komoditas pertanian tersebut telah pada kondisi bersaing “sempurna” dengan surplus bagi masing-masing individu sudah sangat minimal. Perlukah koperasi dibentuk? Jika hanya produsen yang membentuk koperasi, maka akan terjadi monopoli. Cara ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi pada saat yang sama akan menurunkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Jika hanya konsumen yang membentuk koperasi, maka akan terjadi monopsoni dan kesejahteraan konsumen akan naik tetapi kesejahteraan sosial secara keseluruhan juga menurun. Jika kedua belah pihak membentuk koperasi, maka kondisi yang dicapai tidak akan lebih baik dibandingkan kondisi tanpa koperasi karena membentuk koperasi bukanlah tanpa biaya sedangkan kuantitas yang diperdagangkan tidak lebih banyak.

4.5 Model Ekonomi Perilaku Koperasi

1. **Tanya:** Setelah banyak hal yang berbau retorika, saya mohon pak De berkenan membahas perilaku orang dalam koperasi secara lebih formal. Semoga teori tentang perilaku ini dapat sedikit memberi cahaya mengapa koperasi sulit berkembang, padahal seharusnya menjadi tumpuan harapan orang kecil.

Answer: Studi model ekonomi teoritis koperasi modern diperkenalkan oleh Ward (1958) yang kemudian disempurnakan oleh Domar (1966). Inti dari model Ward-Domar adalah asumsi bahwa semua anggota koperasi berbagi revenue bersih atau *SHU* secara merata. Model mereka dirancang untuk melihat bagaimana alokasi sumberdaya dan efisiensi organisasi akibat dari asumsi yang digunakan. Domar menunjukkan bahwa bila tingkat upah pada firma kapitalistik ditetapkan sama dengan *SHU* rata-rata, maka untuk jumlah tenaga kerja tertentu solusi koperasi dan firma kapitalistik adalah identik, yakni keduanya akan memilih tingkat output dan input selain tenaga yang sama. Analisis Ward (1958) menghasilkan kurva suplai yang bersudut negatif. Mela-

lui dekomposisi, Miyazaki & Neary (1983) menunjukkan bahwa sudut negatif tersebut disebabkan oleh *pure-price effect*²⁰ yang lebih kecil dari *fixed-cost effect*.

Ada berbagai macam bentuk koperasi. Demikian pula koperasi sebagai entitas bisnis juga beragam. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya seksi ini dibagi menjadi dua subseksi, yakni subseksi koperasi sosialis dan subseksi koperasi kapitalis. Memang terasa ironik dan bahkan menggelikan ada istilah koperasi kapitalis, padahal koperasi dibangun untuk menghadapi kapitalisme. Tetapi penggabungan dua hal yang saling bertentangan dalam satu entitas bukan sesuatu yang baru, apalagi aneh. Disini, “ngono yo ngono ning ojo ngono” mungkin sangat cocok untuk diterapkan.

Disamping koperasi produsen, koperasi dapat juga berbentuk sebagai koperasi konsumen, atau koperasi campuran produsen dan kosumen. Untuk menganalisis berbagai kemungkinan ini, Carson (1977) telah membuat model umum. Dalam model yang dikembangkan, output dibagi menjadi output yang dijual keluar dan output yang dijual kepada anggota. Demikian juga dengan input, ada input yang dibeli dari luar dan ada pula input yang dibeli dari anggota. Tidak seperti model Ward-Domar yang memaksimumkan produk penerimaan bersih (atau *SHU*) rata-rata, Carson memaksimumkan kesejahteraan anggota koperasi.

Keputusan koperasi dan implikasinya sering dibandingkan dengan keputusan firma kapitalis beserta implikasinya. Perusahaan yang dikelola pekerja memperkerjakan lebih sedikit pekerja dan memproduksi tingkat output yang lebih rendah dibandingkan perusahaan saudaranya yang memaksimumkan keuntungan (Steinherr, 1975; Fufeld, 1983). Alasannya, ketika output firma meningkat produk marginal dari pekerja menurun, pada kapital tertentu, dan pekerja yang ada tidak bersedia menerima upah yang lebih rendah sebagai akibatnya. Alasan kedua adalah teorem *self-extinction* yang disampaikan oleh Vanek yang dikutip oleh Fufeld (1983). Menurut Vanek, firma yang dikelola pekerja yang melakukan optimisasi akan menghancurkan dirinya sendiri. Return to labor yang menurun berarti bahwa pendapatan per pekerja dapat dinaikkan dengan cara mengurangi jumlah pekerja. Ini menyebabkan nisbah kapital-pekerja menjadi suboptimal. Untuk

²⁰Miyazaki & Neary (1983) mendefinisikan *pure-price effect* sebagai pengaruh perubahan harga output pada jumlah pekerja bila biaya tetap secara bersamaan disesuaikan untuk mempertahankan utilitas pekerja pada tingkat tertentu

mengembalikan ke tingkat optimal, maka jumlah kapital harus dikurangi. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi jumlah pekerja, dan selanjutnya, sampai entitas kolektif musnah. Tentu saja kita dapat mengajukan pertanyaan sederhana, misalnya apakah optimalitas sedemikian pentingnya sehingga harus dikejar dengan mengorbankan jumlah pekerja? Hasil pemodelan teoritis seperti ini tentu saja sangat tidak masuk akal dan kurang realistis. Oleh karena itu kita perlu mencari cara pemodelan koperasi yang lebih realistis.

Prediksi model teoritis tersebut di atas tentu saja tidak mampu menjelaskan fakta yang diperoleh dari berbagai penelitian empirik yang menunjukkan koperasi dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan kinerja firma. Babb dan Boynton (1981) menunjukkan bahwa pengolahan keju berkoperasi memperlihatkan pemakaian kapasitas pabrik dan efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi dan biaya pengolahan yang lebih rendah dibandingkan pengolah keju swasta. Penelitian empirik di Italia oleh Jones & Svejnar (1985) menunjukkan bahwa koperasi produsen yang berciri *profit sharing*, partisipasi, dan pemilikan aset oleh pekerja secara individual mempunyai efek positif pada produktivitas. Hal senada disampaikan oleh Boyd (1987) yang melakukan penelitian di Yugoslavia yang menyimpulkan bahwa koperasi mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan firma kapitalistik.

Hasil penelitian empirik lainnya, Bartlett et al. (1992) yang melakukan penelitian di Italia Utara menunjukkan bahwa koperasi mempunyai produktivitas lebih tinggi, lebih padat karya, perbedaan pendapatan yang lebih kecil, dan hubungan industrial yang lebih tenang. Selanjutnya, Frohlich et al. (1998) menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh pekerja menampilkan produktivitas yang lebih tinggi, distribusi pendapatan yang lebih adil, keterlibatan yang lebih tinggi dalam pekerjaan, kebersediaan menolong sesama pekerja yang lebih tinggi, dan pandangan pekerja yang lebih positif terhadap atasannya.

Analisis model ekonomi dari masing-masing bentuk koperasi dapat dilihat dalam uraian selanjutnya. Berbagai macam implikasi seperti yang disebutkan oleh beberapa skolar akan lebih mudah dilihat. Sekali lagi, pemodelan ini sangat diwarnai oleh pandangan neoklasik kapitalis terhadap koperasi. Prediksi yang janggal dan tidak sesuai dengan beberapa hasil penelitian empirik merupakan undangan kuat kepada banyak skolar untuk membangun model ekonomi koperasi yang lebih realistis.

4.5.1 Koperasi Kapitalis

1. **Tanya:** Jadi model koperasi yang lebih realistis atau apalah namanya itu seperti apa menurut pak De?

Answer: Istilah koperasi kapitalis atau C Co-op juga digunakan oleh Dubravčić (1970) yang memaksimumkan rate of return on capital, bukan keuntungan, dengan memilih tingkat kapital optimal. Namun, koperasi kapitalis dalam subseksi ini berbeda dengan koperasi kapitalis yang dimaksud oleh Dubravčić.

Pesan utama dari koperasi adalah keadilan ekonomi, khususnya dalam pembagian surplus, sementara itu cara berproduksinya tidak berbeda dari cara berproduksi firma kapitalis (Miller, 1981). Meskipun ajaran pokok dari firma kapitalis yang bekerja dalam pasar bersaing sempurna tidak menghasilkan surplus dalam jangka panjang, namun realitas sosial yang terjadi di masyarakat adalah adanya beberapa orang sangat kaya dari surplus firma yang dimilikinya. Sistem bersaing sempurna dalam dunia ideal memang tidak pernah terjadi di dunia nyata.

Koperasi kapitalis yang pak De maksud adalah suatu badan usaha yang pemiliknya terdiri dari para pekerja badan usaha tersebut dengan tujuan untuk memaksimumkan keuntungan yang selanjutnya dibagikan kepada para pekerja. Misalnya beberapa orang yang berjumlah L_0 mempunyai cita-cita sama bersepakat mendirikan badan usaha. Kapital yang dibutuhkan disediakan oleh para anggota. Mengingat balas jasa atas kapital dibatasi, maka tidak ada anggota yang mempunyai insentif untuk menempatkan kapitalnya secara berlebihan ke dalam koperasi. Akibatnya, kontribusi penyediaan kapital oleh masing-masing anggota dapat dianggap sama.

Koperasi kapitalis tidak memaksimumkan keuntungan rata-rata yang diterima oleh para pemilik secara langsung, melainkan memaksimumkan keuntungan total lebih dahulu dan tahap berikutnya membagikan keuntungan tersebut kepada setiap anggota. Keanggotaan selalu bersifat penuh untuk menghindari degenerasi ke bentuk firma joint-stock (Miller, 1981). Problemnnya identik dengan problem (4.1) dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pekerja yang menjadi pemilik firma secara merata sebagai berikut:

$$\bar{\pi} = \beta \frac{\pi}{L_0}, \text{ dimana } 0 < \beta < 1 \quad (4.3)$$

Unsur kapitalis ditunjukkan oleh elemen tujuan yang memaksimalkan keuntungan sebagaimana firma kapitalis murni. Sementara itu, pembatasan balas jasa atas kapital, kepemilikan perusahaan secara bersama oleh anggota, serta pembagian keuntungan secara merata di antara anggota merupakan unsur sosialis yang menjamin pemerataan pendapatan. Disini, pemaksimalan keuntungan bukanlah tujuan akhir dari koperasi, tetapi melulu sebagai cara untuk menjaga efisiensi dan kekompakan.²¹ Bentuk koperasi kapitalis ini lazim disebut dengan *profit sharing*. Namun, analisis Markusen (1975) menunjukkan bahwa firma yang dijalankan secara *profit sharing* murni biasanya tidak akan mencapai suatu optimum, bahkan bila para pekerja bekerjasama, jika pembagian hasil tidak endogenous. Untuk menghindari masalah *free rider*, pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan tingkat usaha dari anggota. Pertanian kolektif di desa Chen di Cina menggunakan pola ini dan berhasil (Unger, 1977).

4.5.2 Koperasi Sosialis

1. **Tanya:** Meskipun gerakan koperasi merupakan bagian dari gerakan sosialisme, penggabungan keduanya menjadi koperasi sosialis sebagai tandingan dari firma kapitalis menggugah selera untuk tahu lebih banyak. Silahkan pak De diteruskan.

Answer: Dubravčić (1970) dan selanjutnya Sisk (1982) menganalisis berbagai bentuk koperasi. Berikut pemodelan dari berbagai bentuk koperasi secara sederhana dengan pekerja yang homogen:²²

- (a) Kolektif Sosialis (Sisk, 1982) atau Co-Op (Dubravčić, 1970)

Komoditas tunggal diproduksi dengan menggunakan input yang berupa kapital (k) dan tenaga kerja yang juga menjadi anggota koperasi (n) dengan fungsi produksi ($y = y(k, n)$). Jumlah kapital yang digunakan adalah konstan sebesar $k = k_0$, sehingga sosialis kolektif tidak lagi memilih jumlah kapital optimal yang perlu

²¹ Maksimisasi keuntungan berimplikasi pada minimisasi biaya (Varian, 1992; Mas-Collel et al., 1995). Menurut Paulson (1940), keuntungan bukanlah tujuan koperasi, tetapi koperasi beroperasi untuk melayani anggotanya pada biaya yang paling rendah. Selain itu, koperasi mendukung sistem yang kompetitif.

²² Untuk kasus koperasi dengan pekerja yang heterogen dapat dilihat di Askildsen (1988).

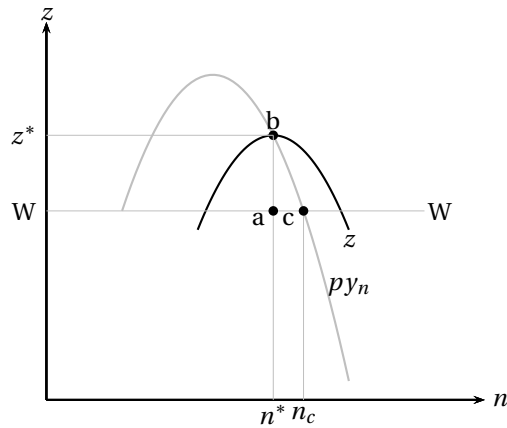
digunakan. Koperasi bekerja pada pasar yang kompetitif dan bebas menjual produknya ke pasar dengan harga p . Sementara itu, atas penggunaan kapital pemerintah mewajibkan koperasi untuk membayar sewa sebesar R . Dengan masing-masing anggota memberi curahan tenaga kerja dan menerima SHU yang sama, para anggota berupaya untuk memaksimumkan SHU rata-rata (z), dimana:

$$z = \frac{1}{n} [p \cdot y(k_0, n) - R] \quad (4.4)$$

Jumlah anggota optimal akan dicirikan oleh kondisi berikut:

$$p \cdot y_n = \frac{1}{n} [p \cdot y(k_0, n) - R] = z \quad (4.5)$$

SHU rata-rata mencapai maksimum ketika SHU rata-rata sama dengan marginal revenue product. Gambar 4.1 mengilustrasikan pernyataan dalam Persamaan (4.5) yang meringkas perilaku dari kolektif sosialis.



Gambar 4.1: Penentuan Keanggotaan Optimal

Apa yang terjadi bila harga output berubah atau pemerintah menaikkan sewa kapital? Persamaan (4.5) dapat ditulis kembali dalam bentuk

$$y_n = \frac{1}{n} \left[y(k_0, n) - \frac{R}{p} \right]$$

Ketika harga output meningkat maka ruas sebelah kanan akan meningkat. Agar kesamaan tetap berlaku maka ruas sebelah kiri

harus meningkat. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah anggota koperasi. Akibatnya, jumlah output yang dihasilkan akan berkurang. Dengan kata lain, bentuk kurva suplai dari kolektif sosialis adalah bersudut negatif seperti telah disinggung sebelumnya. Realistiskah perilaku seperti ini? Inilah konsekuensi dari tujuan memaksimalkan *SHU* rata-rata. Selanjutnya, bila pemerintah menaikkan sewa kapital maka ruas sebelah kanan akan menurun. Konsekuensinya adalah penambahan jumlah anggota sosialis kolektif untuk menurunkan y_n .

Bagaimana solusi firma kompetitif yang memaksimalkan keuntungan dalam situasi seperti di atas? Problem firma kompetitif adalah

$$\max_{\{n\}} [p \cdot y(k_0, n) - R - wn] \quad (4.6)$$

dimana w adalah upah kepada pekerja atau harga suplai tenaga kerja. Solusi terhadap problem ini adalah

$$p \cdot y_n = w \quad (4.7)$$

Bila $w=0$ terletak di bawah *SHU* maksimum, solusi koperasi menghasilkan pendapatan per anggota, z^* , yang lebih tinggi dibanding biaya kesempatannya. Sementara itu, dalam hal penyerapan jumlah pekerja, koperasi menyerap lebih sedikit tenaga kerja, n^* , dibandingkan firma kompetitif, n_c .

(b) Koperasi yang Diberi Hibah Kekayaan

Bila kekayaan berupa kapital dihibahkan oleh pemerintah kepada koperasi sehingga koperasi tidak perlu membayar sewa lagi, maka problem koperasi menjadi

$$\max_{\{n\}} \left[\frac{1}{n} \cdot p \cdot y(k_0, n) \right] \quad (4.8)$$

Solusi jumlah pekerja optimal interior dari problem ini harus ber-ciri sebagai berikut:

$$y_n = \frac{1}{n} \cdot y(k_0, n) \quad (4.9)$$

Problem ini sebenarnya persis sama dengan problem sosialis kolektif dengan R ditetapkan sebesar nol. Sebagaimana telah disinggung dalam sosialis kolektif, antara R dan jumlah anggota terdapat hubungan yang positif. Oleh karena itu, jumlah anggota

optimal dari koperasi yang diberi hibah kekayaan lebih rendah dibandingkan jumlah anggota optimal dalam sosialis kolektif selama $R > 0$.

(c) Kemitraan (Sisk, 1982) atau L Co-op (Dubravčić, 1970)

Bentuk koperasi ini oleh Dubravčić (1970) juga disebut dengan koperasi produsen. Disini anggota berkontribusi terhadap pengadaan kapital yang dibutuhkan, k_0 . Harga kapital per unit adalah r . Problem yang hendak dipecahkan adalah memaksimumkan SHU rata-rata yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\max_{\{n\}} \frac{1}{n} \cdot [p \cdot y(k_0, n) - r k_0] \quad (4.10)$$

Jumlah anggota optimal harus dicirikan oleh kondisi sebagai berikut:

$$p y_n = \frac{1}{n} [p \cdot y(k_0, n) - r k_0] \quad (4.11)$$

Struktur solusi ini sebenarnya mirip dengan solusi bagi sosialis kolektif. Kenaikan r dalam problem kemitraan ini mirip dengan kenaikan sewa kapital dalam problem sosialis kolektif. Jumlah anggota akan lebih kecil bila harga kapital lebih tinggi.

Kita dapat memodifikasi model ini dengan kendala bahwa setiap anggota menyumbang dalam jumlah yang sama bagi pengadaan kapital yang dibutuhkan, yakni $k_0 = n \bar{k}_0$ dimana \bar{k}_0 adalah sumbangan kapital dari tiap anggota. Dengan rancangan ini problem menjadi:

$$\max_{\{n\}} \frac{1}{n} \cdot [p \cdot y(n \bar{k}_0, n) - r n \bar{k}_0] \quad (4.12)$$

Solusi terhadap problem ini dicirikan oleh

$$p y_n [1 + \bar{k}_0] = \frac{1}{n} \cdot [p y(n \bar{k}_0, n) - r n \bar{k}_0]$$

yang dapat ditulis kembali dalam bentuk sebagai berikut:

$$p y_n = \frac{1}{n} \cdot \left[\frac{p y(n \bar{k}_0, n) - r n \bar{k}_0}{[1 + \bar{k}_0]} \right] \quad (4.13)$$

Ruas sebelah kiri Persamaan (4.13) ini identik dengan ruas sebelah kiri Persamaan (4.11). Sementara itu, ruas sebelah kanan

Persamaan (4.13) mengandung pembagi $[1 + \bar{k}_0] > 1$ karena $\bar{k}_0 > 0$. Artinya, tambahan kendala bahwa setiap anggota harus berkontribusi dengan jumlah yang sama dalam pengadaan kapital yang dibutuhkan akan memerlukan jumlah anggota koperasi yang lebih banyak.

4.6 Koperasi Sosialis dan Teknologi Produksi

1. **Tanya:** Niat baik dari gerakan koperasi itu memang sepantasnya kita hargai. Tetapi tetap saja kita juga perlu menyadari keterbatasannya. Menyalurkan niat baik tanpa ilmu pengetahuan dapat mencelakakan juga ya pak De?

Answer: Tidak mudah memformulasikan konsep atau teori ringkas tentang koperasi. Dua hambatan utama terhadap hal ini adalah bahwa koperasi tidak memiliki basis operasional yang jelas dan koperasi menjadi wadah bagi banyak ragam aktivitas (Eaton, 1948). Model koperasi sosialis seperti telah disampaikan sebelumnya akan menghadapi kendala teknologi yang serius. Kritik banyak diarahkan kepada kendala yang tidak perlu, asumsi yang bertentangan, dan memberikan kesimpulan yang menyesatkan atau tidak relevan (Sexton, 1986).

Salah satu problem besar dari analisis model Ward-Domar dan Sisk (1982) adalah asumsi terhadap fungsi produksi yang sangat ketat bagi kasus output tunggal dengan input tunggal tenaga kerja dan tanpa biaya tetap. Untuk dapat menghasilkan kurva marginal revenue product dan *SHU* rata-rata seperti tersaji pada Gambar 4.1 diperlukan fungsi produksi yang mempunyai titik belok, convex di level bawah lalu berubah menjadi concave di level atas. Persyaratan bahwa fungsi produksi harus quasi-concave tidak akan cukup karena fungsi concave juga quasiconcave. Teknologi produksi yang memenuhi harus quasi-concave tetapi tidak *strictly concave* dan tidak *strictly convex* juga. Ketika teknologi produksi adalah concave, maka tidak akan ada solusi interior seperti yang terjadi pada Gambar 4.1.

Apakah benar bahwa koperasi hanya dapat beroperasi dengan menggunakan teknologi produksi dengan syarat yang begitu ketat? Atau, apakah model koperasi yang diuraikan di atas kurang realistis dan oleh karena itu perlu dicari model koperasi yang lebih realistis? Mempertahankan pemaksimalan *SHU* sebagai tujuan meski dengan me-

ngorbankan tenaga kerja sangatlah tidak realistis dan oleh karena itu perlu dicarikan tandingannya (Furubotn, 1976). Cara berkoperasi seperti apa yang tidak memerlukan asumsi teknologi produksi yang begitu ketat dan lebih realistis? Dalam kaitan dengan anomali yang berasal dari fungsi produksi, Landsberger & Subotnik (1981) mengusulkan perlunya reformulasi tujuan koperasi.

Problem lain dari model di atas adalah pelanggaran terhadap prinsip koperasi sebagai organisasi yang terbuka. Ketika jumlah anggota optimal tercapai, koperasi harus menutup diri terhadap masuknya anggota baru kecuali koperasi bersedia mengorbankan *SHU* rata-rata maksimum yang telah dicapainya sehingga jumlah anggota tidak lagi optimal. Atau, prinsip terbuka koperasi merupakan salah satu kelemahan koperasi yang akhirnya dapat menghancurkan koperasi itu sendiri? Prinsip sebagai organisasi terbuka akan menghadapi koperasi pada masalah jangka panjang dan jangka pendek:

- (a) *Jangka Panjang*: Ketika koperasi masih dalam fase *increasing return to scale* penambahan anggota memang diperlukan, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan terus menerus ketika koperasi telah memasuki fase *decreasing return to scale* tanpa menanggung inefisiensi (lihat subseksi 4.5.1).
- (b) *Jangka Pendek*: Dengan mempertahankan input lain tetap, penambahan anggota yang juga berfungsi sebagai tenaga kerja akan menghadapi koperasi pada hukum *diminishing marginal productivity of labor*. Akibatnya, *SHU* yang diterima oleh setiap anggota akan semakin menurun dengan semakin bertambahnya anggota. Ketika *SHU* tidak lebih rendah dari upah kompetitif, penambahan anggota kemungkinan masih dapat dibenarkan karena koperasi dianggap sebagai wahana untuk mendistribusikan surplus. Namun, apa yang akan dilakukan ketika *SHU* per anggota telah lebih kecil dari upah kompetitif?

Cara pemodelan di atas menghasilkan perilaku koperasi yang janggal. Ketika harga output meningkat, misalnya karena permintaan yang meningkat, respon koperasi malah mengurangi tenaga kerjanya yang artinya mengurangi jumlah anggotanya. Hal seperti ini tidak akan terjadi pada firma kapitalis yang memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, sifat sosial koperasi sepatutnya tidak keluar dari batas perusahaan yang rasional.

Secara filosofis, pemaksimalan *SHU* secara langsung sebenarnya malah mengingkari jiwa koperasi itu sendiri. Pemodelan seperti ini secara tidak sadar mempunyai makna bahwa pekerja dalam koperasi lebih *selfish* dibanding pekerja dalam firma kapitalis. Dengan pemaksimalan *SHU* secara langsung, pekerja lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang koperasi sebagai wahana untuk mencapai tujuan bersamanya. Koperasi menjadi kurang efisien sehingga juga kurang kompetitif yang berimplikasi pada tragedi bersama ketika koperasi kalah bersaing dengan firma kapitalis. Oleh karena itu pak De tidak sependapat dengan cara pemodelan koperasi yang bertujuan memaksimalkan *SHU* secara langsung. Tetapi model maksimisasi *SHU* diami ni oleh Mubyarto (2003) yang menyatakan bahwa “koperasi tidak mencari keuntungan karena anggotalah yang mencari keuntungan yang harus menjadi lebih besar dengan bantuan organisasi koperasi.”

2. **Tanya:** Sampai disini apa yang dapat kita simpulkan pak De?

Answer: Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik:

- (a) Tema utama koperasi adalah menempatkan kapital secara proporsional. Koperasi tidaklah anti kapital karena koperasi juga membutuhkan kapital dalam operasinya. Kapital dalam koperasi dihargai sebagaimana seharusnya, sementara penghargaan tersebut cenderung berlebihan dalam firma kapitalis. Koperasi lebih menghargai manusia yang bertindak produktif ketimbang kapital.
- (b) Tema utama lainnya dari koperasi adalah distribusi surplus. Dalam model firma kapitalis, distribusi tersebut dilakukan melalui kompetisi untuk jangka panjang - pendekatan tidak langsung - dan melalui pembagian langsung berdasarkan pada penguasaan kapital melalui pemilikan saham untuk jangka pendek. Koperasi melakukan distribusi tersebut tidak berdasarkan pada penguasaan kapital, melainkan berdasarkan “jasa usaha” dari masing-masing anggota.
- (c) Cara distribusi surplus tersebut sesungguhnya merupakan pilihan atau kesepakatan sosial atas suatu surplus dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pilihan sosial lainnya yang juga sangat penting dalam koperasi adalah distribusi suara dalam pengambilan keputusan; firma kapitalis berdasarkan penguasaan kapital, sedangkan koperasi berdasarkan keanggotaan. Kesepakatan atas

landasan distribusi surplus dan suara merupakan masalah normatif yang tidak dapat dinilai benar dan salahnya.

- (d) Teori ekonomi neoklasik tidak berurusan dengan distribusi surplus, melainkan dengan penciptaan surplus yang paling efisien. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya mempertentangkan teori ekonomi neoklasik dengan teori ekonomi koperasi. Bahkan, dalam penciptaan surplus, koperasi dapat menggunakan - jika tidak ingin mengatakan tidak dapat menghindari - pendekatan teori ekonomi neoklasik.
- (e) Koperasi yang bertujuan memaksimumkan *SHU* rata-rata menghadapi kendala teknologi produksi yang sangat ketat sehingga koperasi hanya dapat dijalankan pada teknologi produksi yang sangat terbatas. Maksimisasi *SHU* per anggota merupakan cara distribusi surplus yang terlalu prematur. Untuk menghindari kendala tersebut, perlu ada rumusan lain dari tujuan ekonomi yang hendak dicapai oleh koperasi.
- (f) Prinsip keanggotaan terbuka sangat berpotensi mengancam efisiensi koperasi, terutama ketika koperasi memasuki tahap *decreasing return to scale* dalam jangka panjang atau *diminishing marginal product of labor* dalam jangka pendek. Perlu diingat bahwa semakin besar skala usaha tidak harus selalu berarti semakin efisien usaha tersebut. Ancaman inefisiensi ini dapat mengarah kepada kematian koperasi itu sendiri.

"If your company has a clean-desk policy, the company is nuts and you're nuts to stay there."

Tom Peters

"He who knows best knows how little he knows"

Thomas Jefferson

"Subsidy a formula for handing you back your own money with flourish that makes you think it's a gift"

Jo Bingham

5

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sering menjadi bahan perdebatan banyak pihak. Perdebatan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seolah sudah menjadi ritual wajib tahunan atau beberapa tahun sekali. Jualannya tetap sama, yakni kasihan rakyat kecil, dan tujuan yang juga tetap sama, yakni mendapat simpati publik dan keuntungan finansial. Subsidi BBM ini paling sulit dihilangkan karena ada pertemuan antara kepentingan rakyat kecil yang berharap mendapatkan subsidi dan kepentingan orang yang memiliki kekuasaan yang memperoleh keuntungan finansial luar biasa besar dari penyelundupan minyak ke luar negeri. Ada sinyalemen bahwa demo menentang pengurangan subsidi BBM itu dibiayai oleh para penyelundup BBM.

Masih banyak kebijakan publik lain yang dilihat sepintas adalah baik bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil, tetapi bila dicermati lebih jauh sebenarnya tidak sebaik kelihatannya, bahkan justru merugikan rakyat kecil. Dalam banyak kasus, nama rakyat kecil itu hanya dipinjam atau dijadikan barang dagangan politik belaka. Masyarakat membutuhkan pencerahan. Sayangnya, banyak analisis kebijakan publik dengan gelar akademik yang sangat tinggi tidak memberikan pencerahan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi malah mencari popularitas untuk dirinya sendiri dengan harapan mendapat jabatan publik.

Bab ini membahas beberapa kebijakan publik yang paling sering muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan. Dengan teknik analisis yang sederhana, setiap orang dapat melakukan analisis terhadap suatu kebijakan publik untuk melihat baik buruknya bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kita dapat menilai pendapat para politisi dan analisis kebijakan, sehingga diketahui mana pendapat yang dilandasi kejujuran dan mana pendapat yang berangkat dari keculasan. Diharapkan, meningkatnya daya kritis masyarakat dapat mempersempit ruang gerak politisi dan analisis kebijakan picisan yang telah banyak menimbulkan kerusakan di negeri ini.

5.1 Subsidi Bahan Bakar Minyak

1. **Tanya:** Kebijakan paling heboh dulu pak De, yaitu tentang bahan bakar minyak (BBM). Lebih tepatnya tentang subsidinya itu pak De. Produksi dan distribusi BBM di Indonesia dikuasai oleh negara melalui BUMN PT. Pertamina. Secara umum, harga minyak di pasar dalam negeri Indonesia lebih rendah dibandingkan harga minyak di negara tetangga terdekat dan pasar dunia pada umumnya. Dalam ilmu ekonomi, harga yang lebih rendah dari yang seharusnya menurut pasar disebut sebagai harga yang disubsidi. Setiap kali pemerintah menaikkan harga BBM, beberapa komponen masyarakat melakukan protes menyatakan ketidak-setujuannya. Banyak alasan digunakan, tetapi intinya adalah bahwa kenaikan tersebut tidak tepat, entah karena waktunya atau alasan lain. Pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyat, begitu cemooh pihak yang membela atau pura-pura membela nasib rakyat. Ada yang sedikit cerdas mencela pemerintah sebagai tidak punya strategi mengembangkan energi alternatif.

Answer: Apanya yang ingin kamu ketahui? Isu itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tidak kunjung terpecahkan juga hingga hari ini. Banyak energi dan waktu habis untuk debat subsidi BBM yang sangat tidak produktif.

2. **Tanya:** Lho semua itu ngomongnya untuk rakyat meskipun posisi mereka berseberangan. Lalu yang benar yang mana? Masih ada isu yang lain lagi pak De. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai sumberdaya alam yang dapat menghasilkan energi. Sebagai wilayah yang dikepung gunung berapi, Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan energi panas bumi. Indonesia juga memiliki daerah-

daerah yang beriklim relatif sangat kering - sedikit berawan - sehingga cocok untuk mengembangkan energi matahari. Dengan iklim tropika basahnya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan energi hayati. Pertanyaannya mengapa berbagai sumber energi alternatif tersebut tidak digarap secara serius? Mengapa seolah-olah tidak ada strategi besar untuk mengembangkan berbagai sumber energi alternatif tersebut?

Answer: Kalau kamu mengikuti perdebatan tentang rencana kenaikan harga BBM yang baru lalu, menurut pak De, omongan yang paling jujur dan juga paling tepat ya omongannya pak wamen yang meninggal ketika naik gunung itu. Omongan pihak yang berseberangan dengan beliau umumnya ya sekedar asal bunyi saja.

3. **Tanya:** Maksudnya tidak memahami isu sentralnya begitu pak De? Tetapi banyak diantara mereka adalah orang yang cukup tersohor pak De.

Answer: Ya benar begitu, tetapi tersohor belum tentu ada isinya. Masih ingat dengan pepatah tong kosong nyaring bunyinya kan? Baiklah, simak penjelasan pak De ya.

Ada beberapa isu penting menyangkut BBM yang perlu diurai agar perdebatan kenaikan harga BBM di masa mendatang lebih substantif dan tidak sekedar debat kusir dengan masing-masing pihak menjual nama rakyat. Ada juga pihak yang sebenarnya tahu masalahnya tetapi tega melacurkan dirinya demi popularitas.

Pertama, isu subsidi. Pemerintah selalu menggunakan terminologi subsidi untuk mengatakan bahwa harga BBM di dalam negeri lebih murah dibanding harga BBM di luar Indonesia pada umumnya. Pihak yang tidak setuju kenaikan harga BBM mempertanyakan apakah pemerintah mengeluarkan uang untuk membuat harga BBM di dalam negeri lebih murah tersebut? Menurut pihak ini, bila pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk membuat harga BBM lebih murah maka sebenarnya pemerintah tidak memberikan subsidi.

Ketika pemerintah memilih menggunakan kata subsidi, pemerintah menggunakan terminologi ekonomi. Disini memang tidak perlu ada uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat harga lebih rendah. Ketika BBM tidak dijual untuk memperoleh nilai terbaiknya karena harus dijual kepada rakyatnya sendiri, maka disitu tersirat ada subsidi. Sebut saja subsidi tersirat. Sementara itu,

dari pandangan akunting, setiap subsidi harus melibatkan uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menutupi selisih harga. Bagi akunting, subsidi harus tersurat, jika tidak maka itu bukan subsidi. Terminologi mana yang lebih tepat. Untuk mengurus negara, terminologi ekonomi yang lebih tepat. Sedangkan untuk mengurus perusahaan, terminologi akunting lebih tepat.

Kedua, isu kepentingan rakyat. Pihak yang menentang kenaikan harga BBM menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Sementara itu, alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah juga untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana yang dimaksud? Mari kita urai debat kusir ini dengan lebih jernih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada generasi sebelumnya, mari kita fokuskan pada rakyat yang ada hari ini dan rakyat yang akan ada kemudian. Rakyat yang sudah almarhum toh sudah tidak merasakan tinggi rendahnya harga BBM sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam kebijakan harga BBM. Itu pembagian antar generasi. Dalam satu generasi, rakyat dapat dibagi ke dalam kelompok sangat kaya hingga kelompok sangat miskin. Ada generasi masa kini yang kaya, ada juga generasi masa datang yang kaya dan seterusnya. Semua itu adalah rakyat Indonesia yang harus dipertimbangkan setiap membuat kebijakan publik.

Tanpa harus belajar ilmu ekonomi lebih dahulu, setiap orang dapat merasakan dan mengerti bahwa ketika harga suatu barang dirasakan murah maka konsumsi atas barang tersebut cenderung lebih banyak dibanding ketika harga barang tersebut dirasakan mahal. Oleh karena itu, bila harga suatu barang dimurahkan sehingga lebih rendah dari yang semestinya, maka konsumsi atas barang tersebut lebih banyak dari yang semestinya. Inilah yang terjadi dengan BBM yang dijual pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai terbaiknya.

Mari kita perhatikan lebih seksama fenomena di SPBU. Setiap kali menjelang kenaikan harga BBM diumumkan, banyak anggota masyarakat berebut mengisi tanki mobil atau sepeda motornya sampai penuh karena harga saat itu lebih murah dibanding harga yang akan berlaku beberapa jam kemudian. Seandainya hari ini pemerintah mengumumkan akan menurunkan harga BBM seminggu kemudian, dijamin beberapa hari sebelum waktu penurunan berlaku SPBU bakal sepi pengunjung. Inti dari fenomena tersebut adalah jika harga kini lebih murah dibandingkan harga di hari yang akan datang, maka konsum-

si akan ditarik ke masa kini. Sebaliknya, jika harga kini lebih mahal dibanding harga di hari yang akan datang, maka konsumsi akan ditunda.

Sekarang menjadi lebih mudah dimengerti bahwa ketika harga BBM hari ini lebih rendah dari yang semestinya, maka konsumsi BBM bangsa Indonesia hari ini lebih tinggi dari yang semestinya. Sementara itu, jumlah bahan dasar BBM di bumi kita ini relatif tetap. Apa konsekuensinya bagi generasi mendatang yang juga rakyat Indonesia? Konsekuensi logisnya tidak mungkin lain kecuali bahwa konsumsi BBM rakyat Indonesia di masa mendatang harus lebih rendah dari yang semestinya karena sebagian konsumsi tersebut telah digunakan oleh generasi sebelumnya. Pembela kepentingan rakyat generasi sekarang pada dasarnya juga pengorban rakyat generasi mendatang. Jangan pernah melupakan pepatah peninggalan orang tua kita “jangan lebih besar pasak daripada tiang.”

Ketiga, isu siapa mensubsidi siapa? Benarkah pemerintah yang memberi subsidi harga BBM yang sekarang kita nikmati? Uraian sebelumnya sudah cukup menunjukkan bahwa pihak yang berkorban atau dikorbankan agar generasi sekarang mendapatkan subsidi adalah generasi yang akan datang. Merekalah pemberi subsidi yang sesungguhnya. Pemerintah tidak lebih dari sekedar sebuah instrumen perampokan yang kita buat untuk merampok hak-hak generasi yang akan datang yang hari ini belum mampu bersuara apalagi mampu berdemo. Pemerintah bukan pemberi subsidi. Bila subsidi terpaksa harus diadakan, maka sepantasnya subsidi dalam satu generasi. Kelompok kaya membantu kelompok yang kurang beruntung dalam generasi yang sama. Tetapi tidak jarang bahwa kelompok kurang beruntung justru memberi subsidi kelompok yang sangat beruntung. Kelompok masyarakat yang hidup di tempat yang miskin prasarana jalan harus membayar harga BBM lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat yang hidup di daerah yang mempunyai prasarana jalan lebih baik.

Keempat, isu pengembangan energi alternatif. Harga minyak di pasar dunia yang meningkat tajam di tahun 2008 dan semakin menguatnya isu pemanasan global memaksa banyak pihak untuk memikirkan pengembangan energi alternatif. Di Indonesia banyak pihak menyalahkan pemerintah yang disebutnya sebagai tidak mempunyai kebijakan energi nasional. Ketika pemerintah mencanangkan program konversi dari minyak tanah ke gas alam, banyak pihak yang menentang pro-

gram pemerintah tersebut. Tidak ketinggalan, semua masalah ini disebabkan oleh neoliberalisme. Sistem ekonomi pasar dicurigai sebagai penyebab utama semua masalah yang tidak mengenakkan. Mari kita urai perdebatan kusut ini perlahan-lahan.

Ketika harga suatu barang lebih murah dibandingkan dengan harga barang substitusinya yang mempunyai fungsi dan kualitas yang sama, orang akan cenderung memilih barang tersebut dibandingkan barang substitusinya. Bila selisih harga tersebut sangat jauh berbeda, maka barang substitusi akan kalah bersaing dan akhirnya tidak menarik untuk diproduksi. Inilah yang terjadi dengan kasus BBM dan barang alternatif sebagai substitusinya. Implikasi dari subsidi harga BBM yang terlalu banyak adalah tidak kompetitifnya barang substitusinya. Dengan kata lain, subsidi BBM merupakan disinsentif bahkan pembunuhan bagi penggunaan kreatifitas untuk mengembangkan energi alternatif. Oleh karena itu, sangat lucu bila kita menuntut pengembangan energi alternatif ketika kita juga menuntut agar BBM disubsidi habis-habisan.

Ringkasnya, selama kita menghendaki harga BBM terus disubsidi secara besar-besaran, selama itu pula sebenarnya kita tidak menghendaki dikembangkannya sumber energi alternatif. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyalahkan pemerintah, karena pemerintah pada dasarnya juga sedang tersandera oleh tuntutan kita untuk terus memberi subsidi BBM. Perlu terus diingat bahwa ketika subsidi telah menjadi *way of life* maka kehancuran sesungguhnya telah mencengkeram kita karena kita telah menghancurkan kreativitas sebagai sumber kemajuan umat manusia dengan peradabannya.

Kenyamanan hidup yang berlebihan akan mengurangi daya imajinasi yang produktif yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidup itu sendiri. Kita semua memahami dan sering melihat sendiri bahwa daya juang anak yang dimanjakan umumnya sangat rendah. Sayangnya, manusia itu umumnya hanya sebatas ingin sekedar tahu. Semua orang tahu bahwa jujur itu baik. Mengetahui bahwa kejujuran itu baik dianggap sudah cukup dan sudah paham tentang kejujuran. Tindakan selanjutnya biasanya adalah berkotbah tentang kejujuran kepada orang lain. Salahkah? Tentu saja tidak. Tetapi bila ingin memahami secara tuntas makna kejujuran yang sebenarnya maka jalan satu-satunya adalah menjalankan kejujuran itu setiap saat. Dari pengamalan kejujuran yang terus menerus itulah seseorang akan mendapatkan ilmu

kejujuran, bukan sekedar pengetahuan tentang kejujuran.

Pengalaman peradaban manusia telah mengajarkan bahwa suatu perubahan besar selalu diawali oleh krisis yang besar juga. Keberhasilan mengatasi krisis tersebut akan membuat peradaban baru yang lebih maju, tetapi jika gagal menghadapi krisis tersebut maka kepunahan peradaban yang akan terjadi. Dari berbagai peninggalan yang ditemukan, sebelum ada peradaban yang kita kenal saat ini, di dunia ini telah hadir suatu peradaban manusia. Kita sering mendengar kemegahan peradaban Babilonia yang kemudian hancur. Kita juga sudah tahu bahwa menyegerakan suatu pekerjaan itu adalah perbuatan yang baik. Akankah menyegerakan suatu pekerjaan tetap hanya sebagai pengetahuan atau menjadi suatu ilmu? Ilmu akan membuat manusia semakin arif dan bijaksana, sedangkan pengetahuan akan membuat manusia semakin congkak dan pongah.

Bagaimana, apa sudah cukup paham?

4. **Tanya:** Kalau tidak salah ingat pak De, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga melarang diserahkannya harga BBM kepada mekanisme pasar. Dengan kata lain, dalam pandangan MK, penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Bagaimana pak De?

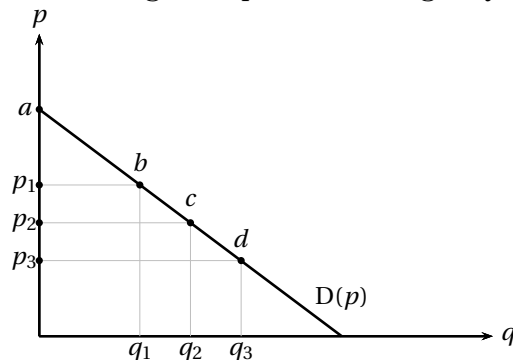
Answer: Satu hal yang kamu harus selalu ingat-ingat Tanya adalah apa tujuan yang hendak dicapai dari pengelolaan ekonomi itu. Bukankah tujuannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat? Harga yang tidak mengikuti mekanisme pasar itu maksudnya apa? Mungkin saja aspek fluktuasinya yang ditiadakan atau dikurangi dengan memberlakukan tingkat harga tertentu untuk jangka waktu yang cukup panjang. Adapun harga yang diberlakukan tersebut dapat berupa harga rata-rata dari fluktuasi harga selama setahun misalnya, atau sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata tersebut.

Terhadap Pasal 22 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 yang berbunyi "Harga BBM dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penyerahan harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar adalah bertentangan dengan konstitusi. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa seharusnya harga BBM dan gas bumi didalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan meka-

nisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Apakah keputusan MK beserta alasannya cukup jelas?

Dalam kaitannya dengan kemakmuran rakyat, harga mana - harga yang fluktuatif atau harga tetap pada rata-rata harga fluktuatif tersebut - yang memberikan kemakmuran lebih tinggi? Mengenai hal ini, dahulu pernah ada perdebatan yang cukup seru.

Debat tentang efek dari ketidakstabilan harga pada kesejahteraan konsumen diawali oleh Waugh (1944) yang mengklaim bahwa konsumen akan lebih diuntungkan - menikmati surplus konsumen (harapan) lebih besar - jika harga dari suatu komoditas adalah berubah-ubah dibandingkan bila harga komoditas tersebut adalah konstan pada nilai tengahnya, sepanjang kurva permintaan adalah bersudut negatif. Banyak yang keberatan terhadap temuan ini dan sebagian besar keberatan tersebut menyatakan bahwa temuan tersebut melawan akal sehat. Dari kerenyit di dahimu, tampaknya kamu juga termasuk yang tidak menerima klaim tersebut. Tanya. Waugh dan peneliti berikutnya (misalnya Massell (1969), Turnovsky et al. (1980) dan Bradford & Kelejian (1977)) menggunakan hasil ini untuk membuat preposisi tentang efek kesejahteraan dan distribusi dari skema stabilisasi harga. Howell (1945) dan Lovasy (1945) menolak klaim tersebut karena stabilisasi harga tidak harus ditargetkan pada nilai tengahnya.



Gambar 5.1: Efek Fluktuasi Harga pada Surplus Konsumen

Jika peluang harga BBM pada p_1 dan p_3 masing-masing adalah 50%, maka luas rata-rata segitiga ap_1b dan ap_3d adalah lebih besar dari luas segitiga ap_2c . Berbagai segitiga tersebut menunjukkan surplus konsumen; karena nilainya tergantung pada harga yang terjadi maka sur-

plus konsumen dapat dicatat dalam bentuk $cs(p)$. Pernyataan Waugh kemudian dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas sebagai:

$$cs(E(p)) < E(cs(p)) \quad (5.1)$$

Cara membacanya adalah surplus konsumen dari harga harapan lebih kecil dari harapan surplus konsumen. Jangan sekali-sekali menggunakan notasi seperti ini dalam diskusi dengan anggota DPR, karena mereka pasti jauh dari mudeng.

Hasil yang diperoleh Waugh tersebut merupakan konsekuensi logis dari teori konsumsi, baik melalui maksimisasi utilitas (*utility maximization*) maupun dualitasnya, yakni minimisasi belanja (*expenditure minimization*). Waugh membatasi analisisnya pada barang tertentu dan harganya dengan menggunakan surplus konsumen dari barang yang bersangkutan. Tentu saja hal ini belum mencerminkan perubahan kesejahteraan secara keseluruhan karena surplus konsumen dari barang lain juga terpengaruh. Ketidakpastian pendapatan riil akibat variabilitas harga dan peran *hedging* tidak diperhitungkan (Eaton, 1980).¹ Beberapa tahun sebelumnya, tidak kurang dari seorang ahli ekonomi pemenang hadiah nobel yang menentang hasil analisis Waugh dengan menggunakan teori keseimbangan umum (Samuelson, 1972).

Perlu pak De tekankan Tanya, bahwa realitas yang sesungguhnya terjadi banyak yang bertentangan dengan intuisi kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami masalah yang sedang kita hadapi dengan melakukan analisis yang mendalam secara rasional. Hanya dengan intuisi dan emosi, kita dapat tersesat semakin menjauh dari keadaan yang kita inginkan. Hal seperti inilah yang banyak terjadi dengan politisi Indonesia yang semakin hari semakin norak.

5.2 Subsidi di Sektor Pertanian

1. **Tanya:** Sudah pak De. Masih tentang subsidi pak De, yaitu subsidi di sektor pertanian. Ada subsidi pupuk, ada subsidi harga gabah, dan entah subsidi apalagi. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Dalam musim panen, khususnya padi, harga

¹ *Hedging* merupakan suatu strategi manajemen resiko yang diterapkan dalam membatasi atau mengimbangi peluang rugi dari fluktuasi harga komoditas, mata uang, atau saham.

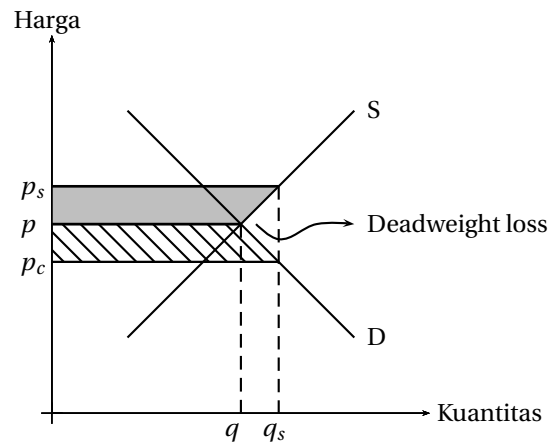
padi selalu jatuh dan sering merugikan petani. Keluhan dari pihak yang prihatin atau pura-pura prihatin terhadap nasib petani umumnya adalah bahwa pemerintah kurang berpihak pada petani. Tuntutan yang umum dilakukan adalah agar pemerintah memberi subsidi kepada petani, seperti subsidi pupuk, subsidi obat-obatan, subsidi bibit, dan subsidi harga gabah. Setiap kali musim petani butuh pupuk, maka pupuk sangat sulit diperoleh di pasar. Kita tahu pupuk bagi petani disubsidi, sedangkan pupuk bagi perkebunan besar tidak disubsidi. Penyelewengan pupuk subsidi yang dijual kepada pengusaha perkebunan sering terjadi.

Misalnya pemerintah meminta nasehat sebagai berikut “dengan anggaran yang ada dan terbatas sebaiknya subsidi pupuk atau subsidi harga gabah yang harus dipilih oleh pemerintah?” Sebagai orang yang prihatin atau pura-pura prihatin atas nasib rakyat miskin, pilihan mana yang sebaiknya disarankan?

Answer: Kita bagi subsidi di atas kedalam dua golongan, yakni subsidi harga input dan subsidi harga output. Kita ambil salah satu input saja, misalnya pupuk. Kita anggap tidak ada pedagang pupuk, sehingga petani membeli pupuk dari pabrik pupuk atau perwakilannya. Jadi, transaksi pupuk terjadi antara pembuat pupuk dan petani secara langsung. Gambar 5.2 menyajikan pasar pupuk sebelum dan setelah ada subsidi. Kita akan menggunakan gambar ini untuk melakukan analisis sederhana.

Tanpa subsidi harga pupuk, maka keseimbangan pasar akan menghasilkan harga p dan kuantitas pupuk yang diperdagangkan sebesar q . Dengan subsidi, keseimbangan berubah. Kuantitas yang diperdagangkan menjadi q_s . Bagaimana dengan harga? Harga yang dibayarkan oleh petani menjadi p_c , sedangkan harga yang diterima pabrik pupuk adalah p_s . Selisih antara p_s dan p_c merupakan besarnya subsidi per satuan kuantitas. Jadi, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar $(p_s - p_c) \times q_s$.

Pertanyaannya, apakah seluruh subsidi tersebut dinikmati oleh petani. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa hanya sebagian subsidi tersebut yang benar-benar dinikmati oleh petani, yakni trapesium bagian bawah yang diarsir. Trapesium atas yang berwarna kelabu dinikmati oleh pabrik pupuk. Jumlah kedua trapesium ini masih lebih kecil dari besarnya subsidi. Selisih tersebut adalah segi tiga kecil sebelah

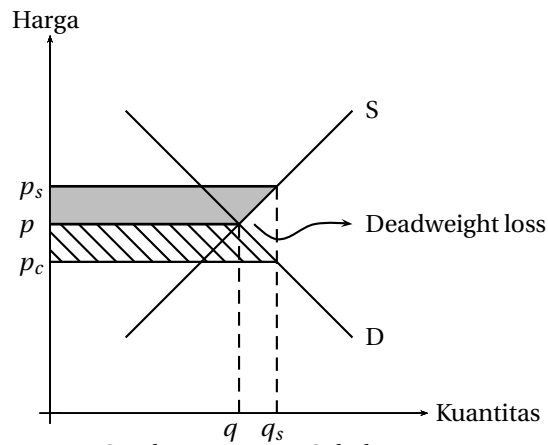


Gambar 5.2: Pasar Pupuk

kanan kurva supply dan kurva demand. Ini yang disebut dengan social deadweight loss atau mudahnya inefisiensi. Memang ada kondisi tertentu dimana subsidi tidak menimbulkan inefisiensi dan seluruh subsidi diterima oleh satu satu pihak. Namun, untuk mengerti hal ini diperlukan uraian yang lebih dalam dan panjang. Hal tersebut dapat dijumpai dalam setiap buku ekonomi mikro tingkat dasar.

Sekarang mari beralih ke subsidi harga gabah. Kita anggap bahwa transaksi terjadi antara petani sebagai produsen gabah dengan konsumen beras. Kerangka analisis yang digunakan persis sama dengan kerangka analisis pupuk (Gambar 5.3). Sekarang, bagian subsidi yang jatuh ke tangan petani adalah trapesium atas yang ditandai dengan warna abu-abu. Trapesium bawah yang ditandai dengan arsiran miring ke kiri merupakan bagian subsidi negara yang dinikmati oleh konsumen beras. Sedangkan inefisiensi ditunjukkan oleh segi tiga abu-abu.

Sama seperti kasus subsidi harga pupuk, dalam kasus subsidi harga gabah petani tidak menerima seluruh subsidi yang diberikan negara. Perbedaannya adalah jika dalam subsidi harga pupuk uang negara untuk subsidi dibagi antara petani dengan pabrik pupuk, maka dalam kasus subsidi harga gabah uang negara untuk subsidi dibagi antara petani dengan konsumen beras. Siapa konsumen beras terbesar? Kita



Gambar 5.3: Pasar Gabah

tahu bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin kecil porsi yang dibelanjakan untuk bahan pangan. Dari sini kita sudah dapat menebak bahwa subsidi harga gabah akan membantu petani dan kelompok miskin yang banyak mengonsumsi beras. Sebaliknya, subsidi harga pupuk akan membantu petani dan industrialis pupuk. Tentu saja, dengan subsidi harga pupuk bukan berarti konsumen beras tidak memperoleh manfaat. Konsumen beras memperoleh manfaat secara tidak langsung melalui harga gabah yang lebih rendah karena produksi gabah yang semakin meningkat.

Sebaliknya, dalam kasus subsidi harga gabah tidak berarti industri pupuk tidak memperoleh manfaat. Seperti terlihat pada Gambar 5.3 gabah yang diproduksi meningkat akibat dari subsidi. Untuk menghasilkan gabah yang lebih banyak diperlukan jumlah pupuk yang lebih banyak juga. Manfaat yang diperoleh pabrik pupuk bersifat tidak langsung.

Berdasarkan uraian di atas, pilihan mana yang seharusnya diambil oleh pemerintah? Mengapa pemerintah memberi subsidi harga pupuk? Mengapa tidak sepenuhnya digunakan untuk subsidi harga gabah? Pembagian kue anggaran negara harus melalui proses politik. Pabrik pupuk jelas lebih terkonsentrasi dibandingkan konsumen beras. Lobi politik pabrik pupuk tentu lebih efektif dibanding lobi konsumen

beras.

2. **Tanya:** Wah asyik juga mampu menganalisis kebijakan publik ya pak De. Boleh jadi, saya lebih cerdas dari politisi senayan pak De.

Answer: He he he kamu ini mengukur kecerdasan saja kok menggunakan standar kecerdasan politisi senayan sih. Ingin menang boleh, tetapi ya jangan yang terlalu mudah begitulah.

3. **Tanya:** Kita teruskan dengan topik yang lain pak De. Saya jadi segera ingin ikut debat publik dalam pilbup.

Answer: Wah kamu jangan menghina pak De begitulah. Bahasa gaulnya sangat tidak level!

4. **Tanya:** Menghina pak De? Maksud pak De apa?

Answer: Lha kok hanya untuk pilbup. Untuk pilgubpun menurut pak De masih terlalu rendah. Untuk pilpres! Bagaimana?

5.3 Penurunan Harga

1. **Tanya:** Hemm menarik juga pandangan pak De tersebut. Tetapi Tanya akan lebih fokus pada penguasaan substansi sehingga kalau diperlukan sudah siap. Kalau toh bukan sebagai presiden, barangkali saja menjadi penasehatnya atau paling tidak tukang kritiknya. Kalau materi kritiknya bernas dan bermutu, kan bangsa ini juga yang akan menikmati hasilnya.

Ketika ekonomi sedang dalam kondisi sulit, maka rakyat kelompok paling tidak beruntung biasanya kesulitan membeli bahan pokok. Sekelompok masyarakat yang prihatin atau pura-pura prihatin melakukan penggalangan massa untuk kemudian melakukan demo. Tuntutannya apalagi kalau bukan **turunkan harga**. Bagaimana cara menurunkan harga merupakan urusan pihak yang dituntut untuk mikir. Pihak yang dituntut untuk melakukan penurunan harga biasanya pemerintah. Para pejuang yang prihatin atau pura-pura prihatin ini biasanya berbagai kelompok mahasiswa atau partai politik yang sedang mencari simpati massa, khususnya massa yang menjadi konsumen.

Kecurigaan yang berlanjut kepada kebencian biasanya juga dialamatkan kepada penjual barang, baik dia sebagai produsen maupun sebagai

pedagang perantara. Banyak pedagang perantara mendapat julukan spekulen. Memang benar dalam beberapa kasus pedagang melakukan spekulasi. Ulah spekulen ini dapat membuat harga naik turun secara eratik yang tentu saja menjengkelkan konsumen. Tetapi benarkah pedagang dapat menaikkan harga dan jika benar demikian sampai seberapa jauh kemampuan mereka melakukan kenaikan harga tersebut?

Answer: Wah pak De salut bila kamu, dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri, bersedia dengan tulus ikhlas memerankan diri sebagai orang nomor dua atau bahkan nomor lebih rendah lagi. Biasanya, orang itu kalau sudah merasa dirinya pintar dan tahu, maka inginnya menduduki posisi nomor satu - terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya dirinya diliputi rasa serba ragu sehingga akhirnya terlihat wagu. Sikapmu itu paling tidak sudah memberi jalan bagi lahirnya sebuah harmoni.

Harga terbentuk oleh interaksi antara penjual dengan penawarannya dan pembeli dengan permintaannya. Transaksi akan terjadi hanya bila harga terendah yang dipatok (*willingness to sell*) penjual masih lebih kecil dibandingkan harga tertinggi yang dipatok (*willingness to buy* atau *willingness to pay*) pembeli. Sebaliknya, transaksi tidak akan pernah terjadi bila *willingness to sell* lebih tinggi daripada *willingness to buy*. Bila pembaca yakin produsen mampu menaikkan harga sekehendak hatinya, maka saran saya segera hentikan membaca buku ini dan segera menjadi pedagang sate. Bayangkan bila sepuluh tusuk sate ukuran normal dapat dijual dengan harga satu milyar rupiah maka predikat sebagai orang super kaya akan segera dapat diraih. Persoalannya adalah adakah orang yang mempunyai *willingness to pay* untuk sepuluh tusuk sate sebesar satu milyar rupiah? Hampir mustahil konsumen yang seperti ini ada dan akan ada di dunia ini.

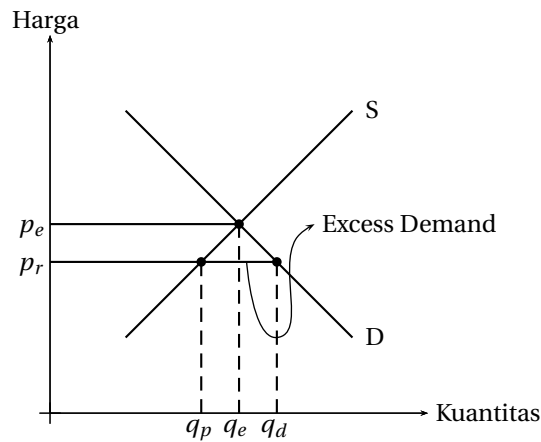
Dalam keadaan tanpa saingan sekalipun, seorang produsen tidak dapat menaikkan harga sekehendak hatinya. Bahkan kenaikan harga setinggi-tingginya juga bukan menjadi kepentingan seorang produsen atau penjual. Penerimaan penjualan merupakan hasil kali dari harga dan jumlah unit barang yang terjual. Jika penjual tersebut merupakan satu-satunya penjual atau monopolis, maka jumlah unit yang dijual berkorelasi negatif dengan harga yang ditetapkan; semakin tinggi harga jualnya, semakin sedikit jumlah unit yang akan terjual. Jika ingin menjual banyak, maka harga yang ditetapkan harus lebih rendah. Harga jual yang terlalu tinggi mungkin saja tidak ada satupun

pembeli yang bersedia membeli barang yang ditawarkan. Seorang monopolis akan memilih harga dan jumlah unit penjualan yang memberikan keuntungan tertinggi.

Sebaliknya, seorang pembeli dapat menaikkan harga sebarangapun dia mau. Jika tidak percaya, maka silahkan pergi ke pasar dan tawarlah mangga aromanis dengan harga dua milyar rupiah per kilo. Saya berani menjamin tidak ada satupun penjual mangga aromanis yang keberatan. Tetapi masalahnya tidak ada pembeli yang akan berbuat seperti itu, karena kepentingan pembeli adalah menekan harga beli menjadi serendah mungkin sejauh yang dapat dia lakukan untuk memaksimalkan surplus yang dapat diperolehnya.

Penjelasan ekonomi atas regulasi pemerintah terhadap harga dapat lebih mudah dipahami dengan menggunakan bantuan grafik sebagaimana tampak pada Gambar 5.4. Tanpa campur tangan dari pemerintah maka pasar akan mencapai keseimbangan pada harga p_e dan kuantitas barang yang ditransaksikan sebesar q_e . Jika karena tuntutan massa pemerintah memaksakan harga maksimum sebesar p_r yang lebih rendah dari p_e sebagai harga keseimbangan, maka konsumen dan produsen akan bereaksi berbeda; konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang hendak dibelinya (q_d) sedangkan produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan di pasar (q_p). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen, yakni sebesar $q_d - q_p$. Ini disebut dengan *excess demand* atau kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan ini menimbulkan tekanan keatas pada harga, sehingga harga pada akhirnya kembali kepada keseimbangan semula, yakni p_e .

Tampak bahwa sesungguhnya regulasi pemerintah yang memaksakan harga harus dibawah harga keseimbangan adalah tidak efektif. Produsen mungkin tidak berani melawan secara terbuka. Perlawanan dari produsen yang paling mungkin adalah menurunkan produksi atau menjual secara gelap pada harga p_e . Mengapa pemerintah terkadang terpaksa menetapkan harga maksimum yang lebih rendah dari harga keseimbangan? Keputusan itu semata-mata demi alasan citra politik pemerintah belaka bahwa seolah-olah pemerintah telah menanggapi keinginan rakyat, lebih tepatnya konsumen. Ketika akibatnya barang menjadi langka maka kemarahan massa akan tertuju pada produsen yang dianggap hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.



Gambar 5.4: Efek Regulasi Harga Melalui Kekuasaan Politik

Sebelum marah sebaiknya memosisikan diri sendiri sebagai produsen. Kalau masih tetap marah juga maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke psikiater!

Jika pemerintah terlibat dalam memproduksi ataupun mengonsumsi barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat mempengaruhi harga dengan meningkatkan produksi atau mengurangi konsumsi. Namun, harus ada syarat agar mekanisme ini dapat bekerja, yakni pangsa produksi atau konsumsi pemerintah atas bahan pokok harus dominan. Atau, pemerintah dapat melakukan impor. Dapatkah dibayangkan ekonomi seperti apa ketika pemerintah menjadi konsumen utama bahan pokok? Pemerintah sebagai produsen utama kita alami saat ini, seperti dalam produksi minyak dan listrik. Hasilnya, kita sering mengantri BBM dan mengalami pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.

2. **Tanya:** Jika pemerintah tidak terlibat dalam memproduksi ataupun mengonsumsi barang kebutuhan pokok, bagaimana cara pemerintah menurunkan harga barang tersebut pak De?

Answer: Satu-satunya instrumen tinggal impor. Agar impor dapat terlaksana, maka dua syarat harus terpenuhi, yakni (1) ada negara yang kelebihan produksi dan bersedia menjual kepada kita dan (2) tersedia anggaran yang harus disetujui oleh DPR untuk melakukan impor. Bila terjadi disparitas harga yang besar dan di luar terjadi kelebihan

produksi, maka tanpa pemerintah mengimpor pasti ada pihak yang melakukan impor secara ilegal.

Kesalahan yang paling sulit dimaafkan adalah ketika para penuntut mengharapkan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menurunkan harga. Ini pikiran diktator yang sudah tidak punya tempat di abad 21 ini. Penggunaan kekuasaan dalam menurunkan harga hanya akan menumbuhkan pasar gelap atau ekonomi bawah tanah. Jika pemerintah mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga mampu menurunkan harga secara langsung, maka kekuasaan itu pertamanya akan digunakan untuk menggilas para pendemo. Kita pantas bersyukur memiliki pemerintah yang kekuasaannya tidak cukup kuat untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok.

5.4 Upah Minimum

1. **Tanya:** Baiklah pak De, tetapi sementara ini saya menyiapkan diri dengan memperluas wawasan dahulu. Sekarang tentang kaum yang sering demo, yakni buruh. Dahulu ketika ingin menarik investasi, pejabat kita selalu menggunakan upah buruh rendah sebagai keunggulan daya saing. Sebaliknya, buruh menginginkan tingkat upah yang setinggi mungkin; atau, paling tidak ada batas terendahnya yang dikenal dengan upah minimum regional (UMR) yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Seringkali, UMR yang ditetapkan pemerintah dipandang terlalu rendah. Pertanyaan saya pak De, mengapa pemerintah ini susah benar mengambil langkah untuk membela kaum buruh?

Answer: Keinginanmu membela kaum buruh, kaum wong cilik, atau kaum yang dianggap lemah itu baik. Setelah keinginan menjelma menjadi langkah nyata, maka timbul pertanyaan apakah benar efek dari langkah nyata itu menguntungkan kaum yang sedang kamu bela?

Prinsipnya, argumen yang digunakan pada Butir 2 Bab ini dapat digunakan disini, hanya dibalik. Bagaimana dengan efektivitasnya? Seperti halnya dengan kasus tuntutan penurunan harga yang telah dibahas sebelumnya, yakni tidak efektif sebagai instrumen untuk mengangkat kesejahteraan buruh.

Bayangkan kamu mempunyai usaha yang dapat menampung 10 orang pekerja dengan tingkat produktivitas yang tidak sama. Anggaplah tingkat produktivitas tersebut dapat diurutkan mulai dari yang paling ti-

tidak produktif hingga yang paling produktif. Agar usaha tidak merugi, maka prinsip pengupahan adalah bahwa upah yang dibayarkan kepada seorang pekerja tidak lebih besar daripada produktivitas pekerja tersebut. Misalnya produktivitas pekerja kamu bernilai 100 ribu per hari, apakah kamu bersedia mengupahnya dengan 105 ribu per hari? Jika kamu melakukannya, maka usaha kamu sedang dalam perjalanan menuju bangkrut.

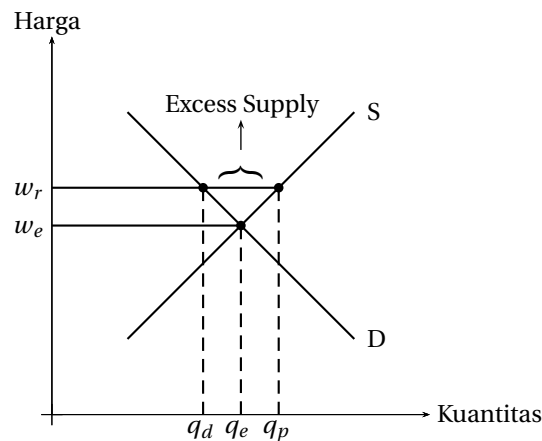
Sekarang mari kita kembali ke pekerja kamu yang berjumlah 10 orang dengan tingkat produktivitas yang bernilai 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 ribu rupiah per hari. Anggaplah bahwa upah minimum yang sedang berlaku adalah sebesar 90 ribu rupiah per hari. Anggap juga bahwa kamu merasa sebagai pengusaha yang peduli terhadap nasib pekerja sehingga upah yang kamu berikan adalah 100 ribu per hari kepada setiap pekerja. Dari sepuluh pekerja tersebut kamu memperoleh keuntungan sebesar 450 ribu rupiah per hari yang merupakan penjumlahan dari hasil bersih dari setiap pekerja.

Jika kemudian pemerintah menaikkan upah minimum menjadi 150 ribu rupiah per hari - misalnya presiden baru yang terpilih memenuhi janji kampanyenya yang akan membela pekerja habis-habisan - apa respon kamu sebagai pengusaha? Jika kamu tetap bertahan memperkerjakan ke 10 pekerja, maka kamu akan menderita kerugian sebesar 50 ribu rupiah per hari. Dari 5 pekerja yang paling tidak produktif - berproduktivitas kurang dari 150 ribu rupiah per hari - kamu merugi sebesar 150 ribu rupiah, sedangkan dari 4 pekerja yang paling produktif - berproduktivitas lebih dari 150 ribu rupiah per hari - kamu mendapat keuntungan 100 ribu rupiah. Dengan tidak memperkerjakan atau memutus hubungan kerja dengan 5 pekerja yang paling tidak produktif kamu memperoleh keuntungan 100 ribu rupiah per hari.

Uraian sederhana di atas menunjukkan bahwa upah minimum sebenarnya mengancam nasib pekerja yang paling kurang beruntung - pekerja yang memiliki produktivitas rendah. Bukan hanya itu, upah minimum juga menghambat masuknya pencari kerja ke dunia kerja. Mereka ini umumnya juga dari kelompok masyarakat yang nasibnya tidak lebih baik dari para pekerja yang sedang aktif. Semakin tinggi upah minimum, semakin sedikit pekerja yang dapat terserap dan semakin besar pengangguran. Jadi, upah minimum yang tinggi itu membela siapa?

Mari kita mendalami lebih serius pasar tenaga kerja. Penawaran te-

naga kerja berasal dari rumah tangga. Secara agregat, semakin tinggi tingkat upah, semakin besar jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat akan membatalkan melanjutkan sekolahnya ketika bekerja memberikan upah yang dianggap memadai. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. Semakin tinggi upah yang harus dibayarkan, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang dimintanya. Perpotongan antara kurva penawaran (S) dan permintaan (D) tenaga kerja ini akan menentukan jumlah dan upah tenaga kerja yang terjadi (Gambar 5.5). Dalam gambar, keseimbangan tersebut terjadi pada harga w_e dan kuantitas tenaga kerja q_e . Jika upah ditetapkan di atas upah keseimbangan ini, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat (menjadi q_p), tetapi jumlah tenaga kerja yang diminta menurun (menjadi q_d). Disini terjadi kelebihan tenaga kerja yang ditawarkan di pasar (*excess supply*). Excess supply tenaga kerja di pasar ini pada akhirnya akan menekan upah untuk kembali ke tingkat keseimbangan semula.



Gambar 5.5: Efek Regulasi Upah Minimum

Sekali lagi, kita melihat bahwa regulasi harga pasar dengan menggunakan instrumen kekuasaan politik sebenarnya tidak terlalu menjanjikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan berpotensi mempersulit kelompok kaum buruh sendiri. Sebagai suatu ketentuan yang mengikat maka upah minimum ini secara teoritis harus diikuti bila terjadi hubungan kerja. Kegagalan memenuhi upah minimum mempunyai

konsekuensi hukum. Apa yang akan terjadi bila ketentuan ini benar-benar dilaksanakan secara ketat ketika tingkat pengangguran masih sangat tinggi? Saya berpendapat bahwa kerangka upah minimum ini bukanlah solusi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.

2. **Tanya:** Wah pak De, padahal banyak pemuda pemudi yang tinggal dalam gang buntu di belakang rumah saya masih belum mempunyai pekerjaan. Mereka sudah sering mengirimkan surat lamaran, tetapi mereka selalu mendapat balasan “lamaran saudara(i) sangat diperhatikan tetapi maaf saat ini belum ada lowongan.” Celaknya, mereka juga sering ikut demo menuntut kenaikan UMR, meskipun mereka sendiri belum mendapat pekerjaan sebagai ungkapan solidaritas sesama kaum susah. Lebih celaka lagi, sayapun ikut mendukung dalam bentuk sumbangan finansial sekedarnya sebagai tambahan untuk membeli minum selama demo.

Answer: Oleh karena itu, berkeinginan baik saja tidak cukup Tanya. Menolong orang itu juga memerlukan ilmu dan pengetahuan yang memadai, niat baik dan emosi tidak cukup, malah dapat membuat orang tambah celaka.

3. **Tanya:** Memang kaum buruh umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, bahkan pengetahuan tentang perburuhan itu sendiri. Nasib para buruh migran (TKI) juga sering membuat bulu kuduk merinding. Beberapa TKI ternyata bekerja menjadi buruh di perkebunan, terutama sawit, di negara tetangga yang tanahnya tidak lebih luas dari tanah di negara kita. Apa tidak mungkin para TKI yang bekerja sebagai buruh di perkebunan itu kita beri tanah agar menjadi pemilik perkebunan di tanah airnya sendiri?

Answer: Pikiran dan pertanyaan yang sangat cemerlang. Jawabnya sangat mungkin bila ada kemauan politik dari pemerintah. Nah, kemauan politiknya itu yang belum pernah ada. Pikiran yang digunakan pemerintah dan para perancang ekonomi umumnya masih primitif. Lapangan kerja akan tercipta bila ada investasi dan yang dimaksud dengan investasi itu adalah pelibatan investor skala besar. Padahal tidak harus seperti itu. Kita punya BUMN yang memiliki pengalaman melimpah dalam membangun perkebunan. Seharusnya mereka yang diberi tugas untuk melakukan pembangunan kebun dan melatih para petaninya bagaimana mengelola kebun yang baik. Setelah saatnya tiba, serahkan seluruh kebun tersebut kepada para petani untuk memi-

likinya. Demikian pula dengan pabrik pengolahannya; akhirnya harus dimiliki oleh para pekerja dan petani pemilik kebun. Fungsi BUMN adalah memberdayakan rakyat, bukan untuk bersaing dengan atau menindas rakyat. Jangan salah, seluruh biaya pembangunan kebun dan pabrik pengolahannya harus dibayar, dengan cara mencicil, oleh para petani dan pekerja pabrik yang menjadi pemilik usaha.

4. **Tanya:** Pak De, sebenarnya benar apa tidak sih bila dikatakan bahwa investor itu menciptakan lapangan kerja?

Answer: Kalau sengaja hendak menciptakan lapangan kerja kayaknya sih tidak. Kalau toh ada yang seperti itu, rasanya jumlahnya sedikit sekali. Yang paling umum terjadi adalah para investor itu memang membutuhkan tenaga untuk menunjang usahanya. Kalau usaha itu dapat dijalankan tanpa buruh, maka mereka pasti tidak akan menyewa buruh. Jadi, terciptanya lapangan kerja itu pada dasarnya hanya *by product* saja, bukan tujuan utama. Inilah problem yang berkenaan dengan model investasi konvensional.

5. **Tanya:** Apakah pak De tidak percaya dengan *trickle down effect* yang banyak disinggung dalam teori pembangunan?

Answer: Nah ini pertanyaan bagus. Coba lihat lagi dengan jernih *trickle down effect* itu suatu efek yang direncanakan dengan baik atau tidak? Membangun ekonomi rakyat kok digantungkan pada tetesan. Ini jalan pikiran yang konyol. Di kampung pak De, hal seperti itu namanya *leles* - biasanya ketika musim panen buah ada beberapa buah yang tercecer tidak terambil oleh pemilik atau sengaja tidak diambil karena kualitasnya jelek. Kegiatan untuk memunguti buah sisa, biasanya dilakukan oleh anak-anak, yang tidak terambil atau afkiran itu disebut dengan *leles*.

Selain itu, *trickle down effect* itu juga menentang hukum alam. Ada hukum alam yang kira-kira bunyinya begini: "energi mengalir dari sistem yang kurang stabil ke sistem yang lebih stabil." Dibandingkan dengan organisasi bisnis besar dan maju, maka secara umum organisasi bisnis rakyat kecil jelas kalah stabil. Jadi, secara umum energi atau manfaat ekonomi mengalir dari organisasi ekonomi yang kurang stabil menuju ke organisasi ekonomi yang lebih stabil. Dengan kata lain, *trickle down effect* bukan sesuatu yang dirancang dengan baik untuk memberi manfaat kepada orang banyak, tetapi lebih sebagai suatu ketidaksengajaan.

6. **Tanya:** Intinya bagaimana menghadapi keserakahan pemilik modal pak De. Mereka itu serakah sekali dengan menghisap darah dan keringat buruh. Begitu yang Tanya sering dengar dalam berbagai forum diskusi. Sementara itu, pemerintah lebih sering membela kepentingan mereka ketimbang kepentingan kaum buruh. Kan nyebelin pak De?

Answer: Apa masih ada hal lain yang ingin kamu tumpahkan Tanya?

7. **Tanya:** Maksudnya pak De? Pertanyaan atau uneg-uneg yang lain begitu?

Answer: Benar Tanya. Kalau masih ada silahkan tumpahkan sekalian, biar menjawabnya juga sekalian.

8. **Tanya:** Sementara ini cukup itu dulu pak De.

Answer: Baiklah Tanya. Bagaimana kalau kita bayangkan sambil berdoa agar para pemilik modal itu insyaf dan sadar sehingga akhirnya tidak memiliki sifat serakah sedikitpun. Karena dia sudah insyaf dan sadar bahwa keserakahan itu pada akhirnya menyengsarakan orang lain dan dirinya sendiri maka dia tutup pabrik miliknya dan dia hancurkan pabrik itu. Selanjutnya, dia memilih hidup menyepi dengan sangat sederhana di lereng Gunung Lawu sana. Bila saja semua pemilik modal serakah itu melakukan hal tersebut, maka dunia ini mungkin sedikit lebih nyaman ya Tanya?

9. **Tanya:** Lha kalau pabriknya ditutup lalu para buruh harus kerja di mana pak De?

Answer: Ketika para pemilik modal serakah, kamu marah-marah. Ketika mereka sudah tidak serakah lagi, kamu kebingungan sendiri. Mengapa bukan kamu sendiri yang tampil memberi contoh menciptakan lapangan kerja tanpa diiringi keserakahan?

10. **Tanya:** Oh ternyata tidak sesederhana seperti yang Tanya bayangkan. Tanya jadi curiga bahwa ketika kita teriak anti keserakahan sebenarnya yang teriak itu juga keserakahan.

Answer: Melihat kelemahan dan kekurangan orang lain itu mudah sekali Tanya. Bahkan, kelemahan dan kekurangan orang lain itu tampak sangat jelas bila kita melihatnya dengan menggunakan kelemahan dan kekurangan kita!

5.5 Pembatasan Harga Maksimum

1. **Tanya:** Baik pak De, Tanya akan lebih hati-hati dalam menolong orang. Sekarang kita balik pak De, yaitu tentang pembatasan harga input maksimum. Maksud Tanya begini pak De - kalau harga input dibuat murah maka biaya produksinya kan menjadi lebih murah sehingga harga produknya juga menjadi lebih murah. Jadi, andaikan pemerintah menetapkan harga maksimum dari input maka harga outputnya akan menjadi lebih murah.

Lebih kongkritnya tentang kedele. Beberapa waktu yang lalu, tahu tempe sulit diperoleh di pasaran dan walaupun ada harganya terlalu tinggi sehingga sulit laku. Penyebabnya adalah kelangkaan bahan baku, yakni kedele, yang sangat tergantung pada impor. Ringkasnya, karena pasokan kedele mendadak turun dan harganya mendadak naik, maka pasar tahu tempepun mengalami goncangan dahsyat - tahu tempe menjadi langka dan harganya pun sulit terjangkau oleh rakyat kebanyakan.

Kritik dan protes pun bermunculan dengan alamat tunggal pemerintah. Pemerintah harus disalahkan karena berbagai alasan mulai dari tidak mampu menjaga harga kedele agar tetap rendah hingga isu ketergantungan pada barang impor. Seperti biasa terjadi, "para nasionalis pembela rakyat" punya solusi yang dahsyat, yakni swasembada produksi kedele agar tidak dipermainkan pasar internasional. "Pembela rakyat" yang lain mengusulkan sambil memaksa agar pemerintah harus membuat ketentuan tentang harga kedele maksimum yang diizinkan agar setelah menjadi tahu dan tempe harganya dapat terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Sebagai "pembela rakyat" mereka memang harus heroik. Tanpa heroisme yang menggebu mereka khawatir rakyat tidak mengenalnya sehingga sulit memperoleh jabatan politik.

Respon pemerintah ketika itu hanya menurunkan tarif impor yang jauh dari memadai untuk mengimbangi kenaikan harga kedele. Kenaikan harga impor kedele hampir dua kali lipat, sementara tarif impor hanya sekitar 10% dari harga impor semula. Dengan sangat heroik "para pembela" rakyat menyatakan bahwa pemerintah telah gagal membela kepentingan rakyat. Tentu saja mereka selalu menyelipkan pesan "agar dirinya dipilih" bila suatu saat mencalonkan diri untuk mengemban jabatan publik dengan janji memperbaiki nasib rakyat. Bagaimana kita melihat masalah seperti ini?

Answer: Mari kita kaji lebih dalam dua isu utama, yakni (1) swasembada kedele akan membebaskan bangsa kita dari penderitaan akibat ketergantungan pada pasar kedele internasional yang sering goncang dan (2) perlunya pemerintah membuat peraturan tentang harga maksimum kedele agar dapat dijangkau oleh pembuat tahu tempe dan akhirnya produk tahu tempe dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Isu pertama berangkat dari pemikiran bahwa karena kita mengimpor kedele maka ketika pasokan kedele dunia berkurang kita akan mengalami kesulitan mengimpornya. Harga kedele di pasar dunia akan melonjak tajam sehingga rakyat kita yang mengonsumsi produk dari kedele akan menderita karenanya. Jadi, bila kita memproduksi sendiri maka kelangkaan kedele di pasar internasional tidak akan berpengaruh pada konsumen produk kedele di negara kita. Oleh karena itu, kita harus segera swasembada kedele.

Mengapa petani kita tidak memproduksi kedele yang mencukupi untuk kebutuhan bangsa sendiri? Jawabannya sangat sederhana, sebab harga kedele sebelum terjadi lonjakan sangat tidak menarik karena terlalu rendah. Dengan harga yang rendah tersebut, petani yang menanam kedele menderita kerugian. Biaya produksi per kilogram kedele di dalam negeri jauh di atas harga per kilogram kedele impor - yang mungkin disubsidi oleh "pemerintah" negara pengekspor. Produk kedele petani kita kalah bersaing dengan produk kedele impor. Dalam kondisi seperti ini dan tanpa ada peningkatan efisiensi produksi kedele yang luar biasa, maka swasembada tidak mungkin terjadi tanpa ada larangan impor kedele sama sekali.

Berapa harga kedele ketika impor kedele dilarang? Harganya tentu lebih tinggi dari harga kedele impor sebelum terjadi lonjakan, bahkan mungkin sama dengan atau melampaui harga kedele impor setelah ada lonjakan harga. Jadi, memaksakan swasembada produksi kedele tanpa didahului oleh peningkatan efisiensi proses produksinya hanya akan mempercepat datangnya penderitaan bagi rakyat konsumen produk kedele dengan intensitas yang lebih parah. Tanpa ada larangan impor saja harga kedele di dalam negeri sudah sangat melonjak, apalagi ada larangan impor total. Kebijakan seperti ini tentu menguntungkan petani kedele dalam negeri. Impor dengan harga rendah membuat petani mati, tanpa impor sehingga harga tinggi membuat konsumen kedele protes.

Isu kedua berkembang dari pemikiran sebagai berikut. Karena tahu

tempe dibuat dari kedele, maka harga tahu tempe akan sangat ditentukan oleh harga kedele sebagai inputnya. Pikiran ini masuk akal dan memang benar adanya. Kebenaran ini mulai melenceng ketika “pembela” nasib konsumen tahu tempe mulai menunjukkan heroismenya dengan menuntut agar pemerintah membuat peraturan penetapan harga kedele maksimum yang cukup rendah agar harga tahu tempe menjadi rendah sehingga dapat dijangkau oleh konsumen tahu tempe yang umumnya berasal dari kalangan kurang mampu. Tuntutan ini masih dibumbui dengan alasan lain yang tidak kalah heroiknya, seperti tahu tempe merupakan sumber protein masyarakat kurang mampu yang penting bagi perkembangan otak dan akhirnya kecerdasan anak-anak mereka. Tahu tempe adalah masa depan bangsa.

Kita misalkan bahwa pada awalnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam penentuan harga kedele. Pasar dalam keseimbangan. Karena tidak berdaya menghadapi tuntutan para “pembela” nasib konsumen tahu tempe yang kelewat heroik, misalnya pemerintah terpaksa menentukan harga maksimum kedele di bawah harga pasar yang sedang berlaku. Apa yang akan terjadi dengan harga tahu tempe? Menjadi lebih murah? kamu boleh menebak sebelum mengikuti uraian selanjutnya. Jangan lupa, di akhir cerita - dengan tetap memegang kejujuran terhadap diri sendiri - kamu dapat menguji tebakan kamu tersebut.

Agar kamu tidak pernah melupakan jawaban yang benar, maka kamu harus berperan sebagai pemain kunci dalam percaturan perkedelean. Bayangkan bahwa kamu adalah petani kedele. Ketika ada ketentuan harga maksimum kedele yang harus diikuti dan harga tersebut kamu pandang terlalu rendah, apa reaksi alami kamu?

2. **Tanya:** Ya bikin malas memproduksi pak De.

Answer: Benar! Kamu dan juga petani kedele yang lain pasti menjadi kurang tertarik menanam kedele. Akibatnya, produksi kedele menjadi berkurang. Karena tahu tempe terbuat dari kedele dan jumlah kedele yang diproduksi berkurang maka jumlah tahu tempe yang dapat diproduksi pun menjadi berkurang. Tahu tempe menjadi lebih langka dengan akibat yang sudah dapat diduga sebelumnya, yakni harga tahu tempe menjadi lebih tinggi.

Jadi, tuntutan penetapan harga maksimum kedele agar harga tahu tempe dapat terjangkau oleh konsumen tahu tempe yang kurang mam-

pu akan menghasilkan penderitaan bagi petani kedele dan konsumen tahu tempe sekaligus. “Pembela” nasib rakyat yang sangat heroik tersebut sebenarnya adalah penghianat bangsa. Mungkin saja “pembela” nasib rakyat itu sendiri tidak menyadari kesalahan berpikirnya. Oleh karena itu, kita perlu lebih waspada ketika melihat orang yang terlalu heroik dalam membela nasib rakyat kecil. Dalam banyak kasus, heroisme yang berlebihan tidak lebih dari cara untuk menutupi keterbatasan pemahaman.

Apakah tebakan kamu benar? Bagi yang pernah belajar ilmu ekonomi tingkat dasar, memperoleh jawaban yang benar tidaklah sulit. Bila tebakan kamu salah, jangan khawatir karena banyak anggota DPR bahkan calon presiden umumnya masih pada level ini. Berhati-hatilah memilih dan jangan terlalu berharap banyak. Akan lebih baik bila kamu sendiri yang mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak terpilih bukan masalah, tetapi kehadiranmu paling tidak dapat mengangkat kualitas debat pilpres menjadi lebih bermutu.

5.6 Pasar Modern vs Pasar Tradisionil

1. **Tanya:** Semakin hari semakin banyak pasar modern bermunculan dan sebaliknya banyak pasar tradisionil menjadi sepi pengunjung dan akhirnya mati. Banyak orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa tumbuhnya pasar modern - terutama yang lokasinya dekat dengan pasar tradisionil - merupakan penyebab kematian pasar tradisionil. Jika pasar modern sebagai penyebab matinya pasar tradisionil, maka kita pun dapat berpikiran bahwa pasar tradisionil itu merupakan sebab hidupnya pasar modern. Pandangan seperti ini menghasilkan kebijakan pengaturan jarak minimum pendirian pasar modern dari pasar tradisionil. Bagaimana kita menyikapi kebijakan berbasis jarak ini? Konsistenkah kita dengan ide ekonomi kerakyatan?

Answer: Membicarakan pasar tradisional versus pasar modern nih? Kamu sebagai konsumen, kemana kamu akan berbelanja sayur bila pasar modern dan pasar tradisionil berdiri berdampingan? Mengapa semakin banyak konsumen yang beralih berbelanja ke pasar modern? Apapun alasannya, ujungnya pastilah bahwa berbelanja di pasar modern memberi manfaat bersih yang lebih besar dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisionil; entah karena faktor harga yang lebih

pasti, kebersihan, kualitas produk, kenyamanan dan sebagainya. Pasar modern memberikan pelayanan yang lebih mendekati preference konsumen.

Tuntutan konsumen mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendapatan, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Konsumen yang semakin maju mempunyai tuntutan terhadap pelayanan yang lebih tinggi. Tuntutan ini yang tidak direspon dengan baik oleh pasar tradisional, tetapi dapat dibaca dan direspon dengan tepat oleh pasar modern. Dimanakah para pembela pasar tradisional berbelanja kebutuhannya? Coba kamu amati, kebanyakan mereka juga berbelanja di pasar modern! Kamu sendiri belanja dimana?

Cara untuk menolong pasar tradisional bukannya dengan memaksa konsumen mundur dengan cara tidak memberi pilihan kepada mereka kecuali pasar tradisional. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah dengan meningkatkan kapasitas pasar tradisional agar mampu memenuhi selera konsumen yanguntutannya semakin tinggi. Peningkatan kapasitas ini tidak selalu membutuhkan modal yang tinggi. Pengetahuan dan ketersediaan untuk berubah dari pedagang di pasar tradisional jauh lebih menentukan. Hidup adalah perubahan. Barang siapa enggan berubah dia akan ditinggalkan kehidupan.

Kebijakan pengaturan jarak sebenarnya menggunakan logika monopoli. Ini sesungguhnya logika kapitalis yang paling jahat. Anehnya, pendekatan jarak ini dibela habis-habisan oleh pendukung ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak mungkin dilakukan dengan cara membelenggu kebebasan rakyat lainnya yang bertindak sebagai konsumen. Ekonomi kerakyatan harus dibangun dengan memberdayakan seluruh rakyat - baik produsen maupun konsumennya - dengan menggunakan kerangka pikir ekonomi kerakyatan, bukan dengan kerangka pikir kapitalis jahat.

5.7 Perang Harga

1. **Tanya:** Sekarang kita bahas soal perang harga tiket pesawat pak De. Sejak swasta diijinkan melayani penerbangan domestik dengan pesawat jet, harga tiket jauh lebih murah daripada harga tiket jaman monopoli Garuda dan Merpati. Harga tiket dapat ditekan pada tingkat yang

sulit dibayangkan sebelumnya, bahkan kadang-kadang lebih rendah dari pada harga bus atau kereta eksekutif untuk tujuan yang sama. Perang harga kadang-kadang muncul.

Karena kecelakaan penerbangan berakibat sangat fatal, faktor keselamatan menjadi perhatian utama. Harga tiket yang terlalu rendah dikhawatirkan mengurangi anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan pesawat sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu menetapkan harga tiket minimum agar faktor keselamatan tetap terjaga. Benarkah harga tiket minimum merupakan instrumen yang efektif bagi terpeliharanya keselamatan penerbangan?

Answer: Harga tiket yang turun drastis setelah dibukanya peran serta penerbangan swasta adalah akibat dari persaingan antar perusahaan penerbangan. Ketika harga tiket minimum ditetapkan pemerintah apakah persaingan antar perusahaan penerbangan menjadi hilang? Tentu saja tidak. Bagaimana persaingan tersebut dilakukan bila ada ketetapan harga tiket minimum?

Persaingan berubah bentuk dari persaingan harga menjadi persaingan pelayanan Rose (1992). Dengan harga tiket yang sama, perusahaan yang mampu dan bersedia memberikan pelayanan lebih akan memenangkan persaingan. Pelayanan dapat berupa ketepatan waktu, kemudahan pemesanan tiket, dan kemudahan pembatalan tiket sekedar untuk menyebut beberapa jenis pelayanan yang relatif tidak membutuhkan tambahan biaya. Tetapi peningkatan pelayanan dapat juga menimbulkan tambahan biaya, seperti hidangan makanan dan minuman selama menunggu pemberangkatan dan selama penerbangan, penjemputan calon penumpang dan sebagainya.

Tambahan pelayanan yang memerlukan tambahan biaya dapat menggerogoti penerimaan dari penjualan tiket hingga akhirnya keuntungan yang diperoleh dari setiap penumpang menjadi sangat kecil. Hal seperti ini juga terjadi ketika harga tiket minimum belum ditetapkan pemerintah. Tanpa harga tiket minimum, persaingan dilakukan dengan menekan harga tiket dengan konsekuensi pelayanan yang membutuhkan biaya tambahan tidak mungkin diadakan. Inilah yang kita alami dengan hilangnya sajian makanan dalam berbagai penerbangan nasional kita.

Penelitian juga menunjukkan bahwa setelah deregulasi - dengan mem-

beri ruang yang lebih besar kepada berjalannya mekanisme pasar sehingga harga tiket menurun - selang waktu antar perawatan mesin memang menjadi lebih panjang tetapi analisis logit menunjukkan bahwa peluang terjadinya kegagalan mesin yang menimbulkan kecelakaan fatal tidak meningkat (Kennet, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi. Atau dengan kata lain, tingkat penyediaan keselamatan sebelum deregulasi sesungguhnya terlalu besar.

Bagi pengguna jasa angkutan udara, keselamatan merupakan aspek kualitas produk. Tidak seperti karakteristik kualitas produk yang lain - seperti kenyamanan jadwal, berjejal, dan pelayanan selama penerbangan - pelanggan menghadapi kesulitan mengamati tingkat keamanan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan bila mereka membuat keputusan perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, ada alasan untuk curiga bahwa pasar mungkin kurang memperhatikan keselamatan dibandingkan yang diminta oleh konsumen seandainya konsumen mempunyai informasi penuh. Peduli terhadap kemungkinan kegagalan pasar telah mendorong dibentuknya regulasi pemerintah yang sangat rumit yang menetapkan input keselamatan minimum dan standar kinerja bagi penyedia jasa penerbangan. Namun, ada mekanisme alternatif untuk menjamin perhatian keselamatan yang memadai, yakni reputasi pesawat. Dari sudut pandang ekonomi, ada dua alasan untuk mendukung mekanisme alternatif tersebut (Rose, 1992).

Pertama, pabrik pesawat dan perusahaan penerbangan pada dasarnya membeli asuransi yang memberi ganti rugi secara penuh seluruh kewajiban bila terjadi kecelakaan, khususnya perusahaan penerbangan besar.² Dengan asuransi yang lengkap, perusahaan asuransi memainkan peranan sebagai regulator bagi mekanisme ini untuk berfungsi. Ada alasan untuk menduga hal ini tidak cukup: perusahaan asuransi tidak memonitor secara langsung perusahaan penerbangan dan premi asuransi responsif hanya secara parsial terhadap sejarah kecelakaan (Mitchell & Maloney, 1989).

Kedua, sebagian besar eksekutif perusahaan penerbangan menyebut perlunya menjaga dan meningkatkan reputasi mereka sebagai kepedulian utamanya dalam mempertahankan standar keselamatan. Jika reputasi seperti itu merupakan pengendali perilaku yang efektif, kita

²Kita perlu memastikan apakah praktek semacam ini juga berlaku bagi perusahaan penerbangan di Indonesia.

seharusnya melihat hukuman pasar bagi perusahaan yang menyimpang dari reputasi mereka yang telah mapan.

Teori nama dagang (*brand name*) memperkirakan bahwa konsumen enggan terbang dengan penerbangan yang mempunyai catatan keamanan yang buruk ketimbang memandang kecelakaan melulu sebagai kejadian acak - gampangnya sebagai nasib buruk semata - yang tidak mencerminkan kualitas perusahaan penerbangan?(Mitchell & Maloney, 1989). Konsumen mempunyai harapan tentang peluang kecelakaan; beberapa kecelakaan akan mendorong konsumen untuk mengekspansi harapan ini. Bila hal ini terjadi, teori meramalkan bahwa konsumen akan menurunkan taksiran mereka atas jumlah sumberdaya yang dialokasikan bagi keamanan oleh perusahaan penerbangan. Konsumen akan mengurangi permintaan jasa penerbangan dari perusahaan seperti ini sehingga berpengaruh buruk pada keuntungan perusahaan. Sementara itu, pasar modal akan mengamati hal ini dan mendevaliasi aset niat baik dari perusahaan tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketetapan harga tiket minimum bukanlah instrumen yang efektif untuk mengontrol keselamatan penerbangan. Sebagai konsekuensi logisnya, keselamatan penerbangan harus diatasi - jika memang diperlukan tentunya - dengan menggunakan instrumen yang lain, misalnya inspeksi secara berkala oleh sebuah badan yang kredibel untuk melakukan tugas tersebut.

5.8 Surat Utang

1. **Tanya:** Beberapa kali pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk menutupi defisit anggaran belanja negara. Sebagaimana lazimnya, utang tersebut harus dibayar kembali beserta bunganya. Kritik yang sering muncul dari utang negara tersebut adalah tingginya tingkat suku bunga yang dijanjikan oleh SUN tersebut. Dibandingkan dengan SUN yang diterbitkan negara lain yang kurang lebih setara dengan Indonesia, bunga SUN dari pemerintah Indonesia memang relatif lebih tinggi.

Secara sederhana, SUN berisi pernyataan legal dari pemerintah tentang kewajiban membayar senilai utang pemerintah beserta bunganya sebagaimana yang tertera di dalam SUN tersebut kepada pihak yang memilikinya setelah jatuh tempo. Jelaslah bahwa SUN merupakan

surat berharga. Bagi pembelinya, SUN dipandang sebagai instrumen investasi. Sebagaimana surat berharga pada umumnya, SUN dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan.

Pembayaran kembali utang negara tersebut dialokasikan dari anggaran belanja negara yang sebagian besar diperoleh dari pajak. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan berimplikasi pada lebih tingginya beban rakyat Indonesia dalam membayar kembali utang negara ditambah bunganya di kemudian hari. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan SUN dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan SUN yang diterbitkan pemerintah negara lain merupakan suatu kebijakan yang buruk dan oleh karenanya harus ditentang. Bagaimana pandangan anda?

Answer: Anggaplah anda sebagai calon investor pembeli SUN yang nilai par-nya adalah 10 juta dolar per lembar. Pemerintah Indonesia mematok bunga 10%, kita sebut dengan SUN A, sedangkan saingannya - sebutlah pemerintah negeri Impian - menawarkan bunga sebesar 5%, kita sebut SUN B. Artinya, jika anda membeli SUN B, maka pada saat jatuh tempo anda dapat mengklaim pembayaran dari pemerintah negeri Impian sebesar 10 juta dolar ditambah bunganya sebesar 5% dari 10 juta dolar, atau 500 ribu dolar. Sebaliknya, jika anda membeli SUN A, maka pada jatuh tempo anda berhak memperoleh pembayaran sebesar 10 juta dolar ditambah bunganya sebesar satu juta dolar. Kewajiban pemerintah negara penerbit SUN untuk melakukan pembayaran. Agar sederhana, jatuh tempo dianggap satu tahun kemudian. SUN mana yang kamu pilih? SUN mana yang lebih menguntungkan bagi investor?

Jika menurut anda SUN A lebih menarik sebagai pilihan investasi, maka anda tidaklah salah. Tetapi, bila anda mengira hanya anda yang lebih tertarik pada SUN A sementara orang lain lebih tertarik pada SUN B, maka anda mulai bermimpi di siang bolong. Tentu saja semua orang akan memilih SUN A bila harga SUN A, (p_a), sama dengan harga SUN B, (p_b). Karena semua investor memilih SUN A dan jumlah SUN A yang ditawarkan terbatas, maka para investor tersebut harus bersaing untuk mendapatkannya. Persaingan tersebut berwujud harga yang mereka tawarkan kepada penerbit SUN A. Persaingan harga yang ditawarkan oleh para investor ini menyebabkan harga SUN A semakin meningkat.

Misalnya harga yang terjadi untuk SUN A adalah p_a yang dinyatakan

dalam juta dolar, berapa *yield* yang diperoleh investor yang bersangkutan? Kata *yield* sering digunakan untuk investasi dalam keuangan yang secara sederhana tidak lebih dari persen keuntungan. Pada saat jatuh tempo, investor akan memperoleh pembayaran sebesar 11 juta dolar. Angka sebesar 11 juta dolar ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan p_a karena ada perbedaan waktu satu tahun. Agar dapat dibandingkan, maka salah satu dari dua besaran tersebut harus dikonversi dengan memperhitungkan perbedaan waktu sebesar satu tahun. Dengan kata lain, p_a dapat dibawa ke waktu 11 juta dolar dibayarkan (*compounding*) atau 11 juta dolar dibawa ke waktu p_a dikeluarkan (*discounting*).

Untuk melakukan *compounding* atau *discounting* kita perlu tahu tingkat diskonto yang dianggap sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku, dilambangkan dengan r . *Compounding* akan menghasilkan $(1+r)p_a$, sedangkan *discounting* akan menghasilkan $\frac{11000000}{(1+r)}$. *Yield* (dilambangkan dengan π_a) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\pi_a = \frac{\frac{11000000}{(1+r)} - p_a}{p_a} \times 100\% \quad (5.2)$$

Ekspresi 5.2 akan menghasilkan π_a negatif jika $11000000 < p_a(1+r)$ dan sebaliknya menghasilkan π_a positif jika $11000000 > p_a(1+r)$. Jika $11000000 = p_a(1+r)$, maka $\pi_a = 0$. Artinya, antara investasi dalam SUN A dan investasi dalam bentuk deposito tidak berbeda karena keduanya akan menghasilkan kekayaan sebesar 11000000 atau sebesar $p_a(1+r)$. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung *yield* untuk SUN B sebagai berikut:

$$\pi_b = \frac{\frac{10500000}{(1+r)} - p_b}{p_b} \times 100\% \quad (5.3)$$

SUN mana yang kamu pilih jika kamu tahu bahwa $\pi_a < \pi_b$? Investor yang rasional pasti akan memilih SUN B. Persaingan antar investor memperebutkan kedua SUN tersebut akhirnya akan menghasilkan keseimbangan yang berbentuk $\pi_a = \pi_b$. Artinya, investor akan dalam keadaan indifferent antara investasi dalam SUN A dan SUN B karena keduanya memberikan *yield* yang sama. Ketika hal ini terjadi, maka hubungan berikut akan berlaku:

$$\frac{10500000}{p_b} = \frac{11000000}{p_a} \implies p_a = \frac{110}{105} p_b \quad (5.4)$$

Sekarang mari kita hitung beban bunga yang harus ditanggung oleh masing-masing pemerintah penerbit SUN tersebut:

(a) Pemerintah penerbit SUN B akan menanggung bunga (ρ_b) sebesar

$$\rho_b = \frac{105000000}{p_b} - 1 \quad (5.5)$$

(b) Pemerintah penerbit SUN A akan menanggung bunga (ρ_a) sebesar

$$\rho_a = \frac{110000000}{p_a} - 1 = \frac{105000000}{p_b} - 1 \quad (5.6)$$

Melalui substitusi p_a dari ekspresi 5.4 ke dalam Ekspresi (5.6) akan diperoleh

$$\rho_a = \frac{105000000}{p_b} - 1 \quad (5.7)$$

Dari Ekspresi (5.5) dan (5.7) kita dapat melihat bahwa dalam keseimbangan maka bunga yang ditanggung oleh kedua penerbit SUN tersebut adalah sama. Jadi, kurang tepat juga bila bunga SUN yang lebih tinggi bermakna beban bunga yang harus ditanggung oleh penerbit SUN akan lebih tinggi juga.

2. **Tanya:** Jadi sebenarnya tingkat bunga tinggi yang diberikan itu hanya semacam pancingan agar menarik para calon pembeli begitu pak De? Terus bedanya dengan bunga deposito apa pak De?

Answer: Ya orang yang tertarik dengan pancingan itu biasanya juga orang-orang pemula. Kalau orang yang sudah kawakan dalam investasi finansial, trik semacam itu ya hanya jadi guyonan. Bedanya dengan deposito, lebih tepatnya *certified deposit* (CD), adalah harganya. Harga SUN dapat berbeda dengan nilai yang tertera pada SUN tersebut, sedangkan CD pasti sama. Jadi, kalau kamu membeli CD yang berharga 10 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun, misalnya, maka uang yang harus kamu bayarkan untuk mendapatkan CD tersebut adalah 10 juta. Untuk jangka waktu yang sama, maka CD dengan bunga yang lebih tinggi pasti lebih diminati oleh investor.

5.9 Perdagangan Rotan: Kebijakan Ayunan Anak Kecil

1. **Tanya:** Kebijakan perdagangan rotan pada intinya berayun dari satu sisi ke sisi yang berlawanan dengan sedikit variasi. Ayunan ke satu sisi menguntungkan produsen rotan mentah dan merugikan industri pengolah sebagai konsumen rotan mentah, sementara ayunan yang lain merugikan produsen rotan mentah dan menguntungkan konsumennya. Berikut ini perjalanan kebijakan ayunan tersebut:
 - (a) Tahun 1979 melalui SK Mendagkop No 492/KP/VII/79 tertanggal 23 Juli 1979, pemerintah melarang ekspor rotan bulat dalam bentuk asalan.
 - (b) Tahun 1986 terbit SK Menperdag No 274/KP/X/1986 tertanggal 7 Oktober 1986, yang isinya (juga) larangan ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi. Dampak dari keputusan tersebut adalah tumbuhnya industri mebel di Pulau Jawa dari 10 menjadi 300 unit usaha.
 - (c) Tahun 1998 melalui SK No 440/MPP/KP/9/1998, pemerintah kembali membebaskan ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi.
 - (d) Tahun 2004 Memperindag menerbitkan SK 355/MPP/Kep/5/2004 tertanggal 27 Mei 2004 yang isinya melakukan pelarangan ekspor rotan bulat dari hutan alam. Ekspor rotan yang berasal dari tanaman dimungkinkan.
 - (e) Tahun 2005 Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 yang membolehkan ekspor rotan asalan dan rotan setengah jadi. Meskipun selama perjalanannya mengalami beberapa kali revisi, peraturan ini dianggap oleh pelaku industri pengolahan rotan sebagai biang keladi kehancuran industri rotan.
 - (f) Tahun 2009, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan pada 11 Agustus 2009 yang intinya memperketat ekspor rotan asalan dan setengah jadi.

Sampai kapan kebijakan ayunan yang hanya cocok untuk mainan anak-anak ini akan terus dipertahankan? Larangan terhadap sesuatu

yang sebenarnya tidak membahayakan merupakan bentuk kebijakan yang paling tidak cerdas.

2. **Answer:** Esensi dari perdagangan adalah mengeksploitasi potensi kemakmuran - dicerminkan oleh jumlah surplus konsumen dan surplus produsen - yang belum dimanfaatkan. Melalui perdagangan, kemakmuran dua pihak yang terlibat akan lebih tinggi dibandingkan kemakmuran tanpa perdagangan. Isu pokok yang sering muncul dari perdagangan adalah redistribusi dari penambahan kemakmuran yang diperoleh.

Perdagangan meliputi ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri. Ekspor membuka pasar alternatif bagi produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif. Menutup pintu ekspor terhadap produk dalam negeri, termasuk bahan mentah, akan mendistorsi harga produk yang bersangkutan tetapi ada harapan untuk memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi tidak dengan serta merta membuat rotan mentah dan setengah jadi menjadi melimpah di pasar domestik. Larangan ekspor rotan mentah menekan harga rotan didalam negeri. Harga yang lebih rendah ini merupakan disinsentif bagi petani penghasil rotan yang selanjutnya akan direspon dengan menurunkan produksi rotan mentah. Petani rotan merupakan makhluk sosial yang mempunyai perilaku strategis. Dengan jumlah bahan baku tersedia yang semakin sedikit, maka nilai tambah dan lapangan kerja yang tercipta juga kecil - lebih kecil dari yang dibayangkan semula.

Ekspor rotan mentah dan setengah jadi akan mendorong harga rotan dan setengah jadi didalam negeri meningkat. Peningkatan harga ini adalah insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya. Petani rotan juga akan meningkatkan produksinya, baik dari rotan tanaman maupun rotan alam. Peningkatan produksi rotan mentah akibat dari dibukanya kran ekspor sering menimbulkan kekhawatiran yang bukan saja tidak perlu bahkan sangat keliru, yakni kelestarian tanaman rotan khususnya dan kelestarian hutan umumnya.

Peningkatan harga rotan mentah mungkin saja mendorong eksploitasi berlebihan rotan di hutan alam, tetapi akan mendorong perluasan tanaman rotan. Eksploitasi berlebihan rotan alam ini sering menimbulkan persepsi yang salah. Mengurangi eksploitasi rotan alam melalui

mekanisme larangan ekspor yang mendistorsi harga akan menghasilkan pandangan bahwa nilai tangible hutan alam adalah rendah dan oleh karena itu layak dikonversi menjadi penggunaan yang memberikan nilai tangible lebih tinggi. Kelestarian hutan alam akan selalu menghadapi dilemma, baik ketika harga produknya tinggi maupun ketika harga produknya rendah. Ketika harga produknya tinggi kelestarian hutan alam terancam oleh eksploitasi yang berlebihan, ketika harga produknya rendah kelestarian tersebut terancam oleh desakan konversi. Ringkasnya, argumen kelestarian hutan untuk mendukung larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi merupakan argumen yang sangat tidak relevan.

Ada tiga faktor mengapa hutan alam akan selalu menghadapi dilemma yang telah disebutkan diatas. Pertama, faktor property rights yang tidak jelas. Faktor ini yang bertanggung jawab mengatur interaksi sosial dalam mengeksploitasi sumberdaya alam. Hutan alam dipandang sebagai *common resources*, bahkan tidak jarang diperlakukan sebagai *open access resources*. Eksploitasi berlebihan yang terjadi pada sumberdaya alam yang berciri *open access* atau *common property* sudah lama dikenali dan diyakini orang (Gordon, 1954; Hardin, 1968; Bromley, 1991; Dasgupta, 2005). Kedua, faktor laju pertumbuhan di hutan alam yang relatif rendah, termasuk dalam hal rotan. Untuk harga produk yang konstan, maka laju pertumbuhan minimal agar produk hutan cukup menarik adalah sama dengan tingkat suku bunga sebagai *opportunity cost*. Laju pertumbuhan di hutan alam yang rendah akan cukup menarik bila diimbangi dengan laju peningkatan harga dari produk yang dihasilkan. Laju peningkatan harga ini akan sangat tergantung pada adanya faktor ketiga, yakni barang substitusi. Kehadiran barang substitusi rotan akan menekan perkembangan harga rotan. Barang substitusi ini akan mengisi sebagian atau seluruh peningkatan permintaan akan rotan, sehingga peningkatan harga rotan menjadi terhambat.

“There’s no trick to being a humorist when you have the whole government working for you.”

Will Rogers

“The secret of life is honesty and fair dealing. If you can fake that, you got it made.”

Groucho Marx

“Weed is a plant whose virtues have not been discovered.”

Ralph Waldo Emerson

6

Sumberdaya Alam

Hampir semua orang Indonesia percaya bahwa bangsa Indonesia dikaruniai dengan sumberdaya alam yang melimpah ruah. Ukuran Indonesia memang besar dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya juga banyak. Tetapi jangan lupa bahwa penduduk Indonesia juga sangat banyak, keempat terbesar di dunia. Sadarkah kita bahwa kekayaan alam per kapita penduduk Indonesia itu kurang lebih setara dengan kekayaan alam per kapita bangsa Israel yang hidup di tempat gersang itu? Benar, kekayaan alam per kapita bangsa Indonesia tidak banyak, tidak seperti kekayaan alam per kapita orang Selandia Baru atau Islandia misalnya.

Salah pengertian lain orang Indonesia tentang sumberdaya alamnya adalah bahwa seolah tanah Indonesia itu merupakan tanah yang subur. Dalam topik suksesi bentang alam ditunjukkan bagaimana salah pengertian ini terjadi dan bagaimana salah pengertian tersebut merembet kepada salah pengertian yang lain, seperti tentang biodiversitas dan bahkan tentang tata ruang yang mempunyai fungsi vital dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.

Bila tidak dikelola dengan baik maka sumberdaya alam dapat menjadi ajang konflik atau sumber mala petaka lainnya. Muncullah kemudian istilah “kutukan sumberdaya alam” (*resource curse*), yakni adanya kecen-

derungan bahwa kinerja ekonomi dari negara yang kaya sumberdaya alam lebih buruk daripada kinerja ekonomi negara yang tidak kaya sumberdaya alam. Konflik merupakan salah satu saluran dari timbulnya kutukan tersebut. Bagaimana dengan konflik lahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan kehutanan?

Sumberdaya alam lain yang banyak mendapat sorotan adalah sumberdaya tambang. Dua sisi yang paling mudah dilihat oleh publik tentang pertambangan adalah mudahnya orang menjadi kaya dari tambang di satu sisi, tetapi di sisi yang lain tambang banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Bagaimana menginternalkan dampak lingkungan dan juga mengekstrak rente ekonomi dari sumberdaya tambang harus dipelajari dengan baik. Sialnya, banyak orang yang menganggap hal tersebut sulit. Bagi yang masih berniat memajukan bangsa ayo kita belajar bersama, tetapi bagi yang sudah malas belajar ya silahkan tidur saja.

6.1 Suksesi Bentang Alam

1. **Tanya:** Pak De, negara kita ini terkenal sebagai negara yang tanahnya subur dan kaya sumberdaya alam. Ekosistem kita juga terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kita juga mempunyai laut yang sangat luas. Ringkasnya, kita kaya raya. Bagaimana menurut pak De?

Answer: Sebenarnya, dalam hal sumberdaya alam, negara kita ini tidak kaya-kaya amat. Banyak negara lain yang sumberdaya alam per kapitanya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kita bahas satu per satu. Soal tanah misalnya. Sejak kecil kita dijejali pengertian bahwa tanah kita adalah tanah yang subur. Tongkat dan batu menjadi tanaman. Pengertian keliru yang ditanamkan sejak kecil ini menjadikan kita lengah.

2. **Tanya:** Lho salahnya dimana pak De, wong nyatanya batang yang dilemparkan begitu saja dapat tumbuh menjadi tanaman?

Answer: Untuk dapat tumbuh dengan baik, tanaman membutuhkan berbagai unsur dan keadaan. Tanah merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab menyediakan unsur dan keadaan yang dibutuhkan tanaman. Kesuburan tanah itu umumnya mengacu kepada kandungan unsur kimia yang dibutuhkan tanaman. Nah karena

bahan bakunya serta proses pelapukan yang berjalan sangat intensif maka kandungan unsur kimia yang dibutuhkan tanaman didalam tanah kita umumnya rendah. Artinya tidak subur. Kamu boleh berhipotesis bahwa wilayah di Indonesia yang memiliki curah hujan rendah cenderung mempunyai tingkat kesuburan tanah lebih tinggi.

Bahan baku tanah adalah batuan yang awalnya berasal dari gunung berapi yang disebut batuan beku. Melalui berbagai proses, seperti pengikisan, pengendapan, penekanan, dan pemanasan, maka dapat terbentuk batuan endapan dan batuan metamorf. Kalau kamu amati bentuk gunung api di negara kita, mereka umumnya berbentuk kerucut. Hal ini disebabkan oleh kentalnya magma yang keluar dari gunung itu sehingga tidak dapat menyebar terlalu jauh. Magma yang keluar dari gunung di Hawaii sana yang bersifat cair dapat bergerak melebar dan menjauh dari titik keluarnya. Gunung yang terbentuk adalah pendek dan lebar.

Kekentalan atau keenceran magma tadi ternyata ditentukan oleh kandungan SiO_2 ; semakin tinggi kadar SiO_2 dalam magma semakin kental magma tersebut. Demikian juga, semakin tinggi kadar SiO_2 dalam magma maka semakin rendah kadar unsur yang lain didalam magma tersebut, termasuk unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi, bahan baku pembentuk tanah di negara kita itu sebenarnya miskin unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, yang lazim disebut dengan unsur hara tanaman.

Di sisi lain, negara kita ini memiliki iklim dengan curuh hujan tahunan dan suhu udara yang tinggi. Kombinasi tersebut membentuk ekosistem yang disebut dengan tropika basah. Memang ada beberapa tempat di negara kita ini yang memiliki curah hujan sangat rendah dan oleh karenanya sering mengalami kekurangan air. Tetapi secara umum, Indonesia memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Kombinasi curah hujan dan suhu tinggi tersebut merupakan kombinasi yang paling ideal bagi proses pelapukan, termasuk pelapukan batuan menjadi bahan induk dan dari bahan induk menjadi tanah muda, yang akhirnya menjadi tanah tua.

3. **Tanya:** Ah Pak De mulai mengada-ada. Memangnya tanah punya umur? Apa benar umur tanah dapat bertambah yang diiringi dengan berubahnya “tampang” dari tanah tersebut, misalnya dari ganggang waktu muda menjadi kempot waktu tuanya?

Answer: Kamu ini bertanya sungguh-sungguh atau sedang mengelurkan sindiran? Tetapi tidak masalah, mari kita lanjutkan diskusinya. Sedikit mengulang biar lebih jelas apa yang pak De maksudkan.

Untuk kepentingan diskusi kesuburan tanah, batuan induk dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu batuan basa, batuan intermedier, dan batuan masam. Perbedaan didasarkan pada kandungan SiO_2 . Kandungan SiO_2 batuan masam paling tinggi, sedang SiO_2 dalam batuan basa paling rendah. Batuan basa mengandung banyak unsur hara makro dan mikro, sebaliknya dengan batuan masam. Kekentalan lava yang keluar dari gunung berbanding lurus dengan kadar SiO_2 . Semakin kental lava, semakin sulit menyebar sehingga terbentuklah gunung yang runcing. Sebaliknya, kadar SiO_2 dalam lava rendah maka gunung yang terbentuk akan melebar. Bagaimana bentuk gunung di Indonesia? Coba bandingkan dengan bentuk gunung di Hawaii, melalui gambar bila belum sempat ke Hawaii. Selain dari batuan beku yang keluar dari gunung berapi, tanah juga dapat terbentuk dari batuan endapan dan batuan metamorfik.

Empat faktor yang berpengaruh terhadap proses pelapukan pembentukan tanah, yaitu iklim, topografi, makhluk hidup, dan waktu. Keempat faktor ini bekerja pada bahan induk tadi. Unsur iklim yang penting bagi proses pelapukan adalah kelembaban dan suhu. Semakin tinggi suhu dan kelembabannya, semakin cepat proses pelapukan berlangsung. Indonesia mempunyai suhu tinggi dan curah hujan tinggi. Dapat diharapkan proses pelapukan tanah berjalan sangat intensif. Proses pencucian unsur hara yang dibutuhkan tanaman juga berjalan sangat intensif.

Faktor topografi menentukan perimbangan laju erosi tanah yang telah terbentuk dan laju pencucian bahan-bahan yang telah dibebaskan dari lapisan atas ke lapisan di bawahnya. Tempat bertopografi curam memiliki tanah yang dangkal dan relatif muda - diferensiasi antar lapisan belum jelas. Dengan berjalannya waktu, daerah bertopografi berat secara perlahan akan menjadi lebih landai karena proses erosi. Untuk mudahnya, daerah yang telah berumur tua umumnya lebih landai daripada daerah berumur muda. Ketika suatu daerah menjadi lebih landai, proses pencucian menjadi lebih intensif, sementara intensitas proses erosi menurun.

Makhluk hidup juga berperan penting dalam proses pembentukan tanah. Akar yang dalam membantu memecahkan batuan. Bahan kimia

yang berasal dari organisme, baik yang masih hidup atau sudah mati, membantu reaksi kimia dan pelepasan unsur hara. Makhluk hidup - khususnya tumbuhan - juga penting dalam menyimpan dan membantu siklus unsur hara penting dalam ekosistem. Unsur hara yang telah dibebaskan dari batuan dan bahan induk serta dari organisme mati yang terlapuk sebagian hilang melalui pencucian dan erosi, sebagian disimpan dalam tanah, sebagian dalam serasah, dan sebagian yang lain diambil oleh tumbuhan dan disimpannya. Ini yang disebut dengan siklus unsur hara. Tumbuhan - khususnya yang berakar dalam - sangat penting dalam proses mempertahankan diri yang merupakan ciri setiap sistem.

Mengingat proses penghancuran dan pencucian unsur hara di daerah tropika basah seperti di Indonesia yang sangat tinggi, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan yang sangat kuat. Inilah alasannya mengapa hutan di Indonesia sangat rapat dengan tajuk berlapis serta ukuran pohonnya yang sangat besar. Mekanisme perlindungan yang ketat ini berguna untuk menekan sekecil mungkin kehilangan unsur hara oleh proses erosi dan pencucian yang akhirnya keluar dari sistem. Disamping itu, biomass yang lebat pekat ini juga bertindak sebagai penyimpan unsur hara. Teori sistem mengatakan bahwa setiap sistem berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara mengonservasi energi yang telah dikuasainya (Fath et al., 2004).

Dengan berjalannya waktu, proses pelapukan, pencucian, dan erosi semakin berjalan jauh. Ciri bahan induk dengan tanah yang terbentuk semakin jauh berbeda. Perlindungan oleh biomass yang rapat pekat tidak sepenuhnya efisien - selalu ada yang hilang dari ekosistem yang bersangkutan. Ringkasnya, proses pemiskinan tanah tidak sepenuhnya dapat dihindarkan. Semakin tua tanah, semakin sedikit kandungan unsur hara di dalamnya. Bentuk gunungpun semakin tumpul.

Bagaimana dengan tanah di Indonesia? Dari segi bahan dasarnya, tanah di Indonesia umumnya terbentuk dari batuan yang masam. Beberapa tempat memang ada tanah yang terbentuk dari batuan endapan basa - khususnya daerah kapur. Secara umum, tanah di Indonesia bagian Barat lebih miskin dibandingkan tanah di Indonesia bagian Timur. Sebagian besar Sumatera dan Kalimantan bertanah miskin. Berkelanjutan di Kalimantan dataran rendah, kamu akan sangat sulit menjumpai batu di permukaan. Pulau Jawa lebih baik karena dibantu oleh banyaknya gunung berapi. Sulawesi juga lumayan, tetapi topo-

grafinya sangat berat. Daerah Nusa Tenggara mempunyai tanah yang banyak mengandung unsur hara, tetapi kurang air. Ringkasnya, pandangan bahwa tanah Indonesia itu subur makmur sebenarnya jauh dari kenyataan.

Dengan berjalannya waktu, bentang alam beserta seluruh komponennya mengalami perubahan. Bentuk permukaan bumi semakin datar. Tanah mengalami perkembangan dari tanah muda (Ordo Entisol, Inceptisol), tanah matang (Alfisol, Ultisol), tanah tua (Oxisol), dan akhirnya sisa pelapukan. Organisme, khususnya, vegetasi juga mengalami perubahan yang kita kenal dengan suksesi. Pak De akan memasuki wilayah yang agak provokatif disini, yakni mengaitkan suksesi bentang alam tadi dengan keanekaragaman hayati (kehati).

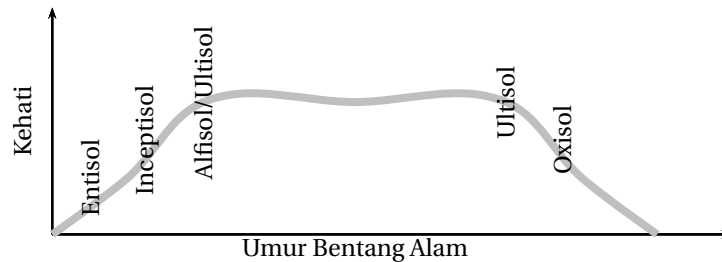
4. **Tanya:** Maksud pak De provokatif itu apa? Tukang demo mana yang akan terprovokasi oleh pandangan pak De ini? Mungkin lebih tepat bahwa pak De memasuki wilayah spekulasi barangkali?

Answer: Memang ada unsur spekulasinya. Namun pak De lebih bermaksud memprovokasi pemikiran para ahli ekologi tumbuhan. Suksesi vegetasi itu kan hanya gejala yang tampak di permukaan, tetapi pastilah hal tersebut hasil dari perubahan banyak hal yang mempengaruhi kehidupan si vegetasi tersebut. Misalnya saja, bagaimana perubahan faktor abiotik selama suksesi tersebut terjadi?

Ketika bentang alam masih berusia muda, hanya beberapa jenis organisme saja yang dapat tumbuh. Biasanya tumbuhan tingkat rendah. Semakin dewasa usia bentang alam ini - yang dicirikan salah satunya oleh terbentuknya tanah yang matang - bentang alam tersebut memberi tempat yang cocok (*favorable*) bagi banyak spesies untuk tumbuh dan berkembang sehingga terbentuklah ekosistem yang berkeanekaragaman hayati tinggi. Pada tahap ini, peran vegetasi yang beranekaragam tersebut lebih sebagai pemanfaat lingkungan bentang alam yang sangat ideal.

Pada tahap perkembangan berikutnya ketika usia bentang alam telah tua - tanah telah kehilangan seluruh mineral yang dapat dilapuk - peran vegetasi yang beranekaragam tersebut lebih sebagai pelindung sistem. Kehilangan berbagai unsur penting tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga akhirnya sistem semakin miskin. Proses ini diikuti oleh menurunnya secara perlahan keanekaragaman hayati karena kondisi bentang alam semakin tidak cocok bagi semakin banyak je-

nis. Pada tanah yang sangat tua - ketika semua mineral mudah lapuk telah habis sehingga hanya tersisa pasir kuarsa yang paling tahan terhadap pelapukan - hanya sangat sedikit spesies yang dapat bertahan. Itulah hutan kerangas. Sekali hutan kerangas dibuka, hilanglah semua cadangan energinya dan ekosistem tersebut tidak akan pernah kembali seperti semula. Proses perkembangan bentang alam dengan keanekaragaman hayatinya ditampilkan dalam Gambar 6.1.



Gambar 6.1: Perkembangan Keanekaragaman Jenis dan Umur Bentang Alam

Jadi ada keseiringan antara perkembangan bentang alam dengan perkembangan keanekaragaman hayati. Apa implikasinya bagi pengelolaan sumberdaya alam kita? Ketika bentang alam berada di sekitar perubahan dari muda ke matang, pemanfaatan lahan secara monokultur tidak masalah, bahkan sangat dianjurkan. Bentang alam memberikan pilihan yang sangat banyak kepada kita. Larangan monokultur ketika bentang alam pada posisi seperti itu merupakan kekonyolan yang menghambat perkembangan ekonomi. Persoalan menjadi kebalikan ketika bentang alam telah memasuki usia tua.

Ketika bentang alam berusia tua, keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk melindungi sistem bentang alam tersebut. Budidaya monokultur akan mendorong bentang alam mencapai titik perjalanan akhirnya yang tidak reversibel. Pembicaraan keanekaragaman hayati yang pak De ikuti hingga kini belum pernah dikaitkan dengan posisi usia bentang alamnya. Pembicaraan seperti itu sebenarnya tidak punya makna apapun - persis seperti pembicaraan tentang hantu yang membuat takut anak kecil! Pak De tidak mengatakan bahwa orang tua tidak takut hantu. Banyak orang tua yang masih takut sama hantu meskipun ngakunya sudah beriman.

5. **Tanya:** Jadi pak De, hutan kita yang hijau royo-royo itu belum tentu mencerminkan kesuburan tanah kita? Bahkan sebaliknya hal tersebut dapat merupakan tanda telah miskinnya tanah? Jika demikian, maka sebenarnya selama ini kita telah salah kaprah berjamaah.

Answer: Benar Tanya, begitulah adanya. Hijau royo-royo itu juga dapat menunjukkan keringkahan sistem. Kamu sekarang punya kewajiban untuk ikut mengoreksinya.

6.2 Tata Ruang

1. **Tanya:** Setelah bentang alamnya tergelar pak De, maka tahap berikutnya adalah bagaimana menggunakan bentang alam tersebut. Agar pemanfaatan bentang alam tersebut berjalan dengan “baik” maka perlu ada penataan terlebih dahulu. Sebutlah itu sebagai tata ruang. Maaf pak De, Tanya menggunakan ungkapan ringkas “baik” untuk menunjukkan jarak terdekat dengan segala kualitas yang diinginkan. Kok bahasa Tanya jadi ikut-ikutan mbulet seperti bahasa pak De yah?

Answer: Benar Tanya, tata ruang harus dibangun dengan pertimbangan yang matang dan berjangka panjang. Tetapi, sehebat dan serasional apapun manusianya yang menyusun tata ruang dan selengkap apapun informasinya, tetap saja ada kekurangannya sehingga pendekatan rasional tidak dapat dijalankan secara penuh (*bounded rationality*). Oleh karena itu, tata ruang itu seharusnya merupakan konsep yang dinamis. Biar sedikit melek ya Tanya, pak De mau menggunakan simbol matematika. Jangan khawatir, tidak terlalu sulit kok. Misalnya ada berbagai kemungkinan tata ruang dan setiap kemungkinan itu kita catat dengan vektor R . Tata ruang yang terpilih, R^* , adalah tata ruang yang memberikan kemakmuran tertinggi, yakni $U(R^*; I) > U(R; I)$, dimana I adalah informasi yang tersedia saat keputusan tersebut diambil. Ini adalah pendekatan rasional yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Apalagi pengambil keputusannya adalah para birokrat dengan perilaku administratifnya dan *satisficing* yaitu sikap merasa cukup bila telah mampu melampaui tingkat tertentu meski belum tingkat yang tertinggi (Simon, 1965, 1991).

Meskipun ada ruang yang besar untuk melakukan koreksi terhadap tindakan manajemen yang dianggap gagal, manajemen adaptif haruslah berlandaskan pada kajian dan pemikiran yang mendalam sehingga

kegagalan yang terjadi benar-benar merupakan peristiwa yang di luar kontrol. Ruang yang besar untuk melakukan koreksi tidak disediakan bagi ketidakseriusan. Hal ini perlu mendapatkan penekanan karena manajemen adaptif tidak sama dengan manajemen coba-coba (*trial and error*) (Williams, 2011). Pendekatan coba-coba dilakukan dengan sikap “mencoba sesuatu dan jika hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya maka mencoba yang lain,” yang pada dasarnya melibatkan revisi strategi secara *ad hoc* bila keputusan yang dibuat tampak gagal.

2. **Tanya:** Ada dua hal yang dapat Tanya tangkap dari uraian pak De, yakni tetap teguh pada pesan konstitusi dan tetap rendah hati dalam membuat perencanaan. Itu merupakan prinsip yang tidak boleh ditinggalkan. Tetapi bagaimana dengan praktek tata ruang dalam dunia nyata pak De?

Answer: Tata ruang diatur melalui UU 26 tahun 2007. Ada dua isu yang menjadi perhatian pak De, yakni tentang pertambangan dan tentang kehutanan. Paling tidak dalam dua isu tersebut perlu ada perombakan besar, terutama dalam pemikiran.

Pertama tentang pertambangan. Pasal 5 ayat (2) UU 26/2007 berbunyi “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.” Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU 26/2007 ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai “kegiatan pertambangan diperbolehkan hanya di dalam kawasan budi daya.” Pertanyaannya, peruntukan menentukan fungsi kawasan atau sebaliknya fungsi kawasan menentukan peruntukan? Karena karakteristiknya yang tidak dapat diadakan secara buatan, peruntukan pertambangan akan masuk akal hanya bagi kawasan yang mengandung bahan tambang. Implikasinya, suatu kawasan yang mengandung bahan tambang dan secara ekonomis layak dimanfaatkan yang meningkatkan kemakmuran rakyat harus dimasukkan sebagai kawasan budi daya. Dengan kata lain, peruntukan kawasan menentukan fungsinya, bukan sebaliknya. Sangat tidak masuk akal bila suatu kawasan diperuntukkan bagi pertambangan ketika tidak ada informasi tentang adanya sumber daya tambang yang ekonomis untuk dimanfaatkan. Jadi, interpretasi terhadap pasal 5 ayat (2) yang lebih masuk akal berdasarkan penjelasan yang diberikan adalah bahwa kawasan dengan peruntukan pertambangan digolongkan sebagai kawasan yang berfungsi budi daya. Lebih tegasnya, kawasan lindung yang kemudian diketahui mengandung sumber daya tambang yang layak dimanfaatkan harus diubah

fungsinya menjadi kawasan budi daya, bukan melarang pertambangan di dalam kawasan lindung tersebut.

Penjelasan pasal 5 ayat (2) tersebut perlu dibuat lebih jelas dan tegas agar pemegang wewenang alih fungsi kawasan terlindungi secara hukum ketika menjalankan wewenangnya. Kurang jelas dan tegasnya pasal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap petugas yang sedang menjalankan wewenangnya karena dengan mudah dituduh sebagai menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan umum.

Kedua tentang kehutanan. Lucu bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) harus dipaduserasikan dengan “kawasan hutan” melalui kajian tim terpadu. Hal ini terjadi karena pasal 19 UU 41 tahun 1999. Lha tentang kawasan hutan ini juga merupakan isu lucu yang lain lagi.

3. **Tanya:** Benar pak De, dimana-mana kawasan hutan itu menimbulkan masalah hingga konflik terbuka. Sebenarnya kawasan hutan itu apa?

Answer: Untuk membahas hal tersebut, ada baiknya kita melihat perkembangan pemikiran tentang kawasan hutan itu dari waktu ke waktu. Dalam UU 5 tahun 1967, kawasan hutan didefinisikan sebagai “wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap” (Pasal 1 angka 4). Dalam melaksanakan penetapan tersebut, menteri memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh pemerintah (Pasal 7 ayat (2)). Jadi, apa yang dilakukan oleh menteri dalam menetapkan kawasan hutan adalah melanjutkan apa yang telah dihasilkan oleh pemerintah yang berwujud rencana penggunaan tanah.

Penggunaan tanah itu menyangkut banyak isu dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, adalah masuk akal bila rencana penggunaan tanah tersebut ditentukan oleh pemerintah, yang menurut pendapat pak De terdiri dari berbagai sektor dan kompetensi. Penunjukan kawasan hutan merupakan bagian dari penyusunan rencana penggunaan tanah dan merupakan salah satu tahap dalam penetapan kawasan hutan. Dengan demikian, penetapan kawasan hutan sudah mempertimbangkan berbagai macam hal dan kepentingan berbagai sektor. Semua sektor harus melihat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai tujuan bersama yang hendak kita capai.

Dari UU 5 tahun 1967 tersebut dihasilkan peta sakti yang disebut taguna hutan kesepakatan (TGHK), suatu peta yang dikemudian hari banyak menimbulkan masalah, baik bagi kehutanan maupun bukan kehutanan. Peta TGHK sebenarnya hanyalah peta indikatif sektoral yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, tetapi di Indonesia peta semacam itu dapat digunakan untuk memenjarakan orang. Pak De sebut sebagai peta indikatif sektoral karena memberikan pedoman kasar bagi kehutanan saja. Perlu diingat, Peta TGHK bukanlah bagian dari Peta Rencana Penggunaan Tanah. Banyak keluhan dari sektor nonkehutanan bahwa Peta TGHK merupakan hambatan dalam proses penyusunan tata ruang.

Menyadari bahwa proses pengukuhan hutan, untuk menghasilkan kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum, diperlukan waktu yang panjang dan anggaran yang besar, maka definisi kawasan hutan sedikit diubah dalam UU 41 tahun 1999 sebagai pengganti UU 5 tahun 1967. Pada pasal 1 angka 3, kawasan hutan didefinisikan sebagai “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Ada upaya untuk potong kompas, yakni tidak harus “ditetapkan” yang pasti harus melalui proses penunjukan, penatabatasan, pemetaan, dan pengukuhan (Pasal 15 ayat (1)), melainkan cukup dengan penunjukan yang hanya merupakan salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Untunglah upaya potong kompas menerobos pagar tersebut telah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya No 45/PUU-IX/2011 tahun 2012 dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau.”

Dihapuskannya frasa “ditunjuk dan atau” berimplikasi bahwa untuk dapat disebut sebagai kawasan hutan maka suatu wilayah harus melalui proses penetapan, sama dengan perintah UU 5 tahun 1967. Perbedaannya, dalam UU 41 tahun 1999 penetapan tersebut dilakukan oleh pemerintah, sementara dalam UU 5 tahun 1967 penetapan dilakukan oleh menteri. Sekali lagi perlu diperhatikan munculnya kata pemerintah, yang menurut pendapat pak De bukanlah sembarangan. Frasa “ditunjuk dan atau” dimaksudkan untuk mengesahkan wilayah-wilayah yang baru pada taraf ditunjuk sebagai kawasan hutan agar disahkan menjadi kawasan hutan tetap. Satu hal yang dilupakan adalah bahwa penunjukan kawasan dalam Peta TGHK dilakukan oleh menteri, padahal perintahnya oleh pemerintah. Ringkasnya, pemaksa-

an kawasan hutan sebenarnya mentah dimana-mana. Kehadiran tim untuk melaksanakan penelitian terpadu menurut Pasal 19 UU 41 tahun 1999 adalah untuk kawasan hutan saja. Sedangkan untuk mengubah peruntukan dan fungsi kawasan yang baru berstatus penunjukan sebagai kawasan hutan tidak membutuhkan penelitian terpadu.

4. **Tanya:** Terus apa hubungannya kawasan hutan dengan fungsi hutan pak De?

Answer: Ha ini pertanyaan bagus. Hutan itu mempunyai tiga fungsi, yakni produksi, lindung, dan konservasi (Pasal 6 ayat (1) UU 41/1999). Semua hutan mempunyai fungsi seperti itu, hanya saja fungsi yang satu dapat lebih menonjol dari fungsi yang lain, tergantung pada karakteristik dari hutan yang bersangkutan. Tetapi ayat (2) dari pasal yang sama memerintahkan pemerintah untuk membagi kawasan hutan menurut tiga fungsi tersebut, sehingga ada kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Ini namanya fungsional yang distrukturkan.

Ada hal lucu tentang penentuan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang perlu kamu ketahui. Peraturan tentang penetapan hutan lindung adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980. Ada tiga faktor yang dijadikan dasar penilaian, yaitu faktor lereng dengan bobot 20, faktor jenis tanah dengan bobot 15, dan faktor intensitas hujan dengan bobot 10. Masing-masing faktor ini dibagi ke dalam lima kelas dan masing-masing kelas diberi skor (Tabel 6.1, 6.2, dan 6.3).

Tabel 6.1: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan Lapangan

Kelas lereng	Kelerengan	Keterangan
1	0% - 8%	(datar)
2	8% - 15%	(landai)
3	15% - 25%	(agak curam)
4	25% - 45%	(curam)
5	45% ≤	(sangat curam)

Suatu titik dalam suatu kawasan yang sedang dinilai harus menampikan tiga atribut, yakni skor kelas lereng, skor jenis tanah, dan skor intensitas hujan. Selanjutnya, jumlah hasil kali antara nilai skor

Tabel 6.2: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah Menurut Kepekaannya terhadap Erosi

Kelas tanah	Jenis Tanah	Keterangan
1	Aluvial, Tanah Glej Planosol Hidromorf Ke-labu, Laterit Air Tanah	(Tidak peka)
2	Latosol	(Agak peka)
3	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Me-diteran	(Kurang peka)
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podso-lik	(Peka)
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	(Sangat peka)

Tabel 6.3: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian Rata-Rata

Kelas Intensitas Hujan	Intensitas Hujan (mm/hari hujan)	Keterangan
1	≤ 13.6	(Sangat rendah)
2	13.6 - 20.7	(Rendah)
3	20.7 - 27.7	(Sedang)
4	27.7 - 34.8	(Tinggi)
5	$34.8 \leq$	(Sangat tinggi)

dan pembobotnya untuk ketiga faktor tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Hutan Lindung: ≥ 175
- (b) Hutan Produksi Terbatas: 125-174
- (c) Hutan Produksi Tetap: ≤ 124

Disamping kriteria tersebut, suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung, apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut :

- (a) Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45%; Catatan: Dalam KEPPRES No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung, aturan ini diubah menjadi: kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.

- (b) Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, lito-sol, organosol dan renzina dengan lereng lapangan lebih dari 15%;
- (c) Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter di kanan-kiri sungai/aliran air tersebut dan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;
- (d) Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;
- (e) Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih;
- (f) Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai hutan lindung.

Nah Tanya, nama tanah pada Tabel 6.2 itu adalah nama tanah yang digunakan pada sistem klasifikasi tanah yang sangat kuno. Mungkin pabrik yang menelorkan sistem klasifikasi tersebut juga sudah tutup. Padahal, pendekatan lain yang lebih modern, misalnya menggunakan *land system*, sebenarnya juga sudah ada. Pak De juga kurang paham mengapa di kehutanan itu sulit sekali terjadi pembaharuan.

5. **Tanya:** Kalau begitu, sebenarnya wilayah yang telah memenuhi kriteria legal kawasan hutan itu masih belum banyak dong pak De? Tetapi mengapa banyak orang, termasuk pihak lembaga pemerintah sendiri, takut terhadap klaim sepihak dari kehutanan itu?

Answer: Ha ha ha pak De tadi kan sudah bilang bahwa perlu ada perombakan besar-besaran, terutama dalam pemikiran. Ya apa yang kamu sampaikan itu merupakan salah satu arena dimana perombakan pemikiran harus dilakukan. Ada kejanggalan yang luar biasa, bahwa RTRWK(P) harus dipaduserasikan dahulu oleh tim yang dibentuk Kementerian Kehutanan. Mestinya, proses pepaduan dan penyerasian itu dilakukan ketika membangun RTRWK(P) itu. Pemapaduserasikan RTRWK(P) dengan kawasan hutan, yang sebenarnya secara legal formal masih belum ada, tidak lebih dari proses memaduserasikan antara kebodohan dan keserakahan.

Nah, ada hal lain yang juga ikut bertanggung jawab atas terbentuknya kondisi janggal yang berkelanjutan tersebut, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Para penegak hukum nakal ini menggunakan ketidakjelasan untuk keuntungan dirinya. Teman di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau bergerak karena tidak ingin dikuyo-kuyo oleh penegak hukum yang nakal, meskipun teman tadi tahu bahwa pada akhirnya dirinya akan dibebaskan dari persoalan hukum karena memang tidak ada hukum yang dilanggarnya. Kita memang sedang dalam jaman kegelapan jahiliyah.

6. **Tanya:** Jadi, menurut pak De apakah kawasan hutan itu masih perlu? Menurut saya nih pak De, mempertahankan sawah itu lebih penting dan strategis ketimbang mempertahankan hutan jati, hutan pinus, dan sebangsanya. Apalagi, terhadap areal persawahan tadi ada investasi publik yang sangat besar, seperti bendungan dan saluran irigasi. Kalau kawasan konservasi seperti suaka alam, taman nasional, dan sejenisnya bolehlah dipertahankan karena kita memang belum banyak mengetahui dan keberadaannya boleh jadi unik. Menyediakan kawasan secara terpisah dan harus dilindungi hukum untuk menanam jati, sengon, pinus, dan sebangsanya itu apa hebatnya pak De? Bukankah sama saja dengan karet, kopi, coklat, dan sejenisnya itu?

Answer: Wah wah wah kamu sudah berani melakukan gugatan-gugatan semacam itu Tanya.

7. **Tanya:** Apa hal seperti itu salah pak De?

Answer: He he he ... kamu ini kok hobi benar menggunakan struktur salah benar. Pak De setuju banget dengan pikiranmu tadi. Justru dengan menyediakan kawasan secara terpisah begitu, kreativitas dan kecerdasan menjadi kurang berkembang. Tetapi satu hal yang kamu tidak boleh lupa dan melupakannya, yakni bahwa tujuan kita adalah mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, mengganti jati dengan karet dan karet dengan sengon itu hanyalah instrumen untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi.

6.3 Kutukan Sumberdaya Alam

1. **Tanya:** Negara yang kaya sumberdaya alam ternyata tidak selalu mampu menyejahterakan rakyatnya. Bahkan, sumberdaya alam yang me-

limpah ruah malah menimbulkan masalah ketimbang masalah bagi rakyat. Kinerja ekonomi negara yang kaya sumberdaya alam cenderung dibawah kinerja ekonomi negara yang tidak kaya sumberdaya alam.

Answer: Benar, data empirik menunjukkan hal tersebut. Itulah yang lazim dikenal sebagai kutukan sumberdaya alam. Pak De perlu menempatkan sumberdaya alam dari dari perspektif dua pandangan, yakni kelompok yang fanatik dengan teori neoklasik dan kelompok yang lebih rileks terhadap paham neoklasik. Pak De perlu menyampaikan ini agar kamu tidak terjebak oleh dan dalam kesombongan teori, yang sekarang ini sedang menjadi arus utama.

2. **Tanya:** Pak De, Tanya usul agar pembahasan perspektif dua pandangan tersebut ditempatkan di belakang saja, karena Tanya tidak sabar untuk segera mendengar kutukan sumberdaya alam.

Answer: Ada beberapa penjelasan mengapa fenomena kutukan sumberdaya alam itu dapat terjadi. **Pertama**, akibat *Dutch disease* (Sachs & Warner, 1995). Penyakit ini merupakan kecenderungan bagi nilai tukar riil menjadi terlalu tinggi dalam merespon kejut positif, seperti yang dialami oleh Belanda setelah menemukan gas alam di Laut Utara, yang menggiring kepada kontraksi dari sektor yang hasilnya dapat diperdagangkan (manufaktur). Nilai tukar yang tinggi merupakan hambatan utama ekspor dari suatu negara karena harga barang yang diproduksi oleh negara tersebut menjadi terlalu tinggi di negara pengimpornya. Inti dari dongeng *Dutch disease* adalah bahwa sumberdaya alam yang melimpah ruah menggeser sumberdaya menjauh dari sektor yang memiliki eksternalitas positif bagi pertumbuhan. Maraknya industri ekstraksi sumberdaya alam, yang umumnya padat modal, dapat mendongkrak tingkat upah sehingga berdampak negatif pada sektor manufaktur, yang umumnya lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Kedua, akumulasi sumberdaya manusia yang lambat karena biaya kesempatan (*opportunity cost*) untuk melanjutkan sekolah menjadi terlalu tinggi. Ketika upah meningkat akibat dari maraknya industri ekstraksi sumberdaya alam, maka tetap melanjutkan sekolah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh upah yang tinggi tersebut. Beberapa orang akan memilih untuk segera memasuki dunia kerja di sektor industri ekstraksi sumberdaya alam, yang artinya mengorban-

kan pendidikannya. Dalam jangka panjang, ekonomi akan mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang bermutu tinggi yang dipercaya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Barro, 2001). Selanjutnya, Gylfason (2001) melihat melimpahnya sumberdaya alam dapat menyebabkan suatu bangsa lebih memandang kekayaan alamnya, bukan kapital manusianya, sebagai kunci bagi masa depannya dan sebagai akibatnya mengabaikan investasi pendidikan.

Ketiga, perang atau konflik untuk memperebutkan sumberdaya alam itu sendiri (Ross, 2004). Sebagaimana sering kita lihat di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia sendiri, konflik yang dipicu oleh sumberdaya alam sering terjadi. Kasus bentrok masyarakat dan polisi di NTB, kasus penembakan di sekitar tambang Freeport, perang memperebutkan tambang berlian di beberapa negara Afrika, perang karena minyak di Nigeria, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Collier & Hoeffler (2004) telah menunjukkan bahwa sumberdaya alam sangat meningkatkan kemungkinan konflik sipil di suatu negara. Menurut perkiraan mereka, efek dari sumberdaya alam pada konflik adalah kuat kuat dan non-linier. Sebuah negara yang tidak memiliki sumberdaya alam mempunyai peluang konflik sipil sebesar 0,5 persen, sedangkan negara dengan kontribusi sumberdaya alam terhadap PDB sebesar 26 persen menghadapi peluang konflik sebesar 23 persen. Faktor ketiga ini merupakan bagian dari rusaknya kapital sosial.

Keempat, kualitas dari kelembagaan (Mehlum et al., 2006). Lebih banyak sumber daya alam mendorong pendapatan agregat turun bila kelembagaannya memberi ruang kepada praktek korup, sementara sumber daya lebih meningkatkan pendapatan bila kelembagaannya ramah terhadap produsen.

Kelima, diversifikasi ekonomi yang kurang berkembang. Kekayaan sumberdaya alam cenderung menggiring kearah struktur ekonomi dan penerimaan ekspor yang sangat terkonsentrasi, yang menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan dari luar, dengan akibat pertumbuhan yang lambat.

Keenam, terlalu percaya diri yang menggiring kepada kebijakan fiskal yang kurang hati-hati. Kekayaan alam dapat mengendorkan tekanan kepada pemerintah untuk memungut pajak dan mengurangi patuhan fiskal. Adalah alami bagi populis untuk menuruti kemauan yang tidak pernah terpuaskan dari warga negara untuk menurunkan pajak. Bacon (2001) menyebutkan bahwa negara penghasil minyak cenderung

menentukan harga minyak domestik yang lebih rendah, yang berimplikasi bahwa rente sumberdaya alam yang diperoleh dari royalti di hulu menyubsidi konsumsi hilir domestik. Kamu lihat sendiri bahwa hal seperti ini terjadi di Indonesia juga, bahkan ketika kita sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak. Keadaan sudah berubah, tetapi perilaku masih belum mampu mengikuti perubahan tersebut. Keadaan lain yang tidak kalah mengkhawatirkannya adalah pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah. Kutukan sumberdaya alam semakin terasa, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal.

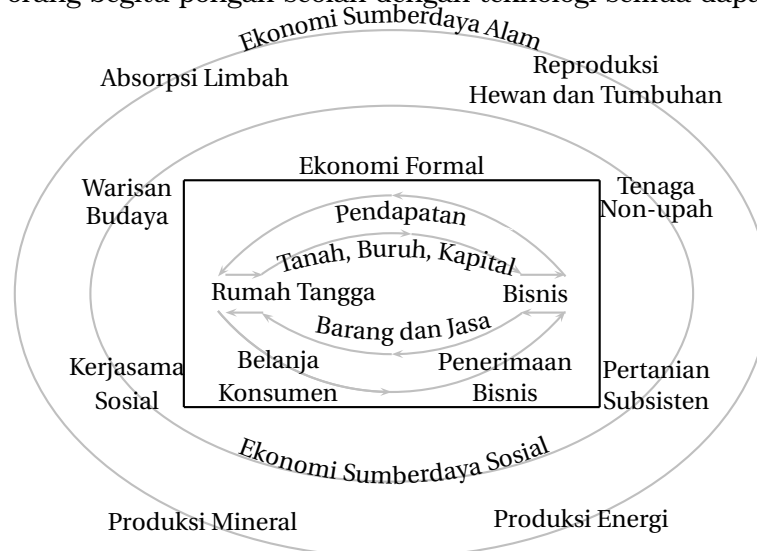
3. **Tanya:** Wah gawat nih pak De. Jangan-jangan, maraknya industri pertambangan di negara kita saat ini juga merupakan bagian dari kutukan sumberdaya alam itu. Bukankah kutukan sumberdaya alam itu bermakna bahwa pembangunan yang sedang berlangsung tidak berkelanjutan (*unsustainable*)?

Answer: Kita melihat konflik yang berlatar belakang sumberdaya alam terjadi di banyak tempat dengan frekuensi yang semakin tinggi. Ini sinyal kuat bahwa kutukan sumberdaya alam sedang berlangsung. Pak De masih belum begitu yakin apakah keduanya terjalin oleh hubungan sebab akibat atau sebenarnya ketidakberlanjutan itu hanya salah satu wujud dari kutukan sumberdaya alam.

4. **Tanya:** Pak De, bukankah sumberdaya alam itu esensial bagi pembangunan dan oleh karena itu bagaimana sumberdaya alam dikelola akan menentukan jalannya pembangunan, termasuk keberlanjutannya?

Answer: Sebelumnya pak De sudah menyinggung tentang hal tersebut. Masih ingat dengan kelompok yang fanatik terhadap paham neoklasik dan kelompok yang lebih rileks terhadap paham neoklasik? Inti dari pandangan pak De adalah bahwa ekonomi tidak akan pernah ada tanpa sumberdaya alam dan lingkungan. Setiap aktivitas ekonomi pastilah bersentuhan dengan salah satu atau bahkan keduanya sekaligus. Sayangnya, dalam perkembangannya kajian ekonomi pernah mengabaikan sumberdaya alam, terlebih-lebih setelah pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak kunjung terbukti dan penduduk dunia semakin meledak. Ekonomi neoklasik “merasa” telah mampu mengatasi kelangkaan sumberdaya alam dengan kemajuan teknologi yang terus menerus (Stiglitz, 1974; Agnani et al., 2005). Tetapi suka atau tidak, sistem ekonomi tidak akan pernah mampu keluar da-

ri ekosistem. Aturan yang mengatur dinamika ekosistem, dimana di dalamnya aktivitas manusia berlangsung, pada akhirnya merupakan fungsi dari hukum biologi, bukan fungsi dari sistem ekonomi yang diciptakan manusia (Gowdy & McDaniel, 1995; Smith, 1996). Gambar 6.2 memperlihatkan uraian yang baru saja pak De sampaikan. Elips terluar adalah ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan, dengan fungsi utama melaksanakan reproduksi kehidupan hewan dan tumbuhan, mengabsorpsi limbah, memproduksi energi, memproduksi mineral. Semua fungsi ini diperlukan untuk mendukung ekonomi sumberdaya sosial (elips kedua) yang melibatkan warisan budaya, kerjasama sosial, tenaga yang tidak dibayar, dan pertanian subsisten. Nah, ekonomi formal yang banyak kita pelajari itu sesungguhnya hanya bagian kecil, kotak yang di tengah, dari ekonomi sumberdaya sosial dan ekonomi sumberdaya alam. Pak De juga kurang begitu paham mengapa orang begitu pongah seolah dengan teknologi semua dapat diatasi.



Gambar 6.2: Perluasan Perhitungan Ekonomi Keluar Batas Siklus Ekonomi Konvensional (Cato (2009) yang mengutip dari F. Hutchinson, M. Mellor dan W. Olsen)

Ada kaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dengan pertum-

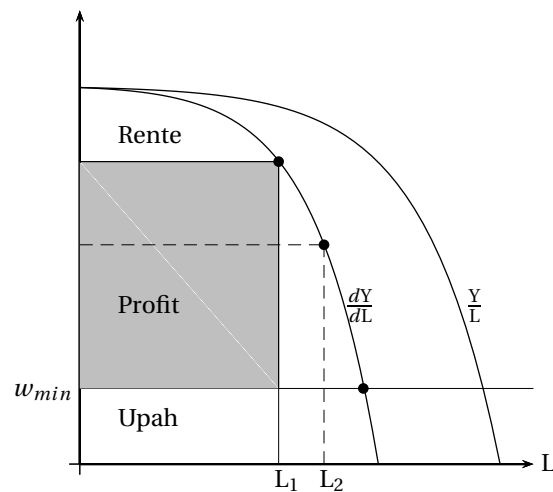
buhan ekonomi dan kaitan tersebut sering menimbulkan kebingungan (Sen, 1988). Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan bila karya tulis awal dalam ilmu ekonomi pembangunan, para penulis memberi perhatian yang sangat intens pada cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produk nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (GDP) dan total penyerapan tenaga kerja. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas menjadi bahwa pembangunan ekonomi “tidak harus bermakna” mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat saja merupakan keharusan tetapi tidak cukup. Informasi GNP atau GDP hanya menangkap barang dan jasa yang ada pasarnya, sedangkan banyak barang dan jasa yang sangat menentukan kesejahteraan manusia tidak terdaftar di pasar. Pembangunan berkepentingan dengan pemerataan dan perubahan struktur yang tidak mungkin teratasi hanya dengan memanipulasi pertumbuhan (Nafziger, 2006).

Ketika pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak terbukti, penganut neoklasik mendapatkan landasan yang kuat untuk semakin hanyut dengan pahamnya. Dalam ekonomi klasik dengan bintangnya Adam Smith dan Ricardo, akumulasi kapital merupakan faktor penentu yang mempengaruhi laju kemajuan ekonomi. Sumberdaya alam utama yang menjadi fokus ekonomi klasik adalah tanah pertanian. Dalam pandangan ekonomi klasik, pertanian sendiri mampu menciptakan surplus. Dalam karya besarnya “the wealth of nations,” Adam Smith mengembangkan teori harga normal ditentukan oleh harga buruh, kapital, dan tanah. Dengan menggunakan notasi Y untuk produk netto, L untuk input buruh, K untuk kapital, dan R untuk tanah, fungsi agregat produksi Smith berbentuk $Y = F(L, K, R)$.

David Ricardo mengembangkan lebih lanjut teori harga normal di atas dengan memperkenalkan pengertian perbedaan rente atas tanah berkualitas lebih tinggi sementara tanah marginal memiliki rente nol. Jika dalam fungsi produksi agregat Smith kualitas tanah dianggap konstan, dalam fungsi produksi agregat Ricardo kualitas tanah, $q(R)$, dianggap beragam yang berbanding terbalik dengan jumlah lahan yang telah dalam pemakaian. Fungsi produksi agregat Ricardo mengambil bentuk $Y = F(L, K, q(R)R)$ dengan $\frac{\partial q}{\partial R} < 0$.

Dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi, budidaya pertanian semakin melibatkan tanah yang kurang produktif hingga akhirnya mencapai tanah marginal. Karena tanah marginal tidak memerlukan rente

apapun, harga alami dari suatu komoditi yang dihasilkan oleh tanah marginal tersebut tidak mencakup komponen rente. Rente Ricardo dan teori pertumbuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 6.3. Produktivitas marginal dari buruh ($\frac{\partial Y}{\partial L}$) menentukan profit dan rente. Ketika populasi adalah L_1 dan buruh diupah dengan upah minimum w_{min} , pemilik tanah mendapatkan rente, sedangkan kapitalis menerima profit. Seiring dengan semakin luasnya tanah kurang produktif yang digunakan, semakin tinggi populasi maka semakin tinggi pula rente atas tanah berkualitas tinggi dan semakin kecil profit yang diperoleh. Karena tanah marginal tidak memberikan hasil bersih apapun maka menjadi wajar bila tanah marginal tidak memiliki harga dan kemudian lenyap dari fungsi produksi agregat neoklasik.



Gambar 6.3: Teori Rente Ricardo

Pandangan di atas masih tetap menjadi tema utama ekonomi neoklasik dalam menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) menyatakan bahwa investasi dengan cepat mendorong income agregat dan pada saat yang sama memperbesar output potensial periode selanjutnya. Solow (1956) melihat kemungkinan meningkatnya standard hidup material melalui kemajuan teknologi. Fungsi produksi mencakup tenaga kerja (L), kapital (K), dan perubahan teknologi (A) dengan bentuk $F(L, K, A)$. Sumberdaya alam atau lingkungan tidak ada dalam fungsi produksi neoklasik.

Terbitnya buku "limits to growth" dari Club of Rome di awal tahun 1970an telah menggeser perdebatan atas masa depan pertumbuhan ekonomi. Para penulis limits to growth menyatakan adanya batas bi-fisik bagi pertumbuhan yang akan membawa pertumbuhan ekonomi kepada titik akhir. Sayangnya, perlakuan terhadap preferensi, teknologi produksi, dan ekonomi terlihat tidak konvensional dan tidak masuk akal bagi banyak ekonom (Beckmann, 1975).

Terhadap limits to growth tersebut muncullah gerakan lingkungan. Ahli pertumbuhan mulai memasukkan sumberdaya alam dan polusi ke dalam model pertumbuhan ekonomi selama era 1970an. Sebagai contoh, Stiglitz (1974) mengusulkan fungsi produksi agregat dengan tenaga kerja, barang modal, dan sumberdaya alam sebagai barang substitusi dalam produksi. Fungsi produksi yang digunakan Stiglitz adalah $F(N,K,R)$ dimana R adalah laju pemakaian sumberdaya alam. Namun upaya Stiglitz tersebut tidak menjadikan sumberdaya alam dan lingkungan dengan serta merta memasuki arus utama kajian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Setelah membandingkan income per kapita dan intensitas kapital antara Amerika Serikat dan India, Lucas Jr. (1990) menyimpulkan bahwa intensitas kapital saja tidak cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan income per kapita yang begitu jauh. Kualitas sumberdaya manusia diduga sebagai penyebab perbedaan yang begitu jauh. Namun, setelah melakukan koreksi terhadap sumberdaya manusia, perbedaan memang semakin kecil tetapi tetap tidak hilang. Model dengan akumulasi kapital fisik dan kapital manusia yang digunakan oleh Mankiw et al. (1992) dapat menjelaskan data dengan baik. Barro (2001) juga menguatkan peran dari sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan merupakan bentuk investasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kritik terhadap model neoklasik datang dari berbagai penjurur dan disiplin. Penjelasan bagi pertumbuhan ekonomi harus meliputi kultur bangsa (Landes, 1999; Inglehart & Baker, 2000). Kultur biasanya dipandang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan mempengaruhi ciri personal seperti kejujuran dan etika kerja. Agama merupakan salah satu dimensi penting dari kultur. Studi pertama tentang hal ini dilakukan oleh Weber yang melihat hubungan Etika Protestant dengan spirit kapitalisme. Studi lebih baru oleh Barro & McCleary (2003)

menyimpulkan bahwa kepercayaan agama mempengaruhi ciri individu yang meningkatkan kinerja ekonomi. Pentingnya faktor kultur bagi pertumbuhan ekonomi juga diamati oleh (Abrams & Lewis, 1995).

Ketika ekonomi Jepang, Cina, dan Korea Selatan berkembang semakin berkilau, orang mulai melihat pengaruh faktor konfusianisme. Bukan mustahil suatu saat nanti Hinduisme akan dikaitkan dengan kemajuan ekonomi pada saat India dan Sri Lanka berhasil menyejahterakan rakyatnya. Setelah meneliti efek keragaman kultural pada pembangunan di 98 negara selama periode 1960-1985, Lian & Oneal (1997) sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan etnik, bahasa, dan agama tidak berhubungan nyata dengan laju pertumbuhan GDP per kapita. Tetapi pak De yakin bahwa kapital sosial merupakan faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya. Boleh jadi, etnik, bahasa, dan agama tidak ada sangkut pautnya dengan kapital sosial.

Namun, kritik yang terus menerus dan relatif paling bertahan lama dan sistematis datang dari para pecinta lingkungan. Dari kelompok ini muncul brown GDP dan green GDP. Bagi pak De, GDP adalah GDP dan brown GDP adalah GDP yang salah hitung. Kita mulai diskusi ini dengan mengangkat definisi tentang pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 ayat (3)). Definisi ini masih senafas dengan definisi umum tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya dikenal keberkelanjutan versi lemah dan versi kuat sebagai berikut:

- (a) Keberkelanjutan lemah: Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan dianggap dapat berlangsung sempurna. Saat ini, penafsiran keberlanjutan lemah ini merupakan penafsiran keberlanjutan yang dominan.
- (b) Keberkelanjutan kuat: Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan adalah terbatas. Kedua kapital dipandang sebagai

komplemen – keduanya harus digunakan bersama agar produktif. Pendekatan keberkelanjutan kuat berimplikasi pada batas skala ekonomi makro. Sistem ekonomi tidak dapat tumbuh di luar batas yang ditetapkan oleh kapasitas regenerasi dan penyerapan limbah oleh ekosistem.

Selanjutnya, Costanza dan Daly mengusulkan “syarat keharusan minimum” yang dinyatakan dalam konservasi kapital alam (Daly, 1991) sebagai berikut:

- (a) Sumberdaya alam dapat pulih: kaidahnya adalah membatasi konsumsi sumberdaya hingga level hasil lestari.
- (b) Sumberdaya alam tidak dapat pulih: kaidahnya adalah menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi sumberdaya alam tidak dapat pulih kedalam pengganti yang dapat pulih.

Hartwick (1977) mengusulkan kaidah agar konsumsi tidak menurun dari waktu ke waktu, dalam hal dimana ekonomi menggunakan sumberdaya alam tidak dapat pulih dalam proses produksinya. Hartwick menunjukkan bahwa sepanjang cadangan dari kapital tidak menurun dengan berjalannya waktu, maka konsumsi yang tidak menurun juga mungkin terjadi. Dia lalu merekomendasikan bahwa cadangan kapital dapat dipertahankan konstan melalui investasi seluruh rente Hotelling dari ekstraksi sumberdaya alam tidak dapat pulih dalam kapital buatan manusia. Rente ini berasal dari program ekstraksi intertemporal yang efisien bagi sumberdaya alam tidak dapat pulih.

5. **Tanya:** Mantra untuk menghindari ketukan sumberdaya alam itu tentunya juga tersedia kan pak De?

Answer: Tidak ada mantra ajaib untuk mengatasi hal tersebut. Semua normal-normal saja. Apa yang disampaikan oleh Daly (1991) pada bagian sebelumnya merupakan salah satu mantranya. Transformasi kapital alam membutuhkan kebijakan untuk mendorong: (1) efisiensi ekonomi dalam ekstraksi sumberdaya untuk memaksimalkan rente dari sumberdaya, (2) pemungutan rente sumberdaya oleh agensi yang akan mengreinvestasikan penerimaan yang diperoleh, dan (3) reinvestasi rente dalam aset yang menghasilkan paling sedikit sebesar pendapatan kapital alam yang digantikannya. Nah penentuan tarif rente

sumberdaya alam itu menjadi ajang bancaan banyak orang. Agar kamu sedikit lebih paham, pak De akan membahas hal ini pada topik tentang pertambangan.

Menurut Kronenberg (2004), investasi sumberdaya manusia dapat menjadi saluran yang penting untuk mengatasi kutukan sumberdaya alam dalam jangka panjang. Kenyataannya, negara-negara dengan keyakinan kuat bahwa sumberdaya alam merupakan aset paling penting dapat dengan mudah mengabaikan pembangunan kapital manusia.

Solusi paling populer memberi tekanan pada kebijakan ekonomi makro, diversifikasi ekonomi, dana sumberdaya alam, transparansi dan akuntabilitas, dan distribusi langsung kepada rakyat banyak (seperti bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara) (Weinthal & Luong, 2006). Selanjutnya dinyatakan bahwa keberhasilan berbagai solusi tersebut ternyata terbatas karena berbagai solusi tersebut menyaratkan adanya institusi negara yang kuat, yang umumnya tidak dipenuhi di negara berkembang, atau menganggap bahwa kepemilikan negara atas kekayaan mineral dan oleh karenanya memerlukan pelaku eksternal untuk membatasi negara. Pada saat yang sama, kepemilikan oleh swasta domestik jarang sekali diusulkan dan seringkali diselewengkan.

Iimi (2007) mendapatkan bahwa tatakelola menentukan seberapa jauh efek pertumbuhan dari kekayaan sumberdaya alam dapat mewujudkan. Di negara berkembang, kualitas regulasi, seperti prediktabilitas perubahan regulasi, dan kebijakan anti korupsi, seperti transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, adalah paling penting bagi pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan pertumbuhan.

6. **Tanya:** Pak De, kita teruskan dengan membahas hutan dan lahan ya. Sekitar 70% tanah Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan, meskipun kenyataannya belum memenuhi semua persyaratan untuk dapat disebut sebagai kawasan hutan. Dahulu, hampir semua tanah itu ditutupi oleh hutan yang sangat rapat. Bisnis kehutanan sempat sangat terkenal dan beberapa pelaku bisnis kehutanan menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Tanya dengar, sekarang ini bisnis kehutanan sangat lesu, hutannya banyak yang rusak, sementara konflik tanah yang melibatkan “kawasan hutan” terjadi dimana-mana. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan kehutanan itu pak De?

Answer: Kalau mau jawaban singkat, apa yang terjadi di kehutanan

itu dapat dinyatakan secara ringkas sebagai kegagalan total dari hulu hingga hilir. Tetapi yang patut kamu waspadai adalah bahwa kejadian yang menimpa sumberdaya hutan tersebut sesungguhnya juga sedang menimpa sumberdaya pertambangan dan juga perikanan.

6.4 Hutan dan Lahan

1. **Tanya:** Kegagalan siapa pak De?

Answer: Ha ... pertanyaan ini sangat tajam, tetapi bagus. Dalam dunia nyata, kegagalan itu jelas mutlak kegagalan pemerintah. Pemerintah yang mengontrol perijinan, baik untuk hutan alam maupun untuk hutan tanaman. Setiap langkah pengelolaan hutan harus memperoleh persetujuan pemerintah. Bahkan ada data yang menunjukkan bahwa 180 hari dalam setahun, suatu unit manajemen pemegang IUPHH mendapat kunjungan petugas kehutanan pemerintah. Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) hanya mengikuti petunjuk dan perintah dari pemerintah. Jika berhasil, maka keberhasilan itu adalah milik pemerintah. Sebaliknya bila gagal, maka kegagalan itu pun sepenuhnya milik pemerintah. Inilah salah satu corak kebijakan kehutanan kita, yakni *command-and-control*.

2. **Tanya:** Tetapi pengusaha itu kan banyak yang curang pak De. Mereka maunya untung besar melulu.

Answer: Lha kalau namanya pengusaha ya harus memburu untung besar dong. Itu merupakan sifat bawaan pengusaha. Tetapi sangat keliru jika kita memandang pengusaha itu sebagai perusak hutan. Mereka sebagai pemburu laba adalah benar adanya dan tidak harus disalahkan. Jika laba itu harus diperoleh dengan membangun hutan, maka mereka akan membangun hutan. Sebaliknya, jika laba itu harus diperoleh dengan merusak hutan, maka sebagai pengusaha yang tulen mereka akan merusak hutan. Persoalannya adalah mampukah pemerintah membuat kondisi sehingga yang terjadi adalah para pengusaha itu mencari untung dengan cara membangun hutan. Kalau saja pengusaha itu dapat memilih, maka semua pengusaha atau sebagian besar pengusaha akan memilih mendapat laba tanpa merugikan pihak lain atau bila mungkin menguntungkan pihak lain ketimbang merugikan pihak lain yang pasti lebih beresiko. Pengusaha tidak akan ber-

buat curang, jika berbuat tidak curang memberikan laba lebih besar daripada berbuat curang.

3. **Tanya:** Selain *command-and-control*, apalagi corak kebijakan kehutanan kita pak De?

Answer: Ada beberapa lagi yang dapat disebutkan, seperti bias kepada usaha skala besar, menciptakan kekacauan hak atas tanah, dan menciptakan inefisiensi.

4. **Tanya:** Kok semuanya bertentangan dengan kehendak untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Yang benar saja pak De. Tanya sering dengar pejabat kehutanan menyatakan bahwa pembangunan kehutanan bersifat pro job, pro poor, dan pro environment.

Answer: Wacana kok mau diadu sama realita. Pejabat kehutanan dari dulu sampai sekarang ya hanya berwacana. Mereka buta realita. Akan pak De tunjukkan satu per satu. **Pertama**, soal bias kepada usaha skala besar. Berapa juta hektar hutan alam yang dikelola oleh usaha kecil? Tidak ada, semuanya dinikmati usaha skala besar. Berapa hektar hutan tanaman skala kecil (HTR) yang sudah mendapat ijin? Dibandingkan luas yang mendapat ijin HTI, maka luas yang mendapat ijin HTR dapat disebut nol. Perijinan HTR ini mirip dengan perijinan HTI. Bagi petani kecil dengan pengetahuan dan modal terbatas, maka perijinan HTR hampir mustahil dapat ditembusnya. Jadi, HTR yang sering digambarkan sebagai niat pro poor dari pemerintah sama sekali tidak benar.

Bias kepada skala besar ini juga menghasilkan ketimpangan yang luar biasa. Industri pulp dan kertas dikuasai oleh dua perusahaan raksasa yang secara substansi kemungkinan sudah melanggar undang-undang anti monopoli. Tetapi secara legal pelanggaran ini sulit dibuktikan. Penguasaan lahan oleh kedua perusahaan pulp dan kertas ini mencapai jutaan hektar.

Kedua, menciptakan kekacauan hak atas tanah. Sejak klaim kawasan hutan dicanangkan, banyak tanah adat, tanah ulayat, tanah dengan status yang lain tercerabut dari tangan masyarakat setempat. Hegemoni dan dominasi pemerintah mengacaukan tatanan sosial yang telah ada dalam masyarakat. Bahkan ada pemukiman transmigrasi yang dibangun oleh pemerintah sendiri menjadi kacau oleh klaim kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak, brutal, dan sangat tidak

adil. Dua contoh akan diberikan, yakni Semoi SP 3 di Kalimantan Timur dan Pemukiman Transmigrasi Wonotirto yang juga di Kalimantan Timur.

Dalam hal pemukiman transmigrasi Semoi SP3, pencadangan transmigrasi oleh BPN tahun 1968 seluas 2700 ha. Dokumen yang tersedia saat itu adalah berupa fotokopi surat pencadangan tersebut. Tim terpadu meminta legalisasi dari foto kopi dokumen tersebut tetapi tidak diperoleh. Hal ini berkaitan dengan adanya penunjukkan kawasan hutan (TAHURA) yang dilakukan belakangan. Karena legalisasi foto kopi dokumen tidak diperoleh, maka pencadangan areal transmigrasi tidak dapat diterima sepenuhnya.

Mengapa proses legalisasi dokumen menjadi begitu sulit dan rumit? Memang terasa janggal mengapa legalisasi dokumen yang jelas siapa penerbit dokumen aslinya dan apa tujuan diterbitkannya dokumen tersebut ternyata tidak dapat dilakukan. Tetapi ketika alasannya adalah ketidakjelasan penegakan hukum, maka kesulitan legalisasi tersebut menjadi lebih mudah dimengerti.

Dalam hal pemukiman transmigrasi Wonotirto diperoleh fakta sebagai berikut. Berdasarkan RTRWP I areal tersebut diluar kawasan hutan sehingga disertifikasi oleh BPN. Kemudian berdasarkan pengamatan oleh BPN, jarak antara batas TAHURA dan Transmigrasi pada peta RTWRWP adalah 154 m. Namun berdasarkan penetapan TAHURA SK 577/Menhut-II/2009 ternyata areal yang bersangkutan termasuk dalam kawasan TAHURA. Pertanyaannya mengapa problem seperti ini tidak teridentifikasi dalam tatabatas? Padahal, secara normatif pelaksanaan tatabatas harus melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan garis batas tersebut.

Ketiga. kebijakan kehutanan menciptakan inefisiensi. Kalau kamu analisis, hampir semua kebijakan kehutanan dicirikan oleh peningkatan manfaat sosial yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan biaya sosialnya. Kamu pasti sudah cukup paham bila proses pengurusan perijinan atau persetujuan pemerintah selalu membutuhkan biaya siluman. Pak De tidak perlu menjadikan proses pengurusan persetujuan pemerintah sebagai contoh, meskipun dari waktu ke waktu semakin banyak. Istilah orang dalam adalah bahwa aturan seperti itu dibuat agar ada talang yang mengarah kepada mereka dengan harapan mendapat tetesan air. Sangat menjijikan memang, tetapi itulah faktanya.

Pak De akan memberikan dua contoh kebijakan yang menimbulkan inefisiensi. Kedua contoh tersebut adalah (1) integrasi vertikal antara produksi kayu industri pengolahannya dan (2) larangan ekspor kayu bulat dan juga rotan mentah dan setengah jadi.

5. **Tanya:** Sebentar pak De, bukankah integrasi vertikal itu dimaksudkan agar terjadi efisiensi, kayu dari hutan langsung diolah oleh industrinya sendiri. Dengan cara ini, industri pengolahan tidak perlu menanggung biaya bahan baku yang terlalu tinggi, sehingga produk akhirnya lebih kompetitif. Demikian juga dengan larangan ekspor bahan mentah atau setengah jadi itu kan dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah didalam negeri?

Answer: Ya persis seperti itu argumen yang biasanya digunakan oleh pembuat kebijakan. Argumen seperti itu bukannya salah, tetapi baru menyampaikan sebagian kebenaran. Nah ketika ditambah dengan kebenaran yang lain, apakah pilihan kebijakan terbaiknya tetap sama? Mari kita lihat.

Dalam hal integrasi vertikal, harga kayu bulat di pasar domestik menjadi tertekan. Bahan baku berupa kayu bulat cenderung diberi harga yang rendah, sehingga sebagian besar atau seluruh keuntungan ditarik di segmen industrinya. Keadaan ini kurang memberi insentif kepada orang, khususnya petani dengan lahan sempit, untuk menanam hutan. Harga kayu bulat yang terjadi tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya karena terdistorsi kebawah. Dalam bahasa ekonomi, harga kayu bulat yang terjadi bukanlah harga yang kompetitif dan oleh karena itu dikatakan ada inefisiensi. Akibatnya, peluang mendapatkan manfaat dari budidaya hutan hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal kuat sehingga dia mampu membangun hutan tanaman dan industri pengolahannya sekaligus. Hal ini konsisten dengan kebijakan kehutanan yang cenderung bias kepada skala besar.

Nilai tambah oleh industri pengolahan dapat terjadi bila industri yang bersangkutan efisien. Inilah kebenaran lain tentang penciptaan nilai tambah. Industri pengolah kita umumnya kurang efisien, sehingga kalah bersaing dalam memperoleh bahan baku. Larangan ekspor bahan mentah dimaksudkan untuk mencegah mengalirnya bahan baku kepada industri pengolah yang menjadi pesaing. Tetapi jangan lupa bahwa larangan ekspor tersebut juga mempunyai efek menekan harga domestik juga. Seperti sebelumnya, keadaan ini kurang memberi

insentif bagi produsen kayu bulat dan bahan mentah lainnya, seperti rotan misalnya. Jadi, mengalihkan beban inefisiensi industri pengolahan ke sektor bahan baku tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya akan menyebarkan masalah.

Pemilik industri yang terintegrasi secara vertikal dengan bisnis bahan baku tidak banyak menghadapi masalah, tetapi industri pengolahan yang tidak terintegrasi secara vertikal dengan bisnis bahan bakunya, seperti rotan, menghadapi problem yang sangat serius. Karena harga rotan mentah terlalu rendah, maka para petani rotan menjadi enggan untuk memproduksi rotan. Karena tidak ada yang memproduksi rotan mentah sebagai bahan baku, maka industri pengolah rotan di tingkat yang lebih hilir akan mati juga pada akhirnya. Inginnya mendapatkan nilai tambah, tetapi kematian bersama yang didapat.

Dalam kasus industri pengolahan kayu yang terintegrasi secara vertikal dengan penyediaan bahan baku malah mendapat celah yang sangat menguntungkan. Pemilik industri dapat menambah kapasitas industrinya sehingga bahan baku yang ada tidak mencukupi. Tindakan berikutnya adalah dia mengadu kepada pemerintah bahwa industrinya kekurangan bahan baku dan di pasar juga tidak tersedia. Jalan satu-satunya adalah meminta tambahan areal untuk membangun HTI sambil nyolong tegakan hutan alam yang masih tersisa. Mudah ditebak bahwa akan terjadi penumpukan penguasaan lahan di satu dua tangan. Inilah jalan tol menuju revolusi sosial.

6. **Tanya:** Apa sebabnya industri pengolahan kita kalah efisien sehingga kalah bersaing dengan industri pengolahan dari negara lain?

Answer: Tentu tidak semua industri pengolahan kita kalah efisien, ada beberapa jenis industri yang sudah sangat efisien dan oleh karenanya kompetitif. Ada banyak faktor yang menyebabkan industri pengolahan kita menjadi kurang efisien. Transportasi jelas salah satu faktor utama. Jalan pantura Jawa yang merupakan urat nadi utama perekonomian mulus hanya di seputar lebaran saja. Jalan lintas Sumatera, lintas Kalimantan, atau lintas Sulawesi pasti lebih buruk dari jalan pantura Jawa itu. Belum lagi dengan banyaknya kutipan sepanjang jalan tersebut.

Masih ada beberapa komponen biaya lain yang kurang menguntungkan industri pengolahan kita, seperti biaya penanganan di pelabuhan yang lebih tinggi, tingkat suku bunga yang secara umum lebih tinggi

dari tingkat suku bunga negara pesaing, dan tarif listrik yang kemungkinan juga lebih tinggi dibandingkan tarif listrik di negara pesaing.

6.5 Pertambangan

1. **Tanya:** Kata orang yang banyak dikutip dan disampaikan di media masa, negara kita itu kaya dengan sumberdaya alam, seperti bahan tambang. Tanya sering mendengar juga bahwa pertambangan kita itu dijual dengan harga yang sangat murah. Sementara itu, industri pertambangan sering meninggalkan kerusakan lingkungan yang permanen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang bermukim dekat dengan lokasi pertambangan tersebut. Tetapi di lain pihak, rasanya hingga sejauh ini kita tidak mungkin menghindari pertambangan tersebut karena kita memang memerlukannya, baik bahan tambangnya itu maupun hasil dari bahan tambang tersebut. Lha pemanfaatan kekayaan alam yang berupa sumberdaya tambang itu bagaimana pak De?

Answer: Benarkah negara kita kaya sumberdaya alam? Rasanya Indonesia bukanlah negara yang kaya sumberdaya alam bila dihitung per kapita. Pak De akan membandingkan kekayaan per orang Indonesia dan kekayaan per orang negara lain (lihat Tabel 6.4). Kekayaan sumberdaya alam per kapita antara orang Indonesia dan orang Israel kurang lebih sama, sekitar US\$ 5.000.¹ Orang Cina sedikit dibawah orang Indonesia. Pasti sulit kamu membayangkan bahwa kekayaan sumberdaya alam orang Indonesia ternyata tidak berbeda jauh dengan kekayaan sumberdaya alam orang Israel yang negaranya tampak gersang itu. Sedikit terkejut kan? Nah kalau ingin tahu orang yang kaya sumberdaya alam, maka berikut ini beberapa diantaranya Australia US\$ 39.979, Kanada US\$ 36.924, Selandia Baru US\$ 52.979, dan Federasi Rusia US\$ 31.317.

Jadi, selama ini sebagian besar rakyat Indonesia ini salah duga. Merasa diri kaya dengan sumberdaya alam, padahal sebenarnya tidak kaya-kaya amat. Bahkan dalam hal minyak yang sudah jelas harus impor masih juga merasa diri kaya. Sikap ini merupakan jalan bebas hambatan menuju kehancuran total. Jika kamu masih ingat Dutch

¹Natural capital is sum of Crop, Pasture Land, Timber, Non Timber Forest, Protected Areas, Oil, Natural Gas, Coal, and Minerals.

Diseases sebagai salah satu bentuk kutukan sumberdaya alam, maka merasa kaya padahal miskin ini bolehlah disebut sebagai Indonesian Diseases yang tidak kalah berbahayanya dalam mengundang kutukan sumberdaya alam.

Tabel 6.4: Kekayaan Per Kapita Beberapa Negara Tahun 2005

Economy	Populasi (Juta)	Harta Total	Kapital		
			Intangible	Buatan	Alam
AS	296,4	734.195	627.246	100.075	13.822
Australia	20,3	518.805	386.381	111.671	39.979
Brazil	186,4	79.142	54.569	11.330	14.978
Cina	1.304,5	19.234	8.921	6.017	4.013
Fed. Rusia	143,1	73.166	24.364	17.712	31.317
India	1.094,6	10.539	5.961	1.980	2.704
Indonesia	220,6	19.769	11.398	3.968	4.926
Inggris	60,2	662.624	578.791	84.861	6.263
Islandia	0,3	902.960	799.123	137.470	12.363
Israel	6,9	327.471	278.892	47.232	4.843
Kanada	32,3	538.697	414.938	89.811	36.924
PNG	5,9	8.989	-1.584	2.547	8.569
Pilipina	83,1	19.698	14.076	2.745	3.468
Selandia Baru	4,1	414.113	306.124	76.281	52.979

Sumber: The World Bank (data.worldbank.org/sites/)

2. **Tanya:** Lha kalau negara kita ini sebenarnya tidak termasuk yang kaya sumberdaya alam mengapa kutukan sumberdaya alam itu tampaknya juga ditimpakan kepada bangsa kita?

Answer: Lho benar-benar kaya saja dapat terkutuk, apalagi yang hanya merasa dan berlagak kaya malah akan dapat kutukan ganda. Miskin saja sudah suatu kutukan tersendiri. Sudah miskin berlagak kaya pula. Nah ini mengundang kutukan yang lain, yakni kutukan terhadap kesombongan dan perilaku tidak tahu diri.

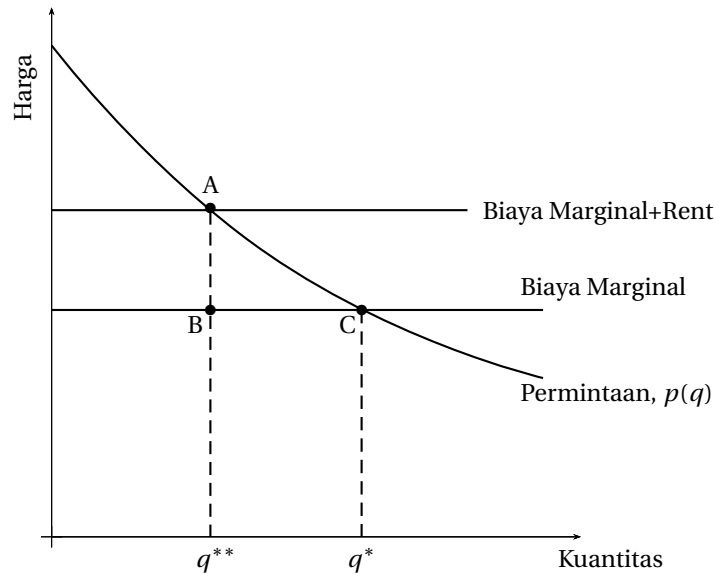
3. **Tanya:** Kok selama ini kita dapat begitu terlena ya Pak De? Baru sekarang ini Tanya mendapat gambaran yang jelas tentang keadaan kita yang sebenarnya. Baiklah pak De, berapapun kekayaan alam yang kita miliki adalah kewajiban kita untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Lha bagaimana sebaiknya sumberdaya alam yang tidak ba-

nyak tersebut kita kelola? Kita fokus pada pertambangan saja pak De, karena sedang marak saat ini.

Answer: Baik, kita konsentrasi pada ekstraksinya saja ya. Soal bagaimana menggunakan pendapatan dari ekstraksi tersebut tidak kita bahas sekarang. Sumberdaya alam takterbarukan bersifat terbatas dalam jumlah dan tidak dapat diproduksi kembali dalam horison perencanaan manusia. Pemanfaatan menurut waktu berimplikasi bahwa ekstraksi dan konsumsi satu unit hari ini melibatkan suatu biaya kesempatan, yakni nilai yang mungkin diperoleh di waktu yang akan datang (Fisher, 1981). Inilah yang membedakan sumberdaya alam takterbarukan dari barang biasa. Biaya kesempatan tersebut harus dipertimbangkan dalam pengalokasiannya dari waktu ke waktu.

Untuk barang biasa yang dapat diproduksi kembali, kaidah alokasi kompetitif yang lazim digunakan adalah menyamakan biaya marginal dengan harga. Untuk sumberdaya alam takterbarukan, ada faktor lain yang harus dimasukkan dalam persamaan, yakni biaya kesempatan tadi. Pernyataan lengkapnya menjadi harga komoditi sumberdaya alam sama dengan biaya marginal ditambah biaya kesempatan. Ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi ekstraksi optimal. Implikasi dari dimasukkannya biaya kesempatan ini adalah kuantitas yang diproduksi menjadi lebih kecil dibandingkan jika seandainya dia dapat diproduksi kembali. Tingkat output yang ditentukan berdasarkan kaidah harga atau penerimaan marginal sama dengan biaya marginal merupakan batas atas dari produksi. Semakin melimpah sumberdaya alam, semakin kecil biaya kesempatan pemanfaatan sumberdaya alam. Bahkan dalam keadaan sumberdaya alam sangat melimpah, biaya kesempatan mendekati nol sehingga ekstraksi sumberdaya alam mengikuti kaidah harga atau penerimaan marginal sama dengan biaya marginal.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.4, ekstraksi optimal tanpa memperhitungkan biaya kesempatan adalah pada q^* , sedangkan ekstraksi optimal dengan mempertimbangkan biaya kesempatan adalah q^{**} . Jarak antara titik A dan titik B mencerminkan perbedaan antara harga dan biaya marginal yang disebut dengan biaya kesempatan. Apa yang ditampilkan pada Gambar 6.4 merupakan contoh kasus ekstraksi dengan teknologi *constant return to scale* dalam struktur pasar yang monopoly. Ekstraksi mungkin saja dilakukan dengan teknologi yang *decreasing return to scale* dengan struktur pasar bersaing sem-

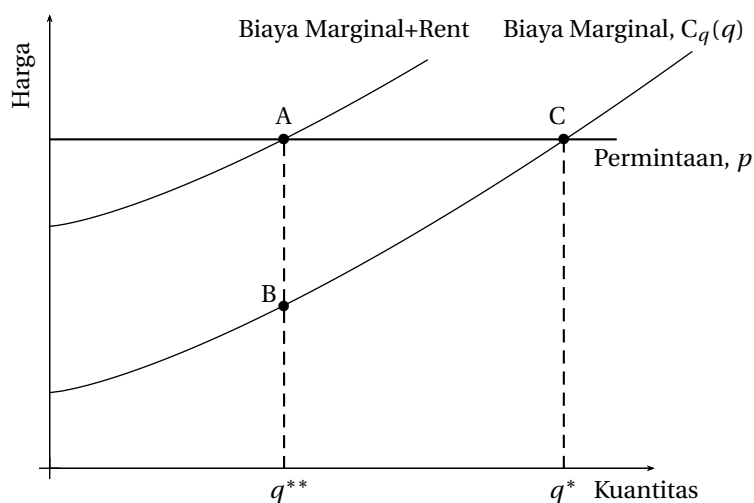


Gambar 6.4: Ekstraksi Sumberdaya Alam takterbarukan dengan *Teknologi Constant Return to Scale*

purna. Untuk kasus kedua ini dapat diilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 6.5. Perhatikan bahwa sekarang harga tidak lagi sebagai fungsi dari q , sebaliknya biaya marginal menjadi tergantung pada q .² Keterangan lain dapat mengikuti kasus sebelumnya. Masih ada pertanyaan, apakah ekstraksi optimal konstan atau beragam dari waktu ke waktu? Demikian pula apakah biaya kesempatan konstan atau beragam dari waktu ke waktu? Kita akan segera menjawab pertanyaan yang kedua ini.

Perilaku biaya kesempatan dari waktu ke waktu merupakan syarat keharusan kedua bagi ekstraksi yang optimal. Dalam literatur, biaya kesempatan mempunyai beberapa nama lain, tidak sampai 99 nama, yang perlu diketahui oleh siapapun yang tertarik pada ekonomi sum-

²Fungsi biaya lazim dituliskan dalam bentuk $C(q, \mathbf{w})$, dimana q adalah output dan \mathbf{w} adalah vektor harga input. Biaya marginal merupakan turunan dari fungsi biaya tersebut terhadap output dan lazim dituliskan dalam bentuk $\frac{dC}{dq} = C_q(q, \mathbf{w})$ atau secara lebih sederhana $C_q(q)$.



Gambar 6.5: Ekstraksi Sumberdaya Alam takterbarukan dengan Teknologi *Decreasing Return to Scale*

berdaya alam. Beberapa nama tersebut adalah royalti, rent, *user cost*, harga netto, dan laba marginal. Satu nama lebih banyak digunakan untuk isu tertentu, sedangkan untuk isu lain nama lain yang lebih dipilih. Namun, nama manapun yang digunakan, maknanya tetap sama.

Memahami perilaku biaya kesempatan dari waktu ke waktu akan lebih mudah dilakukan dengan melihat suatu contoh. Berangkat dari contoh sederhana ini, pembaca dapat mengembangkan sendiri untuk horison waktu yang lebih panjang. Misalnya ada satu kilo emas tersimpan didalam tanah. Jika satu kilo emas tersebut diekstraksi hari ini, maka berapa manfaat sosial nettonya? Mudah ditebak bahwa manfaat tersebut sebesar selisih antara harga dan biaya ekstraksinya, yang disebut rent. Emas yang sama juga dapat menghasilkan rent bila diekstraksi setahun kemudian. Atau mungkin malah diekstraksi dua tahun kemudian. Pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk mengekstraksi emas tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita lihat contoh sederhana numerik. Misalnya ada cadangan batu bara dalam bumi kita sebanyak

100 unit ($S_0 = 100$) dan biaya ekstraksi adalah $C(q(t)) = \frac{1}{2}q(t)^2$. Struktur pasar adalah bersaing sempurna dengan harga per unit batu bara adalah konstan sebesar 60 ($p(t) = 60$). Disini kita menggunakan kasus seperti diperlihatkan pada Gambar 6.5. Diasumsikan bahwa ekstraksi hanya dilakukan dalam dua periode, yakni $t = 0, 1$, dan tingkat diskon adalah $r = 0,10$. Pertanyaannya adalah bagaimana alokasi ekstraksi dalam dua periode itu dilakukan untuk mencapai manfaat sosial netto tertinggi?

Batas kuantitas ekstraksi adalah q^{**} . Manfaat netto yang diperoleh diwakili oleh daerah yang dibatasi oleh kurva biaya marginal di bagian bawah dan harga di bagian atas yang berada antara $q = 0$ dan $q = q^{**}$. Karena biaya ekstraksi adalah $C(q(t)) = \frac{1}{2}q(t)^2$, maka biaya marginalnya adalah $C'(q) = q$. Kita dapat menuliskan daerah ini dengan lebih pekat dalam bentuk:

$$\int_0^{q(0)} (60 - q) dq \quad (6.1)$$

untuk ekstraksi periode pertama dan

$$\int_0^{q(1)} (60 - q) dq \quad (6.2)$$

untuk periode kedua. Manfaat periode kedua datang satu tahun lebih lambat dari manfaat periode pertama. Agar keduanya setara maka dapat ditempuh salah satu dari dua cara, yakni manfaat periode kedua harus dikalikan dengan $\frac{1}{1+r}$ atau manfaat periode pertama dikalikan dengan $1+r$. Kita akan menggunakan cara pertama, karena cara ini yang lebih banyak digunakan.

4. **Tanya:** Tunggu tunggu pak De. Kok makin rumit. Apa tidak mungkin simbol matematik seperti integral itu dihilangkan? Kesannya itu angker dan ngedap-ngedapi gitu lho pak De.

Answer: Begini Tanya, pak De sengaja menggunakan simbol matematik seperti itu dengan tujuan untuk menguji niatmu dan juga niat teman-temanmu untuk mempersoalkan pengelolaan kekayaan alam kita. Kalau kamu ingin bangsamu ini berdaulat, maka tidak mungkin ada jalan lain kecuali kamu harus bekerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya setelah menguasai perhitungan yang sangat njlimet dan detail kamu dapat menghadapi pihak yang kamu curigai menggarong kekayaan alam kita. Banyak orang

mengatakan bahwa kekayaan alam kita dihargai terlalu murah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghitung untuk mendapatkan harga yang pantas dan adil.

Alasan lainnya adalah untuk membuat pak Likmu yang bekerja di sektor pertambangan itu bangga - seolah-olah pekerjaannya itu rumit karena banyak menggunakan matematika. Pak Likmu itu sering minder, karena prestasi sekolahnya memang sangat pas-pasan. Mudah-mudahan dengan memodelkan ekstraksi tambang secara matematik begini pak Likmu cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa prestasi sekolahnya dahulu pas-pasan karena pelajarannya memang sangat sulit. Sekali-sekali kita memberi kesempatan orang minder untuk sedikit berani narsis.

5. **Tanya:** Begini pak De, Tanya mendapat pelajaran seperti itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi, banyak yang sudah lupa. Apalagi cara menyampaikan pelajarannya kurang inspiratif.

Answer: Wong kamu sendiri yang gagal memahami kok menyalahkan orang lain. Apapun alasanmu, pak De pasti lebih dahulu mendapatkan pelajaran itu. Kalau pak De belum lupa, maka tidak pantas kamu sudah lupa. Lha kalau pak De yang lupa tetapi kamu yang masih ingat maka hal seperti itu wajar dan dapat diterima.

6. **Tanya:** Bukankah itu argumen yang mau menangnya sendiri pak De? Silahkan pak De melanjutkan perhitungan soal tambang tadi, Tanya akan menyimak dengan khusuk.

Answer: Problem yang sedang kita hadapi adalah memilih $q(0)$ dan $q(1)$ untuk memaksimalkan manfaat sosial netto dari deposit batu bara sebesar 100 unit dalam dua periode ekstraksi. Problem ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \max_{\{q(0), q(1)\}} \int_0^{q(0)} (60 - q) dq + \frac{1}{1 + 0,10} \int_0^{q(1)} (60 - q) dq \\ \text{s.t. } q(0) + q(1) = 100 \end{aligned} \quad (6.3)$$

Ini merupakan problem maksimisasi dengan kendala. Problem ini dapat dipecahkan dengan sangat mudah dengan menggunakan teknik Lagrangian sebagai berikut:

$$\mathcal{L} = \int_0^{q(0)} (60 - q) dq + \frac{1}{1 + 0,10} \int_0^{q(1)} (60 - q) dq +$$

$$\lambda(100 - q(0) - q(1)) \quad (6.4)$$

dimana λ adalah pengganda Lagrange. Langkah selanjutnya adalah membuat derivasi dari fungsi Lagrange tersebut terhadap $q(0)$, $q(1)$, dan λ , lalu menyamakannya dengan nol. Hasilnya adalah sebagai berikut:

$$q(0) : \quad (60 - q(0)) - \lambda = 0 \quad (6.5)$$

$$q(1) : \quad \left(\frac{1}{1+0,10}\right)(60 - q(1)) - \lambda = 0 \quad (6.6)$$

$$\lambda : \quad 100 - q(0) - q(1) = 0 \quad (6.7)$$

Solusi bagi $q(0)$, $q(1)$, dan λ menggunakan ketiga persamaan di atas adalah $q(0) = 50,48$, $q(1) = 49,52$, dan $\lambda = 9,52$. Rent di periode kedua adalah 10,47, tetapi setelah dikalikan dengan faktor diskon $\frac{1}{1,1}$ akan diperoleh nilai sebesar 9,52. Dengan kata lain, nilai kini dari rent adalah konstan atau tanpa didiskon nilai rent akan tumbuh sebesar tingkat diskon tersebut. Inilah hasil yang disampaikan oleh Hotelling (1931). Menurut Fisher (1981), temuan tersebut telah disampaikan jauh sebelumnya oleh Gray (1913) yang kemudian diperbaiki di tahun berikutnya (Gray, 1914).

Mari kita memberi tafsiran tentang pengganda Lagrange, λ . Pengganda ini merupakan harga bayangan, yakni perubahan nilai optimal dari fungsi tujuan yang disebabkan oleh perubahan kecil dalam kendala. Kendala dalam problem di atas adalah cadangan awal baru bara, yakni S_0 . Jika cadangan awal lebih tinggi (rendah) sebesar satu unit, maka fungsi tujuan akan lebih tinggi (rendah) sebesar $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial S_0} = \lambda$. Namun perlu diingat bahwa pengganda tersebut hanya sekedar biaya kesempatan dari memproduksi sumberdaya alam sekarang, yakni *rent*.

Untuk mengembangkan intuisi dan imajinasi lebih jauh, sekarang bayangkan bahwa seseorang memiliki aset berupa emas batangan sebanyak satu kilogram. Kita tahu emas batangan tidak mengalami penyusutan maupun pertumbuhan. Keuntungan (kerugian) dari memiliki emas batangan hanya berasal dari kenaikan (penurunan) harga emas tersebut. Kapan orang tersebut harus tetap mempertahankan aset dalam bentuk emas batangan atau menjualnya untuk kemudian menginvestasikan hasil penjualannya untuk mengakuisisi aset dalam bentuk yang lain? Jika harga emas batangan naik sebesar 5% per tahun sedangkan ada aset lain yang dapat memberi *return* sebesar 7%

per tahun, maka tindakan apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Rasionalitas efisiensi mengajarkan bahwa pemilik emas seharusnya menjual emas batangan simpanannya dan mengakuisisi aset lain yang memberikan *return* sebesar 7% tersebut. Bila proses pertukaran aset ini berjalan lancar tanpa hambatan, maka keseimbangan yang efisien akan menghasilkan kondisi bahwa *return* dari semua aset akan sama.

Dari teori kapital, kita mengenal persamaan *arbitrage* untuk suatu aset yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$\frac{Y_t}{p(t)} \geq r - \frac{\dot{p}}{p(t)} \quad (6.8)$$

dimana Y_t adalah *yield* dari aset yang bersangkutan pada waktu t , $p(t)$ adalah harga aset pada waktu t , dan r adalah tingkat *return* atas aset lain (sering diacu sebagai aset *numeraire*). Jika \dot{p} adalah positif (negatif), maka aset mengalami apresiasi (depresiasi) nilai. Persamaan *arbitrage*, yang juga dikenal sebagai “persamaan *yield* jangka pendek,” memberi syarat untuk mempertahankan aset: persamaan ini menyatakan bahwa *yield* harus paling kecil sama dengan *return* dari aset *numeraire* dikurangi peningkatan nilai dari aset atau ditambah depresiasi dari nilai aset. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka lebih baik menjual aset yang bersangkutan dan menginvestasikannya di aset *numeraire*.

7. **Tanya:** Sebentar pak De. Mengapa pak De menulis p saja harus diberi titik di atasnya. Apa supaya kelihatan indah atau lebih berwibawa begitu pak De?

Answer: Ha ha ha ha ... tanda titik di atas huruf p itu bukan seperti lipstik atau sandangan yang lain agar terlihat cantik, berbibawa, atau sakral. Makna dari \dot{p} adalah perubahan dari p bila waktu berubah sebesar satu unit. Ada yang menuliskan dengan $p'(t)$ atau yang lebih panjang $\frac{\partial p(t)}{\partial t}$. Itu hanya selera orang menuliskannya saja. Kita teruskan ya.

Cadangan sumberdaya alam takterbarukan adalah steril. Ini berarti bahwa sumberdaya alam takterbarukan tidak menunjukkan pertumbuhan intrinsik apapun dan oleh karenanya tidak menghasilkan *yield*. Dengan kata lain, $\frac{Y_t}{p(t)}$ sama dengan nol. Jika Ekspresi (6.8) ditata

ulang, maka akan diperoleh:

$$\frac{\dot{p}}{p(t)} \geq r \quad (6.9)$$

Jika ekspresi ini tidak terpenuhi, maka menjual sumberdaya alam dan menginvestasikan dalam aset *numeraire* merupakan pilihan yang lebih baik. Dalam keseimbangan kompetitif Ekspresi (6.9) berlaku dengan tanda sama dengan. Sekali lagi, ini merupakan kaidah Hotelling yang telah disinggung sebelumnya yang menyatakan bahwa nilai sumberdaya alam takterbarukan harus meningkat dengan laju yang sama dengan tingkat *return* dari aset *numeraire*. Tetapi, kaidah ini berlaku dalam kondisi tertentu (Levhari & Liviatan, 1977; Farzin, 1992). Kaidah Hotelling tidak terlepas dari asumsi yang digunakan oleh Hotelling, yakni stok tidak berpengaruh pada biaya dan stok dihabiskan hingga nol pada akhir masa ekstraksi. Apa yang akan terjadi jika stok yang tersedia sangat melimpah dan teknologi produksi yang digunakan bersifat *decreasing return to scale*? Diantara harga batu bara di pasar dan rent, mana yang lebih mencerminkan kelangkaan? Semakin memahami sesuatu, semakin banyak pula pertanyaan yang dapat dibuat tentang sesuatu tersebut. Orang yang tidak mampu membuat pertanyaan dari apa yang telah dipelajarinya, maka kemungkinan besar orang tersebut belum paham yang telah dipelajarinya. Bagaimana Tanya, apa isu ekstraksi sumberdaya tambang ini masih perlu dilanjutkan?

6.5.1 Model Dasar

1. **Tanya:** Harus pak De. Meskipun Tanya belum sepenuhnya dapat menangkap penjelasan pak De saat ini, tetapi paling tidak pak De sudah memberi petunjuk tentang apa yang harus dipelajari lebih mendalam bagi yang berminat. Terus terang saja, teman Tanya sebenarnya banyak yang menjadi aktivis yang bergerak dalam isu pertambangan ini. Teriakan mereka seringkali sangat kencang tetapi tampaknya belum ditunjang oleh pemahaman tentang ilmunya secara memadai.

Answer: Teori ekonomi sumberdaya alam tidak terbarukan pertama kali diperkenalkan oleh Hotelling (1931). Levhari & Liviatan (1977) melakukan kajian apakah ekstraksi sumberdaya alam akan dilakukan hingga benar-benar terkuras habis atau tidak. Masalah utama dari

problem pemanfaatan sumberdaya alam minerba adalah menentukan ekstraksi optimal. Problem dasar Hotelling dapat dimodifikasi lebih lanjut ke berbagai arah, seperti menambah efek kumulatif pada biaya (Levhari & Liviatan, 1977; Livernois & Martin, 2001), harga komoditas sumberdaya yang stokastik (Pindyck, 1981), ketidakpastian cadangan (Gilbert, 1979; Epaulard & Pommeret, 2003), ketidakpastian cadangan dan biaya (Hoel, 1978), perubahan teknologi (Rausser, 1974), dan ketidaksempurnaan pasar (Khalatbari, 1977; Stiglitz & Dasgupta, 1981). Kamu dapat saja ikut berkontribusi dengan mengembangkan ke arah yang lain lagi.

Kaidah Hotelling

Bagian ini kita akan mempelajari bagaimana kaidah Hotelling dilahirkan dengan menggunakan model yang mirip dengan model yang dianalisis oleh Hotelling (1931). Hanya saja, berbeda dengan Hotelling yang menggunakan teknik calculus of variation, uraian dalam bagian ini akan menggunakan teknik optimal control theory yang dikembangkan belakangan. Kedua teknik akan bertemu pada persamaan Euler yang dihasilkan.

Misalnya ada cadangan minyak dalam perut bumi pada periode t sebesar $S(t)$. Ekstraksi pada periode t adalah sebesar $q(t)$. Ekstraksi ini menghasilkan nilai sebesar $V(q(t))$ dan menimbulkan biaya sebesar $C(q(t))$. Seperti sebelumnya, tingkat diskon adalah r , yang dianggap konstan selama periode ekstraksi. Perubahan stok minyak dalam tanah dapat dinyatakan sebagai $\dot{S} = -q(t)$. Problem yang dihadapi oleh pemilik sumberdaya adalah memaksimumkan nilai kini dari manfaat bersih eksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya:

$$\max_{\{q(t), S(t)\}} \int_{t=0}^T e^{-rt} [V(q(t)) - C(q(t))] dt$$

s.t. $\dot{S} = -q(t)$, dan kondisi transversalitas

Current Hamiltonian dari problem ini adalah sebagai berikut:

$$H = [V(q(t)) - C(q(t))] - \lambda(t)q(t) \quad (6.10)$$

Mendiferensiasi terhadap $q(t)$ dan $S(t)$ lalu menyamakan dengan nol akan diperoleh:

$$q(t): (V_q - C_q) - \lambda(t) = 0 \quad (6.11)$$

$$S(t): -\frac{\partial H}{\partial S} + r\lambda(t) = \dot{\lambda} \quad (6.12)$$

Dua persamaan ini bersama persamaan perubahan stok, $\dot{S} = -q(t)$, akan menentukan solusi terhadap problem yang dihadapi. Dari Ekspresi (6.11) akan diperoleh formula yang sudah sangat dikenal yang merupakan syarat pertama dari ekstraksi optimal:

$$V_q(q(t)) - C_q(q(t)) = \lambda(t) \quad (6.13)$$

Persamaan ini berlaku untuk semua t sehingga kita mempunyai

$$V_q(q(t+1)) - C_q(q(t+1)) = \lambda(t+1) \quad (6.14)$$

Dari Ekspresi (6.12) akan diperoleh syarat kedua dari ekstraksi optimal, yakni rent tumbuh dengan laju sebesar tingkat diskon:

$$\lambda(t) = \lambda(0)e^{rt} \quad (6.15)$$

Dari tiga Persamaan (6.13), (6.14), dan (6.15) akan diperoleh

$$\frac{V_q(q(t+1)) - C_q(q(t+1))}{V_q(q(t)) - C_q(q(t))} = e^r \quad (6.16)$$

Untuk kasus $V(q(t)) = p(t)q(t)$, persamaan terakhir ini menjadi

$$\frac{p_{t+1} - C_q(q(t+1))}{p(t) - C_q(q(t))} = e^r \quad (6.17)$$

Ekspresi ini memperlihatkan peran penting harga dan tingkat diskon dalam mempengaruhi tingkat ekstraksi optimal. Jika harga adalah konstan, maka agar Ekspresi (6.17) berlaku kuantitas ekstraksi harus semakin menurun dari waktu ke waktu. Ingat bahwa $C''(q(t)) > 0$, sehingga agar marginal profit tahun depan sama dengan e^r kali marginal profit tahun ini maka biaya marginal tahun depan harus lebih kecil dari biaya marginal tahun ini. Artinya, produksi tahun depan harus lebih kecil dari produksi tahun ini.

Contoh 1 (Kaidah Hotelling). Tersedia stok minerba sebesar 150 unit volume. Harga per unit volume dari minyak yang telah diekstraksi adalah satu unit uang. Struktur pasar adalah bersaing sempurna. Biaya produksi adalah $C(q(t)) = 0,01q(t)^2$. Jangka waktu eksploitasi yang diberikan adalah 10 tahun. Tingkat diskon yang berlaku adalah 5%. Bagaimana ekstraksi yang optimal dan bagaimana perkembangan dari rent? Ini adalah problem standar yang paling sederhana.

Dalam bahasa optimal control, problem diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_0^{10} e^{-rt} (1 \times q(t) - 0,01q(t)^2) dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{S} = -q(t) \\ & T = 10 \quad \text{dan} \quad S(0) = 150 \end{aligned}$$

Problem diatas tidak menyatakan bagaimana dengan kondisi $S(10)$, apakah $S(10) \geq 0$ atau $S(10) = 0$. Keduanya dapat menghasilkan lintasan *rent* yang berbeda, meskipun keduanya menghasilkan laju peningkatan *rent* yang sama. Analisis dalam tulisan ini mengikuti tradisi Hotelling yang mengasumsikan bahwa semua stok akan diekstraksi hingga habis, dengan kata lain $S(10) = 0$.

Current Hamiltonian dari problem diatas adalah

$$\mathcal{H} = q(t) - 0,01q(t)^2 - \lambda(t)q(t) \quad (6.18)$$

Kondisi yang harus terpenuhi untuk $q(t)$, $S(t)$, dan $\lambda(t)$ yang positif adalah

$$q(t): \quad [1 - 0,02q(t) - \lambda(t)] = 0 \quad (6.19)$$

$$S(t): \quad 0,05\lambda(t) = \dot{\lambda} \quad (6.20)$$

Solusi terhadap Ekspresi (6.20) adalah

$$\lambda(t) = \lambda_0 e^{0,05t} \quad (6.21)$$

Untuk menentukan λ_0 yang definitif, kita harus menggunakan syarat lain yang harus dipenuhi. Dengan menggunakan Persamaan (6.21), Persamaan (6.19) dapat ditulis sebagai:

$$q(t) = 50(1 - \lambda(t)) = 50(1 - \lambda_0 e^{0,05t}) \quad (6.22)$$

Karena seluruh stok harus terekstraksi hingga habis, maka kondisi berikut harus terpenuhi

$$\int_0^{10} 50(1 - \lambda_0 e^{0,05t}) dt = 150 \quad (6.23)$$

Pemecahan persamaan ini akan menghasilkan $\lambda_0 = 0,5395$. Dengan demikian secara definitif, Persamaan (6.21) dan Persamaan (6.22) menjadi

$$\lambda(t) = 0,5395e^{0,05t} \quad (6.24)$$

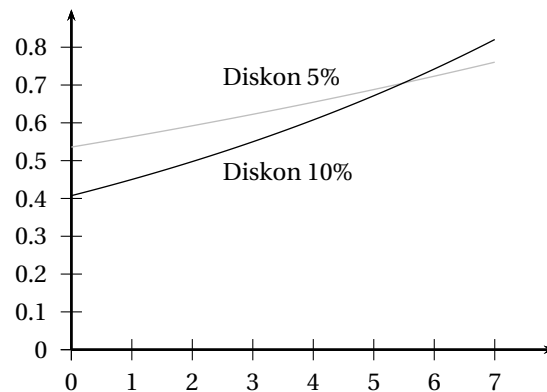
dan

$$q(t) = 50(1 - 0,5395e^{0,05t}) \quad (6.25)$$

Karena perubahan stok adalah $\dot{S} = -q(t)$, maka dengan mudah kita dapat memperoleh persamaan untuk stok sebagai berikut:

$$S(t) = -389,523 + 539,523e^{0,05t} - 50t \quad (6.26)$$

Gambar 6.6 memperlihatkan perkembangan dari rent berdasarkan persamaan terakhir ini. Disertakan juga perkembangan rent dengan tingkat diskon 10%. Terlihat bahwa kurva rent untuk tingkat diskon 10% lebih curam dari kurva rent untuk tingkat diskon 5%. Hal ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Implikasi dari hal ini terhadap sekuen ekstraksi seharusnya sudah dapat diterka. Untuk tingkat diskon 10%, laju ekstraksi di awal lebih tinggi dan laju ekstraksi di akhir lebih rendah dibandingkan laju ekstraksi dengan tingkat diskon 5%. Apa yang terjadi bila tingkat diskon adalah nol persen?

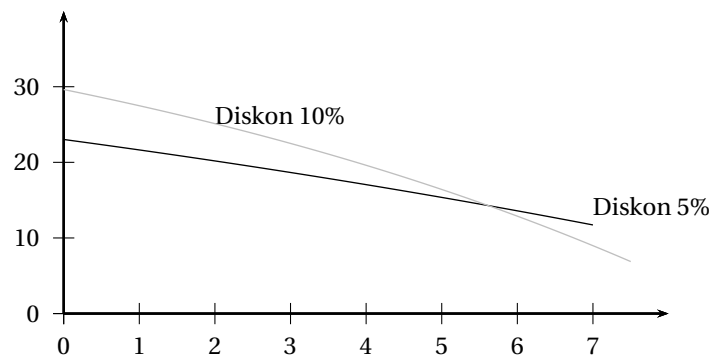


Gambar 6.6: Perkembangan Rent Menurut Waktu

Sebagai biaya kesempatan kelangkaan sumberdaya, tentulah semakin melimpah stok yang tersedia semakin rendah royaltinya. Bila stok

yang tersedia sangat melimpah, mungkin tidak ada rent yang bernilai positif yang memenuhi Persamaan (6.19). Tetapi, rent negatif juga tidak masuk akal, karena hal ini berarti bahwa biaya marginal ekstraksi lebih tinggi dari harga komoditinya. Oleh karena itu, dalam keadaan stok sangat melimpah, penambang membatasi diri dengan berproduksi ketika biaya marginal sama dengan harga komoditi dengan implikasi rent dari tambang bernilai nol. Untuk membuktikan hal ini, pembaca dapat mencoba contoh diatas dengan $S_0 = 750$ misalnya. Stok yang berlimpah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kaidah Hotelling tidak berlaku.

Gambar 6.7 memperlihatkan sekuen produksi untuk tingkat diskon 10% dan 5%. Dengan tingkat diskon yang lebih tinggi, kurva laju ekstraksi sumberdaya alam tampak lebih curam. Artinya, ekstraksi berlangsung lebih cepat di awal periode dan berlangsung lebih lambat di akhir periode dibandingkan dengan ekstraksi dengan tingkat diskon yang lebih rendah.



Gambar 6.7: Perkembangan Output Menurut Waktu

Penyimpangan dari Kaidah Hotelling

Perbedaan pokok bagian ini dengan bagian sebelumnya adalah masalahnya stok sumberdaya dalam biaya. Rasionale di balik asumsi ini

adalah bahwa ketika stok sumberdaya masih melimpah maka eksploitasinya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Dalam kasus pertambangan, menyusutnya stok memaksa penambang untuk menggali lebih dalam atau menjelajah ke tempat yang lebih jauh dan berat untuk memperoleh satu unit bahan tambang yang sama. Fungsi biaya terdiri dari dua argumen, $C(q(t), S(t))$, yakni produksi dan stok di setiap periode dengan sifat $C_q(\cdot) > 0$, $C_{qq}(\cdot) < 0$, $C_S(\cdot) < 0$, $C_{qS}(\cdot) = C_{Sq}(\cdot) < 0$.

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{t=0}^T e^{-rt} [V(q(t)) - C(q(t), S(t))] dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{S} = -q(t) \\ & S_0, T \text{ tertentu} \end{aligned}$$

Hamiltonian dari problem ini adalah sebagai berikut:

$$H = (V(q(t)) - C(q(t), S(t))) - \lambda(t)q(t) \quad (6.27)$$

Untuk nilai $q(t)$, $S(t)$, dan $\lambda(t)$ yang positif, kondisi yang harus dipenuhi adalah

$$q(t): \quad V_q(\cdot) - C_q(\cdot) - \lambda(t) = 0 \quad (6.28)$$

$$S_{t+1}: \quad C_S(\cdot) + r\lambda(t) = \dot{\lambda} \quad (6.29)$$

$$(6.30)$$

Untuk kasus $V(q(t)) = p(t)q(t)$, maka $V_q(\cdot) = p(t)$. Persamaan (6.28) dapat ditulis sebagai

$$p(t) - C_q(\cdot) = \lambda(t) \quad (6.31)$$

$$\dot{p} - C_{qq}(\cdot)\dot{q} - C_{qS}(\cdot)\dot{S} = \dot{\lambda} \quad (6.32)$$

sedangkan Persamaan (6.29) memberikan:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda(t)} = r + \frac{C_S}{\lambda(t)} \quad (6.33)$$

$$\frac{\dot{p} - C_{qq}(\cdot)\dot{q} - C_{qS}(\cdot)\dot{S}}{p(t) - C_q(\cdot)} = r + \frac{C_S}{p(t) - C_q(\cdot)} \quad (6.34)$$

Karena $C_S(\cdot) < 0$, Ekspresi (6.34) menyatakan bahwa laju perkembangan marginal profit kurang dari tingkat diskon sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Hotelling.

Contoh 2 (Penyimpangan Kaidah Hotelling). Tersedia stok minerba sebesar 1200 unit volume. Harga per unit volume dari minyak yang telah diekstraksi adalah satu unit uang. Struktur pasar adalah bersaing sempurna. Biaya produksi adalah $C(q(t)) = \frac{1}{2}q(t)^2/S(t)$. Jangka waktu eksploitasi yang diberikan adalah 10 tahun. Tingkat diskon yang berlaku adalah 5%. Bagaimana ekstraksi yang optimal dan bagaimana perkembangan dari rent? Perhatikan bahwa stok ikut menentukan biaya produksi. Ketika stok masih banyak, biaya produksi relatif rendah dan biaya produksi tersebut semakin meningkat seiring dengan berkurangnya stok.

$$\max_{\{q(t), S(t)\}} \int_{t=0}^T e^{-rt} \left[q(t) - \frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{S(t)} \right] dt$$

$$\text{s.t. } \begin{aligned} \dot{S} &= -q(t) \\ S_0 &= 150, \quad T = 10, \quad S(T) \text{ bebas} \end{aligned}$$

Untuk nilai $q(t)$, $S(t)$, dan $\lambda(t)$ yang positif, kondisi yang harus dipenuhi adalah

$$q(t): \quad 1 - \frac{q(t)}{S(t)} - \lambda(t) = 0 \quad (6.35)$$

$$S(t): \quad -\frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{S(t)^2} + 0,05\lambda(t) = \dot{\lambda} \quad (6.36)$$

$$\dot{S} = -q(t) \quad (6.37)$$

Dengan menggunakan Ekspresi (6.35) dan (6.36)

$$-\frac{1}{2}(1 - \lambda(t))^2 + r\lambda(t) = \dot{\lambda} \quad (6.38)$$

Solusi terhadap persamaan ini dengan kondisi $\lambda(10) = 0$ (kondisi akhir yang harus dipenuhi untuk kasus $S(T)$ adalah bebas) adalah

$$\lambda(t) = \frac{1,4499 \times 10^{16} e^{0,320156t} - 3,56252 \times 10^{17}}{1,0582 \times 10^{16} e^{0,320156t} - 4,8812 \times 10^{17}} \quad (6.39)$$

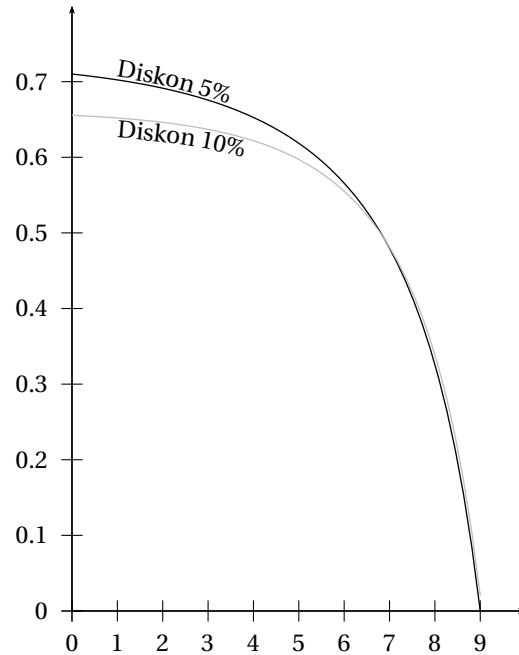
Substitusi Persamaan (6.37) dan (6.39) kedalam Persamaan (6.35) lalu melakukan penyusunan ulang akan diperoleh ekspresi sebagai berikut:

$$-\dot{S} = \left(1 - \frac{1,4499 \times 10^{16} e^{0,320156t} - 3,56252 \times 10^{17}}{1,0582 \times 10^{16} e^{0,320156t} - 4,8812 \times 10^{17}} \right) S(t) \quad (6.40)$$

yang solusinya adalah

$$S(t) = \frac{0,0737(46,1276 - e^{0,3202t})^2}{e^{0,2702t}} \quad (6.41)$$

Perkembangan rent dengan waktu diperlihat pada Gambar 6.8, sementara tingkat ekstraksi optimal diperlihatkan pada Gambar 6.9 dan Tabel 6.5. Segera dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat diskon yang digunakan maka semakin curam kurva ekstraksi optimal yang terbentuk. Apa yang akan terjadi jika tingkat diskon yang digunakan adalah nol?



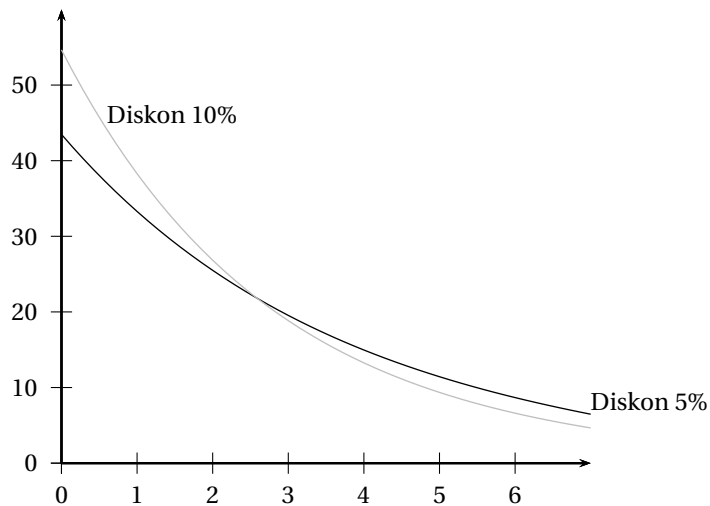
Gambar 6.8: Perkembangan Rent yang Menyimpang dari Kai-dah Hotelling

6.5.2 Model Lanjutan

1. **Tanya:** Mendengar uraian model dasar saja sudah banyak nyureng, apalagi pengembangan dari model dasar tersebut ya pak De? Tetapi realitas pasti jauh lebih rumit dari model yang paling lengkap sekalipun. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, kita harus bersedia bekerja dengan berbagai kerumitan itu. Tetapi mohon garis besarnya saja

Tabel 6.5: Rencana Optimal Ekstraksi Sumberdaya Tambang
Pada Tingkat Diskon 5%

t	Stok	Produksi	Revenue	Biaya		Biaya	
				Total	Profit	Marginal	Rent
0	150,000	43,485	43,485	6,303	37,182	0,290	0,710
1	106,515	31,699	31,699	4,717	26,982	0,298	0,702
2	74,816	23,088	23,088	3,563	19,526	0,309	0,691
3	51,728	16,775	16,775	2,720	14,055	0,324	0,676
4	34,953	12,136	12,136	2,107	10,029	0,347	0,653
5	22,817	8,702	8,702	1,660	7,043	0,381	0,619
6	14,115	6,127	6,127	1,330	4,797	0,434	0,566
7	7,987	4,154	4,154	1,080	3,074	0,520	0,480
8	3,833	2,584	2,584	0,871	1,713	0,674	0,326
9	1,250	1,250	1,250	0,625	0,625	1,000	0,000



Gambar 6.9: Perkembangan Output Menurut Waktu

pak De, soal detail teknisnya dapat kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon pak De juga berkenan menunjukkan bahan bacaan yang dapat digunakan sebagai rujukan bila suatu saat diperlukan. Siapa tahu di

suatu hari nanti Tanya memperoleh kesempatan studi lanjutan dan harus menulis disertasi.

Answer: Baiklah Tanya, pak De akan menambahkan unsur pajak lingkungan ke dalam model dasar. Kita tahu bahwa industri pertambangan banyak menimbulkan dampak lingkungan, terutama yang negatif. Pajak lingkungan ini merupakan upaya untuk menginternalkan eksternalitas tersebut agar ekonomi menjadi lebih efisien. Orang pertama yang menganalisis internalisasi eksternalitas melalui pajak (subsidi) adalah Pigo. Namun, mengingat ekstraksi sumberdaya tambang bersifat dinamis, maka pajak lingkungan yang diterapkan juga harus bersifat dinamis (*dynamic Pigovian tax*). Kajian pajak terhadap ekstraksi sumberdaya alam telah banyak dilakukan, seperti Gamponia & Mendelsohn (1985) yang melihat efek berbagai tipe pajak pada efisiensi, (Muzondo, 1993) yang melihat pentingnya eksternalitas dari laju produksi dan kumulatifnya,

Ada dua problem mendasar dari pajak lingkungan Pigo, yakni sifatnya yang melekat pada output. Pertama, karena melekat pada output maka pajak lingkungan Pigo dapat dipungut hanya sepanjang ekstraksi masih terjadi, padahal dampak lingkungan mungkin saja masih terus berlangsung meskipun eksploitasi sudah berhenti. Bagaimana pemerintah membebaskan kerugian lingkungan seperti ini tanpa banyak mempengaruhi efisiensi eksploitasi tambang. Kedua, pajak lingkungan Pigo itu pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tingkat ekstraksi berjalan. Dampak permanen yang tidak terkait dengan tingkat ekstraksi masih belum tertangani oleh pajak lingkungan Pigo.

2. **Tanya:** Sebentar pak De, jadi dampak lingkungan itu ada yang keberlangsungannya selama masa eksploitasi dan ada yang tetap berlangsung meskipun tambangnya sudah ditutup? Lalu, besarnya dampak ada yang tergantung pada tingkat ekstraksi berjalan, jumlah ekstraksi kumulatif, dan ada pula yang tidak tergantung pada tingkat ekstraksi berjalan maupun kumulatifnya? Semua itu harus diperhatikan agar pemajakan dapat dilaksanakan secara penuh dan sejauh mungkin menekan inefisiensi yang mungkin terjadi?

Answer: Benar seperti itu Tanya sehingga kita mengetahui dengan lebih baik berapa sebenarnya kekayaan bersih dari tambang itu. Sekarang ini tampaknya masih banyak dampak lingkungan oleh industri

pertambangan belum dinternalisasikan secara penuh. Ini yang membuat industri tambang tampak sebagai industri yang memberikan keuntungan menggiurkan, padahal sebenarnya sebagian, malah mungkin sebagian besar, yang dianggap keuntungan tersebut sebenarnya nilai kerusakan lingkungan yang tidak dibayar. Memang benar, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan tambang untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Nah disini juga ada problem, yakni bila dana jaminan reklamasi ini terlalu rendah maka perusahaan akan cenderung membiarkan areal bekas tambangnya dan membebankan pekerjaan reklamasi tersebut kepada negara. Pengalaman kegagalan reboisasi hutan alam dapat terulang dalam reklamasi bekas tambang. Kita harus berupaya sekuat tenaga agar pengalaman buruk tersebut tidak sampai terulang.

6.5.3 Penerimaan Negara

1. **Tanya:** Bukankah itu suatu bentuk kecurangan dari pengusaha pak De? Bagaimana mungkin setelah mendapatkan manfaatnya, mereka meninggalkan kewajibannya?

Answer: Entah apa namanya, apakah kecurangan, kecerdasan, atau bahkan kebodohan. Orang akan selalu mencari pilihan yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Ini adalah tindakan yang normal saja. Menurut pak De, perilaku pengusaha seperti itu justru bagus, artinya pengusaha kita itu masih rasional dalam mengambil keputusan. Yang harus kita pertanyakan adalah pihak yang memberi kesempatan terhadap dimungkinkannya terlaksananya tindakan yang dianggap merugikan tersebut. Itikad dan kemampuan dari pihak yang membuat aturan tersebut yang perlu kita pertanyakan. Tetapi dimanapun yang namanya birokrasi itu ya seperti itu.

2. **Tanya:** Berapa sebenarnya tingkat pungutan dari pertambangan pak De? Kesannya, ini kesan ya Pak De, pertambangan itu kok sepertinya memberi keuntungan yang luar biasa besar bagi pelakunya.

Answer: Wah kesan pertambangan selalu memberi keuntungan yang besar tidak sepenuhnya benar. Ada juga yang menderita rugi, hanya saja tidak terpublikasikan. Ketika masih dalam tahap eksplorasi, para pengusaha tambang sebenarnya berada dalam lingkungan “perjudian” yang besar. Biaya yang diperlukan sangat besar, sementara mene-

mukan sumber tambang yang ekonomis untuk ditambang merupakan probabilitas.

Ada beberapa jenis pungutan di pertambangan. Kita fokus pada pungutan non pajak saja, yang lazim disebut dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Aturan yang digunakan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003. Sesuai dengan PP 45 tahun 2003 tersebut, ada PNBP yang dipungut berdasarkan volume atau massa, seperti royalti (Tabel 6.6), dan ada pungutan yang berdasarkan luas, seperti *land rent* (Tabel 6.7). Kita ambil contoh timah misalnya. Jika harga tiap ton timah kita anggap satu unit, maka dari setiap ton timah yang diproduksi oleh pengusaha negara mendapatkan bagian 0,03 unit. Penerimaan negara sangat ditentukan oleh harga jual dari timah tersebut. Nah, bagaimana harga jual ditentukan?

Tabel 6.6: Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty untuk Usaha Tambang

	Uraian	Tarif (% Harga Jual)
1	Batubara (Open Pit) (Kkal/kg)	
	1. ≤ 5100	3,00%
	2. 5100-6100	5,00%
	3. >6100	7,00%
2	Batubara (Under ground) (Kkal/kg)	
	1. ≤ 5100	2,00%
	2. 5100-6100	4,00%
	3. >6100	6,00%
3	Bijih Nikel (Garnieritik)	5,00%
4	Bijih Nikel (Limonitik)	4,00%
5	Timah	3,00%
6	Tembaga	4,00%
7	Besi	3,00%
8	Emas	3,75%
9	Intan	6,50%

Sumber: Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2003

3. **Tanya:** Iya, bagaimana harga jual itu ditentukan pak De? Apalagi bila perusahaan timah dan pembeli timahnya banyak. Apakah hal tersebut berarti harga jualnya juga menjadi beragam? Selain itu, kita juga tahu

Tabel 6.7: Landrent: (1) Kuasa Pertambangan (Usaha A) dan
(2) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha-
an Pertambangan Batubara (Usaha B)

Usaha A			Usaha B		
Uraian		(Rp/Ha/Th)	Uraian		(US\$/Ha/Th)
Penyelidikan Umum			Penyelidikan Umum		
1	Tahun ke I	500,00	1	Tahun ke I	0,05
2	Tahun ke II	1.000,00	2	Tahun ke II	0,10
Eksplorasi			Eksplorasi		
1	Tahun ke I	2.000,00	1	Tahun ke I	0,20
2	Tahun ke II	2.500,00	2	Tahun ke II	0,25
3	Tahun ke III	3.000,00	3	Tahun ke III	0,30
4	Tahun ke IV		4	Tahun ke IV	0,50
5	Tahun ke V		5	Tahun ke V	0,70
Perpanjangan Eksplorasi			Studi Kelayakan		
1	Tahun ke I	5.000,00	1	Tahun ke I	1,00
2	Tahun ke II	7.000,00	2	Tahun ke II	1,00
Pembangunan Fasilitas Eksploitasi			Konstruksi		
1	Tahun ke I	8.000,00	1	Tahun ke I	1,00
2	Tahun ke II	8.000,00	2	Tahun ke II	1,00
3	Tahun ke III	8.000,00	3	Tahun ke III	1,00
Eksploitasi			Eksploitasi		
1	Tahun ke I	15.000,00	1	Tahun ke I	2,00
2	Tahun ke II	25.000,00	2	Tahun ke II	4,00

Sumber: Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2003

bahwa harga timah berubah setiap hari. Bagaimana menangani harga yang beragam dan sangat fluktuatif tersebut pak De?

Answer: Benar Tanya, begitulah keadaan yang kita hadapi. Ya pemerintah tentu dapat memilih cara bagaimana menentukan harga patokan yang akan digunakan dalam penghitungan tarif. Dinamika harga harus selalu diikuti agar tarif yang ditetapkan mendekati tingkat yang paling efisien dan paling menguntungkan kepentingan publik.

"The final lesson of history Let's never go back there again!"

Friedrich Wilhelm Nietzsche

"We learn from history that we do not learn from history."

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

"Patriots always talk of dying for their country and never of killing for their country."

Bertrand Russell

7

Menatap ke Depan

Jika kita ingin memiliki masa depan yang lebih baik, maka pertama kali kita harus yakin bahwa masa depan yang lebih baik itu ada dan hal tersebut dapat kita wujudkan. Sebelum kita dapat mewujudkan seperti apa diri kita nanti, maka kita harus paham dan mengerti dengan sebenarnya seperti apa diri kita hari ini. Akan lebih baik lagi bila kita juga paham dan mengerti seperti apa diri kita dahulu. Kita harus berangkat dan berpijak dari apa yang kita punyai. Tata pikir dan tata laku kita harus kita sesuaikan dengan keadaan kita tersebut.

Sebagai pemberi semangat, kita lihat kembali apa yang pernah ada di Bumi Nusantara ini mulai 2000 tahun yang lalu. Ternyata, sejak dahulu di Bumi Nusantara ini telah berkembang suatu peradaban. Ketika itu, Benua Amerika masih sangat sepi penduduk. Tempat keramaian di Asia adalah Cina, India, Jepang, dan Nusantara. Ukuran ekonomi Nusantara ini pernah menempati urutan ketujuh teratas dunia di bawah Cina, India, Itali, Perancis, Jerman, dan Jepang. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 1500an. Sejak saat itu, prestasi bangsa yang mendiami Bumi Nusantara ini terus merosot, kecuali prestasi besarnya korupsi.

Dapatkah bangsa ini meraih kejayaannya kembali? Tentu saja dapat dan sangat mungkin. Nah, dalam Bab Menatap ke Depan ini, beberapa

hal yang memungkinkan kita meraih kejayaan tersebut diulas. Satu faktor tunggal yang harus segera dihadirkan adalah pemimpin dengan karakter kepemimpinan yang tatag, teteg, tangguh, tanggon, tanggap, dan tutug. Jangan menunggu atau mencarinya, tetapi siapkan diri masing-masing untuk menjadi pemimpin seperti itu.

Banyak hal yang harus dikerjakan, tetapi ada beberapa hal penting yang harus segera masuk dalam agenda perubahan. Negeri ini adalah negeri maritim, maka pikiran kemaritiman harus dikembangkan. Kekuatan maritim harus segera dibangun. Fiskal kita yang sangat tidak efisien harus segera dibenahi. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi harus segera dikendalikan. Amankan lahan pangan kita dan manfaatkanlah kekayaan budaya kita.

7.1 Jejak Kita

1. **Tanya:** Apapun keadaan negara kita saat ini, menatap masa depan dengan riang gembira dan berharap yang terbaik bagi negeri ini beserta rakyatnya masih tetap lebih penting pak De. Suka tidak suka, kita harus membangun negeri ini dengan segala resiko dan pengorbanan yang dibutuhkan. Itulah pengabdian sejati bagi ibu pertiwi.

Answer: Wah, kata-katamu sangat inspiratif dan penuh optimisme. Memang begitulah seharusnya semua orang di negeri ini, terutama generasi mudanya.

2. **Tanya:** Menurut pak De, potret masa depan negeri ini seperti apa? Setelah kita sepakat dengan potret ideal negeri kita ini, langkah berikutnya adalah menyusun tindakan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Tetapi sebelum melangkah ke depan, ada baiknya bila kita melihat dahulu jejak langkah negeri kita hingga hari ini. Dengan begitu kita dapat memperoleh pelajaran sebagai bekal membangun masa depan. Kita bertamasya ke jaman dahulu pak De.

Answer: Kita batasi bahasan kita tentang penduduk dan kegiatan ekonominya saja ya? Dua isu ini kelihatannya juga akan menjadi isu penting di masa yang akan datang. Kita lihat bagaimana dinamika perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi di permukaan bumi selama 2000 tahun. Untuk itu, pak De akan mengambil informasi dari buku yang ditulis oleh Maddison (2007) dan Avakov (2010). Mari kita mulai penjelajahan kita untuk melihat Nusantara Kuno.

7.1.1 Penduduk

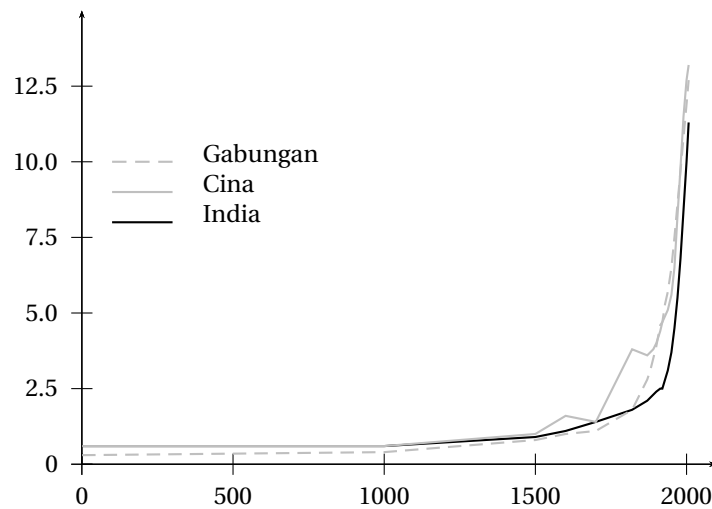
1. **Tanya:** Bagusnya bila ada gambaran juga tentang tempat lain di muka bumi ini pak De. Dengan demikian kita menjadi lebih menyadari posisi kita diantara tetangga kita di muka bumi ini.

Answer: Pak De juga punya gagasan seperti itu. Baiklah kita mulai saja penjelajahan kita.

Sejak 2000 tahun yang lalu, penduduk Cina dan India menduduki tempat teratas. Ketika itu, di wilayah Cina dan India telah bermukim masing-masing 59,6 juta dan 62,9 juta manusia. Pada saat yang sama, wilayah Indonesia dimukimi oleh 3,2 juta manusia dan di wilayah Jepang terdapat 3,0 juta manusia. Daratan Amerika Serikat dan Kanada masih sangat sepi ketika itu karena disana baru ada 0,7 juta orang di Amerika Serikat dan 0,1 juta orang di Kanada. Di daratan Eropa sudah tergolong ramai karena beberapa wilayah telah dihuni oleh penduduk yang cukup banyak. Beberapa wilayah yang penduduknya cukup banyak adalah Itali terdapat 8,0 juta, Perancis 5,0 juta, Spanyol 3,8 juta, Jerman 3,0 juta, dan Inggris 0.7 juta. Pada tahun 2007, penduduk di wilayah Cina dan India masing-masing mencapai 1.317,9 juta dan 1.129,9 juta. Jumlah penduduk di wilayah kelompok papan tengah dan papan bawah secara bersama kurang lebih setara dengan jumlah penduduk yang menghuni wilayah Cina (Gambar 7.1).

Di antara wilayah kelompok papan tengah, wilayah Indonesia muncul sebagai juara pertumbuhan populasi paling tinggi. Di awali dengan jumlah populasi yang kurang dari setengah populasi wilayah Itali, populasi wilayah Indonesia menjadi lebih kurang empat kali populasi Itali di tahun 2007 (Gambar 7.2). Pertumbuhan penduduk di wilayah Indonesia masih menunjukkan trend yang bersifat eksponensial sebagaimana terjadi di wilayah India. Pertumbuhan penduduk di dua wilayah ini patut diwaspadai dan harus segera dikendalikan. Wilayah papan tengah kedua setelah Indonesia adalah Jepang, tetapi ada kecenderungan kuat bahwa pertumbuhan penduduknya telah melambat. Empat wilayah lain yang terletak di Eropa Barat menunjukkan pertumbuhan penduduk yang rendah dengan cenderung semakin melambat.

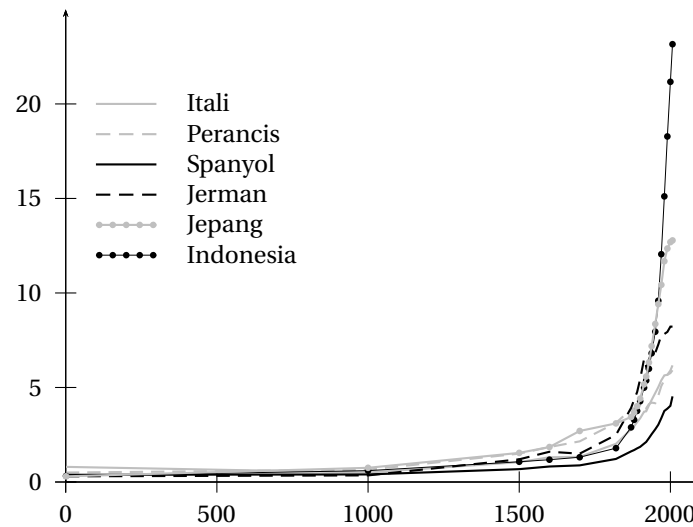
Di antara wilayah yang termasuk papan bawah, wilayah AS pada akhirnya menempati urutan pertama dalam jumlah penduduk meskipun pada awalnya di bawah Inggris. Bahkan, jumlah penduduk di wilayah



Gambar 7.1: Perkembangan Populasi Wilayah Cina, India, dan Gabungan Beberapa Wilayah ($\times 100.000.000$)

AS ini juga melampaui jumlah penduduk di wilayah Indonesia yang pada tahun 1 berpenduduk lebih empat kali lipat jumlah penduduk wilayah AS ketika itu. Di urutan kedua ditempati oleh wilayah Brazil (Gambar 7.3). Pertambahan penduduk di wilayah AS dan Brazil mulai mengalami percepatan di akhir abad 16 dan awal abad 17. Peningkatan penduduk yang sangat tajam di wilayah Brazil terjadi di akhir tahun 1930an yang berlangsung hingga saat ini. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat di wilayah AS dan Brazil kemungkinan disebabkan oleh arus imigrasi, khususnya dari wilayah Eropa, ketimbang oleh pertumbuhan penduduk dari dalam sendiri.

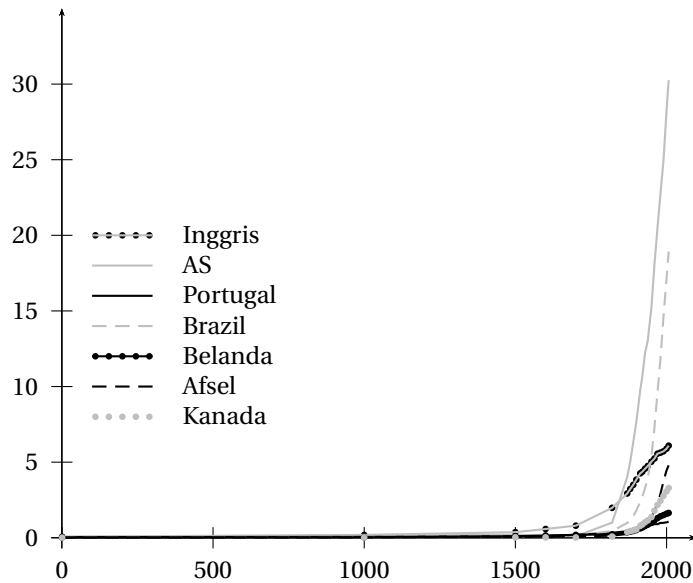
Dengan melakukan standardisasi dimana pada tahun 1 jumlah penduduk di setiap wilayah dibakukan menjadi satu, kita akan mendapatkan dua ciri pertumbuhan penduduk yang sangat kontras. Tiga wilayah di Eropa, yakni Belanda, Inggris, dan Portugal memperlihatkan sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang lamban, sementara wilayah Afsel, AS, Brazil, dan Kanada memperlihatkan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat (Gambar 7.4). Bahkan perkembangan



Gambar 7.2: Perkembangan Populasi Wilayah Papan Tengah
($\times 10.000.000$)

penduduk per orang di wilayah Cina, India, dan Indonesia masih jauh di bawah perkembangan penduduk per orang di wilayah Afsel, AS, Brazil, dan Kanada. Empat wilayah papan bawah ini merupakan tujuan imigrasi penduduk dunia, sedangkan wilayah lainnya merupakan sumber dari para imigran.

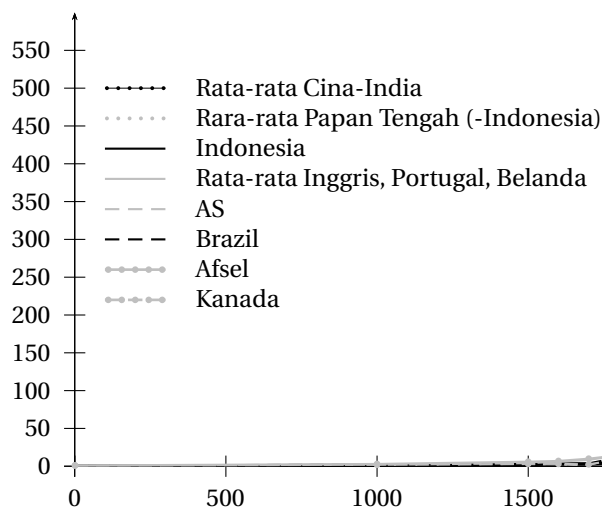
Hingga tahun 1950, pertumbuhan penduduk di wilayah Indonesia kurang lebih setara dengan pertumbuhan penduduk di wilayah Jepang dan Jerman. Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih sama pada tahun satu yang berada sekitar tiga juta, penduduk di tiga wilayah tersebut pada tahun 1950 adalah 79.5 juta di Indonesia, 68.4 juta di Jerman, dan 83.6 juta di Jepang. Namun, untuk periode selanjutnya wajah ketiga wilayah menjadi sangat berbeda jauh, yakni penduduk di wilayah Indonesia jauh lebih produktif dalam memproduksi bayi dibandingkan penduduk di wilayah Jerman dan Jepang. Pada tahun 2007, penduduk di tiga wilayah tersebut menjadi 231.6 juta di Indonesia, 82.2 juta di Jerman, dan 127.8 juta di Jepang.



Gambar 7.3: Perkembangan Populasi Wilayah Papan Bawah ($\times 10.000.000$)

2. **Tanya:** Faktor apa kira-kira yang menyebabkan lonjakan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tersebut pak De? Dalam periode 1950 hingga 1970, bangsa Indonesia berada dalam keadaan yang sangat tidak baik. Perang secara umum memang telah usai, tetapi Indonesia masih harus menghadapi Belanda di Papua dan di kancah diplomasi internasional. Suasana politik juga kurang menguntungkan, khususnya mulai dekade 1960an. Banyak sumberdaya harus dikerahkan untuk menghadapi pemberontakan di dalam negeri dan untuk mengembalikan Papua ke pangkuan ibu pertiwi. Antara 1965 hingga 1970, ekonomi Indonesia praktis mandeg. Dalam kondisi seperti itu bagaimana penduduk Indonesia dapat tumbuh sangat cepat?

Answer: Pak De juga tidak tahu jawabannya. Mulai tahun 1970, pembangunan ekonomi dilakukan dengan gencar oleh pemerintah. Produksi pangan, khususnya padi, digenjot sekuat tenaga, bahkan sering dengan cara-cara yang kurang terpuji. Banyak bendungan dan salur-



Gambar 7.4: Perkembangan Populasi Wilayah Setelah Standardisasi

an irigasi di bangun. Pabrik pupuk dan obat-obatan pertanian didirikan. Penelitian untuk menghasilkan varietas unggul sangat didorong. Tidak ketinggalan, teknik bercocok tanam juga banyak diteliti. Semua hal tersebut harus sampai ke, dimengerti dan dilaksanakan oleh petani. Jasa para penyuluh pertanian sangat besar.¹ Hasilnya, Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Itu merupakan capaian yang luar biasa, mengingat di pertengahan tahun 1960an banyak rakyat Indonesia kelaparan, karena banyak waktu dan tenaga terkuras oleh konflik politik sehingga kegiatan produktif menjadi terbengkelai.

Persediaan pangan yang mencukupi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tetapi saat itu pemerintah juga mencanangkan program keluarga berencana atau populer dengan Program KB. Pelaksanaan Program KB dilakukan dengan cara halus hingga sangat kasar. Banyak orang yang kurang paham tentang Program KB. Dibujuk, diberi penyuluhan, diberi insentif, dan beberapa

¹Pak De sedih bila ingat nasib para penyuluh pertanian yang telah sangat berjasa tersebut. Penghargaan terhadap jasa mereka sangat tidak sepadan. Banyak teman pak De yang menjadi penyuluh pertanian saat itu.

dipaksa. Perang ayat antara yang mengharamkan KB dan yang setuju KB sangat sering terjadi.

Nah, kondisi saat ini mempunyai kemiripan dengan kondisi akhir era orde lama itu. Infrastruktur pertanian banyak yang rusak sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penyuluh pertanian dilerantarkan dan diabaikan, sementara laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Di sisi lain, perubahan iklim global sangat mungkin mengharuskan adanya penyesuaian dalam bertani. Suatu kombinasi yang sangat ideal untuk menyongsong terjadinya kelaparan masal. Apa mungkin pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang terjadi di wilayah Indonesia dapat ditafsirkan sebagai mekanisme pertahanan diri? Mekanisme seperti ini biasa digunakan oleh spesies yang menduduki level bawah dalam rantai makanan. Satu ekor gajah mati menjadi berita, puluhan juta semut mati tidak akan ada yang perduli.

7.1.2 Ekonomi

1. **Tanya:** Sekarang kita beralih ke masalah ekonomi. Candi Borobudur dibangun sekitar 1000 tahun yang lalu. Artinya, saat itu sudah ada peradaban manusia yang cukup maju dan makmur sehingga mampu membangun sebuah candi yang tergolong megah. Andai kata pembangunan Candi Borobudur itu dikontrakkan kepada kontraktor dari Vanuatu sana, tetap saja pemrakarsanya harus memiliki sumberdaya yang cukup. Hal ini dapat terjadi bila dukungan ekonominya cukup memadai. Tetapi kondisi ekonomi yang cukup maju tersebut seharusnya sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, sehingga penguasa merasa yakin dapat membangun sesuatu yang monumental tanpa khawatir gagal di tengah jalan karena kehabisan sumberdaya. Bagaimana pandangan pak De?

Answer: Dua ribu tahun yang lalu ketika Benua Amerika masih sepi, GDP wilayah Indonesia telah menempati posisi ke-11 besar di dunia dengan nilai sebesar 2.066 juta dollar, berada satu tingkat di bawah wilayah Spanyol (2.744 juta dollar) dan satu tingkat di atas wilayah Jerman (1.798 juta dollar) yang kurang lebih setingkat dengan GDP wilayah Jepang. GDP wilayah Indonesia ketika itu kurang lebih seperduapuluh GDP tertinggi yang ditempati oleh wilayah India (41.600 juta dollar) dan Cina (39.402 juta dollar). Wilayah Itali yang merupakan pusat Emperium Romawi yang sangat tersohor itu menghasilkan

GDP sebesar 9.508 juta dollar. Seribu tahun kemudian, peringkat wilayah Indonesia dalam hal GDP meningkat ke posisi 8 besar (3.824 juta dollar) yang mengungguli wilayah Spanyol (2.644 juta dollar), bahkan Itali (3.306 juta dollar). GDP wilayah Indonesia kurang lebih sejajar dengan GDP wilayah Perancis. Lima ratus tahun kemudian, peringkat GDP wilayah Indonesia menduduki posisi ketujuh di bawah Cina, India, Itali, Perancis, Jerman, dan Jepang. Saat itu bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu, peringkat GDP wilayah Indonesia terus menurun hingga hari ini.

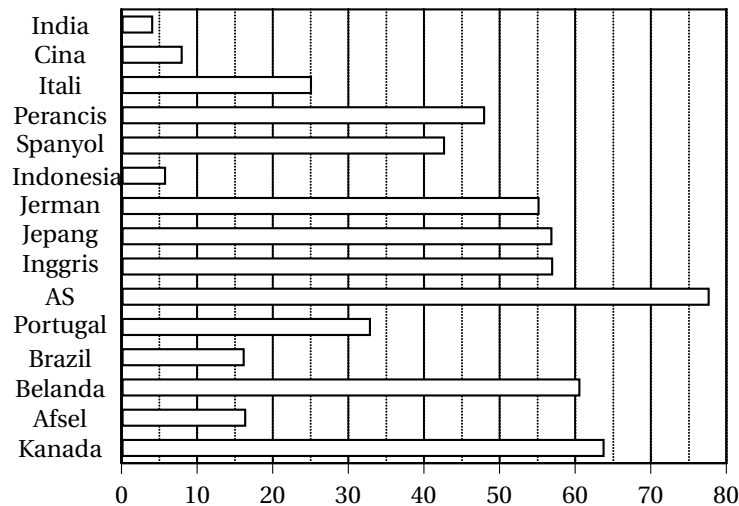
Sekarang, masyarakat penghuni wilayah Indonesia bermimpi untuk menempatkan wilayah Indonesia sebagai penghasil GDP dua puluh besar dunia, suatu prestasi yang belum lebih unggul dari prestasi masyarakat penghuni wilayah Indonesia 500 hingga 2000 tahun yang lalu. Tentu saja bermimpi untuk lebih “maju” bukanlah hal yang buruk, tetapi bermimpi yang tidak didukung oleh pembelajaran terhadap apa yang telah kita lalui selama ini - khususnya kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat sebagai suatu bangsa - hanya akan menghasilkan mimpi buruk bahkan horor. Mungkin saja tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat penghuni wilayah Indonesia, tetapi masyarakat penghuni wilayah lain berbuat jauh lebih baik dan benar.

2. **Tanya:** Apakah GDP itu sendiri pantas dijadikan ukuran kemajuan ekonomi suatu bangsa?

Answer: Mengapa tidak? Tetapi pak De agak heran bila GDP digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu komunitas. Alasan pak De sederhana sekali. Kemakmuran rakyat itu berhubungan dengan masalah keberlimpahan. Sesuatu yang berlimpah maka harganya cenderung rendah. Sementara itu, GDP adalah soal nilai tambah yang cara menghitungnya pasti menggunakan harga. Harga itu sendiri merupakan cerminan adanya kelangkaan. Oleh karena itu, kemakmuran yang lebih dicirikan oleh keberlimpahan rasanya tidak cocok bila harus diukur dengan menggunakan GDP yang ide sentralnya adalah kelangkaan.

Satu dollar per orang per tahun seribu tahun yang lalu menjadi berapa dollar per orang per tahun hari ini? Di wilayah India, Cina, dan Indonesia, satu dollar itu tumbuh menjadi kurang dari 10 dollar, sementara di wilayah AS, Belanda, dan Kanada satu dollar tersebut dapat menja-

di lebih dari 60 dollar. Di wilayah Inggris, Jepang, dan Jerman, satu dollar tersebut tumbuh menjadi antara 55 hingga 60 dollar (Gambar 7.5).



Gambar 7.5: Perbandingan Produktivitas antar Wilayah per Dollar per Kapita

7.2 Beberapa Isu Penting

7.2.1 Mewujudkan Negeri Maritim

1. **Tanya:** Bagaimana kita mendandani Ibu Pertiwi yang telah lama kita siksa ini pak De?

Answer: Negeri kita ini diciptakan dan diletakkan seperti yang kita lihat sekarang ini. Cara pandang dan cara hidup kita seharusnya disesuaikan dengan kondisi negeri kita itu, bukan sebaliknya memperkosa negeri ini untuk memenuhi tuntutan cara pandang dan gaya hidup kita. Sesebuah kita menyebut negeri yang menjadi tanah air kita ini dengan sebutan “ibu pertiwi”. Ini bukan sebutan sembarangan Tanya. Dalam sebutan itu terkandung rasa hormat dan penghormatan serta

janji bakti yang luar biasa. Negeri ini telah menyediakan semua persyaratan agar putra putrinya menjadi manusia terpandai dan terbagia di seluruh dunia. Tetapi sayang ketulusan ibu pertiwi itu sering dibalas dengan pengkhianatan dan kedurhakaan. Maaf Tanya, ketika menyebut ibu pertiwi, pak De menjadi kehilangan kemampuan untuk menahan linangan air mata. Orang sekarang banyak yang sudah kehilangan kebanggaan menjadi putra putri ibu pertiwi yang sangat anggun ini. Kita harus membuat ibu pertiwi ini tersenyum kembali.

2. **Tanya:** Seperti apa cantik dan indahnya ibu pertiwi yang tersenyum itu menurut gambaran pak De?

Answer: Negeri kita ini adalah negeri maritim atau bahari, tetapi cara pandang dan cara hidup kita seperti cara pandang dan cara hidup orang pegunungan. Hal seperti ini sudah merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap jati diri kita sebagai bangsa. Jiwa maritim dan karakter lain yang berkaitan dengan kemaritiman harus dengan sengaja dan sadar dibangun. Kita harus meletakkan tata pikir yang benar lebih dahulu, baru kemudian menyusun tata lakunya.

Di dalam perairan yang sebagian besar laut itu terkandung kekayaan yang luar biasa, baik kekayaan fisik maupun nonfisik. Kekayaan yang paling mudah dikenali adalah ikan, yang kamu juga tahu sebagai sumber protein yang paling baik. Perkembangan otak manusia jelas sangat ditentukan oleh kecukupan gizi, khususnya protein.

Dibandingkan dengan beberapa negara yang setara, konsumsi orang Indonesia atas ikan dan makanan yang berasal dari laut serta konsumsi protein masih tergolong rendah (Tabel 7.1). Dengan sumberdaya laut yang luar biasa, ternyata konsumsi ikan dan produk dari laut lainnya hanya 25,4 kg per kapita per tahun yang tertinggal jauh dari Malaysia yang mencapai 53,2 kg per kapita per tahun. Demikian pula dengan konsumsi protein yang hanya 56 g per kapita per hari, sementara Malaysia mencapai 79 g per kapita per hari.

Program lainnya adalah meningkatkan konsumsi protein dari ikan, khususnya bagi anak-anak dan ibu-ibu yang sedang hamil. Bukannya ingin meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein agar tercipta generasi yang cerdas, makan ikan malah dipersepsikan dapat menyebabkan cacangan. Hal seperti ini tampaknya sederhana, tetapi dapat mempengaruhi keputusan konsumsi seseorang yang akhirnya berdampak pada perkembangan otak anak-anak. Salah persepsi se-

perti ini harus segera diatasi. Untuk anak-anak balita dan ibu-ibu hamil, program tersebut dapat melalui posyandu. Sementara untuk anak-anak usia sekolah dapat dilakukan melalui program makan siang di sekolah. Intinya adalah mengubah alur dari tadinya ikan diubah ke dolar menjadi ikan diubah menjadi generasi cerdas. Tetapi untuk mengeksekusi impian tersebut perlu ada koordinasi beberapa kementerian. Nah, koordinasi ini selalu menjadi masalah di negara kita ini.

Tabel 7.1: Konsumsi Ikan+Seafood Tahun 2009 dan Protein Tahun 2005-2007

Negara	Ikan + Seafood (kg/kapita/th)	Protein (g/kapita/hari)
Afrika Selatan	7,5	81
Brasil	8,3	84
Cina	31,0	89
India	5,5	56
Indonesia	25,4	56
Jepang	56,6	92
Korea Selatan	56,1	88
Malaysia	53,2	79
Pilipina	36,4	59
Thailand	24,6	57
Vietnam	32,6	72

Sumber: FAO (<http://www.fao.org/corp/statistics/en/>)

3. **Tanya:** Jadi, maksud pak De, rantai perjalanan ikan dari laut kita itu diubah dari ikan-devisa-tidak jelas menjadi ikan-gizi rakyat-manusia cerdas-apa saja dapat dilakukan?

Answer: Yah betul begitu. Kalau mikirnya jangka pendek saja, jelas kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang bagus dari ikan tuna kita yang dijual ke Jepang. Tetapi kalau kita memperhitungkan jangka panjangnya, maka nilai tambah dari rakyat Indonesia yang cerdas itu dapat jauh melebihi harga tinggi yang kita korbankan karena kita tidak menjual ikan tuna ke Jepang melainkan kita makan sendiri.

7.2.2 Mengefisienkan Kebijakan Fiskal

1. **Tanya:** Terus anggaran untuk mendukung program seperti itu dari mana pak De? Pada tahun 2010, ada kurang lebih 22,6 juta balita. Jumlah penduduk usia antara 5 hingga 14 tahun ada kurang lebih 46,0 juta jiwa. Total jumlah anak-anak di Indonesia ada 68,6 juta jiwa. Berapa jumlah ibu-ibu hamil per tahun?

Answer: Benar, biaya yang dibutuhkan memang besar. Marilah kita carikan jalan keluarnya. Paling tidak ada tiga jalan yang dapat segera ditempuh, yakni meningkatkan penerimaan dari pajak, realokasi anggaran, dan menekan pencurian ikan (*illegal fishing*). Mari kita lihat satu per satu.

Pada tahun 2009, penerimaan dari pajak adalah 601,3 triliun rupiah (sekitar 11,44% dari PDB) (Tabel 7.2) dan meningkat menjadi 720,8 triliun rupiah pada tahun 2010 dengan rasio pajak 10,89%. Dengan demikian, secara kasar setiap 1% pajak setara dengan penerimaan nominal sebesar 52,6 hingga 66,2 triliun rupiah. Kita ambil angka yang mudah, yakni katakanlah 55,0 triliun rupiah per 1%. Dengan demikian, bila rasio pajak dapat ditingkatkan menjadi 15,00%, maka akan terkumpul tambahan penerimaan dari pajak sebesar 220 triliun rupiah. Opsi ini sangat mungkin dilakukan bila tikus-tikus di Direktorat Jendral Pajak yang tertangkap tangan langsung dibakar hidup-hidup. Rasio pajak terhadap PDB di negara lain dapat jauh lebih tinggi; Australia dan Belanda 22%, Norwegia 26%, bahkan Denmark mencapai 34%. Nah, di negara kita rasio pajak terhadap PDB masih sangat rendah. Sudah sangat rendah masih dikorupsi pula. Tinggal panggil Dirjen Pajak ke istana, minta dia untuk meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga mencapai rasio 15% dari PDB. Pilihan yang tersedia hanya tiga, yakni harus dipenuhi, atau harus dipenuhi, atau harus dipenuhi.

2. **Tanya:** Ah pak De ini bikin ngeri Tanya saja. Ingat pak De, kita sudah bersepakat untuk ikut menghormati hak asasi manusia.

Answer: Betul Tanya, memang kita harus menghormati hak asasi manusia. Tetapi apakah tikus dan manusia itu sama? He he he ... manusia tikus itu harus kita buat ngeri hidup di Indonesia, tetapi yang manusia sungguhan harus kita buat dapat hidup senyaman mungkin. Kita lanjutkan dengan realokasi anggaran. Subsidi yang tidak produk-

Tabel 7.2: Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto Beberapa Negara Tahun 2009

Negara	Rasio (%)	Negara	Rasio (%)
Afrika Selatan	25,54	Jerman	12,16
Amerika Serikat	8,48	Kamboja	9,67
Australia	22,15	Kanada	12,40
Belanda	22,63	Korea Selatan	15,45
Brasil	15,64	Malaysia	15,66
Cina	10,54	Norwegia	26,56
Denmark	34,31	Pilipina	12,23
India	9,66	Rusia	12,96
Indonesia	11,44	Swedia	21,63
Jepang	8,70	Thailand	15,16

Sumber: World Bank (<http://data.worldbank.org/GC.TAX.TOTL.GD.ZS/countries>)

tif harus segera dihilangkan. Contoh yang paling nyata adalah subsidi BBM yang sangat tidak produktif. Ratusan triliun rupiah hanya digunakan untuk menyenangkan orang kota yang kesejahteraannya relatif sudah lebih baik dengan mengorbankan hak warga negara lainnya yang hidup di daerah terpencil. Prasarana jalan tidak dapat dibangun karena misalokasi anggaran. Lihatlah daerah dekat perbatasan. Kapan mereka dapat ikut menikmati kemerdekaan negeri ini? Dengan asumsi biaya pembangunan jalan raya berkualitas tinggi sebesar 10 milyar rupiah per km, maka ribuan kilometer jalan raya baru dapat kita bangun seandainya uangnya tidak dibakar (Tabel 7.3). Nah, berapa jalan raya baru yang dapat dibangun saat ini?

Di negara maju, pengguna BBM itu diharuskan membayar pajak. Di Amerika Serikat, contohnya, pajak dari penjualan BBM digunakan secara khusus (*earmarking*) untuk membangun prasarana transportasi, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Jadi, pengguna jalan raya dengan kendaraan bermotor secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan dan perawatan jalan raya.

3. **Tanya:** Pak De, Amerika Serikat itu kan negara kaya, sehingga wajar bila warganya harus membayar BBM lebih tinggi.

Answer: Nah, disini ada beberapa isu yang perlu dibuka. Pertama,

Tabel 7.3: Perkembangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

Tahun	Subsidi ² (Triliun rupiah)	Ekivalen Jalan Raya (Km)
2006	64,2	6.400
2007	83,8	8.300
2008	139,1	13.900
2009	45,0	4.500
2010	82,4	8.240
2011	129,7	12.970

kekeliruan cara berpikirmu. Justru orang Amerika Serikat yang bersedia urunan membangun dan memelihara jalan raya yang dinikmatinya itulah yang menjadikan negara mereka kaya. Sikap orang Indonesia kebalikannya, meski sudah kaya tetapi mentalnya masih mental pengemis. Kedua, masih tentang kekeliruan cara berpikir, yakni banyak orang beranggapan bahwa harga barang dan jasa seharusnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Kalau ini dilakukan, maka tingkat kekayaan semua negara atau orang akan sama. Amat yang pendapatannya dua kali lebih besar dari Bejo harus membayar dua kali lebih tinggi dari apa yang harus dibayarkan oleh Bejo. Akibatnya, daya beli kedua orang tersebut adalah sama. Ketiga, sinyalemenmu itu ternyata tidak benar; harga solar di beberapa negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia ternyata lebih tinggi dari harga solar di Indonesia. Pak De menggunakan harga minyak diesel sebagai perbandingan karena grade gasoline sangat beragam sehingga perbandingan yang tepat secara langsung sulit dilakukan (Tabel 7.4).

Dibandingkan dengan negara penganut sosialisme dan tergolong paling miskinpun ternyata harga minyak diesel di Indonesia sangat memanjakan. Jika kebiasaan buruk ini tidak segera dihentikan, maka Indonesia benar-benar tidak punya masa depan. Lihatlah orang Suriname yang banyak diantaranya berasal dari Indonesia, mereka berani membayar harga minyak diesel dua kali lipat dari yang dibayarkan oleh orang Indonesia sebagai leluhur mereka. Leluhur yang cengeng itu bukanlah leluhur yang patut untuk dibanggakan! Palingkan muka dari para politisi picisan - politisi yang hanya menyebarkan kebohongan demi popularitasnya sendiri - sekarang juga jika kamu ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini.

Tabel 7.4: Perbandingan Harga Minyak Diesel di Beberapa Negara

Negara	Harga (US dollar per liter)
Banglades	0,63
Ethiopia	0,78
Indonesia	0,51
Kamboja	0,98
Laos	0,97
Myanmar	0,80
Pilipina	0,84
Suriname	1,12
Vietnam	0,77
Zimbabwe	1,15

Misalokasi anggaran terjadi secara masif, sehingga sangat tidak efisien. Bayangkan bila anggaran untuk subsidi itu dialihkan untuk membangun jalan atau kebutuhan lainnya yang lebih strategis, betapa sudah sangat majunya negeri ini. Pembangunan menjadi lebih merata sehingga lebih banyak komponen dan kekayaan bangsa ini yang ikut terlibat dalam proses pembangunan. Wilayah perdesaan dengan jalan yang mulus dan prasarana penunjang lainnya dapat menjadi tempat tinggal yang menyenangkan dan menyehatkan. Orang tidak perlu dihimbau atau dilarang untuk pergi dan menetap di perkotaan yang semakin kumuh, diperintah dan diberi sangupun orang tidak akan mau pindah dari desa mereka. Prioritaskan pembangunan jalan, maka yang lain akan menyusul dengan sendirinya.

4. **Tanya:** Bagaimana memfungsikan jembatan timbang agar jalan yang dibangun lebih awet. Tanya sering melihat truk yang kelebihan muatan tetapi dapat dengan mudah lolos melewati jembatan timbang. Kalau kita dapat menemukan cara yang efektif untuk mengawasi jembatan timbang, maka kerusakan jalan dapat ditekan secara signifikan.

Answer: Kalau mau sebenarnya ya sederhana saja. Prinsipnya, jembatan timbang dibuat online dan setiap petugas yang memulai kerja harus memasukkan *username* dan *password*. Dengan perlengkapan CCTV yang cukup canggih, setiap kendaraan yang masuk jembatan timbang akan terekam datanya. Semua data dapat dipantau di ruang

kendali. Kita tinggal melihat apakah tindakan yang diambil oleh petugas yang bertugas saat itu sesuai dengan data yang terekam. Itu kalau kita mau melakukan pembenahan. Tetapi kamu juga perlu tahu bahwa permainan meloskan truk kelebihan muatan itu bukan hanya permainan petugas jembatan timbang. Permainan ini melibatkan pelaku bisnis, penyedia jasa angkutan, atasan petugas jembatan timbang, atasannya atasan petugas jembatan timbang, dan masih banyak lagi.

5. **Tanya:** Isu fiskal apalagi pak De yang perlu dibenahi dengan segera?

Answer: Struktur penerimaan dan pengeluaran dari sumberdaya alam, seperti royalti dan *cost recovery*. Tarif royalti perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan keadilan sosial. *Cost recovery* dalam industri minyak dan gas perlu diteliti kembali. Kongkalikong *cost recovery* mirip dengan kongkalikong pembayaran pajak; intinya ada petugas yang terbeli untuk menyetujui begitu saja besaran pajak atau *cost recovery* yang dibuat oleh perusahaan.

7.2.3 Membangun Kekuatan Maritim

1. **Tanya:** Di depan pak De telah menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara maritim. Jika kita konsisten dengan ciri alami negara kita dan dari situ kita membangun negara kita maka membangun kekuatan maritim harus memperoleh prioritas. Kekuatan disini tidak harus diartikan sebagai kekuatan militer belaka pak De.

Answer: *Yes, you are truly correct.* Pertanyaan seperti ini membangkitkan optimisme baru akan masa depan negeri ini, karena ternyata masih ada generasi muda yang bernalar waras. Kekuatan maritim kita harus menjadi kekuatan maritim terhebat dan paling disegani di dunia. Kekuatan disini bukan hanya kekuatan militer tetapi juga kekuatan yang lain. Ringkasnya, *hard power as well as soft power*. Harus lebih banyak otak cerdas yang ikut memikirkan pembangunan kekuatan maritim.

Selama ini kita telah mengabaikan ciri kemaritimannya kita. Negara kita terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Sekitar 17.000 pula jumlah personel marinir kita. Secara guyonan kita dapat mengatakan bahwa satu marinir menjaga satu pulau. Garis pantai kita itu mencapai 54.716 km. Meskipun pak De tidak tahu persis berapa jumlah personel idealnya,

jumlah yang ada saat ini jelas terlalu sedikit untuk mengawal pulau dan lautan yang kita miliki. Demikian pula dengan jumlah pelaut kita perlu dikaji kembali untuk menentukan berapa jumlah idealnya.

Peralatan untuk menunjang tugas para pengawal matra laut juga masih sangat terbatas. Banyak diantaranya yang sudah sangat tua. Semangat pengabdian mereka yang tinggi harus kita imbangi dengan memberikan peralatan yang memadai dan jaminan kesejahteraan yang masuk akal. Pengembangan teknologi kemaritiman harus memperoleh prioritas dan dikerjakan dengan serius. Nah, keseriusan tersebut harus tercermin dalam rencana kerja atau *road map* dan penyediaan anggarannya. Misalnya, kita ingin mampu membangun kapal selam kita sendiri paling lambat 20 tahun ke depan. Nah dari situ kita hitung mundur apa yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kemampuan tersebut; dalam lima tahun berjalan berapa orang yang harus kita sekolahkan untuk mendalami teknologi kapal selam, laboratorium penelitian seperti apa yang diperlukan dan mulai kapan diperlukan, dan seterusnya.

Asia-Pasifik telah muncul sebagai pusat lintasan strategis maritim di abad 21 ini (Prabhakar et al., 2006). Disini ada pemain besar dan tangguh yang telah lama bercokol, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia, dan pemain baru yang tidak kalah hebatnya, yakni Cina dan India. Empat dari lima pemain besar tersebut didukung oleh kekuatan nuklir. Ketika di Blok Ambalat ada negara yang berani mengukur kekuatan maritim kita, apalagi di Laut Cina Selatan.

2. **Tanya:** Dengan kekuatan maritim yang memadai, pencurian kekayaan alam dari laut dapat ditekan ya pak De?

Answer: Benar. Sekarang ini pencurian ikan saja bernilai puluhan trilyun rupiah setiap tahun. Kekuatan laut kita sepertinya sangat dilecehkan. Masalahnya memang jumlah personel dan peralatan yang ada sangat jauh di bawah jumlah ideal yang dibutuhkan untuk menjaga laut kita yang sedemikian luasnya itu. Dari pengurangan inefisiensi fiskal yang sudah kita bahas di muka, kita dapat menambah anggaran untuk penjaga laut kita ini. Kaidah yang digunakan sederhana saja, jika anggaran ditingkatkan sebesar ΔG , maka berapa penurunan pencurian kekayaan alam dari laut kita? Misalnya, penurunan pencurian tersebut sebesar ΔL , selanjutnya jika $\Delta L < \Delta G$ maka peningkatan anggaran tidak layak dilakukan. Bila $\Delta L \geq \Delta G$ maka peningkatan anggaran

secara finansial dapat dipertanggung jawabkan meskipun secara ekonomi belum tentu paling efisien.

3. **Tanya:** Secara finansial dapat dipertanggung jawabkan tetapi secara ekonomi belum tentu paling efisien? Lebih jelasnya pak De?

Answer: Begini, uang sebesar ΔG itu dapat dibelanjakan untuk kegiatan lain yang mungkin saja memberikan hasil yang lebih besar dari ΔL . Misalnya dari proyek lain hasil yang diperoleh dengan membelanjakan ΔG adalah ΔM , dimana $\Delta M > \Delta L$. Membelanjakan ΔG mendapatkan ΔL tidak rugi, tetapi mendapatkan ΔM akan lebih untung. Dalam ekonomi ada konsep yang disebut dengan *opportunity cost*. Kamu mendapatkan ΔL tetapi mengorbankan ΔM , padahal kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya.

4. **Tanya:** Sekarang ini karena sarana penunjang tugas sangat terbatas, para pencuri kekayaan laut kita sangat leluasa bergerak. Kapal kita seringkali tidak mampu mengejar kapal para penjarah itu.

Answer: Kalau kita berani, kita dapat kejar para penjarah itu dengan peralatan murah yang tersedia, yaitu peluru.

5. **Tanya:** Maksud pak De ditembak begitu? Wah itu kan melanggar hukum pak De?

Answer: Ya ditembak. Kita jelaskan kepada dunia bahwa kemampuan kita baru sampai pada tingkat mampu mengejar para penjarah kekayaan laut kita dengan menggunakan peluru itu. Nanti ketika kekuatan maritim kita telah berkembang cukup baik, maka metoda pengejaran para penjarah kekayaan alam laut akan kita ganti dengan pendekatan yang lebih aman. Sementara ini, apa yang dapat kita lakukan ya mengejar dengan peluru tadi itu. Kalau tidak ingin ketangkap peluru kita ya jangan pernah memasuki wilayah negara kita secara illegal untuk melakukan penjarahan kekayaan alam kita.

6. **Tanya:** Wah pak De ini bikin ngeri orang saja. Apakah tidak sebaiknya kita mengikuti norma yang ada saja pak De?

Answer: Indonesia itu memang harus menjadi negara yang mampu membuat ngeri orang-orang jahat, tetapi sangat dicintai orang-orang baik. Benar katamu, bila mengikuti norma dapat mencapai hasil yang kita harapkan maka mengikuti norma akan lebih baik. Tetapi dari

pengalaman, kalau kamu mengikuti norma secara penuh ya tidak bakal pernah menang. Dalam kebijakan publik ada satu teori yang disebut teori elit. Intinya, masyarakat dibagi menjadi dua golongan, yakni kaum elit yang jumlahnya sangat sedikit dan kaum kebanyakan yang jumlahnya banyak. Peran kaum elit adalah menentukan nilai-nilai yang harus dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah keinginan dari kaum elit tersebut. Jadi, norma dalam masyarakat itu ditentukan oleh kaum elit. Tentu saja mereka tidak ingin membuat norma sosial yang merugikan kepentingan mereka sendiri. Di depan umum kaum elit ini berbicara tentang norma, tetapi di luar pengawasan publik mereka melakukan kecurangan dan keculasan. Mereka melakukan perbuatan anarki terhadap rakyat banyak. Jangan mudah tertipu oleh penampilan mereka yang sok santun, taat hukum, dan sangat normatif. Di balik layar, mereka bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan. Hal demikian ini terjadi pada semua tingkatan, mulai dari tingkat rukun tetangga hingga tingkat dunia.

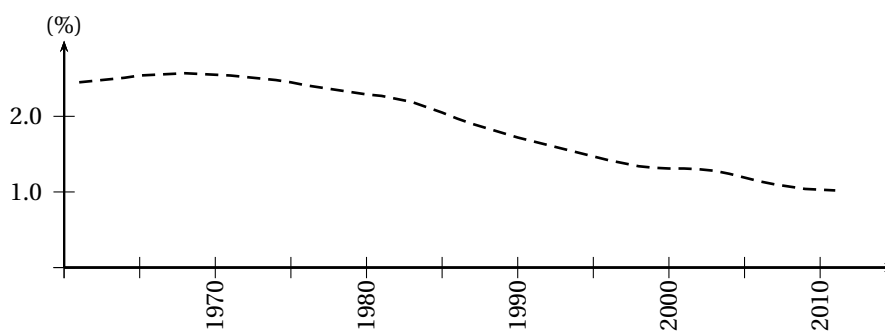
Banyak contoh yang kamu dapat melihatnya sendiri. Perubahan dari orde baru ke orde yang tidak jelas sekarang ini apa mengikuti norma yang ada? Jika tetap mengikuti norma yang ada, maka rakyat Rumania tidak akan pernah dapat bebas dari regim Nicolae Ceauescu, rakyat Mesir dari Hosni Mubarak, rakyat Libia dari Khadafy, dan masih banyak contoh yang lain. Kamu perhatikan, ketika ketidakadilan sudah tidak lagi dapat diterima oleh rakyat, maka rakyat akan melakukan apa saja untuk membalikkan gerak pendulum. Disini Karl Marx tidak pernah menyangka bahwa pemerintah diktator proletariat yang diidealkannya ternyata dapat ditumbangkan oleh revolusi rakyat yang sudah sangat jengah dengan kemunafikan para penguasa.

7.2.4 Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

1. **Tanya:** Seperti telah pak De singgung sebelumnya, tampaknya pertumbuhan penduduk kita sangat mencemaskan. Lajunya terlalu cepat. Menurut Tanya, tingkat pertumbuhan nol persen itu harus segera dapat dicapai sebelum terlambat. Bagaimana menurut pandangan pak De?

Answer: Benar Tanya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Antara 1990 hingga 2000 lajunya adalah 1,40% yang kemudian meningkat menjadi 1,49% antara 2000-2010

(Badan Pusat Statistik, 2011). Pada tahun 2011, data World Bank menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih pada tingkat 1,0% per tahun (Gambar 7.6).³ Kita harus merencanakan dengan baik bagaimana menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut hingga mencapai pertumbuhan nol persen per tahun. Jumlah penduduk harus menjadi aset bangsa, bukan malah menjadi beban.



Gambar 7.6: Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

2. **Tanya:** Akan menjadi berapa penduduk Indonesia hingga laju pertumbuhan nol persen tercapai pak De?

Answer: Tergantung pada seberapa cepat kita mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Misalnya laju pertumbuhan penduduk diturunkan secara merata dalam jangka waktu 25 tahun, maka penduduk Indonesia akan stabil pada 273,20 juta orang. Nah, kalau waktu penurunan laju pertumbuhan penduduk hingga nol persen tersebut 50 tahun, maka jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 309,45 juta orang.

3. **Tanya:** Nah bagaimana caranya untuk sampai kepada pertumbuhan penduduk nol persen itu pak De? Tanya pernah mendengar kalau di Cina jumlah anak yang diijinkan hanya satu. Negara akan mengambil paksa anak kedua dan seterusnya. Entah informasi itu benar atau tidak, tetapi rasanya pendekatan seperti itu terlalu kasar. Kalau mungkin jangan sampai seperti itulah pak De.

Answer: Pendekatan yang sangat keras tersebut boleh jadi sangat cocok untuk kasus negara Cina yang penduduknya memang sudah sa-

³<http://data.worldbank.org/indicator/SP.POPGROW/countries>

ngat padat. Tindakan yang keras kadang diperlukan demi kepentingan yang lebih besar dan berjangka lebih panjang. Tetapi secara umum, pendekatan yang dapat ditempuh dapat dibagi menjadi dua, yakni (1) pendekatan langsung dan (2) pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung meliputi kegiatan dan program yang dirancang untuk menekan jumlah kelahiran. Contoh dari pendekatan ini adalah penyediaan alat dan pelayanan kontrasepsi dan penyediaan tenaga penyuluh keluarga berencana. Adapun pendekatan tidak langsung adalah membangun insentif dan disinsentif. Contohnya, membebaskan uang sekolah hingga tamat kelas 12 untuk dua anak dan menerapkan diferensiasi tarif rumah sakit antara dua anak pertama dengan anak berikutnya. Intinya menciptakan disinsentif untuk memiliki anak lebih dari dua dan lebih fokus kepada kualitas.

7.2.5 Mengamankan Lahan Pangan Kita

1. **Tanya:** Apakah tanah kita cukup untuk memberi makan jumlah penduduk sebesar itu pak De?

Answer: Negara kita memiliki lahan seluas 1.811.569 km² tetapi hanya sekitar 11,03% saja, atau sekitar 20 juta ha, yang dapat ditanami dengan jenis tanaman semusim, termasuk tanaman pangan dan pada tahun 2003 hanya 6.7 juta ha yang berpengairan.⁴ Dari 2003 hingga 2012 apakah lahan berpengairan itu bertambah atau malah berkurang?

2. **Tanya:** Krisis pangan telah beberapa kali melanda dunia. Tanya masih ingat ketika rakyat Ethiopia banyak yang mati kelaparan. Belakangan ini krisis pangan juga mengancam, terlebih lagi dengan adanya perubahan iklim global. Meskipun sebenarnya tidak pantas untuk terjadi, Indonesiapun pernah mengalami krisis pangan. Perlukah kita melakukan tindakan untuk mengamankan lahan yang menghasilkan pangan kita, khususnya sawah dengan hasil padinya?

Answer: Bagus sekali pertanyaanmu Tanya. Produksi pangan bagaimanapun harus kita amankan. Untuk keperluan pengamanan produksi pangan tersebut sudah tersedia peraturan perundangannya, yakni UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ada beberapa definisi yang perlu diketahui:

⁴<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

- (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 angka 3).
- (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCPPB) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang (Pasal 1 angka 4).
- (c) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 angka 7).

3. **Tanya:** Lahan tersebut milik siapa pak De? Apakah lahan milik juga mungkin dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Atau lahan tersebut milik negara?

Answer: Lahan tersebut dapat saja tanah milik ataupun lahan yang belum dibebani hak kepemilikan. Status LPPB, CLPPB, dan KPPB diperoleh melalui proses penetapan (Tabel 7.5). Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai LPPB, CLPPB, dan KPPB dapat dikenai pidana.

4. **Tanya:** Bagaimana bila negara juga memiliki LPPB, bila perlu membeli dari petani. Pemerintah membangun dan memelihara prasarana yang diperlukan. Petani dapat, bahkan didorong untuk, menggarap LPPB dengan cara menyewa dari pemerintah. Hak garap oleh petani dapat diwariskan bila masa hak garap tersebut masih berlaku. Pemilikan oleh negara ini untuk menghindari fragmentasi penguasaan lahan sehingga ukurannya menjadi terlalu kecil untuk diusahakan.

Answer: Pak De tidak menentang pikiran seperti itu. Hanya saja kita perlu memastikan bahwa petugas pemerintah yang berwenang mengelola LPPB menjalankan tugasnya dengan benar. Pengalaman selama

Tabel 7.5: Penetapan LPPB, CLPPB, dan KPPB

Jenis	Penetapan
LPPB	<ul style="list-style-type: none"> o Merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 20 ayat (1)). o Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 25 ayat (1))
CLPPB	<ul style="list-style-type: none"> o Merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21)
KPPB	<ul style="list-style-type: none"> o Merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19 ayat (1)). o Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 23 ayat (1)). o Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi (Pasal 23 ayat (2)) o Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Pasal 23 ayat (3))

ini menunjukkan bahwa kerja birokrasi pemerintah sangat tidak efisien. Tetapi pengelolaan LPPB dapat juga diserahkan kepada swasta, meskipun kepemilikannya tetap oleh negara.

5. **Tanya:** Tetapi yang paling penting adalah bahwa bangsa kita telah memikirkan masalah pangan ini dengan lebih serius, sehingga di masa mendatang konversi dari lahan pertanian beririgasi baik menjadi penggunaan lain semakin sulit dilakukan. Langkah seperti ini patut

diapresiasi dan terus dipertahankan secara konsisten. Pangan itu bukan sembarang komoditas.

Answer: Benar Tanya. Kita perlu bergerak lebih cepat untuk mengimplementasikan UU 41 tahun 2009 agar tidak semakin banyak lahan pertanian pangan yang produktif dikonversi menjadi lahan non pertanian, seperti pemukiman dan pertokoan. Pak De sedih sekali bila melihat hal seperti itu terjadi.

7.2.6 Memanfaatkan Kekayaan Budaya

1. **Tanya:** Isu apalagi pak De yang perlu kita perhatikan agar manusia yang mendiami negeri ini dapat menggapai kemakmuran ekonomi dan ketentraman batin? Cara kita membangun negeri ini rasanya sulit menghasilkan kemakmuran bagi semua orang, apalagi ketentraman batin.

Answer: Soal ketentraman batin itu urusan masing-masing individu, pemerintah hanya dapat memfasilitasi dan memberi perlindungan. Aspek pribadi dari ketentraman itu sebaiknya tidak diintervensi oleh pemerintah. Tetapi untuk kemakmuran ekonomi, pemerintah dapat berbuat lebih banyak. Meskipun kemakmuran ekonomi itu berkenaan dengan materi, pembangunan ekonomi kita tidak harus mengandalkan kekayaan materi sebagai modal pembangunan. Kita memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi (Kennedy, 1942; Barnouw, 1946), yang sebagian besar diantaranya belum banyak dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi. Menurut hasil penelitian Franke et al. (1991), nilai kultural menjelaskan lebih dari 50% keragaman pertumbuhan ekonomi. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh Lian & Oneal (1997).

2. **Tanya:** Bagaimana caranya pak De? Kekayaan dalam bentuk kayu dapat dengan mudah ditebang, diolah terlebih dahulu baru dijual atau habis ditebang langsung dijual. Batubara juga begitu, tinggal membuka tanah penutup, keruk batubaranya, lalu dijual. Habis perkara. Bagaimana memanfaatkan budaya dalam pembangunan?

Answer: Pertanyaan cengeng seperti ini paling sering disampaikan. Bagaimana caranya? Wong hanya motong kayu atau mengeruk batubara lalu menjualnya kok disebut pembangunan. Pembangunan ekonomi itu adalah penciptaan nilai tambah. Nilai tambah apa yang sudah kamu berikan kepada batubara dan kayu glondongan itu atau

nilai tambah apa yang akan kamu berikan kepada batubara dan kayu glondongan itu? Memang benar bahwa memasukkan budaya ke dalam pembangunan itu membutuhkan suatu pemikiran ulang tentang tujuan pembangunan dan perlakuan terhadap konsep budaya yang kompleks (Radcliffe, 2006). Pembangunan ekonomi kultural bermakna mengungkit bakat kreatif, warisan, dan aset kultural kita untuk merangsang, mendorong, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun kemakmuran komunitas.

Ketika pembangunan itu dimaknai sebagai modernisasi, maka budaya atau kebiasaan yang dianggap ketinggalan jaman harus digantikan dengan budaya yang lebih modern. Perhatian orang terfokus pada unsur budaya yang mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi (Cochran, 1958; Granato et al., 1996). Konyolnya, budaya barat dianggap atau dipaksakan untuk dianggap lebih modern ketimbang budaya timur, termasuk budaya Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemikiran seperti ini mulai ditinggalkan dan kini pemikiran pembangunan sedikit banyak telah memperhatikan keberagaman budaya masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri patut dipertanyakan apakah memang seharusnya digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan dalam pembangunan adalah pertumbuhan PDB yang dari berbagai penelitian tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan manusia.

Manusia semakin menyadari bahwa budaya merupakan komponen dasar dari pembangunan berkelanjutan. Sebagai suatu sektor kegiatan, melalui warisan tangible dan intangible, industri kreatif dan berbagai bentuk ekspresi artistik, budaya merupakan penyumbang sangat kuat bagi pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan perlindungan lingkungan. Sebagai tempat penyimpanan pengetahuan, makna, dan nilai yang merembesi semua aspek dari kehidupan kita, budaya juga menentukan cara manusia hidup dan berinteraksi pada skala lokal maupun global. Budaya merupakan medium bagi individu untuk mengekspresikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan oleh karena itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Yang terpenting dari semua debat tentang budaya dan pembangunan adalah timbulnya kesadaran untuk menempatkan manusia di pusat dari aksi pembangunan. Manusia sebagai subyek pembangunan sering dijadikan obyek pembangunan oleh manusia lainnya. Kita semua pantas bersyukur, bahwa setelah diabaikan un-

tuk jangka waktu yang sangat lama dalam diskursus pembangunan, akhirnya manusia sampai juga kepada kesadaran bahwa budaya tidak boleh dan tidak dapat ditinggalkan dalam pembangunan. Bahkan rasanya tidaklah berlebihan bila pembangunan itu sendiri seharusnya merupakan bagian dari suatu budaya.

Pak De akan memberikan beberapa contoh bagaimana pembangunan dan budaya tidak sepatutnya dipisahkan satu dari yang lain:

- (a) Berapa biaya restorasi Candi Borobudur dan berapa lapangan kerja yang tercipta selama restorasi dan setelah restorasi ketika Candi Borobudur menjadi tempat tujuan wisata? Sampai berapa lama dampak tersebut akan berlangsung?
- (b) Pemerintah Indonesia pernah memiliki program pemukiman kembali masyarakat (suku) terasing yang akhirnya banyak yang gagal karena mengabaikan kebiasaan dari masyarakat yang dimukimkan kembali tersebut (Li, 1999). Tujuan dari program tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan pemerintahan dan pengaturan. Sementara itu, kebutuhan dan kebiasaan dari pihak yang dimukimkan kurang terpenuhi.
- (c) Jenis makanan di Indonesia itu mungkin yang paling banyak yang dapat disediakan oleh satu negara. Jenis makan yang sangat beragam itu aset yang luar biasa. Disana ada pengetahuan dan nilai-nilai. Coba saja bila berbagai jenis makanan itu dapat dikemas dengan baik, boleh jadi Indonesia itu seperti sebuah warung besar di muka bumi ini.

3. **Tanya:** Apakah dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan paling nyata ide tentang budaya dan pembangunan ekonomi?

Answer: Ya tidak perlu harus dalam wujud yang seperti itu, meskipun terbentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedikit banyak mencerminkan pentingnya mengaitkan pembangunan ekonomi dengan kebudayaan yang sudah kita miliki. Hal yang lebih penting itu adalah bagaimana pembangunan ekonomi dan kebudayaan itu saling bergandengan dan saling memperkuat. Jadi, tidak ada lagi pemilahan antara ekonomi yang berbasis budaya dan ekonomi yang tidak berbasis budaya.

4. **Tanya:** Wah kalau terlalu banyak orang asing yang datang apa tidak membahayakan negara kita pak De? Bagaimana kalau ada sebagian dari mereka tergoda untuk memiliki negara ini seperti pernah terjadi di masa lampau pak De?

Answer: Orang Indonesia harus bangga dengan bangsa dan negaranya sendiri. Dengan begitu, setiap putra putri ibu pertiwi ini bersedia mengorbankan diri demi kejayaan bangsa dan negaranya. Ada pepatah Jawa yang berbunyi: “sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati.” Pepatah ini secara harfiah berarti bahwa satu sentuhan di dahi dan satu (lebar) jari saja kehilangan tanah pertiwi maka kematianlah taruhannya. Dahi bermakna harga diri yang harus dilindungi jangan sampai tersentuh oleh pihak lain. Sentuhan terhadap dahi bermakna pelecehan dan penghinaan yang luar biasa terhadap harga diri sehingga layak untuk ditebus dengan nyawa. Demikian pula halnya dengan tanah tumpah darah ini yang harus dibela hingga titik darah penghabisan.

5. **Tanya:** Mengingat budaya di Indonesia itu sangat beragam, apakah pendekatan pembangunan yang kita lakukan harus disesuaikan dengan keragaman tersebut pak De? Nah, hal tersebut merembet ke isu pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang akan menjalankan pembangunan tersebut. Apakah pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan keragaman tersebut?

Answer: Tanya, kamu masih ingat kata-kata bijak bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Kamu sudah tahu rasa pisang emas kan? Bayangkan ketika kamu beli durian petruk tetapi rasanya persis rasa pisang emas, apa reaksimu? Sebel kan? Itu guyonnya Tanya.

Benar, keragaman itu harus kita jaga dan kita manfaatkan. Tetapi pendidikan dan pembangunan yang kita jalankan cenderung mereduksi keragaman tersebut. Pendidikan seharusnya tidak menceraabut seseorang dari keadaan lingkungan dimana dia hidup, tetapi justru harus memperkenalkan seseorang kepada lingkungannya dan memperkuat hubungan keduanya. Sulit disangkal bahwa dalam pendidikan itu harus memuat beberapa hal dasar yang sama untuk seluruh wilayah, tetapi jangan sampai keunikan daerah menjadi hilang karenanya. Pembangunan ekonomi juga tidak selayaknya direduksi menjadi berapa dolar yang dihasilkan dalam sehari. Hal seperti ini mungkin cocok untuk orang yang tinggal di New York, tetapi pasti tidak cocok untuk orang yang tinggal di pinggir Danau Sentani sana.

Keragaman itu bagi pak De sedikit banyak sangat mencerminkan adanya *freedom* dalam masyarakat. Kebebasan ini harus kita jaga dan kita hidupi. Di dalam sistem yang otoritarian, penyeragaman itu selalu terjadi. Dengan segala macam kelemahannya, sebenarnya bangsa kita itu sudah memiliki modal untuk berdemokrasi. Tidak kurang dari pemenang Hadiah Nobel Amartya Sen yang mengemukakan bahwa tujuan pembangunan adalah menyebar luaskan kebebasan (Sen, 1999). Sayangnya, akhir-akhir ini banyak bertumbuhan kelompok yang anti pluralisme dan sangat intoleran terhadap perbedaan. Kita harus selalu waspada dan jangan pernah membiarkan kelompok seperti ini tumbuh besar. Memang benar, mengelola keberagaman itu bukan hal mudah. Salah satu kuncinya adalah *trust*! Ingat, *trust* itu lebih sulit berkembang di antara kelompok masyarakat berbeda identitas.

Meski sudah banyak kemajuan, aspek budaya lain yang masih harus perbaiki, paling tidak pada beberapa kelompok masyarakat, adalah apa yang disebut dengan *power distance*, yakni sejauh mana anggota lembaga atau organisasi yang lebih lemah dalam suatu negara berharap dan menerima bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak merata (Hofstede et al., 2010). *Power distance* dideskripsikan berdasarkan sistem nilai dari anggota yang lebih lemah. Sementara itu, pembagian kekuasaan biasanya dijelaskan oleh perilaku dari anggota yang lebih berkuasa. Dalam komunitas yang menganut *power distance* yang tinggi memandang pemimpin sebagai sosok yang berbeda dengan dirinya, misalnya keturunan dewa atau keturunan darah biru. Sebaliknya, komunitas yang menganut *power distance* yang rendah memandang pemimpin sebagai salah satu dari anggota komunitas tersebut. Dalam masyarakat yang seperti ini, kader pemimpin yang berkualitas menjadi lebih sulit muncul. Komunitas pertama berciri feodal, sementara komunitas kedua berciri egaliter sehingga pemimpin dapat muncul dari segala penjurur dalam masyarakat.

6. **Tanya:** Lha untuk menjalankan hal seperti itu kan sulit sekali pak De?

Answer: Memang benar, sulit. Tetapi kan aneh bila kompensasinya adalah penyederhaan dan penyeragaman yang sebenarnya tidak menjawab persoalan dari subyek pendidikan dan pembangunan yang sesungguhnya. Siapa yang memberi hak kepada para ekonom dan teknokrat untuk menentukan pembangunan harus seperti yang terjadi sekarang ini? Subyek dari pembangunan itu sebenarnya siapa? Apa-

kah mereka sudah pernah ditanya tentang pembangunan yang mereka inginkan?

"Remember, if you're headed in the wrong direction, God allows U-turns!"

Allison Gappa Bottke

"The religion of one age is the literary entertainment of the next."

Ralph Waldo Emerson

"We have just enough religion to make us hate but not enough to make us love one another."

Jonathan Swift

8

Spiritual

1. **Tanya:** Pak De, membangun negeri, terlebih negeri kita yang sudah remuk redam seperti ini, rasanya hampir mustahil dilakukan tanpa diiringi dengan kekuatan spiritual yang memadai. Malam ini, yang kebetulan malam Jum'at Legi, saya ingin pak De membahas soal spiritual. Saya mengajukan permintaan ini karena selama beberapa malam kita diskusi, pak De ini terlihat sangat rasional. Sementara itu, saya yakin benar bahwa serasional-rasionalnya seseorang, maka pasti ada sisi irasioanalnya yang demi gampangnya saya sebut dengan spiritual ini. Bagaimana pak De?

Answer: Rupanya malam ini merupakan malam yang paling sulit bagi pak De selama kehadiranmu disini. Mungkin lebih tepat bila pak De yang lebih banyak tanya, karena secara kasat mata kamu yang lebih rajin beribadah. Meskipun pak De tidak paham tentang spiritual, tetapi anggapanmu bahwa seolah-olah bab spiritual bukanlah sesuatu yang rasional pak De kok agak kurang sepakat.

2. **Tanya:** Tetapi pak De sepakat kan bahwa membangun negara itu juga perlu memperhatikan aspek spiritual?

Answer: Sekali lagi, meskipun pak De ini kurang paham tentang spi-

ritualisme, rasanya pak De sulit untuk tidak sepakat bahwa aspek spiritual itu sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. Apalagi, salah satu sila dalam dasar negara kita adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tetapi lucu juga ya, tidak paham namun dapat sepakat.

3. **Tanya:** Anggaplah malam ini malam rekreasi saja pak De. Setelah beberapa malam kita diskusi masalah keruwetan dunia dengan berbagai pemahannya, kerusakan lingkungan dan sumberdaya alamnya, keserakahan manusianya, malam ini kita rileks sambil sekali-sekali membayangkan kenikmatan sorga yang serba sempurna. Siapa tahu kita juga bagian dari manusia yang masuk sorga.

Answer: He he he amin, tetapi kamu saja yang masuk sorga, pak De masih mikir-mikir dahulu.

4. **Tanya:** Pak De ini masuk sorga saja kok masih mikir-mikir, memangnya ada apa pak De?

Answer: Pak De masih mencerna kata-katamu tadi bahwa kehidupan di sorga itu serba sempurna. Pak De pernah juga mendengar cerita bahwa dahulu Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini karena tertipu atau ditipu oleh syetan atau iblis ketika masih di sorga sana. Bukankah itu artinya di sorgapun ada tukang tipunya? Jangan-jangan kamupun setelah masuk sorga juga akan tertipu sehingga kembali lagi ke dunia ini. Lha kapan selesainya?

5. **Tanya:** Hmmmm

Answer: Ada apa Tanya kok wajahmu terlihat aneh begitu?

6. **Tanya:** Pelan-pelan pak De, memang Tanya agak shok mendengar penuturan pak De tadi. Padahal, sejak kecil saya itu dididik untuk berbuat yang baik dan rajin beribadah agar nanti kalau meninggal dimasukkan ke dalam sorga. Terus bagaimana pak De?

Answer: Kalau tidak ingin bingung, ya ikuti saja pelajaran yang sudah kamu peroleh itu. Kalau kamu bertanya ya memang dapat membuatmu bingung dan sangat mungkin malah membuatmu kesasar.

7. **Tanya:** Maksudnya pak De?

Answer: Lho kan jelas, kalau kamu tidak ingin bingung dan kesasar ya tinggal saja dalam rumah yang jelas sudah kamu kenali dengan baik.

8. **Tanya:** Lha kalau seperti itu kan tidak kemana-mana pak De?

Answer: Lha sudah jelas kan Tanya? Semua itu terserah kamu, apakah kamu ingin percaya sebatas katanya, atau ingin percaya karena kamu telah melihat, merasakan, atau mengalami sendiri. Ketika kamu belum pernah minum kopi luwak, mungkin kamu sudah percaya bahwa kopi luwak itu enak dari cerita orang. Tetapi sepintar-pintarnya orang bercerita tentang kopi luwak dan sehebat-hebatnya kamu membayangkan kopi luwak, tetap saja kepercayaanmu tentang kopi luwak itu bukanlah kepercayaan yang nyata, bahkan bagimu sendiri. Lebih parah lagi, bila kamu ternyata juga belum pernah minum kopi yang biasa, maka apa yang kamu yakini tentang rasa kopi luwak dapat sangat jauh berbeda dengan rasa kopi.

9. **Tanya:** Pak De, katanya kopi luwak itu enak sekali dan harganya juga mahal sekali. Pak De sudah pernah mencobanya?

Answer: Pak De tahu bahwa harga kopi luwak itu memang tinggi sekali. Untuk ukuran pak De maka harga tersebut ya tergolong mahal, tetapi untuk ukuran orang yang banyak uang mungkin ya murah. Soal rasanya, pak De tidak dapat berkomentar. Ketika pak De minum kopi luwak, ada teman pak De yang juga minum kopi luwak. Padahal teman pak De itu jago minum kopi, tetapi ternyata tidak mampu membedakan rasa kopi luwak dari kopi biasa. Mungkin lidah teman pak De itu memang agak kurang cerdas ha ha ha ...

10. **Tanya:** Kita kembali ke materi diskusi. Lha kalau seperti itu, terus apa imbalan bagi orang yang rajin ibadah pak De?

Answer: Tanya, berapa yang sudah kamu bayar atas kenikmatan melihat jagad raya ini? Berapa yang sudah kamu bayar ketika setiap bangun pagi kamu dapat mendengar kicauan burung yang begitu ceria menyambut hari? Pak De tidak tahu apakah selama umur manusia yang paling panjang yang mungkin, semua kenikmatan tadi dapat dibayar lunas oleh manusia? Apa kamu tidak malu, kenikmatan yang kamu terima selama ini belum pernah kamu bayar lunas tetapi kamu sudah berani menuntut imbalan dari ibadahmu yang tidak seberapa itu? Mengucapkan kalimat pujian bagi yang Maha Terpuji dan Maha Memberi saja kok harus pakai hitungan dan penjabatan segala itu maksud dan maunya apa? Memangnya manfaat dari mengucapkan 33 kali itu lebih besar dari manfaat mengucapkan kurang atau lebih dari 33 kali? Kok kayak fungsi parabola concave saja. Tanya, kalau

kamu yakin bahwa melakukan sesuatu hal tertentu itu baik adanya, maka lakukanlah sebanyak dan sesering mungkin dengan ikhlas. Bagi pak De, ibadah mengharap imbalan seperti itu ya pada hakekatnya menyekutukan pihak yang diibadahi itu. Seakan-akan tanpa pahala maka pihak yang diibadahi itu menjadi tidak ada artinya. Tanya, bayangkan kamu mengharap kedatangan orang yang paling kamu cintai yang sudah lama tidak pernah bertemu karena tinggal di tempat yang sangat jauh. Entah itu pasangan hidupmu, entah anakmu, entah ibumu, bapakmu, atau siapapun dia. Mana yang lebih berharga menurutmu, bertemu dengan orang yang kamu cintai itu atau mendapatkan buah tangan yang dibawanya?

11. **Tanya:** Iya ya pak De, kalau kepada Yang Maha Pemurah saja sudah sangat kalkulatif, apalagi terhadap yang bukan Maha Pemurah. Terlalukah kalkulatif terhadap perbuatan baik itu bukankah perbuatan orang kikir pak De?

Answer: Sekarang kamu balik ceritanya. Misalnya kamu yang sedang pergi jauh dan anak-anakmu yang merindukanmu. Tentu kamupun merindukan segera bertemu dan berkumpul dengan anak-anakmu. Sebelum kamu berangkat pulang, kamu menelpon anak-anakmu untuk menanyakan oleh-oleh yang mereka inginkan. Misalnya kamu bertanya, kakak adik mau dibawain oleh-oleh apa nih? Terus mereka menjawab spontan, tidak membawa oleh-oleh juga tidak masalah asalkan mama cepat pulang dengan selamat. Sementara itu, kolegamu yang melakukan hal yang sama mendapat jawaban dari anak-anaknya "mama kirimkan saja oleh-olehnya sekarang, mama dapat pergi lebih lama kok."

12. **Tanya:** Wah menyedihkan sekali menjadi orang tua dengan mempunyai anak yang seperti itu. Kalau tidak salah ingat nih pak De, dahulu waktu Tanya kecil memang Tanya mengharap dibawa oleh-oleh ketika bapak atau ibu atau keduanya bepergian. Oleh-oleh lebih berharga ketimbang orang tua. Tetapi setelah Tanya dewasa, melihat beliau berdua pulang dengan selamat saja rasanya sudah lebih dari cukup.

Answer: Ha ha itu artinya ada proses pendewasaan. Orang bilang, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Cobalah kamu bandingkan antara kenikmatan yang kamu peroleh tanpa kamu minta

dengan kinikmatan yang kamu usahakan sendiri. Janganlah menjadi manusia yang tidak tahu diri Tanya.

13. **Tanya:** Jadi pak De tidak ingin masuk sorga setelah mati nanti? Terus pak De mau kemana nanti?

Answer: Begini Tanya, pak De hanya ingin memahami sesuatu itu dengan konsisten. Katanya, segala sesuatu yang bukan Pencipta pastilah ciptaan. Katanya juga, sesempurna-sempurnanya ciptaan adalah manusia. Pak De menerima penuh kedua pernyataan tersebut. Jadi, kalau pak De ini manusia pastilah lebih sempurna daripada sorga, tingkat berapapun dia. Lho ciptaan yang paling sempurna kok berharap tinggal di ciptaan yang tidak lebih sempurna itu bagaimana ceritanya? Bagi pak De, hal demikian itu tidak masuk akal, merupakan kebodohan, bahkan penghinaan bagi pihak yang menciptakan pak De-mu ini. Lha pak De-mu ini juga meyakini bahwa pak De berasal dari pencipta dan nanti kembali kepada pencipta tersebut. Pak De yakin sepenuhnya bahwa pencipta pak De itu bukanlah sorga yang kamu dambakan itu.

14. **Tanya:** Penjelasan pak De sangat menantang pemikiran, tetapi membahas hal yang demikian ini biasanya tidak cukup hanya dengan akal melainkan perlu dilengkapi dengan dalil dari kitab suci. Apakah pak De dapat menunjukkan dalil-dalilnya dalam kitab suci?

Answer: Wah pak De menghindari dalil-dalil dari kitab suci karena kitab suci itu sudah dimonopoli oleh golongan tertentu. Hanya golongan itulah yang berhak memiliki dan menafsirkan kitab suci. Daripada pak De dikuyo-kuyo oleh golongan seperti itu, ya lebih baik tidak usah menyinggung kitab suci apapun. Kalau kamu hendak mengaitkan dengan dalil dalam kitab suci, ya itu urusanmu. Pak De hanya menyampaikan apa yang pak De yakini benar, baik secara akal maupun rasa. Kalau ternyata pemahaman pak De ini cocok dengan dalil dalam kitab suci ya sukur, kalau tidak cocok ya tidak masalah.

15. **Tanya:** Tetapi kitab suci itu kan dawuhnya Yang Maha Kuasa pak De?

Answer: Pak De agak kurang sreg dengan pilihan sisi yang maha kuasa. Memang tidak ada yang salah, tetapi mengapa yang dipilih sisi yang maha kuasa. Selera spiritualmu masih sangat memprihatinkan. Carilah yang lebih elegan Tanya.

Ketika kita sekolah dahulu, tidak semua ucapan bapak dan ibu guru dapat kita tangkap dan pahami dengan benar. Ada beberapa bagian yang ditafsirkan secara berbeda oleh murid yang berbeda. Betapa sombongnya diri ini jika merasa sudah tahu dan mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Maha Tinggi nan Agung dalam kitab yang diturunkanNya?

16. **Tanya:** Memangnya salah pak De menyebut yang maha kuasa?

Answer: Ini bukan soal salah atau benar, hanya soal kepantasan saja. Kuasa itu bila tidak dibarengi dengan sifat unggul yang lain hanya akan mendatangkan bencana bagi orang banyak. Memang benar, kebanyakan orang ingin langsung mencapai yang maha kuasa itu dan karena itu yang sering diucapkan ya sifat maha kuasa itu.

17. **Tanya:** Sejauh pengertian akal, penjelasan pak De sangat masuk akal dan dapat Tanya terima. Tetapi bagaimana dengan keimanan? Karena akal manusia itu terbatas maka manusia perlu iman.

Answer: Kamu ini ngomong apa sebenarnya. Akal dan iman kok diposisikan bertentangan. Gunakanlah akalmu untuk meningkatkan keimananmu. Keimanan yang kamu tegakkan sendiri, bukan keimanan kata orang.

18. **Tanya:** Bagaimana bila dengan menggunakan akal menyebabkan goyahnya iman?

Answer: Lha apa gunanya kamu mempertahankan keimanan yang tidak berkualitas seperti itu. Kalau keyakinanmu atas sesuatu menjadi goyah karena kamu menggunakan akal maka itu pertanda ada yang kurang beres dengan keyakinanmu tadi. Perubahan keyakinan itu bukan sesuatu yang buruk dan sangat biasa terjadi. Kata orang, wajibul yaqin (buah sare'at), ainul yaqin (buah tarekat), dan haqul yaqin (buah hakekat) itu masih mungkin berubah. Keyakinan yang sudah tetap dan tidak akan pernah berubah itu bila sudah sampai tingkat isbatul yaqin (buah ma'rifat). Ini dicapai oleh orang yang sudah paham tentang realitas dan menjadi realitas itu sendiri.

19. **Tanya:** Bagaimana pandangan pak De terhadap perdebatan antara santri dan kaum abangan tentang perlu tidaknya melaksanakan syariat. Penganut aliran kepercayaan atau ada juga yang menyebut dengan penganut aliran kebatinan kan cenderung kurang menganggap

penting bahkan cenderung meninggalkan syareat. Ibarat makan pak De, kalau hanya membatin saja kan tidak dapat menjadi kenyang. Kalau ingin kenyang ya harus benar-benar makan.

Answer: Pertanyaanmu semakin menggiring pak De ke dunia yang kurang pak De pahami. Tetapi berpendapat dalam diskusi kan bukan hal yang tabu. Begini Tanya, apakah kamu masih ingat ketika kamu datang di tempat pak De beberapa hari yang lalu? Kamu membawa *beef steak*, yang menurutmu kamu beli dari tempat yang sangat top, lalu kamu makan dengan lahapnya. Meskipun kamu juga membelikan untuk pak De dan bu De-mu, ternyata bu De-mu hanya makan sekedarnya, sementara pak De tidak menyentuh sama sekali.

Bagimu, makan *beef steak* itu benar-benar makan karena membuat kenyang dan menyenangkan. Sementara bagi pak De, makan *beef steak* merupakan hukuman yang membuat lapar, karena makan satu sendok akan mengakibatkan muntah tiga ember. Sebaliknya, mendol dan sayur tempe busuk bagimu merupakan barang dari neraka, tetapi bagi pak De itu merupakan sumber kenikmatan yang menyehatkan. Ada lagi orang yang meskipun sudah menelan tiga kilo ikan bakar tetapi merasa belum makan karena belum kemasukan nasi. Jadi, pak De setuju bahwa jika ingin kenyang maka orang harus makan sebagai syareatnya. Tetapi kamu juga harus sadar bahwa pengertian makan menurutmu belum tentu sama dengan pengertian makan menurut orang lain.

Kamu pasti setuju bahwa orang yang sehat jasmani dan rohaninya harus bekerja untuk menopang hidupnya. Menurutmu bekerja itu apa? Main bal-balan - teman-teman pak De menyebutnya *soccer* - itu termasuk main-main atau bekerja? Ada orang tua teman pak De dulu bilang begini sama teman pak De tersebut "kamu itu kok memegang pensil terus (masih sekolah) lalu kapan mulai bekerjanya. Apa pensil dapat membuat kenyang?" Bagi ayah teman pak De itu, bekerja artinya nyangkul di sawah atau kebun, menanam bibit, memelihara tanaman, lalu panen. Lha orang seperti kamu yang sehari-hari sibuk hanya dengan angka-angka statistik, banyak diantaranya yang tidak masuk akal, dianggapnya bukan bekerja. Faktanya, dengan menggeluti angka-angka statistik itu kamu mendapatkan gaji yang tidak kecil sehingga dapat makan *beef steak* kapan saja. Apalagi dari angka-angka ajaib itu kemudian kamu mampu memunculkan kesimpulan adanya dampak sistemik sehingga perlu *bail out* atau penyalangan, maka kamu

kemungkinan kicipratan bonus lebih banyak lagi. Menurutmu, kamu itu bekerja atau sekedar bermain teka-teki dengan angka-angka?

20. **Tanya:** Ya pak De, Tanya dapat memahami penjelasan pak De. Dengan pemahaman seperti itu, sebenarnya tidak perlu ada kegaduhan saling menyalahkan dan menyesatkan ya pak De?

Answer: Tanya, paham apapun yang membuat hati ini cepat panas dan marah serta pikiran menjadi cupet, maka sebaiknya kamu waspada dan segera mawas diri. Orang yang berhasil dalam belajar dicirikan oleh sikapnya yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebaliknya, orang yang merasa paling tahu dan paling benar, maka sesungguhnya dia telah mengalami kegagalan dalam belajar. Oleh karena itu, carilah makanan batin yang menyehatkan, bukan makanan yang membuat batin menjadi gersang.

21. **Tanya:** Ingin sih menjadi orang yang tidak cepat naik darah, sabar, dan rileks, tetapi bukan malas. Lha apa ada resepnya supaya orang itu tidak cepat marah, tersinggung, dan perasaan negatif lainnya?

Answer: Wah pak De juga tidak tahu, apakah ada resep tolak marah dan anti tersinggung seperti yang kamu maksud. Tetapi untuk mengerem terlalu mudahnya timbul rasa marah dan tersinggung, maka ada baiknya kamu mulai mengamati dirimu sendiri. Umumnya orang itu lebih suka mengamati segala macam yang menarik diluar dirinya, sementara obyek pengamatan yang paling berharga sering terlupakan, yakni diri sendiri.

22. **Tanya:** Mengamati diri sendiri itu apa hebat dan menariknya pak De?

Answer: Wee lha dalah kamu ini ... how can you say that? Bahkan ada seorang rasul yang mengatakan bahwa "jika engkau ingin mengenal tuhanmu, maka kenalilah dirimu." Secara bertahap mulailah dengan mengamati dirimu sendiri, apakah ketika dia sedang sedih, marah, gembira, atau yang lainnya. Misalnya kamu sedang sedih dan marah, maka bertanyalah siapa sebenarnya yang sedang sedih dan marah ini? Pasti jawabnya ya aku. Terus tanyakan lagi kepada si aku tadi, he si aku apa yang menyebabkan kamu sedih dan marah? Misalnya jawabnya karena tidak lulus ujian. Tanya lagi, memangnya dengan sedih dan marah keadaan dapat berubah menjadi lulus atau lebih menguntungkan bagi diri sendiri? Si aku tadi sebenarnya tahu jawabannya, tetapi malu menyampaikan secara jujur karena akan membuka kedok

dirinya. Biasanya, si aku tadi mengutarakan pembenaran atas sikap sedih dan marah yang sudah terjadi.

Tentu saja si aku tadi tahu bahwa dengan sedih dan marah tidak ada yang berubah dan sedih serta marah itu tidak membawa kebaikan bagi siapapun. Lalu siapa sebenarnya yang sedih dan marah tadi? Itu tidak lain adalah **aku yang** tidak ingin gagal dalam ujian. Lha didalam diri ini banyak sekali **aku yang** seperti itu, misalnya **aku yang** tidak mau disebut bodoh, **aku yang** tidak mau disebut buruk, **aku yang** tidak mau disebut peragu, **aku yang** tidak mau disebut seperti kerbau dan tak berhingga **aku yang aku yang** yang lain. Ringkasnya, **aku yang** itu adalah **aku berpredikat** yang selama ini membajak dan mewakili diri kita. Lha kalau polah tingkah aku berpredikat itu sudah dapat dikendalikan, maka aku tak berpredikat yang akan mengisi diri kita ini. Agar tampak lebih keren, lebih berwibawa, dan lebih sakral, maka aku tak berpredikat tadi kita sebut saja dengan aku sejati. Lho kelihatan lebih serius dan berbobot kan? Sedangkan aku-aku yang lain kita sebut saja sebagai aku palsu.

23. **Tanya:** Jadi, mengamati diri sendiri itu berguna untuk membedakan antara aku sejati dan aku palsu pak De? Terus yang dirasakan oleh aku sejati apa?

Answer: Rasa senang dan rasa susah itu pekerjaan aku palsu yang hobi membajak dan mengatas namakan diri kita. Makin sering ketahuan tingkah polahnya, maka makin malu dia untuk sering muncul mewakili diri kita. Lha kalau aku sejati telah sepenuhnya menguasai diri kita, ya tidak ada rasa sedih atau rasa gembira. Rasa sedih dan rasa gembira dapat diatur kapanpun hendak dirasakan. Nah, keadaan jadi berbalik - dahulunya dikuasai oleh rasa sedih dan gembira menjadi menguasai rasa sedih dan gembira. Itulah manusia yang berjihad tenang dan ketika kembali kepada penciptanya semoga mendapat sambutan ucapan "wahai jiwa yang tenang kembalilah kepadaKu." Di antara sedih dan bahagia itu ada kedamaian (Tolle, 2009).

24. **Tanya:** Lho, kalau begitu hidup ini kan seperti sandiwara saja pak De?

Answer: Bagi orang yang waskito dan waspada maka hidup ini memang sandiwara belaka; kapan tertawa dan kapan menangis dapat diatur. Kalau kamu belum tahu letak sandiwaranya dimana, maka sebenarnya kamu belum hidup! Tetapi kebanyakan manusia lebih memilih dikendalikan rasa senang dan rasa susah yang datang dan per-

ginya sulit diterka. Karena begitu hebatnya sang sutradara dan pihak yang memerintah sutradara, maka para pemain seperti kita ini tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang bermain sandiwara. Sandiwara yang sempurna akan tampak sebagai kejadian sesungguhnya.

25. **Tanya:** Pak De, siapa sih yang tidak ingin bebas dari rasa susah? Lagi-lagi persoalannya kan bagaimana caranya?

Answer: Sebagai langkah permulaan, gunakan akal pikiranmu Tanya. Akal pikiran itu jika digunakan dengan benar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi entah apa sebabnya kebanyakan orang tidak “menggunakan” akal pikiran sama sekali. Malah sebaliknya malah yang terjadi, yakni akal pikiran yang mengendalikan si manusia sehingga si manusia tersebut sampai menyangka akal pikiran itulah dirinya.

26. **Tanya:** Wah pak De jangan kelewatan begitu. Namanya orang hidup, kalau dia waras, pasti menggunakan akal pikirannya. Tanya ini bukan orang jenius pak De, tetapi soal menggunakan akal pikiran rasanya Tanya selalu melakukannya.

Answer: Lho pak De bukan hendak melecehkan siapapun. Ingat Tanya, pak De memakai kata “menggunakan.” Artinya, disini ada upaya aktif. Ada yang “menggunakan” dan ada yang digunakan, yakni akal pikiran itu. Nah, jika Tanya pernah menggunakan akal pikiran, mampukah Tanya tidak menggunakannya? Mampukah kamu membebaskan diri dari akal pikiranmu sendiri Tanya? Kalau kamu mampu menggunakan akal pikiranmu, maka seharusnya kamu juga mampu tidak menggunakan akal pikiranmu?

27. **Tanya:** Lha itu pak De, Tanya kok tidak mampu menghentikan kerja akal pikiran. Apa mungkin kerja akal pikiran itu dihentikan?

Answer: Fokus pak De lebih kepada kemampuan kita untuk mengendalikan akal pikiran tadi - kapan kita gunakan dan kapan tidak kita gunakan, bukan soal berhenti kerjanya akal pikiran itu. Selama tidak kita gunakan, boleh saja akal pikiran itu bekerja sendiri kalau memang mungkin. Jadi, kejadian yang sebenarnya itu adalah akal pikiran yang menunggangimu, bahkan sampai tidak dapat tidur nyenyak, bukan kamu yang menggunakan akal pikiranmu.

Coba kamu perhatikan kejadian hipotetik berikut ini. Misalnya ada orang yang baru pertama kali bertemu denganmu menyatakan mbak

kok muka sampeyan kayak monyet sih. Coba, pikirkan dengan serius, apa yang berubah dengan kata-kata orang tadi? Orang asing berikutnya menyatakan mbak wajah sampeyan sangat cantik mirip bintang Hollywood apa sih rahasianya? Adakah yang berubah dengan pujian ini? Kalau kamu gunakan akal sehatmu, niscaya kamu tidak terusik sedikitpun oleh keduanya. Tetapi kalau kamu kalahkan akal sehatmu dengan emosimu maka terombang ambinglah hidupmu. Kalau kamu sudah mahir menggunakan akal sehatmu, maka sangat banyak energi yang dapat dihemat sehingga dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Apa yang lazim terjadi adalah hal sebagai berikut “ya masuk akal si Rustam marah karena dia dipanggil dengan rusak tampang.” Boleh jadi masuk akal, tetapi akal yang tidak sehat!

28. **Tanya:** Ooohh, sekarang Tanya mengerti apa yang pak De maksudkan. Benar pak De, Tanya atau mungkin juga banyak orang lain sebenarnya tidak sadar sedang dikendalikan, bahkan oleh akal pikiran kita sendiri.

Answer: Sukurlah Tanya bila kamu sudah menyadarinya. Kita sering salah sangka bahwa akal pikiran itu adalah diri kita. Bebaskan kamu dari akal pikiranmu itu.

29. **Tanya:** Beberapa kali pak De menggunakan ungkapan yang dapat ditafsirkan bahwa pak De adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Tetapi tidak seperti umumnya orang yang takut, bahkan satu-satunya takut, kepada Tuhan, kok pak De kelihatannya tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan.

Answer: Meskipun pak De tidak mampu membuktikan, tetapi kamu benar bahwa pak De percaya bahwa Tuhan itu ada, paling tidak ya Tuhannya pak De sendiri atau yang pak De anggap sebagai Tuhan. Orang lain, termasuk kamu, tidak harus mengakui atau menghormati Tuhan pak De. Dia Maha Besar, Dia Maha Agung, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha Mendengar, Dia Maha Bercanda, Dia Maha Menentukan, dan Dia sama sekali tidak menakutkan. BagiNya, pak De ini ibarat debu yang tidak berarti apalagi berguna. Pak De tidak takut, karena Dia memang tidak pantas untuk ditakuti dan disamping itu juga percuma. Apapun yang pak De lakukan dan usahakan, keputusan akhirnya ada padaNya. Dia Maha Mutlak.

30. **Tanya:** Kok pak De kelihatannya punya hubungan dekat sih?

Answer: Maksudmu sama Tuhan pak De? Ya jelas, wong Dia lebih dekat dari urat leher pak De sendiri. Ketika mengadu kepada anggota DPR, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa tidak mendapat tanggapan, pak De mengadu kepada Tuhan pak De. Belum tentu dapat tanggapan juga sih.

31. **Tanya:** Ketika tidak memperoleh tanggapan dari Tuhan, terus apa yang pak De lakukan?

Answer: Ya pak De lepaskan kekesalan pak De dengan ngomel kepada Tuhan pak De, terkadang dengan ungkapan yang agak kasar dan tidak sopan juga. Lha kalau pak gubernur, bupati, camat atau pak kepala desa pak De marahi pasti pak De kena tempeleng, paling tidak oleh ajudannya yang biasanya lebih galak. Tuhan pak De tidak pernah menempeleng, tidak pernah marah, dan tidak pernah dendam. Tuhan pak De itu paling enak diajak bercengkerama.

32. **Tanya:** Pak De ini kok sepertinya yakin dan akrab banget. Kok kesannya seperti berhubungan dengan sahabat saja.

Answer: Lebih dari sekedar sahabat. Bertuhan kalau tidak menimbulkan keyakinan dan keakraban ya percuma. Memang banyak orang di jaman sekarang ini yang suka bertindak anarkis dan penuh kebencian dengan mengatas namakan kesucian Tuhan.

33. **Tanya:** Caranya untuk mencapai keyakinan terus dapat merasa akrab itu bagaimana pak De? Menggunakan bahasa apa?

Answer: Tuhan itu Maha Pandai Tanya. Kamu menggunakan bahasa apapun Tuhan mengerti. Tinggal pilih saja bahasa yang paling kamu mengerti dan paling kamu "maremi." Kalau Tuhanmu hanya mengerti satu bahasa saja, pak De jamin itu tuhan palsu. Tuhan yang bodoh seperti itu sebaiknya kamu tinggalkan saja. Soal keakraban tadi, kamu boleh menyebutnya atau mencurigainya sebagai sok akrab ... he he he ... Dan pak De tidak peduli apakah Tuhan itu dekat dengan pak De atau tidak, yang penting adalah apa yang pak De rasakan.

34. **Tanya:** Marem itu apa pak De?

Answer: Ini soal rasa Tanya, jadi agak sulit menjelaskannya. Marem itu campuran dari berbagai rasa, seperti rasa puas, rasa mantap, rasa percaya, rasa tuntas, dan rasa sebangsa itulah.

35. **Tanya:** Pak De, kalau orang berdoa itu kan ada juga yang menggunakan bahasa yang digunakan oleh nabi dalam berdoa. Bukankah mengikuti cara nabi lebih baik pak De?

Answer: Sekali lagi Tanya, yang penting kamu yakin dan merasa marem. Tentu mengikuti cara nabi itu baik, tetapi apa yang dimaksud dengan mengikuti cara nabi? Misalnya Nabi A menggunakan bahasa Alfa dalam berdialog dengan Tuhannya karena Bahasa Alfa memang bahasa nabi tersebut sehingga dimengertinya dengan baik. Nah di situ, maksud mengikuti nabi itu apakah menggunakan Bahasa Alfa tersebut atau menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang berdoa tersebut? Pak De tetap memilih bahasa yang mampu menimbulkan rasa mak enyos meskipun itu berbeda dengan bahasa yang digunakan nabi.

36. **Tanya:** Terus caranya bagaimana pak De?

Answer: Ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang, tetapi jawabannya tampaknya hampir selalu mengecewakan.

37. **Tanya:** Lho mengapa begitu pak De?

Answer: Karena orang itu sebenarnya tidak serius mencari jawabannya dan kemudian membuktikannya. Mereka umumnya sekedar ingin tahu saja, tetapi tidak dilanjutkan menjadi laku. Apalagi, orang jaman sekarang itu inginnya serba instant, padahal topik yang sedang kita bicarakan ini tidak mungkin dicapai secara instant seperti itu. Apalagi bagi orang yang ingin mendapatkan kesaktian, maka jawaban yang dicarinya sangat mengecewakan.

38. **Tanya:** Baik, Tanya berjanji untuk tidak kecewa apapun jawabannya. Lebih daripada itu, Tanya juga berjanji untuk dengan sekuat tenaga mengamalkannya.

Answer: Kunci yang dicari oleh banyak orang itu sederhana banget dan karena sederhananya itu maka banyak orang meremehkan dan mengabaikannya. Cara yang paling manjur itu adalah selalu bertingkah laku yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Disamping itu, kita harus senantiasa membaguskan hati. Tuhan atau Gusti Pangeran hanya dapat dicapai oleh hati yang bagus. Gampangnya, Gusti itu membaguskan hati.

39. **Tanya:** Lha bukankah orang hidup itu seharusnya begitu pak De? Apa hebatnya?

Answer: Dari awal pak De sudah bilang bahwa caranya sangat biasa dan sangat tidak hebat. Yang sulit itu mengubah dari “seharusnya” menjadi “senyatanya.” Kalau prinsip sederhana itu dilaksanakan oleh sebagian besar orang, maka korupsi di Indonesia ini tidak akan se-dahsyat seperti sekarang ini. Pengetahuan apapun tidak akan ada makna dan manfaatnya bila tidak dijalani dengan perbuatan. Yang paling penting itu adalah segera berbuat sambil merasakan hal yang kita yakini baik adanya itu. Banyak, atau mungkin malah semua, orang berpandangan dengan yakin bahwa jujur itu baik. Tetapi hal tersebut berhenti sampai pada ucapan saja, belum menjadi laku keseharian. Mengetahui dan menyadari jujur itu baik bukan berarti sudah jujur. Menjalani kejujuran dengan konsisten itu berat bukan kepalang Tanya.

40. **Tanya:** Bagaimana pemahaman pak De tentang kebiasaan mudik saat idul fitri? Mengapa semua orang mengenakan pakaian baru. Apakah pak De ikut menjalaninya?

Answer: Kadang-kadang pak De juga rindu mudik, tetapi tidak ngotot harus setiap tahun. Bagi pak De semua itu hanyalah simbolisme. Kamu pasti akan bertanya, menyimbolkan apa? Mudik itu menyimbolkan kembali kepada tanah asal atau kampung halaman. Ringkasnya kembali kepada asul usul si manusia tadi, yakni kampung halaman yang sejati. Inilah kampung halaman rohani. Jadi, dari tempatmu sekarang ke kampung halamanmu dimana kamu dilahirkan, kampung halaman wadag, merupakan perjalanan horisontal. Dari kampung halaman wadagmu ke kampung halaman rohanimu merupakan perjalanan vertikal.

Agar kamu dapat pulang kampung dengan lancar dan tanpa tersesat maka kamu harus mempunyai bekal dan pengetahuan yang cukup. Kamu sudah sering melakukan perjalanan menuju kampung halaman wadag dan tanpa tersesat sekalipun. Itu terjadi karena kamu punya bekal dan pengetahuan yang cukup. Bagaimana dengan kembali ke kampung halaman rohani? Apakah kamu sudah tahu jalan dan arahnya?

Selama mudik, di kampung halaman setiap orang mengenakan pakaian baru. Hal ini bermakna bahwa di setiap lebaran, kamu harus

menjadi orang yang baru dengan membuang atau meninggalkan kebiasaan buruk selama ini. Kebiasaan dan perilaku barumu itu merupakan baju barumu. Contoh yang paling mudah adalah bawang. Ketika lapisan terluar yang kering dibuang, maka muncul bawang dengan “pakaian baru.” Di akhir dari proses itu adalah sebuah “kekosongan” yang diketahui hanya oleh bawang itu sendiri. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan fitri. Inilah bekal kamu untuk kembali ke kampung halaman rohani.

41. **Tanya:** Wah yang umum terjadi adalah mengenakan baju baru dalam arti harafiah, yang tidak jarang orang memaksakan diri untuk memperolehnya. Baju yang dibeli di Pasar Tanah Abang, Pasar Senin, Pasar Klewer, dan sebagainya. Hari mudik bukan dijadikan sebagai ajang latihan perjalanan rohani, tetapi malah dijadikan ajang pamer keberhasilan duniawi.

Answer: Ya tetapi tidak perlu dicela. Apa yang mereka kerjakan toh bermanfaat juga bagi saudara-saudara kita yang tinggal di perdesaan. Para pemudik itu pastilah membawa bekal uang yang cukup yang sebagian daripadanya pasti akan dibelanjakan di kampung halamannya. Gerak ekonomi menjadi sedikit lebih cepatlah. Tentu saja masih ada manfaat lainnya.

42. **Tanya:** Pak De, perjalanan horisontal lalu vertikal tadi kok seperti isro' mi'roj? Apa manusia biasa yang bukan nabi dapat melakukannya?

Answer: Pak De tidak menyebutkan itu sebagai isro' mi'roj, melainkan perjalanan horisontal lalu vertikal. Perjalanan seperti itu dapat dilakukan oleh manusia biasa seperti kita ini bila syaratnya dipenuhi. Perjalanan vertikal itu adalah perjalanan rohani dan dalam dirimu ada roh yang akan melakukan perjalanan itu. Apanya yang aneh?

43. **Tanya:** Bagaimana mengatasi banyaknya korban kecelakaan selama mudik, terutama yang menimpa para pengendara sepeda motor pak De?

Answer: Masalahnya sendiri apa? Jawabnya gampang, yakni jangan mudik atau kalau toh mudik juga maka jaraknya jangan terlalu jauh! How? Banyaknya jumlah kecelakaan itu hanya gejala saja. Menurut pak De, problem utamanya itu adalah ketidakmerataan pembangunan wilayah. Kalau saja pembangunan wilayah itu merata, orang tidak

perlu bermigrasi terlalu jauh dari tempat kelahirannya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, sehingga kalau toh harus mudik maka jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Jika pembangunan merata di semua tempat, maka penduduk juga semakin menyebar sehingga ketika musim mudik juga tidak terjadi menumpukan kendaraan di suatu tempat yang dapat memicu kecelakaan. Semakin padat kendaraan, semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya benturan antar kendaraan. Kecelakaan dari sebab ini biasanya tidak fatal. Penumpukan kendaraan menyebabkan kemacetan sehingga cenderung mendorong pengendara untuk mempercepat laju kendaraannya ketika telah lepas dari jebakan kemacetan. Ini juga mendorong terjadinya kecelakaan yang biasanya sangat fatal.

44. **Tanya:** Pak De, mari kita mundur sedikit untuk menengok soal puasa. Tanya ingin mendengar bagaimana tinjauan pak De tentang puasa.

Answer: Kalau kamu ingin tahu pandangan yang lebih dalam sebaiknya kamu bertanya kepada orang yang paham tentang puasa. Pak De akan menyampaikan yang ringan-ringan saja, karena memang tidak paham yang beratnya. Menurut pak De, puasa orang Indonesia itu lucu. Ada yang minta dihormati dengan memaksa semua warung makan tutup di siang hari. Ini jelas pekerjaan nafsu, padahal puasa itu adalah latihan mengendalikan hawa nafsu. Kelucuan yang lain adalah selama bulan puasa inflasi menjadi lebih tinggi karena dipicu oleh peningkatan permintaan bahan makanan dan minuman. Padahal mengendalikan nafsu makan dan minum merupakan bagian dari puasa. Jadi, lapar dan dahaga saja tidak didapat! Bagaimana mau ketemu lapar dan dahaga bila konsumsi makanan dan minumannya malah meningkat ketika bulan puasa. Mendapatkan lapar dan dahaga saja belum tentu memperoleh “makna,” apalagi bila lapar dan dahaga saja tidak didapat.

45. **Tanya:** Tetapi sehari penuh menahan nafsu masak tidak memperoleh imbalan yang sepadan pak De?

Answer: Nah pertanyaanmu ini mengandung paling kurang dua hal. **Pertama** adalah soal keikhlasan. Jalankan puasa itu dengan ikhlas kalau kamu yakin itu perintah dari tuhanmu. Nilai dari tuhanmu itu bukan karena imbalan yang diberikanNya, tetapi karena Dia itu tuhanmu. **Kedua** adalah soal menahan nafsu. Kamu tidak makan dan minum sepanjang hari itu karena memang dilarang, sehingga kamu

“terpaksa” menahan nafsu. Adapun menahan nafsu yang datangnya dari dirimu sendiri itu adalah menahan nafsu antara magrib dan im-sak. Dalam periode itu kamu tidak dilarang makan dan minum semau-mu. Tetapi jika kamu mampu menahan nafsu selama periode tersebut, maka kamu dapat merasakan lapar dan dahaga selama menjalankan ibadah puasa. Laju inflasi akan turun selama bulan puasa.

46. **Tanya:** Waduh, kalau begitu selama ini banyak yang terbalik dong pak De?

Answer: Pak De tidak tahu apakah mereka yang terbalik atau justru pak De yang keliru. Tetapi menjalankan sesuatu yang baik namun hasilnya adalah sesuatu yang tidak baik bagi pak De sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan pertanyaan kritis. Sesuatu yang baik bila dijalankan oleh banyak orang mestinya menghasilkan kesolehan sosial. Tetapi bila hal tersebut malah menghasilkan kebrutalan sosial, maka sudah pasti ada yang keliru. Gitu aja kok repot.

47. **Tanya:** Pak De, percaya dengan hal atau makhluk gaib tidak?

Answer: Yang kamu maksud dengan hal atau makhluk itu apa? Kita gunakan pengertian umum saja, yakni semua yang diluar Maha Pencipta adalah makhluk. Lalu yang kamu maksud dengan gaib itu apa? Sekali lagi, kita gunakan pengertian umum saja yakni segala sesuatu yang tidak dapat dilihat, dimengerti, dan dipahami manusia adalah gaib. Dengan pengertian semacam itu, maka virus merupakan makhluk gaib bagi sekelompok orang tetapi bukan makhluk gaib bagi sekelompok orang lainnya. Ruh kamu sendiri itu gaib atau tidak? Mungkin bagi kamu masih gaib tetapi ada orang yang sudah mampu mengenali ruhnya sendiri sehingga ruh baginya tidak lagi gaib.

Jadi, gaib atau tidak gaib itu tergantung dari manusianya - kemampuan atau keterbatasannya. Karena pesan tentang gaib ini disampaikan kepada manusia, maka fokus seharusnya lebih diberikan kepada manusianya, bukan kepada makhluk gaibnya karena suatu makhluk dapat gaib bagi sekelompok orang tetapi tidak lagi gaib bagi kelompok orang lainnya. Dengan berfokus pada manusianya, maka perintah untuk mempercayai makhluk gaib itu sebenarnya perintah kepada manusia untuk menyadari keterbatasannya sendiri. Hal yang belum diketahui oleh manusia itu sangat banyak betapapun hebatnya si manusia tadi. Seberapa banyak yang belum diketahui itu gaib juga. Dus,

perintah percaya kepada makhluk gaib itu adalah perintah kepada manusia agar tetap rendah hati betapapun tinggi ilmu pengetahuannya. Ada yang mengatakan bahwa semakin banyak belajar semakin banyak yang tidak diketahuinya - disini ada pendewasaan kesadaran. Jadi, membicarakan hal gaib itu sebenarnya membicarakan keterbatasan diri, bukan kehebatan dan kekaguman seperti si Badut mampu melihat makhluk gaib. Yang terakhir ini gaibnya anak kecil.

"The great end of life is not knowledge but action."

Thomas Henry Huxley

"Wise men talk because they have something to say, but fools because they have to say something."

Plato

"An intellectual is a man who takes more words than necessary to tell more than he knows."

Dwight Eisenhower

9

Penutup

Selama kita masih bersedia berpikir dan mendialogkan buah pikiran kita secara jujur, maka kita masih mempunyai masa depan. Marilah kita tatap masa depan kita, bangsa kita, dan negara kita dengan riang gembira. Kaidah berargumen dengan valid harus dikuasai dengan baik. Ketrampilan berpikir harus terus diasah agar kita tidak mudah terjebak dalam jalan buntu. Setiap orang harus memiliki keberanian untuk berpikir secara mandiri, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Tidak ada gunanya berkeluh kesah mempertanyakan kapan datangnya seorang pemimpin yang mampu mengentaskan Bangsa Indonesia dari kenistaan dan penistaan yang terjadi selama ini. Berpikir dan bekerjalah untuk menjadi pemimpin yang diidamkan tersebut. Benar, Tuhan telah memberikan jalan, yakni menciptakan para pembaca!

Berbagai paham tidak harus dihindari atau dicurigai, tetapi mari kita pelajari dengan lebih baik dan mari kita dialogkan apa yang telah kita pelajari tersebut secara terbuka dan saling menghormati. Berbagai paham tersebut pastilah mempengaruhi pemikiran para pendiri bangsa ini yang kemudian dirumuskan dalam Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Pemikiran para pendiri bangsa harus tetap kita hormati tanpa mengekang diri kita sendiri atau generasi kita untuk mengembangkan pemi-

kiran yang berbeda dari pemikiran para pendiri bangsa kita tersebut. Jangan takut tetapi tertawalah kita ada orang yang berjualan kejahatan *neoliberalisme* atau *marxisme*. Harap dimaklumi karena mereka sedang mencari makan.

Penafsiran terhadap amanat konstitusi harus terus dilakukan dan diperbaharui sesuai dengan kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan keadaan yang berkembang. Dalam bidang ekonomi, misalnya, banyak orang yang masih takut atau bahkan anti privatisasi tanpa didasari pemahaman yang memadai tentang apa itu privatisasi. Demikian pula dengan perkembangan koperasi. Akibatnya, perdebatan publik tentang isu BUMN, koperasi dan privatisasi lebih untuk mencari popularitas ketimbang memberi pencerahan kepada khalayak. Ketakutan terhadap timbulnya monopoli terhadap suatu industri tertentu tidak lantas harus dijawab dengan menyerahkan industri tersebut kepada BUMN.

Kekacauan berpikir dan kurangnya pengetahuan sering muncul dalam perdebatan kebijakan publik. Nama rakyat sering menjadi komoditi dagangan dalam perdebatan yang sekedar mencari popularitas tersebut, misalnya yang paling populer adalah kasus subsidi BBM. Semua mengatas namakan rakyat, tetapi tidak pernah jelas rakyat yang mana sebenarnya yang sedang dibicarakan. Anehnya, hampir semua orang masih mengira bahwa yang memberi subsidi itu pemerintah. Pemerintah memang hobi memberi subsidi karena akan memperoleh nama baik. Tetapi harus diingat, pemerintah itu dapat uang dari mana? Pihak yang paling sering kita paksa untuk memberi subsidi adalah generasi yang akan datang yang belum mampu protes!

Salah kira juga terjadi dengan sumberdaya alam. Banyak orang mengira bahwa bangsa Indonesia itu dikarunia sumberdaya alam yang melimpah ruah. Ini padangan yang salah kaprah karena memang dijejalkan sejak bayi. Sesungguhnya jatah sumberdaya alam per kapita rakyat Indonesia tidak tergolong yang tinggi dan hanya setara dengan orang Israel. Banyak yang mengira bahwa tanah di Indonesia adalah tanah yang subur, padahal sama sekali tidak demikian. Tetapi kita tidak perlu menyesalinya. Bila kita kelola dengan baik, maka sumberdaya alam tersebut dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan apa yang kita miliki mari kita tatap masa depan dengan riang gembira. Kesadaran akan ciri alami negara kita sebagai negeri maritim harus dihidupkan dan terus dirawat agar tumbuh dengan sehat. Ilmu kemaritiman dan kekuatan maritim harus mendapatkan prioritas pengembangan. Laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang, kekayaan laut In-

donesia berpotensi mampu menciptakan manusia paling cerdas di muka Planet Bumi. Sayang, kelompok masyarakat yang menyandarkan hidupnya dari kekayaan laut justru merupakan kelompok yang paling miskin.

Agar kemajuan yang diraih dapat lebih bermakna maka pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan hingga tercapai *zero growth*. Kemakmuran per kapita dapat tergerogoti atau sulit dipertahankan bila pertumbuhan penduduk terus terjadi. Dengan mendayagunakan kekayaan budaya, maka kemakmuran dapat dicapai tanpa harus merusak sumberdaya alam kita. Dengan pemahaman spiritual yang lebih baik, maka jayalah Bumi Nusantara bersama penghuninya yang hidup rukun, damai, adil, dan makmur.

Bibliografi

- Abrams BA & Lewis KA. 1995. Cultural and institutional determinants of economic growth: A cross-section analysis. *Public Choice*, 83(3/4):pp. 273–289.
- Adam I & Dyson RW. 2003. *Fifty Major Political Thinkers*. Routledge, London.
- Agell J. 1996. Why Sweden's welfare state needed reform. *The Economic Journal*, 106(439):pp. 1760–1771.
- Agnani B, Gutierrez MJ, & Iza A. 2005. Growth in overlapping generation economies with non-renewable resources. *Journal of Environmental Economics and Management*, 50(2):pp. 387 – 407.
- Aivaziana VA, Ge Y, & Qiu J. 2005. Can corporatization improve the performance of state-owned enterprises even without privatization? *Journal of Corporate Finance*, 11:791–808.
- Albrecht AE. 1937. Economic theory of consumers' coöperation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 191:pp. 17–28. Consumers' Coöperation.
- Anonimous. 2007. Cooperatives as a business organization; lessons from cooperative organization history. *Monograph on the occasion of the farewell of Prof. Dr. Wim J.J. van Diepenbeek, Professor of Cooperative Business Organization Faculty of Economics & Business Administration Universiteit Maastricht*.
- Arestis P & Sawyer M, editors. 2004. *The rise of the market*. Elgar, Cheltenham [u.a.].
- Arnold NS. 1994. *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Oxford University Press, Oxford.
- Askildsen JE. 1988. Allocation of capital and labor in a labor-owned firm consisting of heterogeneous workers. *The Scandinavian Journal of Economics*, 90:pp. 603–618.
- Atmadi T. 2004. *Demokrasi Kita*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Avakov AV. 2010. *Two Thousand Years of Economic Statistics: World Population, GDP and PPP*. Algora Publishing, New York.
- Bacon R. 2001. Petroleum taxes: Trends in fuel taxes (and subsidies) and the implications. Viewpoint Note 240 (World Bank, Washington).
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Laporan Bulanan: Data Sosial Ekonomi*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bardhan P & Roemer JE. 1992. Market socialism: A case for rejuvenation. *The Journal of Economic Perspectives*, 6(3):pp. 101–116.
- Barnett C. 2005. The consolations of 'neoliberalism'. *Geoforum*, 36(1):pp. 7–12.
- Barnouw AJ. 1946. Cross currents of culture in indonesia. *The Far Eastern Quarterly*, 5(2):pp. 143–151.
- Barro RJ. 2001. Human capital and growth. *The American Economic Review*, 91(2):pp. 12–17. Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association.
- Barro RJ & McCleary RM. 2003. Religion and economic growth across countries. *American Sociological Review*, 68(5):pp. 760–781.
- Bartlett W, Cable J, Estrin S, Jones DC, & Smith SC. 1992. Labor-managed cooperatives and private firms in North Central Italy: An empirical comparison. *Industrial and Labor Relations Review*, 46(1):pp. 103–118.
- Beckmann MJ. 1975. The limits to growth in a neoclassical world. *American Economic Review*, 65(4):pp. 695–99.
- Bernardi A. 2007. The cooperative organization: Economic, organizational and policy issues. *Working Paper*, 42:28pp.
- Bernheim BD & Stark O. 1988. Altruism within the family reconsidered: Do nice guys finish last? *The American Economic Review*, 78(5):pp. 1034–1045.
- Bevir W. 2007. *Encyclopedia of Governance*, volume I of *Encyclopedia of governance*. Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, California.
- Blanchflower DG & Oswald AJ. 1987. Profit sharing—can it work? *Oxford Economic Papers*, 39(1):pp. 1–19.
- Blasi J, Conte M, & Kruse. D. 1996. Employee stock ownership and corporate performance among public companies. *Industrial and Labor Relations Review*, 50:pp. 60–79.

- Boycko M, Shleifer A, & Vishny RW. 1996. A theory of privatisation. *The Economic Journal*, 106(435):309-319.
- Boyd ML. 1987. The performance of private and cooperative socialist organization: Postwar yugoslav agriculture. *The Review of Economics and Statistics*, 69:pp. 205-214.
- Bradford DF & Kelejian HH. 1977. The value of information for crop forecasting in a market system: Some theoretical issues. *The Review of Economic Studies*, 44(3):pp. 519-531.
- Brohman J. 1995. Economism and critical silences in development studies: A theoretical critique of neoliberalism. *Third World Quarterly*, 16(2):pp. 297-318.
- Bromley DW. 1991. Testing for common versus private property: Comment. *Journal of Environmental Economics and Management*, 21:pp. 92-96. Comment.
- Carson R. 1977. A theory of co-operative. *The Canadian Journal of Economics*, 10:pp. 565-589.
- Casson M & Godley A. 2000. Cultural factors in economic growth. In Casson M & Godley A, editors, *Cultural Factors in Economic Growth*. Springer, Berlin. Chapter 1.
- Cato MS. 2009. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. Earthscan, London.
- Choudhury P & Khanna T. 2009. State owned entity reform in absence of privatization: Reforming indian national laboratories and role of leadership. Working Paper 10-006, Harvard Business School.
- Clark BS. 1998. *Political economy : A comparative approach*. Praeger, New York.
- Cochran TC. 1958. Cultural factors in economic growth. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 102(2):pp. 164-167.
- Collier P & Hoeffler A. 2004. Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, 56(4):pp. 563-595.
- Copeland BR & Taylor MS. 2009. Trade, tragedy, and the commons. *American Economic Review*, 99(3):pp. 725-49.
- Córdova RV. 1998. Why economists are wrong about coops. *Dollars & Sense*, 219:pp. pp. 44-47.

- Cunliffe A. 2008. *Organization Theory*. SAGE Course Companions Series. SAGE, Los Angeles.
- Daly HE. 1991. Elements of environmental macroeconomics. In Costanza R, editor, *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*, chapter 3. Columbia University Press, New York.
- Dasgupta P. 2005. Common property resources: Economic analytics. *Economic and Political Weekly*, 40(16):pp. 1610–1622.
- Dawes RM & Thaler RH. 1988. Anomalies: Cooperation. *Journal of Economic Perspectives*, 2(3):pp.187–97.
- de Bono E. 2009. *Lateral Thinking: A Textbook of Creativity*. Penguin Books Limited, London.
- Dewenter KL & Malatesta PH. 2001. State-owned and privately owned firms: An empirical analysis of profitability, leverage, and labor intensity. *The American Economic Review*, 90(1):320–334.
- DiQuattro A. 1978. Alienation and justice in the market. *The American Political Science Review*, 72(3):pp. 871–887.
- Domar E. 1946. Capital expansion, rate of growth and employment. *Econometrica*, 14(2):pp. 137–147.
- Domar ED. 1966. The soviet collective farm as a producer cooperative. *The American Economic Review*, 56(4):pp. 734–757.
- Dubravčić D. 1970. Labour as entrepreneurial input: An essay in the theory of the producer co-operative economy. *Economica*, New Series, 37:pp. 297–310.
- Dunn, Jr RM & Mutti JH. 2003. *International Economics*. Taylor & Francis, London.
- Eaton J. 1980. Price variability, utility and savings. *The Review of Economic Studies*, 47(3):pp. 513–520.
- Eaton JW. 1948. A conceptual theory of co-operation. *The American Journal of Sociology*, 54:pp. 126–134.
- Epaulard A & Pommeret A. 2003. Optimally eating a stochastic cake: a recursive utility approach. *Resource and Energy Economics*, 25(2):pp. 129 – 139.
- Farzin YH. 1992. The time path of scarcity rent in the theory of exhaustible resources. *Economic Journal*, 102(413):pp. 813–30.

- Fath BD, Jrgensen SE, Patten BC, & Straskraba M. 2004. Ecosystem growth and development. *Biosystems*, 77(1-3):pp. 213 – 228.
- Ferreira S. 2004. Deforestation, property rights, and international trade. *Land Economics*, 80(2):pp. 174–193.
- Fisher AC. 1981. *Resource and environmental economics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Fitzgerald BD. 1975. Self-interest or altruism: Corrections and extensions. *The Journal of Conflict Resolution*, 19(3):pp. 462–479.
- Franke RH, Hofstede G, & Bond MH. 1991. Cultural roots of economic performance: A research note. *Strategic Management Journal*, 12:pp. 165–173.
- Friedman K. 2003. *Myths of the Free Market*. Algora Publishing, New York.
- Frohlich N. 1974. Self-interest or altruism, what difference? *The Journal of Conflict Resolution*, 18(1):pp. 55–73.
- Frohlich N, Godard J, Oppenheimer JA, & Starke FA. 1998. Employee versus conventionally-owned and controlled firms: an experimental analysis. *Managerial and Decision Economics*, 19(4-5):pp.311–326.
- Frohlich N, Oppenheimer J, Bond P, & Boschman I. 1984. Beyond economic man: Altruism, egalitarianism, and difference maximizing. *The Journal of Conflict Resolution*, 28(1):pp. 3–24.
- Frydman R, Hessel M, & Rapaczynski A. 2000. Why ownership matters? Entrepreneurship and the restructuring of enterprises in central europe. Economic Research Reports 2000-03, New York University.
- Furubotn EG. 1976. The long-run analysis of the labor-managed firm: An alternative interpretation. *The American Economic Review*, 66:pp. 104–123.
- Fusfeld DR. 1983. Review: Labor-managed and participatory firms: A review article. *Journal of Economic Issues*, 17(3):pp. 769–789. A Model of the Firm as a Stockholder-Employee Cooperative Game by M. Aoki.
- Gamponia V & Mendelsohn R. 1985. The taxation of exhaustible resources. *The Quarterly Journal of Economics*, 100(1):pp. 165–181.
- Gilbert RJ. 1979. Optimal depletion of an uncertain stock. *Review of Economic Studies*, 46(1):pp. 47–57.

- Gintis H, Bowles S, Boyd RT, & Fehr E, editors. 2005. *Moral Sentiments and Material Interests: The Foundations of Cooperation in Economic Life*, volume 1. The MIT Press, 1 edition.
- Gordon HS. 1954. The economic theory of a common-property resource: The fishery. *The Journal of Political Economy*, 62(2):pp. 124–142.
- Gowdy JM & McDaniel CN. 1995. One world, one experiment: addressing the biodiversity–economics conflict. *Ecological Economics*, 15(3):pp. 181 – 192.
- Granato J, Inglehart R, & Leblang D. 1996. The effect of cultural values on economic development: Theory, hypotheses, and some empirical tests. *American Journal of Political Science*, 40(3):pp. 607–631.
- Gray LC. 1913. The economic possibilities of conservation. *The Quarterly Journal of Economics*, 27(3):pp. 497–519.
- Gray LC. 1914. Rent under the assumption of exhaustibility. *The Quarterly Journal of Economics*, 28(3):pp. 466–489.
- Gylfason T. 2001. Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, 45(4-6):pp. 847–859.
- Hansmann H. 1988. Ownership of the firm. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 4:pp. 267–304.
- Hansmann H. 1999. Cooperative firms in theory and practice. *The Finnish Journal of Business Economics*, 4:pp. 387–403.
- Hardin G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859):pp. 1243–1248. New Series.
- Harrod RF. 1939. An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193):pp. 14–33.
- Hartwick JM. 1977. Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources. *The American Economic Review*, 67(5):pp. 972–974.
- Hashi I. 1998. Employee ownership and enterprise behavior. *Russian & East European Finance and Trade*, 34(2):pp. 58–84.
- Helmberger P & Hoos S. 1962. Cooperative enterprise and organization theory. *Journal of Farm Economics*, 44(2):pp. 275–290.
- Higgins B. 1958. Hatta and co-operatives: The middle way for Indonesia? *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 318:pp. 49–57. Asia and Future World Leadership.

- Hill R. 2000. The case of the missing organizations: Co-operatives and the textbooks. *The Journal of Economic Education*, 31(3):pp. 281–295.
- Hodgson GM. 1995. Varieties of capitalism from the perspectives of veblen and marx. *Journal of Economic Issues*, 29:pp. 575–584.
- Hodgson GM. 1996. Varieties of capitalism and varieties of economic theory. *Review of International Political Economy*, 3:pp. 380–433.
- Hoel M. 1978. The long-run rate of profit in an economy with natural resource scarcity. *The Scandinavian Journal of Economics*, 80(2):pp. 199–208. The Arne Ryde Symposium on the Theoretical Contributions of Knut Wicksell.
- Hofstede G, Hofstede G, & Minkov M. 2010. *Cultures and Organizations: Software for the Mind, Third Edition*. McGraw-Hill, third edition.
- Hotelling H. 1931. The economics of exhaustible resources. *Journal of Political Economy*, 39:pp. 137–175.
- Howell LD. 1945. Does the consumer benefit from price instability? *The Quarterly Journal of Economics*, 59(2):pp. 287–295.
- Hultkrantz L. 1992. Forestry and the bequest motive. *Journal of Environmental Economics and Management*, 22(2):pp. 164–177.
- Hurwicz L. 2008. But who will guard the guardians? *The American Economic Review*, 98(3):pp. 577–585.
- Imi A. 2007. Escaping from the resource curse: Evidence from botswana and the rest of the world. *IMF Staff Papers*, 54(4):pp. 663–699.
- Inglehart R & Baker WE. 2000. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65:pp. 19–51.
- Jones DC & Svejnar J. 1985. Participation, profit sharing, worker ownership and efficiency in italian producer cooperatives. *Economica*, 52(208):pp. 449–465. New Series.
- Jouvet PA, Michel P, & Vidal JP. 2000. Intergenerational altruism and the environment. *Scandinavian Journal of Economics*, 102(1):pp. 135–150.
- Kautto M, Heikkilä M, Hvinden B, Marklund S, & Ploug N. 1999. *Nordic social policy : changing welfare states*. Routledge, London.
- Kennedy R. 1942. Contours of culture in indonesia. *The Far Eastern Quarterly*, 2(1):pp. 5–14.

- Kennet DM. 1993. Did deregulation affect aircraft engine maintenance? an empirical policy analysis. *RAND Journal of Economics*, 24(4):pp. 542–558.
- Khalatbari F. 1977. Market imperfections and the optimum rate of depletion of natural resources. *Economica*, 44(176):pp. 409–14.
- Krisnamurthi B. 2002. Membangun koperasi berbasis anggota dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 4:pp. 6pp.
- Kronenberg T. 2004. The curse of natural resources in the transition economies. *Economics of Transition*, 12(3):pp. 399–426.
- Kruse DL. 1992. Profit sharing and productivity: Microeconomic evidence from the united states. *The Economic Journal*, 102:pp. 24–36.
- Laffont JJ & Tirole J. 1991. Privatization and incentives. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7:84–105.
- Landes DS. 1999. *The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor*. Norton, New York.
- Landsberger M & Subotnik A. 1981. Some anomalies in the production strategy of a labour-managed firm. *Economic, New Series*, 48:pp. 195–197.
- Lane JE. 2000. *New Public Management*. Taylor & Francis Routledge, New York.
- Lane JE. 2005. *Public Administration and Public Management: The Principal-agent Perspective*. Taylor & Francis Routledge, London.
- Lange O. 1936. On the economic theory of socialism: Part one. *The Review of Economic Studies*, 4(1):pp. 53–71.
- Lange O. 1937. On the economic theory of socialism: Part two. *The Review of Economic Studies*, 4(2):pp. 123–142.
- Levhari D & Liviatan N. 1977. Notes on Hotelling's economics of exhaustible resources. *Canadian Journal of Economics*, 10(2):pp. 177–92.
- Li TM. 1999. Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia. *Cultural Anthropology*, 14(3):pp. 295–322.
- Lian B & Oneal JR. 1997. Cultural diversity and economic development: A cross-national study of 98 countries, 1960-1985. *Economic Development and Cultural Change*, 46(1):pp. 61–77.

- Lindblom C. 2001. *The Market System: What It Is, How It Works, and What To Make of It*. Yale Isps Series. Yale University Press.
- Linn EL. 1949. The influence of liberalism and conservatism on voting behavior. *The Public Opinion Quarterly*, 13(2):pp. 299–309.
- Livernois J & Martin P. 2001. Price, scarcity rent, and a modified r per cent rule for non-renewable resources. *Canadian Journal of Economics*, 34(3):pp. 827–845.
- Lovasy G. 1945. Does the consumer benefit from price instability?: Further comment. *The Quarterly Journal of Economics*, 59(2):pp. 296–301.
- Lucas Jr. RE. 1990. Why doesn't capital flow from rich to poor countries? *American Economic Review*, 80(2):pp. 92–96.
- Maddison A. 2007. *Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-economic History*. Oxford University Press, Oxford.
- Mankiw N. 2006. *Macroeconomics*. Worth Publishers, New York, NY, 7 edition.
- Mankiw NG, Romer D, & Weil DN. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2):pp. 407–438.
- Markusen JR. 1975. Efficiency aspects of profit-sharing systems versus wage systems. *American Journal of Agricultural Economics*, 57(4):pp. 601–612.
- Marshall FR. 1958. The Finnish cooperative movement. *Land Economics*, 34(3):pp. 227–235.
- Martin J. 1911. An attempt to define socialism. *The American Economic Review*, 1(2):pp. 347–354.
- Mas-Collel A, Whinston MD, & Green. JR. 1995. *Microeconomic Theory*. Oxford University Press, New York, NY.
- Massell BF. 1969. Price stabilization and welfare. *The Quarterly Journal of Economics*, 83(2):pp. 284–298.
- May MA. 1937. A research note on co-operative and competitive behavior. *The American Journal of Sociology*, 42:pp. 887–891.
- Meade JE. 1972. The theory of labour-managed firms and of profit-sharing. *The Economic Journal*, 82:pp. 402–428.
- Means GC. 1957. Collective capitalism and economic theory. *Science, New Series*, 126:pp. 287–293.

- Mehlum H, Moene K, & Torvik R. 2006. Institutions and the resource curse. *The Economic Journal*, 116(508):pp. 1–20.
- Miller D. 1981. Market neutrality and the failure of co-operatives. *British Journal of Political Science*, 11(3):pp. 309–329.
- Mitchell ML & Maloney MT. 1989. Crisis in the cockpit? the role of market forces in promoting air travel safety. *Journal of Law and Economics*, 32(2):pp. 329–55.
- Miyazaki H & Neary HM. 1983. The illyrian firm revisited. *The Bell Journal of Economics*, 14:pp. 259–270.
- Monks RA & Minow N. 2004. *Corporate governance*. Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, 3 edition.
- Mubyarto. 2002. Membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi: Peranan perguruan tinggi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, (6):10pp.
- Mubyarto. 2003. Dari ilmu berkompetisi ke ilmu berkoperasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 16:5pp.
- Muzondo TR. 1993. Mineral taxation, market failure, and the environment. *Staff Papers - International Monetary Fund*, 40(1):pp. 152–177.
- Nafziger EW. 2006. *Economic Development*. Cambridge University Press, Cambridge, 4 edition.
- Nasution M. 2008. *Koperasi: Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta
- Nourse E. 1922. The economic philosophy of cooperation. *The American Economic Review*, 12:pp. 577–597.
- Oppenheimer F. 1942. Capitalism and the free economy. *American Journal of Economics and Sociology*, 1(3):pp. 307–310.
- Ostrom E. 2000. Collective action and the evolution of social norms. *The Journal of Economic Perspectives*, 14(3):pp. 137–158.
- Paulson WE. 1940. Contribution of cooperation to the problem of distribution. *Journal of Farm Economics*, 22:pp. 740–752.
- Pierce JL & Rodgers L. 2004. The psychology of ownership and worker-owner productivity. *Group & Organization Management*, 29(5):pp. 588–613.

- Pindyck RS. 1981. The optimal production of an exhaustible resource when price is exogenous and stochastic. *The Scandinavian Journal of Economics*, 83(2):pp. 277–288. The Impact of Rising Oil Prices on the World Economy.
- Prabhakar LW, Ho J, & Bateman WSG. 2006. *The evolving maritime balance of power in the Asia-Pacific : maritime doctrines and nuclear weapons at sea / editors, Lawrence W. Prabhakar, Joshua H. Ho, Sam Bateman.* World Scientific ; Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore.
- Putterman L. 1982. Economic motivation and the transition to collective socialism: Its application to Tanzania. *The Journal of Modern African Studies*, 20(2):pp. 263–285.
- Radcliffe S. 2006. *Culture and Development in a Globalising World: Geographies, Actors, and Paradigms.* Taylor & Francis ebook collection. Taylor & Francis, London.
- Rausser GC. 1974. Technological change, production, and investment in natural resource industries. *American Economic Review*, 64(6):pp. 1049–59.
- Reisman G. 1998. *Capitalism: A Treatise on Economics.* Jameson Books, Ottawa, IL.
- Ricketts M. 2002. *The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm.* Edward Elgar, Cheltenham, UK
- Rose NL. 1992. Fear of flying? economic analysis of airline safety. *Journal of Economic Perspectives*, 6(2):pp. 75–94.
- Rosenzvaig E & Munck R. 1997. Neoliberalism: Economic philosophy of postmodern demolition. *Latin American Perspectives*, 24(6):pp. 56–62.
- Ross ML. 2004. How do natural resources influence civil war? Evidence from thirteen cases. *International Organization*, 58(1):pp. 35–67.
- Rutherford D. 2002. *Dictionary of Economics.* 2ed. Routledge, London
- Sachs JD & Warner AM. 1995. Natural resource abundance and economic growth. Working Paper 5398, National Bureau of Economic Research.
- Samuelson PA. 1972. The consumer does benefit from feasible price stability. *The Quarterly Journal of Economics*, 86(3):pp. 476–493.
- Sanders A. 1986. The meaning of liberalism and conservatism. *Polity*, 19(1):pp. 123–135.

- Sauser, Jr. WI. 2009. Sustaining employee owned companies: Seven recommendations. *Journal of Business Ethics*, 84:pp. 151–164.
- Schoolman M. 1987. The moral sentiments of neoliberalism. *Political Theory*, 15:pp. 205–224.
- Screpanti E. 1999. Capitalist forms and the essence of capitalism. *Review of International Political Economy*, 6(1):pp. 1–26.
- Sen A. 1988. The concept of development. In Chenery H & Srinivasan T, editors, *Handbook of Economic Development*, volume 1. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. Chapter 1.
- Sen A. 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- Sexton RJ. 1986. The formation of cooperatives: A game-theoretic approach with implications for cooperative finance, decision making, and stability. *American Journal of Agricultural Economics*, 68:pp. 214–225.
- Shimamoto M. 2008. Forest sustainability and trade policies. *Ecological Economics*, 66(4):pp. 605–614.
- Shleifer A & Vishny R. 1992. Pervasive shortages under socialism. *The RAND Journal of Economics*, 23(2):pp. 237–246.
- Shleifer A & Vishny RW. 1994. The politics of market socialism. *The Journal of Economic Perspectives*, 8(2):pp. 165–176.
- Shleifer A & Vishny RW. 1997. A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2):737–783.
- Simon HA. 1965. Administrative decision making. *Public Administration Review*, 25(1):pp. 31–37.
- Simon HA. 1991. Bounded rationality and organizational learning. *Organization Science*, 2(1):pp. 125–134.
- Simon R. 2002. *The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy*. Blackwell Philosophy Guides. Blackwell.
- Sinn HW. 1995. A theory of the welfare state. *The Scandinavian Journal of Economics*, 97(4):pp. 495–526.
- Sisk DE. 1982. The cooperative model versus cooperative organization. *Journal of Economic Issues*, 16:pp. 211–220.
- Skurnik S. 2002. The role of cooperative entrepreneurship and firms in organising economic activities – past, present and future. *The Finnish Journal of Business Economics*, 1:pp. 103–124.

- Smith F. 1996. Biological diversity, ecosystem stability and economic development. *Ecological Economics*, 16:pp. 191–203.
- Soesilo MI. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia: Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat dalam Menggapai Sejahtera Bersama*. PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta
- Solow RM. 1956. A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1):pp. 65–94.
- Steinherr A. 1975. Profit-maximizing vs. labor-managed firms: A comparison of market structure and firm behavior. *The Journal of Industrial Economics*, 24:pp. 97–104.
- Stiglitz JE. 1974. Growth with exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths. *Review of Economic Studies*, 41:pp. 123–138. Symposium on the Economics of Exhaustible Resources.
- Stiglitz JE & Dasgupta P. 1981. Market structure and resource extraction under uncertainty. *Scandinavian Journal of Economics*, 83(2):pp. 318–33.
- Szabó GG. 2006. 'Co-operative Identity' - a concept for economic analysis and evaluation of co-operative flexibility: the dutch practice and the hungarian reality in the dairy sector. *An International Conference on Cooperative Forms of Organisation*.
- Tambunan T. 2008. Prospek koperasi pengusaha dan petani di indonesia dalam tekanan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia. Kadin-Indonesia/Pusat Studi Industri & UKM Universitas Tri-sakti.
- Temkin G. 1996. The new market socialism: A critical review. *Communist and Post-Communist Studies*, 29(4):pp. 467 – 478.
- Tolle E. 2009. *The power of now : a guide to spiritual enlightenment*. Hachette Australia, Sydney.
- Turnovsky SJ, Shalit H, & Schmitz A. 1980. Consumer's surplus, price instability, and consumer welfare. *Econometrica*, 48(1):pp. 135–152.
- Unger J. 1977. Collective incentives in a peasant community: Lessons from chen village. *Social Scientist*, 5:pp. 17–57.
- Urwick LF. 1976. That word "organization". *The Academy of Management Review*, 1:pp. 89–92.
- Valentinov V. 2004. Toward a social capital theory of cooperative organisation. *Journal of Cooperative Studies*, 37(3):pp. 5–20.

- Varian HR. 1992. *Microeconomic Analysis*. W. W. Norton & Company, New York, 3 edition.
- Ward B. 1958. The firm in Illyria: Market syndicalism. *The American Economic Review*, 48(4):pp. 566–589.
- Waugh FV. 1944. Does the consumer benefit from price instability? *The Quarterly Journal of Economics*, 58(4):pp. 602–614.
- Weinthal E & Luong PJ. 2006. Combating the resource curse: An alternative solution to managing mineral wealth. *Perspectives on Politics*, 4(1):pp. 35–53.
- Widarmanto T. 2008. Enam puluh satu tahun perjalanan koperasi: Membangun koperasi berkualitas berbasis kompetensi sdm. *Gemari*, (90). Tahun IX/Juli.
- Wilkinson N. 2005. *Managerial Economics: A Problem-Solving Approach*. Cambridge University Press.
- Williams BK. 2011. Adaptive management of natural resources—framework and issues. *Journal of Environmental Management*, 92(5):pp. 1346 – 1353. Adaptive management for Natural Resources.



Tentang Penulis

Sebagai anak pertama dari lima bersaudara sekandung, Sudarsono Soedomo dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1956 pagi hari, bertepatan dengan Hari Sabtu Pahing, di sebuah dusun yang bernama Petahunan Desa Jajag Kabupaten Banyuwangi dari pasangan Soedomo (ayah) dan Dewi Wasiah (ibu). Ujian dan cobaan hidup mulai masuk ke dalam kesadaran terjadi tahun 1968 ketika sang ibu wafat. Dunia ini terasa sepi dan membingungkan.

Pendidikan dimulai dengan Sekolah Dasar Negeri Sosrodiwongso, sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri Jajag IV. Nama Sosrodiwongso adalah nama ayahanda dari Bapak Soedomo. Jenjang pendidikan berikutnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Benculuk yang diselesaikannya pada tahun 1971. Tahun 1972 hingga 1974 menempuh pendidikan di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Malang, suatu sekolah dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang luar biasa tetapi juga sangat disiplin. Pada tahun 1975 diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada tetapi kemudian mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai karena mendapat surat penerimaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kala itu menawarkan jangka waktu pendidikan yang lebih pendek. Menamatkan pendidikan S₁ di IPB pada tahun 1979 dan pada tahun 1980 melanjutkan pendidikan S₂ di IPB dalam bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) yang baru diselesaikannya pada tahun 1984. Antara tahun 1995 hingga 1997 menempuh pendidikan di Department of Public Policy and Administration, Jackson State University, MS, dan mendapatkan gelar Master of Public Policy and Public Administration (MPPA). Pada tahun 1997 itu pula memulai program S₃ di Department of Economics, University of Missouri-Columbia, MO, dan selesai pada tahun 2003 dengan gelar PhD in economics.

Riwayat pekerjaan seluruhnya di dunia akademik yang dimulai tahun 1980 sebagai dosen di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Mengajar dan membimbing penelitian mahasiswa S₁ hingga S₃. Disamping itu, penulis juga menjadi dosen kunjung di Universitas Indonesia Jakarta. Sekali waktu menjadi konsultan lembaga pemerintah maupun swasta baik nasional maupun internasional. Menjadi pembicara dalam seminar baik nasional maupun internasional.



“Obrolan Nusantara Menyambut Indonesia Baru”

Udara politik di Indonesia semakin pengab dari waktu ke waktu. Rakyat menjadi kehilangan harapan untuk dapat menggapai hidup yang lebih sejahtera. Hampir semua lembaga publik sudah tidak dapat dipercaya. Rakyat sebagai pemilik syah dari negara bebas bersuara tetapi tanpa daya. Wakil rakyat tak acuh terhadap rakyat yang memberinya mandat. Situasi ini secara ringkas dapat dikatakan sebagai jaman “kafilah menggonggong, anjing berlalu.”

Perubahan harus dimulai dari cara kita memandang persoalan dan lingkungan di sekitar kita. Hari baik tidak akan pernah datang bila kita sendiri tidak menjemputnya. Pemimpin yang jujur, tegas, tetapi adil itu tidak akan pernah datang kecuali kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu. Jangan berharap jaman keemasan akan datang jika kita hanya menunggu. Kitalah yang membuat semua itu mungkin terjadi. Berhentilah menunggu. Mulailah mengerjakan sesuatu yang diyakini dapat membantu mempercepat datangnya hari baru yang lebih bermutu. Jaman keemasan akan datang bila cara kita berpikir dan bertindak adalah berkualitas emas.



Gedung Dept. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB,
Kampus IPB Dramaga Bogor, Indonesia 16680
Tlp : +62251 – 8421355
Email : info@forcidev.org
Web : www.Forcidev.org



Penerbit Firdaus, Jakarta
Jl. Kramat Sentiong Mesjid No. E105
Jakarta Pusat, Indonesia
Tlp/Fax : +6221 – 3144738
Email : penerbitfirdaus@gmail.com

ISBN: 978-602-9252-21-7



9 786029 252217